

RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kabupaten Bengkulu Tengah
Periode 2025-2029

*Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang
Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan*



Drs. RACHMAT RIYANTO, S.T., M.A.P.

TARMIZI, S.Sos.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);

- 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

BAB II RPJMD DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Tahun 2025-2029; dan
 - b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RPJMD berpedoman pada :
 - a. RPJMN Tahun 2025-2029;
 - b. RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2045; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
- a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 27 Agustus 2025
BUPATI BENGKULU TENGAH,



RACHMAT RIYANTO

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 27 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



HENDRI DONAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
PROVINSI BENGKULU : (2 / 27 / 2025)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranhir RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ranhir RPJMD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dengan tetap menjaga sinergi dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Ranhir RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi kepala daerah terpilih "Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan." Visi ini menjadi dasar dalam perumusan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan selama lima tahun ke depan. Ranhir RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta berbagai kebijakan strategis lainnya. Dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, Ranhir RPJMD ini disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan,

tantangan, dan aspirasi masyarakat. Ranhir RPJMD ini juga mengakomodasi strategi pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Dengan adanya Ranhir RPJMD ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, guna menciptakan kemajuan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Ranhir RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang lebih maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Bengkulu Tengah, Agustus 2025

Bupati Bengkulu Tengah,



(Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-3

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4. Maksud dan Tujuan..... I-12

1.5. Sistematika Penulisan I-16

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-4

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34

2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-69

2.4. Aspek Pelayanan Umum II-96

2.5. Gambaran Keuangan Daerah II-119

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis..... II-129

2.6.1. Permasalahan Kabupaten Bengkulu Tengah II-129

2.7. Isu Strategis II-163

2.7.1. Isu Strategis KLHS II-163

2.7.2. Isu Strategis Global II-167

2.7.3. Isu Strategis Nasional..... II-173

2.7.4. Isu Strategis Provinsi Bengkulu II-182

2.7.5. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Tengah..... II-183

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III-32

3.3. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 III-48

3.3.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang..... III-50

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-74

BAB V. PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah II-1

Tabel II-2. Jumlah Kelurahan dan Desa dalam Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Tengah.....II-2

Tabel II-3. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 II-9

Tabel II-4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023 II-13

Tabel II-5. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023.....II-15

Tabel II-6. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 II-17

Tabel II-7. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 II-18

Tabel II-8. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023 II-20

Tabel II-9. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024.....II-22

Tabel II-10. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024 II-24

Tabel II-11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024 II-25

Tabel II-12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024 II-26

Tabel II-13. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024.....II-28

Tabel II-14. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024 II-29

Tabel II-15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2030.....II-30

Tabel II-16. Proyeksi Demografi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2030 Berdasarkan Indikator Kependudukan Strategis II-31

Tabel II-17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2018-2024.....II-35

Tabel II-18. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024 II-36

Tabel II-19. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah).....	II-38
Tabel II-20. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah).....	II-39
Tabel II-21. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024	II-40
Tabel II-22. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024.....	II-42
Tabel II-23. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	II-43
Tabel II-24. Umur Harapan Hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024	II-44
Tabel II-25. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023	II-46
Tabel II-26. Prevelansi Stunting Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2023	II-47
Tabel II-27. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024	II-49
Tabel II-28. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024	II-50
Tabel II-29. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024	II-52
Tabel II-30. Angka Partisipasi Murni (APM) Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024.....	II-54
Tabel II-31. Angka Partisipasi Kasar (APK) Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024.....	II-54
Tabel II-32. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023.....	II-56
Tabel II-33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.....	II-59
Tabel II-34. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023.....	II-61
Tabel II-35. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024	II-62
Tabel II-36. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024	II-64
Tabel II-37. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024	II-66
Tabel II-38. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023	II-67
Tabel II-39. Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024	II-70

Tabel II-40. PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah) II-72

Tabel II-41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 II-76

Tabel II-42. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Provinsi Bengkulu 2018-2023 II-79

Tabel II-43. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022-2024 II-84

Tabel II-44. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024 II-87

Tabel II-45. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen) II-88

Tabel II-46. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 II-90

Tabel II-47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten dan Kota di Provinsi Tahun 2020-2024.....II-91

Tabel II-49. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024.....II-93

Tabel II-50. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023.....II-95

Tabel II-51. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024 II-99

Tabel II-52. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024 II-100

Tabel II-53. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024 II-102

Tabel II-54. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024 II-103

Tabel II-55. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023..... II-105

Tabel II-56. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 II-109

Tabel II-57. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 II-109

Tabel II-58. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 II-109

Tabel II-59. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024 II-112

Tabel II-60. Realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024..... II-119

Tabel II-61. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024 II-125

Tabel II-62. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 II-127

Tabel II-63. Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional II-175

Tabel II-64. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional	II-176
Tabel II-65. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	II-179
Tabel II-66. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	II-180
Tabel II-67. Isu Ketahanan Sosial dan Politik.....	II-181
Tabel II-68. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Tengah	II-184
Tabel III-1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029	III-6
Tabel III-2. Keselarasan Misi pada Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025- 2045, serta Asta Cita Tahun 2025-2029	III-8
Tabel III-3. Janji Kerja Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029	III-10
Tabel III-4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029	III-11
Tabel III-5. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	III-13
Tabel III-6. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi.....	III-15
Tabel III-7. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing.....	III-17
Tabel III-8. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi.....	III-19
Tabel III-9. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 5: Menanamkan Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya.....	III-21
Tabel III-10. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.....	III-22
Tabel III-11. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	III-24
Tabel III-12. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	III-27
Tabel III-13. Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi.....	III-35
Tabel III-14. Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-37
Tabel III-15. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah ...	III-37
Tabel III-16. Fokus Pembangunan.....	III-38
Tabel III-17. Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029	III-39

Tabel III-18 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... III-40

Tabel III-19. Janji Kerja Kepala Daerah..... III-43

Tabel III-20. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah 2025-2029 III-44

Tabel III-21 Keselarasan Program Prioritas Kabupaten Bengkulu Tengah
dengan Program Provinsi dan Nasional Tahun 2025-2029 III-46

Tabel III-22. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah..... III-53

Tabel IV-1. Program Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah IV-3

Tabel IV-2. Target indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 IV-75

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-77

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-9

Gambar II-1. Peta Kabupaten Bengkulu Tengah II-3

Gambar II-2. Grafik Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024.....II-10

Gambar II-3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 II-12

Gambar II-4. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023 II-14

Gambar II-5. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik PLN Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lain Tahun 2019–2023 II-15

Gambar II-6. Perbandingan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Lain di Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 II-21

Gambar II-7. Proporsi Jumlah Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 II-23

Gambar II-8. Persentase Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024 II-37

Gambar II-9. Tren Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 II-63

Gambar II-10. Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024 II-65

Gambar II-11. Tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023.....II-68

Gambar II-12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024 II-77

Gambar II-13. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024 II-82

Gambar II-14. Indeks Reformasi Hukum 2024.....II-97

Gambar III-1. Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029..... III-32

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian kedua tentang perencanaan pembangunan daerah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap daerah, sesuai dengan kewenangannya, wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa RPJPD harus disusun dengan kurun waktu yang sama dengan RPJPN, sedangkan RPJMD disusun setiap lima tahun sebagai bagian dari implementasi tahapan RPJPD. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan daerah dalam jangka menengah dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan dinamika pembangunan yang terus berkembang.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 juga disusun sebagai tindak lanjut dari hasil pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara serentak, di mana RPJMD menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan visi, misi, serta janji-janji politik kepala daerah terpilih. Dalam prosesnya, penyusunan RPJMD tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RTRW, dan KLHS, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan sinergis dalam mencapai tujuan pembangunan yang

diharapkan. Penyelarasan ini penting untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan dalam RPJMD 2025-2029, terutama di sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini merupakan kontributor utama dalam perekonomian daerah dan memiliki peluang besar untuk berkembang lebih lanjut dengan dukungan kebijakan yang tepat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, seperti ketergantungan ekonomi pada sektor primer, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, isu lingkungan akibat ekspansi sektor ekonomi dan tantangan perubahan iklim juga menjadi perhatian utama yang perlu diselaraskan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Sesuai dengan perencanaan jangka panjang, periode RPJMD ini merupakan periode fondasi transformasi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Periode ini akan difokuskan pada pembangunan yang bersifat fundamental dan strategis, mencakup perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ini diharapkan dapat menciptakan pondasi yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, dengan menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahapan penyusunan RPJMD meliputi: (1) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang disusun berdasarkan data dan analisis yang objektif untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang melibatkan penyelarasan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta masukan dari pemangku kepentingan; (3) Penyusunan Rancangan RPJMD, sebagai dokumen yang telah mempertimbangkan hasil analisis teknokratik dan partisipasi publik; (4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sebagai forum konsultasi publik yang

melibatkan berbagai pihak terkait untuk menyempurnakan dokumen perencanaan; (5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yang telah melalui proses penyempurnaan dan finalisasi berdasarkan hasil musrenbang dan masukan dari pemangku kepentingan; serta (6) Penetapan RPJMD, melalui peraturan daerah sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Setiap tahapan ini dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa RPJMD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah. Perubahan teknologi, digitalisasi ekonomi, serta tantangan pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi agar Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berdaya saing di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang inovatif dan adaptif dalam RPJMD ini agar pembangunan daerah mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman strategis yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis data dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, RPJMD ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum, konsistensi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMN, dan RTRW, serta menjaga efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik, sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau

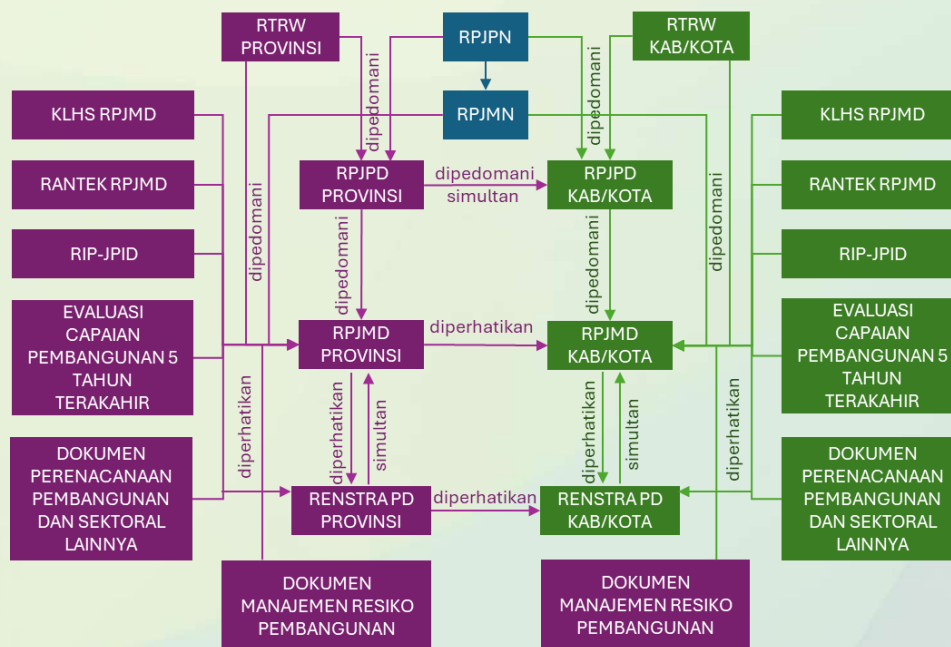
- Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 29. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 30. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 - 2045;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2032; dan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta ketentuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang adil secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga menjamin kelestarian lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, pembangunan berkelanjutan menjadi arah strategis untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, resilien, serta adaptif terhadap perubahan global dan nasional yang dinamis.



Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya

Upaya ini diarahkan untuk mencapai empat sasaran utama: (1) meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat terutama kelompok rentan; (2) memperluas kesempatan kerja dan usaha dengan mendorong iklim investasi serta penguatan UMKM; (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di bidang dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) memperkuat daya saing daerah melalui inovasi, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional serta akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lima tahunan, yang memiliki keterkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

RPJMD disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, di mana RPJMD harus selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJMN;
2. Dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum;

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah, agar pembangunan sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang; dan
4. Disusun berdasarkan kondisi, potensi, serta dinamika perkembangan daerah dan nasional, berbasis data dan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.

A. Hubungan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Secara substansial, RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan lokal dengan dokumen-dokumen strategis lainnya sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMN adalah dokumen lima tahunan yang memuat prioritas pembangunan nasional dan target-target strategis pembangunan lintas sektor. RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah memperhatikan RPJMN agar program pembangunan di daerah selaras dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam hal pencapaian IKU nasional, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta strategi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi hijau.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu

RPJMD Provinsi Bengkulu disusun sebagai penjabaran dari RPJPD Provinsi dan RPJMN. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah memperhatikan RPJMD Provinsi, terutama pada sektor yang bersifat lintas wilayah atau lintas kewenangan, seperti pengembangan infrastruktur regional, pendidikan menengah, dan layanan kesehatan rujukan. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi pembangunan antara kabupaten dan provinsi.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Tengah

RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun yang menjadi pedoman utama penyusunan RPJMD.

Dokumen ini memuat visi jangka panjang, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. RPJMD wajib dipedomani dari RPJPD untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan antarperiode pemerintahan dan konsistensi dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah

RKPD merupakan dokumen tahunan yang menjabarkan RPJMD secara lebih operasional. RKPD menjadi dasar penyusunan APBD setiap tahun, dan memperhatikan RKP Nasional serta RKPD Provinsi. Dengan demikian, RKPD menjamin keberlanjutan perencanaan tahunan yang konsisten dengan arah kebijakan lima tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

B. Dokumen Teknis Pendukung Penyusunan RPJMD

Selain dokumen-dokumen utama tersebut, RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah juga disusun dengan mengintegrasikan berbagai dokumen teknis dan pendukung substantif untuk memperkuat kualitas dan ketepatan kebijakan yang dirumuskan, yaitu:

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD)

Digunakan untuk menilai dan menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program yang direncanakan dalam RPJMD, serta mendukung pencapaian TPB/SDGs.

b. Rancangan Teknokratik RPJMD

Disusun secara objektif berdasarkan data dan analisis rasional oleh perangkat daerah teknis sebagai fondasi awal perumusan kebijakan pembangunan yang logis dan terukur.

c. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIP-JPID)

Sebagai acuan untuk mendorong penguatan inovasi, kapasitas riset, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembangunan daerah.

Dokumen ini menjadi penting dalam mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis ilmu pengetahuan dan memperkuat ekosistem inovasi di berbagai sektor.

d. Evaluasi Capaian Pembangunan Lima Tahun Terakhir

Menjadi rujukan untuk menilai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan RPJMD sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan isu strategis RPJMD yang baru.

e. Dokumen Perencanaan Sektoral dan Tematik Lainnya

Termasuk rencana sektoral (pertanian, kesehatan, pendidikan), serta dokumen tematik (mitigasi bencana, perubahan iklim, perlindungan sosial), yang harus diperhatikan agar arah pembangunan sektoral dan lintas sektor dapat terkoordinasi dengan baik.

Keterpaduan dan konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya bertujuan untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berlangsung secara sistematis, terarah, inklusif, dan berkelanjutan. RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif lima tahunan, tetapi juga instrumen utama transformasi pembangunan daerah yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil. Selain itu, RPJMD juga menjadi dasar bagi penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan, guna menghadapi ketidakpastian dan risiko dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menjembatani pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui penyusunan RPJMD, diharapkan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dijalankan secara

efektif, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

A. Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah periode 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. RPJMD ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan daerah sebagaimana dirancang dalam RPJMD ini diarahkan untuk mencapai:

- a. Kemajuan daerah, melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan infrastruktur wilayah yang merata, serta peningkatan daya saing daerah;
- b. Kesejahteraan masyarakat, melalui perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat;
- c. Kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis, melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, serta pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.

Penyusunan dokumen RPJMD ini dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, DPRD, kalangan usaha, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan unsur masyarakat secara luas. Proses ini menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data yang valid serta evidence-based policy, guna

memastikan bahwa rencana pembangunan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan visi kepala daerah dan mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

B. Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan sistematis dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah terpilih ke dalam arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang konkret, terintegrasi, dan selaras dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

b. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Menentukan arah pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah yang mampu merespons isu-isu strategis, tantangan lokal, serta dinamika regional dan global, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

c. Menynergikan dan Menyelaraskan Program Pembangunan

Mendorong keterpaduan program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat berbasis potensi unggulan serta nilai-nilai kearifan lokal.

d. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan, termasuk anggaran, aparatur, dan potensi wilayah secara tepat guna dan tepat sasaran untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Merumuskan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta berintegritas.

g. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Mengembangkan potensi unggulan daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat struktur ekonomi lokal dan meningkatkan posisi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menghadapi persaingan regional dan nasional.

h. Menanggulangi Permasalahan Strategis Daerah

Menjawab berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antarwilayah, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.

i. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Mendorong perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan penguatan nilai sosial budaya.

Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan Kabupaten Bengkulu Tengah mampu melangkah secara mantap menuju daerah yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Tengah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

a. Latar belakang;

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi kepala daerah.

b. Dasar hukum penyusunan;

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPD, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

d. Maksud dan tujuan; dan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

e. Sistematika penulisan.

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

- i. Aspek geografi dan demografi;
- ii. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- iii. Aspek Daya Saing Daerah;
- iv. Aspek Pelayanan Umum.

Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- i. Standar Pelayanan Minimal;
- ii. Kerjasama daerah;
- iii. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
- iv. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:

- i. Permasalahan pembangunan daerah; dan
- ii. Isu strategis daerah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:

- i. Visi dan Misi; dan
- ii. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:

- i. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- ii. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - i. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - ii. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - i. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - ii. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk dari UU No. 24 tahun 2008 yang pada saat pemekaran terdiri dari enam Kecamatan yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga, dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan yang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah setelah pemekaran pada tahun 2008 mencapai lebih kurang 122.394 hektar atau 1.223,94 kilometer persegi. Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah terletak di Karang Tinggi. Pada tahun 2022 terlihat bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki penambahan pada jumlah Kecamatannya menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Berikut data kecamatan, ibu kota kecamatan dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel II-1. Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1	Talang Empat	Kembang Seri	53,91
2	Semidang Lagan	Lagan Bungin	80,59
3	Karang Tinggi	Ujung Karang	110,59
4	Taba Penanjung	Bajak I	134,38
5	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	98,42
6	Pagar Jati	Keroya	188,57
7	Merigi Sakti	Arga Indah II	99,93
8	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	165,20
9	Pondok Kubang	Pondok Kubang	92,00
10	Pematang Tiga	Pematang Tiga	129,64
11	Bang Haji	Sekayun	70,71
Jumlah			1.223,94

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2025

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 142 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana masing-masing kecamatan memiliki jarak yang berbeda- beda ke Ibukota Kabupaten. Berikut data jumlah kelurahan dan desa dalam kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 2°15’ LS sampai 4°00’ LS dan antara 101°32’BT sampai 102°08’BT. Sementara jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, di

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang.

Tabel II-2. Jumlah Kelurahan dan Desa dalam Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Kelurahan	Desa
1	Talang Empat	12,00	-	10
2	Semidang Lagan	14,00	-	11
3	Karang Tinggi	-	-	13
4	Taba Penanjung	11,00	1	13
5	Merigi Kelindang	16,50	-	13
6	Pagar Jati	20,00	-	14
7	Merigi Sakti	30,00	-	15
8	Pondok Kelapa	30,00	-	17
9	Pondok Kubang	29,00	-	12
10	Pematang Tiga	45,00	-	13
11	Bang Haji	41,00	-	12
Jumlah			1	143

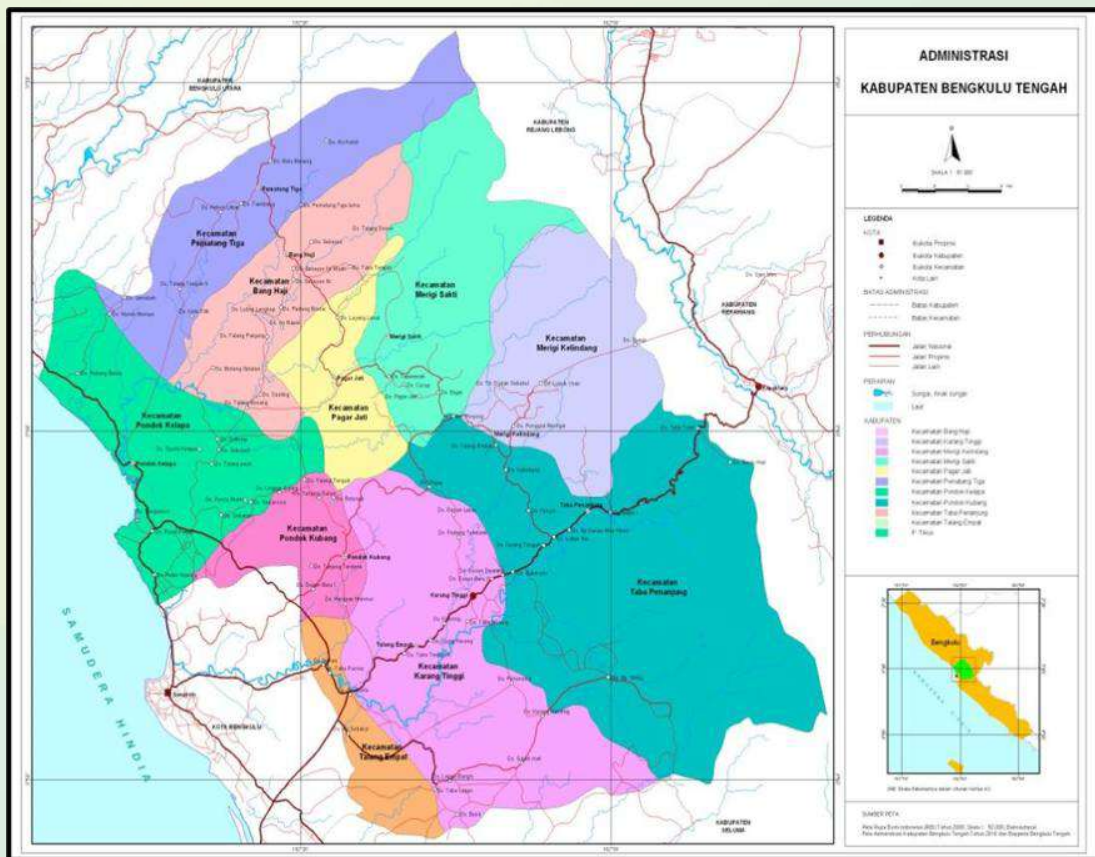
Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka, 2025

Secara administratif Kabupaten Bengkulu Tengah berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Batas administratif Kabupaten Bengkulu Tengah dengan kabupaten yang berbatasan langsung tersebut, telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, permasalahan terkait dengan batas daerah yang selama ini muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada daerah yang berbatasan, seharusnya sudah tidak ada lagi. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penetapan batas daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;



Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Dengan penetapan dan kepastian batas daerah tersebut, menjadi modal dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mendorong kemajuan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada wilayah yang berbatasan dengan daerah lain

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan dua fondasi utama yang sangat memengaruhi arah perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Aspek geografi mencakup posisi geografis, luas wilayah, topografi, iklim, dan potensi sumber daya alam yang tersedia, sedangkan aspek demografi mencakup karakteristik penduduk seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi dan kepadatan, komposisi usia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua aspek ini saling berkaitan erat dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang relevan dan berbasis kebutuhan riil, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029.

Kabupaten Bengkulu Tengah secara geografis memiliki posisi strategis di tengah Provinsi Bengkulu, yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu di sebelah barat, Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong di sebelah utara dan timur, serta Kabupaten Seluma di sebelah selatan. Dengan luas wilayah sekitar $\pm 1.223 \text{ km}^2$, Bengkulu Tengah memiliki topografi yang beragam, meliputi kawasan dataran rendah, perbukitan, dan wilayah pegunungan, dengan kondisi iklim tropis yang relatif stabil. Keanekaragaman geografis ini sangat memengaruhi pola pemanfaatan ruang, distribusi penduduk, serta prioritas pembangunan infrastruktur, terutama untuk memperluas konektivitas dan membuka aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau.

Selain itu, Kabupaten Bengkulu Tengah juga menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari sektor pertanian dan perkebunan (seperti sawit, kopi, dan karet), sektor kehutanan, hingga potensi pariwisata alam dan budaya. Keberadaan potensi tersebut menjadi modal utama untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan dan berkelanjutan, namun sekaligus membutuhkan tata kelola ruang dan sumber daya alam yang bijaksana agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan antarwilayah.

Dari sisi demografi, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang relatif stabil. Komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, persebaran penduduk yang masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu, terutama di wilayah dengan akses transportasi yang lebih baik, menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terpencil atau perdesaan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, pemahaman mendalam terhadap aspek geografi dan demografi menjadi dasar strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan pemerataan infrastruktur, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, penguatan layanan publik berbasis kebutuhan lokal, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta pengembangan potensi unggulan daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi geografis yang sangat strategis di tengah Provinsi Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu. Sebagai daerah hinterland atau wilayah penyangga (satelit) Kota Bengkulu, kabupaten ini memainkan peran penting dalam menopang kebutuhan ruang, logistik, dan aktivitas ekonomi kawasan perkotaan. Dengan posisi ini, Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang mendukung ekspansi wilayah metropolitan Kota Bengkulu.

a. Kontribusi Geografis dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki jaringan konektivitas darat yang menghubungkan pusat Provinsi Bengkulu dengan kabupaten-kabupaten lainnya, seperti Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan Muko-muko. Jalur nasional dan provinsi yang melintasi wilayah ini memudahkan distribusi barang dan mobilitas penduduk, serta membuka peluang investasi pada sektor logistik, perdagangan, dan jasa. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu dari berbagai sisi, Bengkulu Tengah menjadi pilihan utama untuk perluasan kawasan permukiman, kawasan industri, dan penyediaan infrastruktur strategis skala regional.

b. Kontribusi Ekonomi Regional

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki basis ekonomi yang cukup kuat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, dan hortikultura telah memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, potensi pengembangan agrowisata, kawasan industri berbasis hasil bumi, dan ekonomi kreatif menjadi peluang nyata untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan keterpaduan antara potensi agraris dan konektivitas kawasan, Bengkulu Tengah diharapkan dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat agropolitan sekaligus daerah penyuplai kebutuhan pokok bagi Kota Bengkulu dan wilayah sekitarnya.

c. Kontribusi Sosial Budaya dan Identitas Daerah

Secara sosial dan budaya, Bengkulu Tengah memiliki keragaman etnik yang harmonis antara masyarakat asli dan pendatang. Hal ini menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun identitas daerah yang inklusif, toleran, dan partisipatif. Tradisi lokal dan budaya komunitas seperti gotong royong, adat musyawarah, serta nilai religiusitas yang kuat memberikan fondasi kokoh bagi pembangunan sosial yang berbasis pada karakter masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing.

d. Kontribusi Lingkungan dan Ketahanan Ekologis

Dengan topografi wilayah yang meliputi dataran rendah, perbukitan, dan aliran sungai besar seperti Sungai Musi dan Sungai Ketahun, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki fungsi ekologis yang penting. Kawasan hutan lindung dan sempadan sungai menjadi penyangga keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat, menjadi sangat relevan untuk diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

e. Kontribusi dalam Tata Ruang dan Rencana Pengembangan Wilayah

Dalam dokumen visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2025–2029, telah ditegaskan bahwa pembangunan wilayah

diarahkan untuk mendukung transformasi struktural, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pertanian terpadu, dan kawasan ekonomi baru. Penataan ruang di Kabupaten Bengkulu Tengah dirancang untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan seperti Karang Tinggi, Pondok Kelapa, dan Talang Empat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional. Penetapan kawasan-kawasan tersebut akan mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang merata, terencana, dan mendukung integrasi antarwilayah di Provinsi Bengkulu.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, menjadi salah satu kekuatan struktural dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Potensi tersebut tersebar di seluruh kecamatan dan mencakup sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta sumber daya air. Keberadaan bentang alam yang terdiri dari perbukitan, lembah subur, kawasan hutan, dan jaringan sungai memberikan keunggulan ekologis dan ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Di sektor perkebunan, Bengkulu Tengah menonjol sebagai salah satu sentra produksi kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Luas areal kelapa sawit mencapai 45.164 hektar dengan total produksi sebesar 633.331 ton pada tahun 2024. Komoditas unggulan lainnya meliputi karet dengan produksi sebesar 16.426 ton dan kopi robusta sebanyak 3.462 ton. Komoditas-komoditas ini tersebar di kecamatan Pagar Jati, Merigi Sakti, dan Taba Penanjung. Perkebunan menjadi sektor penting tidak hanya sebagai penyumbang PDRB, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi masyarakat perdesaan.

Sektor pertanian pangan dan hortikultura juga memiliki peran strategis, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan lokal dan pendapatan petani kecil. Luas panen padi sawah mencapai 10.205 hektar dengan produksi 49.037 ton gabah kering giling, sedangkan jagung dan ubi kayu menjadi komoditas alternatif yang produktif. Selain itu, hortikultura memiliki potensi besar dengan luas lahan mencapai 800,7 hektar yang ditanami berbagai jenis buah dan sayuran, termasuk tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Kondisi ini membuka

peluang pengembangan agrowisata dan hilirisasi hasil pertanian melalui UMKM berbasis olahan pangan lokal.

Di bidang kehutanan, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas kawasan hutan mencapai 28.006 hektar, yang terdiri atas hutan lindung seluas 19.027 hektar dan hutan produksi seluas 3.942 hektar. Wilayah ini juga mencakup kawasan konservasi seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Daun yang menjadi habitat keanekaragaman hayati endemik dan kawasan ekowisata potensial. Keberadaan kawasan hutan tersebut berfungsi penting dalam menjaga kestabilan lingkungan, mengendalikan erosi dan banjir, serta menyediakan jasa ekosistem. Pengelolaan hutan yang bijak dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung ketahanan ekologis dan pembangunan hijau di daerah.

Selain itu, sumber daya peternakan turut memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan hewani dan ekonomi keluarga. Pada tahun 2024, populasi sapi potong di Bengkulu Tengah tercatat sebanyak 14.491 ekor, sedangkan populasi unggas mencapai 259.356 ekor. Penyebaran populasi ternak yang merata di seluruh kecamatan menunjukkan potensi besar dalam pengembangan usaha peternakan rakyat, termasuk integrasi dengan sektor pertanian dan pemanfaatan limbah organik untuk pupuk alami.

Sumber daya air juga merupakan aset penting yang menopang produktivitas sektor lainnya. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki banyak sungai besar seperti Sungai Bengkulu dan sejumlah anak sungai yang berpotensi untuk pengembangan irigasi, air bersih, serta energi mikrohidro. Kondisi geografis yang memiliki potensi cadangan air tanah dan mata air di wilayah perbukitan dapat menjadi modal pengembangan sektor air bersih pedesaan dan penguatan infrastruktur sanitasi. Dengan pendekatan pengelolaan terpadu, sektor ini bisa memperkuat daya tahan masyarakat terhadap krisis air dan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, potensi sumber daya alam Kabupaten Bengkulu Tengah sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun, pemanfaatan sumber daya ini perlu diarahkan dengan prinsip produktivitas, pelestarian, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui RPJMD 2025–2029, arah kebijakan akan difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan infrastruktur pendukung, tata

kelola lingkungan yang adaptif, serta integrasi antar sektor untuk mewujudkan Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

C. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan. Ketersediaan pangan dijaga melalui penguatan produksi lokal di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sementara aksesibilitas pangan ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, pasar, dan jaringan distribusi. Di sisi lain, pemanfaatan pangan diarahkan pada peningkatan kesadaran gizi dan konsumsi pangan bergizi seimbang, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat. Ketahanan pangan menjadi elemen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan secara komprehensif, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang berbasis pada tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP dirancang menggunakan indikator yang relevan dan tersedia secara rutin, sehingga dapat menjadi alat perencanaan yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan pangan di daerah. Melalui penguatan lintas sektor dan dukungan kebijakan fiskal yang stabil, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

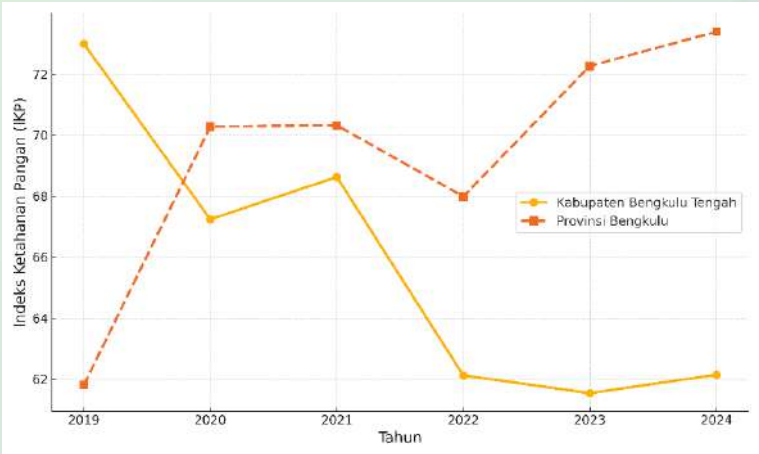
Tabel II-3. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,4	74,54	72,3	73,67	74,63	74,91
Bengkulu Tengah	73	67,24	68,63	62,12	61,54	62,14
Bengkulu Utara	66,9	68,15	68,21	58,31	70,74	72,62
Kaur	70,1	70,68	72,12	71,51	73,9	74,75
Kepahiang	72,4	68,99	68,68	67,14	69,41	72,43
Kota Bengkulu	66,5	67,24	67,82	65,29	75,68	78,72
Lebong	72,2	76,09	74,38	74,86	75,84	77,06
Mukomuko	70,8	71,46	76,17	71,78	76,63	76,57

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rejang Lebong	70,9	70,64	67,54	66,68	72,67	73,11
Seluma	67,6	67,72	67,29	68,54	71,64	71,61
Provinsi Bengkulu	61,8	70,28	70,32	67,99	72,27	73,39

Sumber: <https://satudata.badanpangan.go.id/>

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, IKP Bengkulu Tengah berada di angka 73, namun terus menurun hingga menyentuh angka 62,14 pada tahun 2024. Penurunan ini menempatkan Bengkulu Tengah di bawah rata-rata IKP Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 mencapai 73,39. Tren ini menunjukkan lemahnya kinerja ketahanan pangan daerah, terutama dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan.



Gambar II-2. Grafik Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Kabupaten Bengkulu Tengah cenderung tertinggal. Kota Bengkulu mencatat peningkatan signifikan dengan IKP mencapai 78,72 pada tahun 2024, diikuti Kabupaten Lebong (77,06), Mukomuko (76,57), dan Kaur (74,75). Bahkan kabupaten lain seperti Seluma, Rejang Lebong, dan Kepahiang yang memiliki karakteristik wilayah dan sosial ekonomi serupa, menunjukkan capaian IKP yang lebih baik dan stabil. Hal ini menandakan bahwa Bengkulu Tengah menghadapi tantangan struktural yang lebih serius dalam pembangunan sistem pangan daerah.

Kondisi ini mencerminkan perlunya penanganan terpadu dan terencana dalam pembangunan ketahanan pangan, baik melalui penguatan produksi lokal, pemerataan distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas kelompok rentan, maupun edukasi konsumsi pangan bergizi dan beragam. Perbaikan infrastruktur,

dukungan kelembagaan pangan, dan stabilitas harga menjadi agenda prioritas yang harus diurusutamakan untuk membalikkan tren penurunan dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada periode perencanaan mendatang.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kerentanan masyarakat terhadap persoalan gizi dan ketahanan pangan. Indikator ini menunjukkan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian secara berkelanjutan, dan menjadi cerminan adanya kelompok masyarakat yang terpapar risiko kelaparan terselubung—yakni kondisi kekurangan asupan gizi yang tidak selalu tampak secara kasat mata, namun berdampak serius dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, permasalahan ini menjadi tantangan strategis yang memerlukan perhatian lintas sektor. Meskipun sektor pertanian berperan penting dalam struktur ekonomi daerah, hal tersebut belum secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan seluruh penduduk. Akses terhadap pangan yang bergizi dan mencukupi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti persebaran produksi pangan yang belum merata, rendahnya diversifikasi konsumsi, serta keterbatasan daya beli di sebagian kelompok masyarakat. Ketimpangan wilayah, khususnya antara desa-desa terpencil dan pusat-pusat pertumbuhan, turut memperparah kesenjangan akses pangan.

Oleh karena itu, pengurangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Bengkulu Tengah tidak cukup dilakukan melalui peningkatan produksi semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Ini mencakup penguatan sistem distribusi pangan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga rentan, serta intervensi gizi dan edukasi konsumsi sehat. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan daerah dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Bengkulu Tengah.

Gambar II-3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	8,09	8,25	10,38	9,16	9,42
Rejang Lebong	11,62	11,27	16,55	11,66	12,54
Bengkulu Utara	6,56	6,68	9,91	7,49	9,7
Kaur	6,33	7,01	9,54	9,52	12,36
Seluma	7,38	7,97	8,63	9,06	11,05
Mukomuko	3,64	5	5,94	4,86	5,56
Lebong	8,03	9,51	12,66	9,94	12,38
Kepahiang	10,99	11,3	15,4	13,17	13,7
Bengkulu Tengah	5,67	6	9,3	7,89	9,48
Kota Bengkulu	8,2	11,11	14,61	9,81	6,43
Provinsi Bengkulu	7,72	8,64	11,66	9,25	9,86

Sumber: BPS Indonesia

Selama periode 2020–2024, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren fluktuatif, namun tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu untuk hampir seluruh tahun pengamatan. Pada tahun 2020, angka Bengkulu Tengah tercatat 5,67%, kemudian mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 9,30%. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan menjadi 7,89% pada 2023, namun kembali naik ke 9,48% pada 2024.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang mencapai 9,86%, posisi Bengkulu Tengah masih relatif lebih baik, meskipun selisihnya semakin menipis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan kabupaten/kota lain, Bengkulu Tengah memiliki tingkat ketidacukupan konsumsi pangan lebih rendah dari sebagian besar wilayah lain seperti Kepahiang (13,70%), Kaur (12,36%), dan Lebong (12,38%), namun lebih tinggi dibanding Mukomuko (5,56%) dan Kota Bengkulu (6,43%).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Bengkulu Tengah masih termasuk dalam kelompok dengan prevalensi lebih rendah, risiko kerentanan pangan tetap signifikan, terutama karena tren peningkatan pada 2024. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam bentuk intervensi ketahanan pangan berbasis data dan wilayah, termasuk peningkatan akses pangan bergizi, penguatan distribusi lokal, dan dukungan terhadap rumah tangga rawan pangan.

3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Akses terhadap air minum yang layak merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, penyediaan layanan air minum yang aman, mudah dijangkau, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar yang tidak hanya berdampak

pada kesehatan publik, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan produktif. Upaya pemenuhan akses air minum layak ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6, dan menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan rumah tangga serta mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan cakupan air minum layak perlu diprioritaskan dalam rumusan arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029.

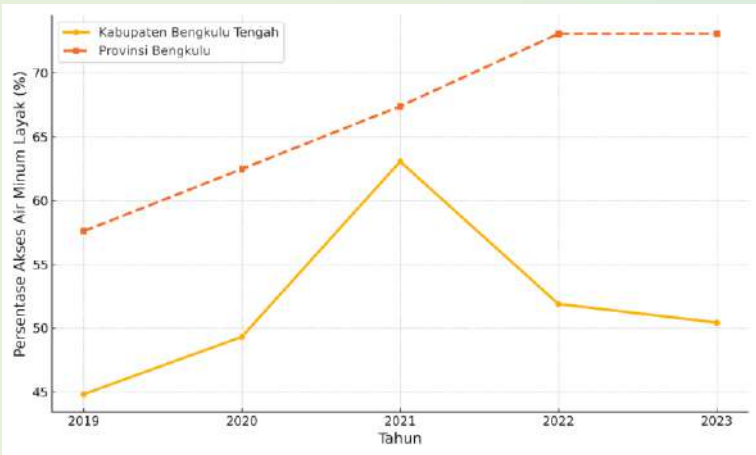
Tabel II-4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	65,85	45,78	58,22	65	62,72
Rejang Lebong	56,63	45,24	65,07	57,25	56,37
Bengkulu Utara	41,21	56,24	53,11	82,64	84,11
Kaur	66,42	79,4	86,2	83,94	84,18
Seluma	33,38	37,54	47,04	71,59	70,93
Mukomuko	53,32	79,41	75,99	75,73	75,45
Lebong	65,81	61,16	57,37	54,85	59,7
Kepahiang	46,19	63,82	62,65	61,81	62,14
Bengkulu Tengah	44,82	49,32	63,06	51,89	50,44
Kota Bengkulu	85,16	88,77	92,21	94,51	93,38
Bengkulu	57,6	62,47	67,39	73,07	73,08

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2023, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan capaian yang masih tergolong rendah dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, persentase akses air minum layak di kabupaten ini sebesar 44,82%, kemudian naik ke angka tertinggi 63,06% pada 2021, namun kembali turun menjadi 50,44% pada tahun 2023. Capaian ini berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang secara konsisten mengalami peningkatan dari 57,6% di tahun 2019 menjadi 73,08% pada tahun 2023.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Bengkulu Tengah berada di kelompok terbawah. Kabupaten seperti Kaur (84,18%), Bengkulu Utara (84,11%), dan Mukomuko (75,45%) menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi dan stabil. Bahkan Kabupaten Seluma, yang pada 2019 hanya mencatat 33,38%, berhasil melampaui Bengkulu Tengah dengan capaian 70,93% pada 2023. Kota Bengkulu tetap menjadi yang tertinggi dengan 93,38% rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan serius dalam penyediaan infrastruktur air bersih dan pemerataan akses terhadap layanan dasar tersebut.



Gambar II-4. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023

Situasi ini menuntut perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses air minum layak harus menjadi prioritas utama guna mendukung kualitas hidup masyarakat, menekan angka penyakit berbasis lingkungan, dan meningkatkan pencapaian indikator pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu Tengah.

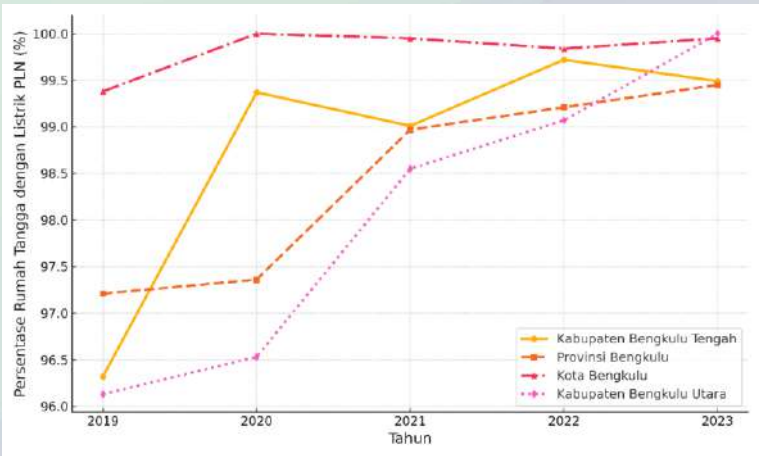
4. Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN

Ketersediaan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan penopang utama dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, akses listrik yang merata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif, peningkatan mutu pendidikan, serta memperkuat interaksi sosial masyarakat. Penyediaan listrik PLN bagi seluruh rumah tangga, terutama di kawasan perdesaan dan wilayah yang secara geografis menantang, menjadi indikator penting dalam mendorong keadilan pembangunan antarwilayah. Meskipun tingkat cakupan listrik di Bengkulu Tengah tergolong tinggi, tantangan tetap ada dalam menjamin keandalan pasokan dan jangkauan layanan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan yang lebih terarah dan inklusif untuk memperluas dan menstabilkan akses listrik PLN sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel II-5. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu	97,21	97,36	98,97	99,21	99,45
Bengkulu Selatan	99,62	96,25	99,87	99,84	99,35
Rejang Lebong	97,72	97,08	99,05	98,26	99,01
Bengkulu Utara	96,13	96,53	98,55	99,07	100
Kaur	94,31	95,54	99,44	99,33	98,36
Seluma	95,23	97,54	98,54	99	99,13
Mukomuko	96,33	94,28	97,74	99,44	99,52
Lebong	97,06	99,01	99,42	99,44	99,96
Kepahiang	97,19	95,76	97,47	98,35	98,82
Bengkulu Tengah	96,32	99,37	99,01	99,72	99,49
Kota Bengkulu	99,38	100	99,95	99,84	99,95

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik dari PLN di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2023, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan konsisten, serta sejalan dengan rata-rata provinsi. Pada tahun 2019, Bengkulu Tengah mencatat angka 96,32%, meningkat signifikan menjadi 99,37% pada 2020, dan tetap berada di atas 99% hingga 2023, dengan capaian akhir 99,49%. Angka ini sedikit di atas rata-rata Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 yang sebesar 99,45%, dan menempatkan Bengkulu Tengah dalam kelompok kabupaten dengan akses listrik PLN yang sangat baik.



Gambar II-5. Perbandingan Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Penerangan Listrik PLN Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lain Tahun 2019–2023

Dibandingkan dengan daerah lain, posisi Bengkulu Tengah tergolong kompetitif. Kabupaten ini berada di atas beberapa kabupaten seperti Kaur (98,36%) dan Kepahiang (98,82%), serta mendekati capaian maksimal seperti Kota Bengkulu (99,95%) dan Kabupaten Lebong (99,96%). Kabupaten Bengkulu Utara bahkan mencapai 100% pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa

akses listrik di Bengkulu Tengah tidak lagi menjadi persoalan utama, dan dapat dijadikan sebagai landasan untuk mendorong pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi berbasis digital dan industri rumah tangga.

Stabilnya ketersediaan listrik PLN di Bengkulu Tengah mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar dan distribusi energi, serta memberikan peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ke depan, tantangan bergeser dari ketersediaan menjadi peningkatan kualitas layanan, efisiensi energi, dan pengembangan energi terbarukan, yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan.

D. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan kondisi ideal di mana ekosistem mampu menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara sehat, aman, dan berkelanjutan, serta terbebas dari pencemaran dan kerusakan. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, yang memiliki bentang alam beragam mulai dari kawasan hutan lindung, perbukitan, hingga daerah aliran sungai yang tersebar di berbagai kecamatan, menjaga kualitas lingkungan menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Posisi kabupaten ini sebagai wilayah penyangga Kota Bengkulu juga menempatkannya dalam posisi penting dalam mengelola tekanan lingkungan akibat alih fungsi lahan, aktivitas industri, dan perluasan permukiman. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025–2029, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diarahkan melalui penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan utama dari amanat ini adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, menjaga fungsi ekologis, serta mewujudkan keseimbangan ekosistem dan keadilan antargenerasi—baik bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap isu-isu lingkungan global, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Daerah telah berupaya menerjemahkan amanat tersebut melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis sesuai kewenangannya. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan sistem pengelolaan sampah terpadu, pengendalian degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan alih fungsi lahan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta perlindungan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah hutan lindung, sempadan sungai, dan kawasan rawan bencana ekologis. Untuk menilai kinerja dan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup, digunakan instrumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai alat evaluasi kuantitatif yang menggambarkan kondisi aktual lingkungan secara periodik. IKLH menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan di bidang lingkungan, agar seluruh proses pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekologis dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel II-6. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	55,00	45,00	45,00	92,62	92,39	93,04
Rejang Lebong	58,33	63,33	61,67	86,56	88,41	89,58
Bengkulu Utara	50,00	50,00	30,00	87,47	89,35	91,46
Kaur	N/A	36,67	N/A	95,09	95,08	94,39
Seluma	45,00	30,00	60,00	93,04	92,98	94,48
Mukomuko	N/A	40,00	48,46	90,79	90,60	91,82
Lebong	50,00	48,57	52,00	95,32	96,67	96,21
Kepahiang	48,33	43,53	51,11	91,39	91,62	93,96
Bengkulu Tengah	44,29	40,40	54,17	87,68	86,94	89,28

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kota Bengkulu	44,12	45,00	37,78	88,70	88,10	90,65
Provinsi Bengkulu	49,81	46,18	48,98	90,81	91,27	92,49

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan komponen penyusunnya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2021–2023, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan capaian yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi dan mayoritas kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2023, IKLH Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada angka 62,35 (kategori sedang), masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 72,10 (kategori baik). Dibandingkan dengan kabupaten lain, capaian IKLH Bengkulu Tengah hanya lebih tinggi dari Kota Bengkulu (57,04) dan Bengkulu Utara (60,79), namun tertinggal cukup jauh dari kabupaten seperti Lebong (75,50) dan Seluma (70,89) yang telah masuk kategori baik.

Tabel II-7. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	46,77	46,83	47,61	68,43 (Sedang)	64,59 (Sedang)	65,03 (Sedang)
Rejang Lebong	43,41	43,41	45,94	66,50 (Sedang)	70,12 (Sedang)	69,53 (Sedang)
Bengkulu Utara	57,21	57,21	56,93	66,75 (Sedang)	68,51 (Sedang)	60,79 (Sedang)
Kaur	66,36	66,36	66,42	53,04 (Sedang)	67,83 (Sedang)	52,77 (Sedang)
Seluma	45,90	45,90	45,94	64,65 (Sedang)	59,99 (Sedang)	70,89 (Baik)
Mukomuko	64,48	64,56	64,09	50,89 (Sedang)	66,87 (Sedang)	69,44 (Sedang)
Lebong	77,44	76,03	77,55	74,36 (Baik)	75,06 (Baik)	75,50 (Baik)
Kepahiang	29,19	29,19	29,51	61,58 (Sedang)	60,86 (Sedang)	63,73 (Sedang)
Bengkulu Tengah	25,62	25,62	26,59	57,77 (Sedang)	57,01 (Sedang)	62,35 (Sedang)
Kota Bengkulu	25,22	25,22	27,93	58,04 (Sedang)	58,12 (Sedang)	57,04 (Sedang)
Provinsi Bengkulu	55,52	55,19	55,80	71,46 (Baik)	70,82 (Baik)	72,10 (Baik)

Dari sisi Indeks Kualitas Air (IKA), Bengkulu Tengah mencatat peningkatan dari 40,40 pada 2022 menjadi 54,17 pada 2023, namun masih di bawah rata-rata provinsi (48,98), dan tertinggal dari kabupaten seperti Rejang Lebong (61,67) dan Lebong (52,00). Sementara itu, untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), capaian Bengkulu Tengah mencapai 89,28 pada 2023, yang masih berada di bawah rata-rata provinsi (92,49) dan tertinggal dari kabupaten seperti Lebong (96,21) dan Seluma (94,48).

Yang paling mengkhawatirkan adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL), di mana Bengkulu Tengah mencatat angka terendah kedua di provinsi, yaitu 26,59 pada 2023, hanya sedikit di atas Kota Bengkulu (27,93) dan jauh di bawah rata-rata provinsi yang berada di angka 55,80. Hal ini menunjukkan adanya tekanan serius terhadap kualitas lahan di wilayah Bengkulu Tengah, yang dapat disebabkan oleh degradasi, alih fungsi lahan, atau minimnya perlindungan kawasan lindung dan sempadan.

Secara keseluruhan, capaian IKLH dan komponen-komponennya mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Upaya perbaikan secara sistematis perlu dilakukan, terutama dalam pengelolaan lahan, pengendalian pencemaran air, dan penguatan kelembagaan lingkungan. Peningkatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi menjadi langkah strategis yang harus diperkuat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana lainnya. IRB disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (hazard) yang menggambarkan potensi terjadinya bencana, kerentanan (vulnerability) yang mencerminkan seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan, serta kapasitas (capacity) yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Indeks ini menjadi referensi penting dalam perencanaan pembangunan yang berbasis risiko, sekaligus sebagai landasan dalam menetapkan prioritas kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat daerah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, IRB menjadi pertimbangan strategis untuk mendukung arah pembangunan yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana. Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis berupa perbukitan, daerah aliran sungai, dan kedekatannya dengan jalur seismik aktif, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi risiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi, yang dapat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi serta mengancam infrastruktur

publik. Pemahaman terhadap IRB memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih tepat, melalui pendekatan seperti penataan ruang berbasis risiko, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pengurangan risiko dan tanggap darurat.

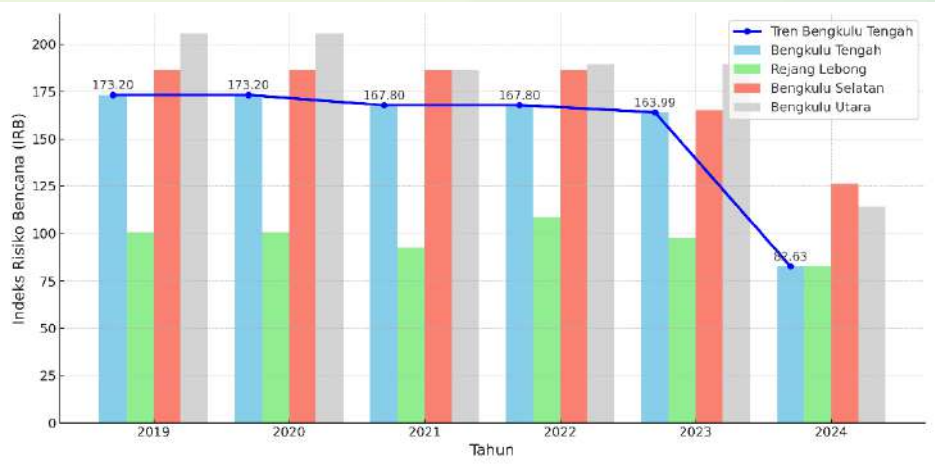
Secara geografis, Bengkulu Tengah berbatasan langsung dengan wilayah pesisir dan memiliki sejumlah daerah rawan longsor serta kawasan yang berdekatan dengan patahan gempa. Hal ini menempatkan Bengkulu Tengah dalam kategori wilayah dengan potensi risiko bencana menengah hingga tinggi. Dengan menjadikan IRB sebagai komponen integral dalam perencanaan pembangunan daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mampu mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan, tangguh terhadap bencana, serta mampu melindungi masyarakat dan aset strategis dari ancaman bencana yang terus berkembang akibat perubahan iklim dan tekanan lingkungan.

Tabel II-8. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	205,60	205,60	186,25	189,19	189,19	114.05
Kaur	203,20	203,20	196,86	182,55	192,16	146.00
Seluma	191,20	191,20	165,74	172,23	163,04	181.62
Bengkulu Selatan	186,40	186,40	186,40	186,40	165,18	126.40
Bengkulu Tengah	173,20	173,20	167,80	167,80	163,99	82.63
Muko Muko	166,02	166,02	172,29	172,29	164,32	
Kota Bengkulu	137,68	137,68	147,50	143,88	143,88	
Kepahiang	138,00	138,00	138,00	117,49	101,31	
Rejang Lebong	100,71	100,71	92,58	108,60	97,92	82.63
Lebong	118,00	118,00	118,00	113,09	106,49	

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren penurunan risiko bencana yang cukup signifikan dan positif. Pada tahun 2019, IRB Bengkulu Tengah tercatat sebesar 173,20 dan menurun stabil hingga mencapai 82,63 pada tahun 2024, angka yang setara dengan Rejang Lebong dan menjadi salah satu yang terendah di provinsi. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan risiko bencana, baik dari aspek pengurangan kerentanan maupun peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut.



Gambar II-6. Perbandingan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Lain di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, capaian Bengkulu Tengah tergolong sangat baik. Kabupaten seperti Bengkulu Utara (114,05), Kaur (146,00), dan Seluma (181,62) masih menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi pada tahun 2024. Bahkan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang sebelumnya memiliki IRB sama tinggi dengan Bengkulu Tengah pada 2019, mencatat IRB 126,40 pada 2024, lebih tinggi dari Bengkulu Tengah. Selain Rejang Lebong, hanya Kepahiang (101,31) dan Lebong (106,49) yang memiliki IRB relatif rendah, namun tetap berada di atas Bengkulu Tengah.

Secara umum, pencapaian ini menempatkan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu wilayah dengan risiko bencana terendah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, menunjukkan efektivitas kebijakan pengurangan risiko yang telah diimplementasikan. Meski demikian, mengingat potensi ancaman seperti banjir, longsor, dan gempa bumi masih tetap ada, maka pendekatan mitigatif dan adaptif tetap perlu diperkuat agar tren penurunan risiko ini dapat dipertahankan dan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.

E. Demografi

Demografi merupakan cerminan karakteristik penduduk suatu wilayah, meliputi jumlah, kepadatan, struktur umur, kelahiran, kematian, migrasi, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi dinamika populasi. Informasi ini menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, pemahaman terhadap kondisi

demografi diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan secara inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, aspek demografi menjadi pertimbangan strategis, khususnya mengingat pertumbuhan penduduk yang menuntut peningkatan kapasitas layanan publik dan infrastruktur dasar. Dominasi penduduk usia produktif di wilayah ini juga menyimpan potensi bonus demografi yang dapat dimaksimalkan melalui kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pendekatan berbasis demografi, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan indikator penting dalam demografi yang mencerminkan besarnya populasi yang mendiami suatu wilayah pada periode tertentu. Dinamika jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi, serta berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan energi. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, informasi ini menjadi acuan utama dalam merancang kebijakan pembangunan, karena juga menentukan potensi tenaga kerja dan tingkat konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, data jumlah penduduk digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Apabila proporsi usia produktif mendominasi, maka kebijakan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan penguatan sektor ketenagakerjaan. Sebaliknya, bila terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, maka perhatian difokuskan pada layanan sosial dan kesehatan lansia. Selain itu, jumlah penduduk turut memengaruhi alokasi anggaran pembangunan, sehingga pemanfaatan data yang akurat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Bengkulu Tengah.

Tabel II-9. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	2.005.045	2.032.384	2.059.373	2.086.006	2.112.235
Bengkulu Selatan	165.725	167.685	169.591	171.463	173.315
Rejang Lebong	276.005	279.280	282.519	285.710	288.832
Bengkulu Utara	295.825	299.479	303.111	306.659	310.125
Kaur	126.125	127.816	129.449	131.063	132.659

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Seluma	207.314	209.961	212.544	215.063	217.507
Mukomuko	189.833	192.863	195.854	198.794	201.700
Lebong	105.947	107.447	108.902	110.347	111.750
Kepahiang	149.298	151.130	152.912	154.651	156.353
Bengkulu Tengah	116.344	117.986	119.571	121.139	122.673
Kota Bengkulu	372.629	378.737	384.920	391.117	397.321

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2020–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, dari 116.344 jiwa pada tahun 2020 menjadi 122.673 jiwa pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, secara absolut Bengkulu Tengah tetap menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terendah kedua di Provinsi Bengkulu, hanya lebih tinggi dari Kabupaten Lebong yang berpenduduk 111.750 jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi yang mencapai 2.112.235 jiwa di tahun yang sama, kontribusi Bengkulu Tengah masih tergolong kecil, yakni sekitar 5,8 persen dari total populasi Provinsi Bengkulu.



Gambar II-7. Proporsi Jumlah Penduduk Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024

Dibandingkan kabupaten/kota lain, penduduk Bengkulu Tengah jauh di bawah Kota Bengkulu (397.321 jiwa), Bengkulu Utara (310.125 jiwa), dan Rejang Lebong (288.832 jiwa). Sementara dengan kabupaten yang memiliki karakteristik wilayah relatif serupa seperti Kaur dan Kepahiang, jumlah penduduk Bengkulu Tengah juga masih lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa skala kebutuhan penduduk di Bengkulu Tengah relatif kecil dibandingkan daerah lain, namun tetap memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan agar distribusi layanan dasar dan

infrastruktur tetap merata dan inklusif, terutama karena wilayah ini juga berfungsi sebagai daerah penyangga utama bagi pertumbuhan Kota Bengkulu.

Tabel II-10. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Talang Empat	12.130	12.275	12.453	12.599	12.760
Semidang Lagan	5.677	5.745	5.828	5.900	5.977
Karang Tinggi	12.415	12.563	12.746	13.119	13.363
Taba Penanjung	11.556	11.694	11.864	11.794	11.876
Merigi Kelindang	7.125	7.210	7.315	7.303	7.365
Pagar Jati	7.034	7.118	7.221	7.383	7.505
Merigi Sakti	6.141	6.214	6.305	6.221	6.248
Pondok Kelapa	30.049	30.408	30.849	31.205	31.603
Pondok Kubang	10.609	10.736	10.892	11.412	11.694
Pematang Tiga	7.296	7.383	7.490	7.388	7.419
Bang Haji	6.674	6.754	6.851	6.815	6.863
Bengkulu Tengah	116.706	118.100	119.814	121.139	122.673

Berdasarkan data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024, terlihat bahwa seluruh kecamatan mengalami tren peningkatan jumlah penduduk meskipun dengan laju yang berbeda-beda. Kecamatan Pondok Kelapa secara konsisten menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu mencapai 31.603 jiwa pada tahun 2024, yang mencerminkan peran wilayah ini sebagai pusat aktivitas dan permukiman utama di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara itu, Kecamatan Semidang Lagan dan Merigi Sakti merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, masing-masing sebanyak 5.977 jiwa dan 6.248 jiwa, menunjukkan konsentrasi penduduk yang masih rendah di daerah tersebut.

Kecamatan Karang Tinggi, Talang Empat, dan Taba Penanjung juga menunjukkan jumlah penduduk yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang stabil dan terus meningkat, mendekati atau melebihi angka 12.000 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang merata di hampir seluruh kecamatan mengindikasikan adanya persebaran penduduk yang mulai menyebar, meskipun tetap terkonsentrasi di wilayah yang memiliki akses ekonomi dan infrastruktur lebih baik. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan wilayah dan pengalokasian sumber daya secara adil dan proporsional, guna memastikan pembangunan yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel II-11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024

Rentang Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	10.116	10.127	10.167	10.695	10.924
5-9	10.572	10.584	10.626	10.268	10.130
10-14	10.339	10.343	10.381	10.524	10.580
15-19	10.262	10.236	10.251	10.266	10.306
20-24	10.480	10.453	10.436	10.321	10.273
25-29	10.335	10.388	10.471	10.287	10.284
30-34	10.040	10.114	10.197	10.121	10.101
35-39	9.124	9.238	9.386	9.613	9.781
40-44	8.469	8.582	8.706	8.762	8.859
45-49	7.212	7.395	7.589	7.915	8.118
50-54	5.870	6.057	6.263	6.530	6.775
55-59	4.718	4.892	5.078	5.224	5.411
60-64	3.626	3.789	3.972	4.082	4.231
65-69	2.463	2.604	2.743	2.931	3.095
70-75	1.531	1.664	1.814	1.809	1.930
75+	1.549	1.634	1.734	1.791	1.875
Jumlah	116.706	118.100	119.814	121.139	122.673

Data jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan kelompok umur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang stabil. Jumlah total penduduk meningkat dari 116.706 jiwa pada tahun 2020 menjadi 122.673 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan alami dan kemungkinan mobilitas penduduk yang relatif positif. Pertumbuhan tersebut tampak merata di hampir seluruh kelompok umur, dengan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada kelompok usia produktif dan usia lanjut.

Secara lebih rinci, kelompok umur 0-4 tahun mengalami pertumbuhan dari 10.116 jiwa pada tahun 2020 menjadi 10.924 jiwa pada tahun 2024, menunjukkan bahwa angka kelahiran relatif stabil. Sementara itu, kelompok usia produktif (15-64 tahun) secara konsisten mendominasi struktur penduduk dengan jumlah besar, yang mengindikasikan potensi bonus demografi. Pada sisi lain, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) juga menunjukkan tren kenaikan, dari 3.994 jiwa pada tahun 2020 (gabungan usia 65-69, 70-74, dan 75+) menjadi 4.905 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah lansia ini menunjukkan adanya pergeseran struktur demografi yang harus diantisipasi melalui kebijakan perlindungan sosial dan layanan kesehatan usia lanjut. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran penting untuk dasar perencanaan pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika penduduk.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografi yang mencerminkan perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode, yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, informasi ini menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang stabil dapat menjadi potensi positif bagi peningkatan konsumsi domestik, perluasan tenaga kerja produktif, serta penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Namun, jika laju pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan penguatan infrastruktur dasar, ketersediaan lapangan kerja, dan pengelolaan lingkungan yang baik, maka potensi tersebut justru dapat menimbulkan tantangan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, analisis terhadap dinamika pertumbuhan penduduk perlu dijadikan landasan strategis agar kebijakan yang dirumuskan bersifat adaptif, adil, dan berkelanjutan, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Tabel II-12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	1,48	1,4	1,13	1,12
Bengkulu Selatan	1,4	1,31	1,18	1,16
Rejang Lebong	1,04	0,95	1,23	1,2
Bengkulu Utara	1,29	1,21	1,28	1,26
Kaur	1,48	1,4	1,24	1,21
Seluma	1,69	1,61	1,56	1,54
Mukomuko	1,89	1,81	1,37	1,34
Lebong	0,6	0,51	1,18	1,16
Kepahiang	1,7	1,62	1,36	1,34
Bengkulu Tengah	1,6	1,51	1,68	1,66
Kota Bengkulu	1,79	1,71	1,35	1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Data laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bengkulu tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah konsisten mencatatkan angka pertumbuhan penduduk di atas rata-rata provinsi. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk Bengkulu Tengah mencapai 1,66 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu yang sebesar 1,12 persen. Bahkan

dalam empat tahun terakhir, Bengkulu Tengah selalu mencatatkan laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan cenderung meningkat, dari 1,6 persen di tahun 2021 menjadi 1,68 persen di 2023, dan sedikit menurun ke 1,66 persen di 2024, namun tetap menjadi salah satu yang tertinggi di provinsi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, laju pertumbuhan penduduk Bengkulu Tengah tahun 2024 lebih tinggi dari sebagian besar daerah lain seperti Rejang Lebong (1,2 persen), Bengkulu Selatan (1,16 persen), dan Lebong (1,16 persen). Namun, masih sedikit di bawah Kota Bengkulu (1,32 persen) dan Kabupaten Mukomuko (1,34 persen). Tingginya laju pertumbuhan ini menunjukkan adanya dinamika penduduk yang aktif di Bengkulu Tengah, baik dari segi penambahan alami maupun migrasi, yang perlu dicermati dalam konteks penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah agar pembangunan ke depan mampu menampung pertumbuhan populasi dengan tetap menjaga kualitas hidup masyarakat.

3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah, biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, indikator ini penting untuk memahami struktur demografi serta potensi tenaga kerja di berbagai sektor. Ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dapat memengaruhi perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor yang secara tradisional didominasi oleh salah satu gender, seperti pertanian, perikanan, atau layanan sosial.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, rasio jenis kelamin perlu dijadikan salah satu pertimbangan dalam perencanaan kebijakan sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Jika proporsi perempuan lebih besar, maka penting untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan, akses layanan kesehatan reproduksi, dan pelatihan keterampilan berbasis gender. Sebaliknya, jika laki-laki lebih dominan, perlu diantisipasi dampaknya terhadap struktur tenaga kerja dan kebutuhan layanan publik. Dengan pendekatan berbasis data yang sensitif terhadap gender, pembangunan di Bengkulu Tengah dapat lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

Tabel II-13. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	104,9	104,72	104,6	104,51	104,38
Bengkulu Selatan	104,1	103,95	103,83	103,72	103,6
Rejang Lebong	104,5	104,34	104,21	104,02	103,86
Bengkulu Utara	105	104,87	104,74	104,52	104,36
Kaur	106,4	106,27	106,14	105,83	105,64
Seluma	106,5	106,38	106,25	106,24	106,15
Mukomuko	107	106,89	106,76	106,61	106,47
Lebong	104,8	104,68	104,55	104,58	104,48
Kepahiang	106,6	106,46	106,33	106	105,78
Bengkulu Tengah	105,6	105,44	105,31	105,11	104,96
Kota Bengkulu	102	101,86	101,74	101,99	101,97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data rasio penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat rasio jenis kelamin yang relatif stabil namun cenderung menurun, dari 105,6 pada tahun 2020 menjadi 104,96 pada tahun 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Bengkulu Tengah masih lebih banyak dibandingkan perempuan, meskipun selisihnya semakin menyempit dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang sebesar 104,38 pada tahun 2024, maka rasio Bengkulu Tengah sedikit lebih tinggi, menandakan proporsi laki-laki di wilayah ini masih dominan.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Tengah berada pada posisi menengah. Beberapa wilayah seperti Mukomuko, Seluma, dan Kepahiang memiliki rasio jenis kelamin yang lebih tinggi, bahkan di atas 106, yang mengindikasikan dominasi penduduk laki-laki yang lebih kuat. Sementara itu, Kota Bengkulu memiliki rasio jenis kelamin terendah, yaitu sekitar 101,97 pada tahun 2024, menandakan proporsi penduduk perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah, terutama dalam menyusun program berbasis gender yang merespons kebutuhan kelompok laki-laki maupun perempuan secara seimbang dan adil.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah indikator demografis yang mengukur jumlah penduduk per satuan luas wilayah, biasanya dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai distribusi populasi dan dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Kabupaten

Bengkulu Tengah, yang memiliki kombinasi wilayah dataran, perbukitan, dan kawasan penyangga perkotaan, pemahaman terhadap kepadatan penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Daerah dengan kepadatan tinggi, terutama di sekitar kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu seperti Talang Empat dan Pondok Kelapa, umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, wilayah dengan kepadatan rendah seperti Merigi Sakti dan Merigi Kelindang kerap menghadapi tantangan aksesibilitas dan infrastruktur.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, data kepadatan penduduk perlu dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pembangunan yang proporsional dan adil. Kecamatan dengan kepadatan rendah memerlukan intervensi berupa penguatan konektivitas, perluasan layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur dasar. Sementara itu, wilayah yang mengalami peningkatan kepadatan memerlukan perhatian dalam pengelolaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur publik agar tidak membebani daya dukung wilayah. Dengan perencanaan yang berbasis sebaran penduduk, pembangunan di Bengkulu Tengah diharapkan dapat berlangsung lebih inklusif, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah.

Tabel II-14. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	99,88	102,6	102,34	103,63	104,93
Bengkulu Selatan	136,25	141,63	139,4	140,52	142,04
Rejang Lebong	178,6	170	181,59	184,45	186,46
Bengkulu Utara	66,16	69,23	67,57	68,42	69,19
Kaur	48,51	54,01	49,7	50,24	50,85
Seluma	85,45	87,69	87,86	88,4	89,41
Mukomuko	46,03	47,86	47,5	48,03	48,74
Lebong	63,78	55,56	64,35	66,21	67,05
Kepahiang	199,81	228,03	205,49	206,37	208,64
Bengkulu Tengah	95,71	95,71	97,89	98,97	100,34
Kota Bengkulu	2.485,47	2.495,74	2.560,32	2.602,07	2.643,34

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data kepadatan penduduk tahun 2020–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren peningkatan kepadatan penduduk yang konsisten, dari 103,07 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 108,34 jiwa/km² pada tahun 2024. Angka ini berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Bengkulu, yang

pada tahun 2024 tercatat sebesar 104,93 jiwa/km², menandakan bahwa Bengkulu Tengah termasuk dalam kategori wilayah dengan kepadatan penduduk sedang. Dibandingkan dengan kabupaten lain, Bengkulu Tengah memiliki kepadatan lebih tinggi dibandingkan Kaur, Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong, namun masih jauh di bawah Kabupaten Kepahiang (208,64 jiwa/km²) dan Kota Bengkulu yang memiliki kepadatan sangat tinggi, yaitu 2.643,34 jiwa/km².

Peningkatan kepadatan di Bengkulu Tengah mencerminkan perannya sebagai daerah penyangga utama bagi Kota Bengkulu, dengan wilayah seperti Talang Empat dan Pondok Kelapa yang menjadi kantong permukiman dan aktivitas penduduk. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur dasar, agar pertumbuhan penduduk tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap layanan publik dan daya dukung lingkungan. Sementara itu, bila dibandingkan dengan wilayah lain yang kepadatannya masih rendah, Bengkulu Tengah berada dalam posisi strategis untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang lebih merata dan inklusif di wilayah sekitarnya.

5. Proyeksi jumlah penduduk

Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui kolaborasi antara Bappenas, BPS, UNFPA, serta sejumlah instansi terkait seperti BKKBN dan Kementerian Kesehatan, telah merilis Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020–2050 yang disusun berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020. Proyeksi ini menggunakan pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk dan dinamika demografi nasional serta regional. Dengan pendekatan serupa dan menyesuaikan karakteristik pertumbuhan penduduk di tingkat provinsi, diperoleh proyeksi penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah untuk periode 2025–2030. Proyeksi ini menjadi acuan strategis dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, khususnya untuk merencanakan kebutuhan layanan dasar, infrastruktur, perumahan, serta merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan dan potensi sosial ekonomi di masa mendatang.

Tabel II-15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2030

Kelompok Umur	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	10.924	11.036	11.017	10.993	10.963	10.929	10.890
5–9	10.130	10.136	10.260	10.379	10.494	10.605	10.714
10–14	10.580	10.604	10.627	10.647	10.665	10.679	10.686
15–19	10.306	10.319	10.335	10.356	10.379	10.402	10.426

Kelompok Umur	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20-24	10.273	10.236	10.216	10.207	10.210	10.220	10.233
25-29	10.284	10.287	10.266	10.225	10.176	10.128	10.093
30-34	10.101	10.132	10.172	10.216	10.256	10.281	10.285
35-39	9.781	9.860	9.919	9.958	9.986	10.012	10.044
40-44	8.859	8.956	9.060	9.169	9.282	9.382	9.447
45-49	8.118	8.263	8.388	8.495	8.591	8.683	8.779
50-54	6.775	6.961	7.142	7.317	7.484	7.637	7.774
55-59	5.411	5.585	5.764	5.944	6.125	6.304	6.479
60-64	4.231	4.405	4.573	4.737	4.898	5.061	5.226
65-69	3.095	3.243	3.401	3.565	3.733	3.898	4.063
70-74	1.930	2.060	2.182	2.298	2.412	2.530	2.655
75+	1.875	2.017	2.177	2.355	2.545	2.745	2.950
Total	122.673	124.102	125.498	126.862	128.198	129.496	130.743

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025–2030, terlihat tren pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari 126.714 jiwa pada tahun 2025 menjadi 133.678 jiwa pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan penduduk yang moderat dengan rata-rata kenaikan sekitar 1.300 hingga 1.400 jiwa per tahun. Dari sisi struktur umur, kelompok usia produktif (15–64 tahun) tetap mendominasi komposisi penduduk selama periode tersebut, menunjukkan potensi bonus demografi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, apabila ditunjang dengan kebijakan pembangunan SDM yang tepat.

Di sisi lain, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan, dari sekitar 7.415 jiwa pada tahun 2025 menjadi lebih dari 9.800 jiwa pada tahun 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah mulai memasuki fase penuaan penduduk secara gradual, sehingga perlu diantisipasi dengan kebijakan jaminan sosial, pelayanan kesehatan lansia, dan strategi pembangunan yang responsif terhadap populasi lanjut usia. Pemanfaatan data proyeksi ini penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan dasar, dan pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan.

Tabel II-16. Proyeksi Demografi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2030 Berdasarkan Indikator Kependudukan Strategis

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Jumlah Penduduk	124.102	125.498	126.862	128.198	129.496	130.743
Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	101,45	102,6	103,74	104,79	105,87	106,88
Proyeksi jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64)	69.093	69.552	70.045	70.561	71.023	71.339
Proyeksi Penduduk Usia Produktif (%)	55,66	55,42	55,23	55,06	54,86	54,55
Proyeksi jumlah Angka Ketergantungan	55.121	56.255	57.367	58.427	59.473	60.484
Proyeksi persentase Angka Ketergantungan	79,91	81,24	82,55	83,74	84,93	86,09

Tahun	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Bonus Demografi (%)	55,58	55,17	54,78	54,42	54,07	53,74
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut (65+)	7.303	7.583	7.918	8.290	8.673	9.013

Dari data pada tabel proyeksi demografi kabupaten bengkulu tengah tahun 2025–2030 berdasarkan indikator kependudukan strategis dapat disimpulkan bahwa:

a. proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan luas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (±1.223 km²). Hasil pembagian ini menunjukkan berapa banyak jiwa mendiami setiap kilometer persegi wilayah.

Selama periode 2025–2030, kepadatan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan dari 101,45 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 106,88 jiwa/km² pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang konsisten dalam wilayah yang tetap, yang dapat berdampak pada tekanan terhadap lahan, infrastruktur, dan pelayanan dasar jika tidak diantisipasi dengan perencanaan ruang dan distribusi layanan yang baik.

b. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif (15–64 Tahun)

Jumlah penduduk usia produktif dihitung dengan menjumlahkan penduduk dalam kelompok umur 15 hingga 64 tahun. Ini mencakup mayoritas tenaga kerja potensial di wilayah. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif di Bengkulu Tengah diproyeksikan sebesar 69.093 jiwa dan meningkat menjadi 71.339 jiwa pada tahun 2030. Meskipun peningkatannya tidak terlalu tajam, kelompok ini tetap mendominasi struktur penduduk dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus memperluas akses terhadap pendidikan vokasi, peluang kerja, dan keterampilan digital untuk mengoptimalkan potensi mereka.

c. Proyeksi Persentase Penduduk Usia Produktif (%)

Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia 15–64 tahun terhadap jumlah penduduk total, dikalikan 100. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar proporsi penduduk usia produktif

dalam total populasi. Proporsi usia produktif di Bengkulu Tengah mengalami penurunan dari 55,66% di tahun 2025 menjadi 54,55% pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) mulai menyaingi laju pertumbuhan usia kerja, yang menandai perlunya penyesuaian dalam kebijakan sosial dan ketenagakerjaan ke depan.

d. Proyeksi Jumlah Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk tanggungan diperoleh dengan menjumlahkan penduduk usia 0–14 tahun dan 65+ tahun. Mereka dianggap sebagai populasi yang membutuhkan dukungan dari kelompok usia produktif. Angka ketergantungan di Bengkulu Tengah menunjukkan peningkatan dari 55.121 jiwa pada tahun 2025 menjadi 60.484 jiwa pada tahun 2030. Hal ini berarti beban sosial dan ekonomi terhadap kelompok produktif semakin besar, sehingga memerlukan sistem perlindungan sosial dan pelayanan publik yang lebih kuat dan merata.

e. Proyeksi Persentase Angka Ketergantungan

Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk tanggungan terhadap penduduk usia produktif, lalu dikalikan 100. Angka ini menunjukkan seberapa besar beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok produktif. Dari tahun 2025 ke 2030, rasio ketergantungan meningkat dari 79,91% menjadi 86,09%. Peningkatan ini menandakan bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif, terdapat lebih banyak individu tanggungan yang harus didukung. Konsekuensinya, program sosial dan penguatan kapasitas kerja menjadi kunci agar kelompok usia produktif tetap mampu menopang beban tersebut secara berkelanjutan.

f. Proyeksi Bonus Demografi (%)

Bonus demografi dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk tanggungan, kemudian dikalikan 100. Nilai yang tinggi menunjukkan potensi ekonomi besar karena dominasi penduduk usia kerja. Tren bonus demografi di Bengkulu Tengah menurun dari 55,58% pada tahun 2025 menjadi 53,74% pada tahun 2030. Penurunan ini menandakan bahwa potensi "bonus" dari struktur demografis mulai menyempit. Oleh karena itu, periode ini harus dimanfaatkan maksimal dengan kebijakan yang proaktif di bidang

ketenagakerjaan, investasi SDM, dan inovasi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

g. **Proyeksi Penduduk Usia Lanjut (65+ Tahun)**

Jumlah penduduk usia lanjut dihitung dari total populasi kelompok usia 65 tahun ke atas. Kelompok ini memerlukan perhatian khusus dalam aspek kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Jumlah penduduk lanjut usia di Bengkulu Tengah diproyeksikan naik dari 7.303 jiwa pada tahun 2025 menjadi 9.013 jiwa pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan proses penuaan populasi yang progresif. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi lonjakan kebutuhan layanan kesehatan lansia, penyediaan fasilitas ramah usia, dan program dukungan sosial yang komprehensif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama yang mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. LPE mencerminkan seberapa besar peningkatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah, yang berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, LPE memiliki arti strategis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan pembangunan selama periode RPJMD 2025–2029. Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keberhasilan program prioritas, seperti penguatan sektor pertanian, pengembangan kawasan sentra produksi, serta konektivitas wilayah penyangga Kota Bengkulu. Peningkatan LPE juga menunjukkan perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi lokal, dan penguatan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pemantauan LPE secara berkala menjadi alat penting dalam menilai arah kebijakan pembangunan dan menyesuaikannya dengan dinamika ekonomi daerah.

Tabel II-17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Bengkulu Selatan	4,95	4,97	0,26	3,25	3,45	3,18	4,37
Rejang Lebong	4,96	4,96	0,07	3,14	4,3	4,05	4,29
Bengkulu Utara	4,81	4,92	0,23	4,01	3,14	4,18	4,43
Kaur	4,98	4,98	0,12	3,08	3,78	3,4	4,15
Seluma	4,8	4,93	-0,01	2,18	2,92	2,61	4,06
Mukomuko	5,01	5,03	0,06	3,35	4,33	3,69	4,05
Lebong	5,01	4,97	0,1	3,08	2,98	2,84	4,3
Kepahiang	5	4,89	0,06	3,16	4,19	4,01	4,28
Bengkulu Tengah	4,97	4,97	-0,06	2,29	3,03	3,82	3,97
Kota Bengkulu	5,48	5,41	-0,25	3,47	5,69	5,53	5,39

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2018–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang cenderung moderat dan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2018 dan 2019, Bengkulu Tengah mencatatkan LPE sebesar 4,97%, sejajar dengan rata-rata provinsi. Namun, ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020, Bengkulu Tengah mengalami kontraksi ekonomi sebesar -0,06%, sedikit lebih dalam dibandingkan rata-rata provinsi yang stagnan di -0,02%.

Meskipun Bengkulu Tengah mulai mengalami pemulihan ekonomi sejak 2021, laju pertumbuhan ekonominya tetap berada di bawah rata-rata provinsi. Pada 2021, Bengkulu Tengah hanya tumbuh 2,29% dibandingkan 3,27% di tingkat provinsi. Perbaikan bertahap terlihat pada 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,03% dan 3,82%, namun tetap lebih rendah dari sebagian besar kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Pada 2024, Bengkulu Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 3,97%, masih di bawah Provinsi Bengkulu (4,62%) serta Kota Bengkulu (5,39%) dan Kabupaten Bengkulu Utara (4,43%).

Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan adanya pemulihan pascapandemi, tetapi laju pemulihannya lebih lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih strategis untuk memperkuat sektor-sektor penggerak ekonomi lokal seperti pertanian, jasa, dan industri pengolahan, serta optimalisasi peran Bengkulu Tengah sebagai wilayah penyangga Kota Bengkulu dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator penting yang menunjukkan persentase penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni batas minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Indikator ini menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Di Bengkulu Tengah, angka kemiskinan mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang masih perlu diatasi, terutama terkait keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, permodalan usaha, serta pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025–2029, pengurangan angka kemiskinan akan menjadi fokus utama yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal. Strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif harus berbasis data, menysasar kelompok rentan secara tepat, dan didukung oleh sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kebijakan yang terarah dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Bengkulu Tengah dapat ditekan secara signifikan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

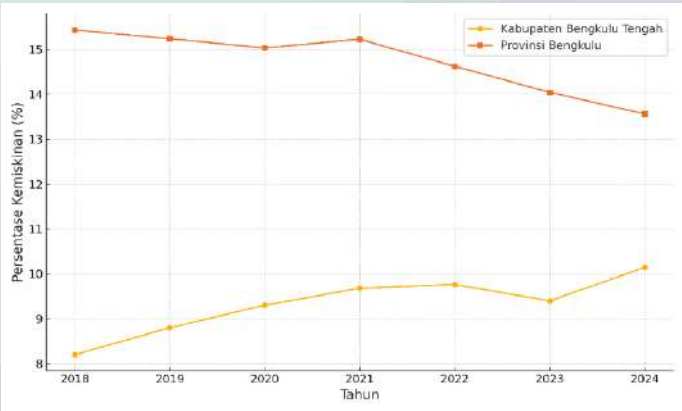
Tabel II-18. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56
Bengkulu Selatan	18,65	18,54	17,82	18,16	17,86	17,51	17,1
Rejang Lebong	16,23	15,95	15,85	15,85	15,65	14,79	14,65
Bengkulu Utara	11,81	11,65	11,67	11,61	11,48	11,29	10,96
Kaur	19,40	18,89	18,47	18,62	18,10	17,83	17,12
Seluma	19,60	19,10	18,56	18,72	18,36	18,00	17,23
Mukomuko	11,40	11,70	11,72	11,93	11,44	10,76	10,76
Lebong	11,59	11,77	11,85	12,00	12,03	11,15	10,45
Kepahiang	14,42	14,74	14,69	14,83	14,53	14,12	12,9
Bengkulu Tengah	8,20	8,80	9,30	9,68	9,76	9,40	10,14
Kota Bengkulu	18,82	18,09	17,65	17,89	15,73	14,71	13,76

Berdasarkan data persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2018 hingga 2024, terlihat bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah secara konsisten memiliki angka kemiskinan paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2018, angka kemiskinan

di Bengkulu Tengah tercatat sebesar 8,20 persen, jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 15,43 persen. Meskipun sempat mengalami kenaikan hingga 10,14 persen pada tahun 2024, angka ini tetap menjadi yang paling rendah di antara seluruh kabupaten/kota, kecuali dibandingkan dengan Kabupaten Mukomuko dan Lebong yang juga menunjukkan tren penurunan signifikan dan memiliki tingkat kemiskinan di bawah 11 persen.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, kabupaten seperti Seluma, Kaur, dan Bengkulu Selatan konsisten menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi, masing-masing masih berada di atas 17 persen pada tahun 2024. Kota Bengkulu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 18,82 persen pada tahun 2018 menjadi 13,76 persen pada tahun 2024, namun tetap lebih tinggi dibandingkan Bengkulu Tengah. Meskipun angka kemiskinan di Bengkulu Tengah menunjukkan sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, secara umum kabupaten ini masih berada dalam posisi yang relatif baik dari sisi tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Bengkulu Tengah memiliki potensi ekonomi dan jaring pengaman sosial yang lebih kuat, namun tetap perlu diwaspadai adanya kenaikan angka kemiskinan pada 2024 sebagai indikasi perlunya penguatan program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi lokal.



Gambar II-8. Persentase Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan setiap penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah dalam satu tahun. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Indikator ini memberikan gambaran mengenai

tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi masyarakat, serta mencerminkan daya beli dan kualitas pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita yang tinggi umumnya menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, PDRB per kapita menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan nilai ini harus didorong melalui optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan berbasis potensi lokal, serta penguatan sektor jasa dan perdagangan. Selain itu, pemerataan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur ekonomi juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh kecamatan.

Tabel II-19. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	36,57	36,55	39,17	43,76	46,29	49,23
Bengkulu Selatan	34,05	35,09	36,95	39,58	42	45,38
Rejang Lebong	34,9	34,53	36,13	38,91	41,65	45,24
Bengkulu Utara	27,42	28,44	32,91	40,64	40,73	41,21
Kaur	29,05	28,62	30,52	32,65	34,7	37,42
Seluma	23,72	22,83	24,07	25,58	26,82	29,17
Mukomuko	27,81	27,75	29,52	31,74	34,2	37,51
Lebong	29,25	32,01	33,76	35,71	37,69	40,99
Kepahiang	31,13	29,54	31,42	33,75	36,31	40,07
Bengkulu Tengah	40,82	40,15	46,33	54,73	55,02	55,28
Kota Bengkulu	63,13	63,11	65,94	72,98	78,78	83,43

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2025

Berdasarkan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2019–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah secara konsisten menunjukkan nilai yang relatif tinggi dibandingkan dengan mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Bengkulu Tengah tercatat sebesar Rp40,82 juta dan terus meningkat hingga mencapai Rp55,28 juta pada tahun 2024. Kinerja ini menempatkan Bengkulu Tengah sebagai kabupaten dengan nilai PDRB per kapita tertinggi kedua setelah Kota Bengkulu, yang secara konsisten mencatat angka tertinggi di atas Rp60 juta dan mencapai Rp83,43 juta pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, yang naik dari Rp36,57 juta (2019) menjadi Rp49,23 juta (2024), Bengkulu Tengah selalu

berada di atas rata-rata provinsi selama enam tahun terakhir. Sementara itu, sebagian besar kabupaten lain seperti Seluma, Kaur, Mukomuko, dan Bengkulu Utara mencatat nilai PDRB per kapita yang lebih rendah dari provinsi, bahkan secara signifikan lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bengkulu Tengah memiliki performa yang cukup kuat, didukung oleh kontribusi sektor-sektor unggulan dan posisi strategis sebagai wilayah penopang utama Kota Bengkulu. Tren ini menjadi indikator positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan perlu dijaga melalui kebijakan yang memperkuat sektor produktif dan memperluas manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II-20. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	21,85	22,32	22,83	23,30	24,06
Rejang Lebong	22,02	22,47	23,16	23,83	24,59
Bengkulu Utara	17,63	18,12	18,46	19,01	19,63
Kaur	17,93	18,26	18,71	19,10	19,66
Seluma	13,85	13,97	14,20	14,40	14,82
Mukomuko	17,53	17,83	18,32	18,71	19,19
Lebong	20,01	20,40	20,73	21,04	21,67
Kepahiang	18,80	19,15	19,72	20,28	20,92
Bengkulu Tengah	24,79	25,02	25,43	26,06	26,76
Kota Bengkulu	41,10	41,81	43,47	45,15	46,84

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2025

Berdasarkan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2020–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi riil yang stabil dan positif. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Bengkulu Tengah tercatat sebesar Rp24,79 juta, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp26,76 juta pada tahun 2024. Angka ini menempatkan Bengkulu Tengah sebagai kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi di antara kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, meskipun masih di bawah Kota Bengkulu yang secara konsisten menduduki peringkat tertinggi.

Pertumbuhan PDRB per kapita ini mencerminkan adanya peningkatan nilai tambah ekonomi yang dinikmati oleh penduduk Bengkulu Tengah secara rata-rata, tanpa terpengaruh inflasi, sehingga menjadi indikator penting kesejahteraan riil masyarakat. Capaian ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi di Bengkulu Tengah relatif kuat, dan memiliki daya dorong pembangunan yang baik dibandingkan kabupaten/kota lain. Dalam konteks

RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, kondisi ini menjadi modal awal yang penting untuk melanjutkan pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat strategi distribusi hasil pembangunan agar pertumbuhan yang tinggi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting untuk mengukur proporsi angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan dalam periode tertentu. Angka ini mencerminkan seberapa efektif perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja serta menunjukkan sejauh mana sistem ketenagakerjaan berjalan secara optimal. Tinggi rendahnya TPT dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta ketersediaan lapangan kerja di sektor produktif.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025–2029, penurunan TPT menjadi salah satu sasaran utama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri rumah tangga, UMKM, serta jasa dan perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Selain itu, pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha harus diperkuat guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Tabel II-21. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	2,6	3,09	2,36	3,52	2,55	3,51	3,56	3,25
Rejang Lebong	3	1,69	2,84	3,7	2,45	2,28	2,94	2,43
Bengkulu Utara	3,89	2,72	4,14	3,82	3,51	4,16	3,33	2,89
Kaur	1,9	2,85	2,4	2,73	3,45	3,83	3,81	3,71
Seluma	3,22	2,95	2,23	3,04	3,44	1,74	2,68	2,38
Mukomuko	3,53	4,9	3,93	3,59	3,68	3,07	3,14	2,41
Lebong	3,57	6,34	4,01	3,92	3,18	3,16	2,72	2,55
Kepahiang	2,94	3,08	2,27	2,52	1,89	2,92	2,41	2,37
Bengkulu Tengah	2,72	3,48	4,63	4,45	4,07	2,48	3,20	2,56
Kota Bengkulu	6,61	5	4,29	6,82	6,35	6,15	5,04	5
Provinsi Bengkulu	3,74	3,51	3,39	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu tahun 2017–2024, terlihat bahwa angka TPT Kabupaten Bengkulu Tengah cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, Bengkulu Tengah mencatatkan angka pengangguran tertinggi sebesar 4,45%, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 4,07%. Namun pada tahun 2024, TPT Bengkulu Tengah berhasil ditekan menjadi 2,56%, lebih rendah dari angka Provinsi Bengkulu yang berada di angka 3,11%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Tengah pada tahun 2024 tergolong cukup baik. Kota Bengkulu, misalnya, masih mencatat angka TPT tertinggi sebesar 5%, sementara kabupaten-kabupaten lain seperti Mukomuko (2,41%), Rejang Lebong (2,43%), dan Lebong (2,55%) memiliki angka yang relatif sebanding dengan Bengkulu Tengah. Sementara itu, Kabupaten Kaur (3,71%) dan Bengkulu Selatan (3,25%) masih mencatat angka pengangguran yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Bengkulu Tengah mulai menunjukkan hasil positif, meskipun tetap diperlukan strategi berkelanjutan untuk menjaga tren penurunan TPT ini, terutama melalui penguatan sektor produktif dan peningkatan kualitas angkatan kerja.

5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antarindividu atau kelompok dalam suatu wilayah. Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah, Indeks Gini menjadi tolok ukur strategis untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu menciptakan pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan yang tinggi menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian pembangunan yang berkeadilan.

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pengurangan ketimpangan melalui penurunan Indeks Gini menjadi salah satu prioritas utama. Upaya yang dapat dilakukan meliputi perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok miskin dan

rentan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan mampu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, menuju Bengkulu Tengah yang lebih adil dan sejahtera.

Tabel II-22. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,36	0,32	0,31	0,30	0,30	0,35	0,3
Rejang Lebong	0,33	0,30	0,29	0,35	0,30	0,30	0,28
Bengkulu Utara	0,35	0,30	0,28	0,31	0,28	0,30	0,28
Kaur	0,31	0,29	0,32	0,28	0,28	0,29	0,3
Seluma	0,31	0,30	0,29	0,25	0,29	0,29	0,28
Mukomuko	0,32	0,29	0,25	0,26	0,26	0,29	0,28
Lebong	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29	0,29
Kepahiang	0,30	0,27	0,31	0,28	0,30	0,33	0,31
Bengkulu Tengah	0,29	0,26	0,26	0,25	0,24	0,27	0,27
Kota Bengkulu	0,39	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38	0,44
Provinsi Bengkulu	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,342

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2025

Berdasarkan data Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2018–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah secara konsisten menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Sejak tahun 2018 hingga 2024, Gini Ratio Bengkulu Tengah berada pada kisaran 0,24 hingga 0,29, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,27. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,342, serta lebih rendah dibandingkan Kota Bengkulu yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi sebesar 0,44.

Dibandingkan dengan kabupaten lain, Bengkulu Tengah termasuk dalam kelompok wilayah dengan ketimpangan paling rendah bersama Seluma, Mukomuko, dan Rejang Lebong. Tren ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Bengkulu Tengah cenderung lebih merata, yang dapat mencerminkan efektivitas kebijakan pemerataan pembangunan di daerah ini. Meski sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023, angka Gini Ratio tetap terkendali dan menunjukkan stabilitas sosial-ekonomi yang positif. Hal ini menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kunci untuk mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama:

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, peningkatan IPM menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD 2025–2029. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang membaik, mulai dari akses layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, hingga penghasilan yang layak. Peningkatan IPM juga berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing daerah secara keseluruhan.

Untuk itu, arah kebijakan pembangunan di Bengkulu Tengah perlu difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM, dan pelatihan kerja. Dengan pendekatan pembangunan manusia yang menyeluruh, diharapkan peningkatan IPM di Bengkulu Tengah bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat menuju daerah yang lebih sejahtera dan tangguh.

**Tabel II-23. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020)
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024**

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,3	74,91
Bengkulu Selatan	72,81	72,93	73,58	74,06	74,53
Rejang Lebong	72,51	72,85	73,54	74,43	75,04
Bengkulu Utara	70,81	71,28	71,76	72,27	73,1
Kaur	69,52	69,71	70,3	70,92	71,53
Seluma	68,87	69	69,74	70,27	70,98
Mukomuko	71,47	71,67	72,15	73	73,65
Lebong	71,2	71,67	72,35	72,95	73,54
Kepahiang	69,91	70,38	70,85	71,38	72,05
Bengkulu Tengah	69,42	69,78	70,29	70,81	71,67
Kota Bengkulu	82,31	82,49	82,93	83,38	83,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Usia Harapan Hidup (UHH) hasil LF SP2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yakni dari 69,42 menjadi 71,67. Meskipun terdapat kemajuan, angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 mencapai 74,91. Dibandingkan kabupaten/kota lain, Bengkulu Tengah menempati posisi menengah ke bawah, sedikit di atas Seluma dan Kaur, namun masih tertinggal dari kabupaten seperti Rejang Lebong (75,04), Bengkulu Selatan (74,53), dan Mukomuko (73,65). Sementara itu, Kota Bengkulu menunjukkan capaian tertinggi secara konsisten dengan IPM 83,95 pada tahun 2024.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat progres positif, Bengkulu Tengah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, khususnya pada aspek kesehatan yang tercermin dalam usia harapan hidup. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan akses dan mutu gizi, serta intervensi program kesehatan masyarakat yang lebih merata dan menyentuh wilayah terpencil. Percepatan peningkatan IPM menjadi penting agar Bengkulu Tengah dapat mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu.

B. Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam demografi dan kesehatan yang mencerminkan rata-rata umur hidup seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola mortalitas tetap. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, UHH mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, pola hidup, serta ketersediaan gizi dan lingkungan yang mendukung. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik pula kualitas hidup dan sistem pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks RPJMD 2025–2029, peningkatan UHH menjadi salah satu prioritas pembangunan manusia di Bengkulu Tengah. Kenaikan indikator ini menunjukkan keberhasilan program di sektor kesehatan, seperti pemerataan akses layanan medis, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta edukasi dan pencegahan penyakit. UHH juga berkaitan erat dengan produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan perlu terus diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan ekonomi agar kualitas hidup masyarakat Bengkulu Tengah meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Tabel II-24. Umur Harapan Hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,59	72,65	72,9	73,11	73,31
Bengkulu Selatan	72,47	72,49	72,67	72,87	73,05
Rejang Lebong	72,99	73,17	73,44	73,67	73,87
Bengkulu Utara	72,49	72,57	72,81	73,03	73,23
Kaur	72,12	72,22	72,49	72,74	72,97
Seluma	72,1	72,25	72,49	72,71	72,9
Mukomuko	73,11	73,19	73,44	73,71	73,95

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lebong	71,93	72,04	72,34	72,59	72,81
Kepahiang	71,73	71,87	72,07	72,26	72,41
Bengkulu Tengah	72,17	72,17	72,33	72,46	72,56
Kota Bengkulu	73,88	73,94	74,18	74,43	74,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, yaitu dari 72,17 tahun pada 2020 menjadi 72,56 tahun pada 2024. Kenaikan ini sebesar 0,39 tahun dalam lima tahun terakhir, mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan masyarakat secara bertahap.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian daerah lain di Provinsi Bengkulu, posisi Bengkulu Tengah masih tergolong rendah. UHH Bengkulu Tengah tahun 2024 (72,56 tahun) berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 73,31 tahun, dan lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lainnya seperti Rejang Lebong (73,87 tahun), Mukomuko (73,95 tahun), bahkan Kota Bengkulu yang mencatat UHH tertinggi di provinsi yaitu 74,69 tahun. Bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten yang secara geografis dan demografis memiliki tantangan serupa, seperti Bengkulu Selatan (73,05 tahun) dan Bengkulu Utara (73,23 tahun), Bengkulu Tengah masih tertinggal.

Data ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan, Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat upaya perbaikan layanan kesehatan, peningkatan gizi, serta pengurangan beban penyakit untuk mendorong percepatan peningkatan Umur Harapan Hidup dan mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komprehensif untuk mengukur kondisi kesehatan keluarga melalui berbagai aspek seperti imunisasi anak, akses air bersih dan sanitasi layak, status gizi balita, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta kesadaran terhadap pencegahan penyakit. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, IKS menjadi alat penting dalam mengevaluasi kualitas hidup masyarakat di tingkat keluarga dan menjadi dasar perencanaan intervensi kesehatan yang tepat. Peningkatan IKS tidak hanya mencerminkan derajat kesehatan yang membaik, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, peningkatan IKS menjadi bagian strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Tantangan seperti keterbatasan layanan di wilayah terpencil, gizi buruk, dan rendahnya penerapan PHBS masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, upaya seperti penguatan layanan kesehatan primer, pemberdayaan kader kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor perlu diperluas untuk mendorong keluarga sebagai unit sosial yang sehat. Peningkatan IKS akan berkontribusi langsung pada peningkatan IPM, penurunan stunting, serta tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Bengkulu Tengah.

Tabel II-25. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rejang Lebong	0,123	0,134	0,147	0,159	0,198	0,209
Kota Bengkulu	0,274	0,299	0,294	0,304	0,307	0,291
Bengkulu Utara	0,133	0,146	0,168	0,181	0,207	0,261
Lebong	0,081	0,073	0,08	0,081	0,118	0,135
Kepahiang	0,156	0,128	0,142	0,166	0,207	0,242
Bengkulu Tengah	0,156	0,128	0,136	0,165	0,186	0,256
Mukomuko	0,099	0,109	0,141	0,143	0,157	0,16
Seluma	0,13	0,115	0,149	0,166	0,178	0,187
Bengkulu Selatan	0,162	0,148	0,156	0,183	0,187	0,206
Kaur	0,098	0,083	0,085	0,085	0,127	0,134
Provinsi Bengkulu	0,164	0,161	0,171	0,183	0,205	0,224

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat tren peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang cukup signifikan, dari 0,156 pada tahun 2018 menjadi 0,256 pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 0,10 poin dalam lima tahun ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam aspek-aspek kesehatan keluarga, seperti cakupan imunisasi, akses air bersih dan sanitasi, status gizi, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka IKS tahun 2023 ini juga melampaui rata-rata Provinsi Bengkulu yang tercatat sebesar 0,224, menandakan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah berada di atas performa rata-rata provinsi dalam hal pembangunan kesehatan keluarga.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Tengah menempati posisi menengah ke atas. IKS-nya lebih tinggi dari enam kabupaten lainnya, yakni Kaur (0,134), Lebong (0,135), Mukomuko (0,160), Seluma (0,187), Rejang Lebong (0,209), dan Bengkulu Selatan (0,206). Bahkan, dalam kurun waktu 2021–2023, peningkatan IKS Bengkulu Tengah (dari 0,165 ke 0,256) tergolong salah satu yang paling pesat di provinsi ini. Jika tren positif

ini terus berlanjut, Bengkulu Tengah berpotensi menyamai atau bahkan melampaui capaian daerah-daerah dengan IKS yang lebih tinggi seperti Bengkulu Utara (0,261) dan Kota Bengkulu (0,291), yang saat ini masih menjadi yang tertinggi meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan keluarga di Bengkulu Tengah mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan, meskipun tetap diperlukan penguatan di sektor-sektor tertentu agar kemajuan yang ada dapat berkelanjutan.

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase balita dengan kondisi tinggi badan di bawah standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak, tingkat kecerdasan, ketahanan tubuh terhadap penyakit, serta produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, stunting merupakan masalah serius yang tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan, tetapi juga erat hubungannya dengan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, pola asuh, dan ketahanan pangan keluarga.

Prevalensi stunting menjadi salah satu fokus utama pembangunan manusia yang harus diatasi secara lintas sektor terutama dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah. Upaya penurunan angka stunting dipandang strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda daerah. Melalui RPJMD, pemerintah daerah mendorong integrasi berbagai intervensi, seperti peningkatan cakupan layanan posyandu dan gizi balita, perbaikan akses air minum dan sanitasi, penguatan edukasi kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan sosial bagi keluarga rentan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, sistematis, dan berbasis data, penanggulangan stunting menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu Tengah yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing tinggi secara berkelanjutan.

Tabel II-26. Prevelansi Stunting Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota	2022	2023
Bengkulu Selatan	2,9	2,9
Rejang Lebong	2,1	2,1
Bengkulu Utara	9,0	9,0
Kaur	4,9	4,9
Seluma	4,0	4,0
Mukomuko	4,5	4,5
Lebong	4,5	4,5
Kepahiang	4,3	4,3

Kabupaten/Kota	2022	2023
Bengkulu Tengah	4,6	4,6
Kota Bengkulu	0,7	0,7
Provinsi Bengkulu	4,5	4,5

Data prevalensi stunting Provinsi Bengkulu tahun 2022–2023 menunjukkan bahwa secara umum angka stunting di wilayah ini tergolong rendah, dengan rata-rata prevalensi Provinsi Bengkulu stabil di angka 4,5%. Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat angka prevalensi sebesar 4,6% pada kedua tahun tersebut, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Meskipun angkanya tidak tergolong tinggi secara nasional, posisi ini menempatkan Bengkulu Tengah di atas beberapa kabupaten lain seperti Rejang Lebong (2,1%), Kaur (4,9%), Seluma (4,0%), dan bahkan jauh lebih tinggi dibanding Kota Bengkulu yang berhasil menekan stunting hingga hanya 0,7%.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Bengkulu Tengah berada pada posisi menengah. Ia memiliki angka yang lebih rendah dibanding Bengkulu Utara (9,0%)—yang memiliki prevalensi tertinggi di provinsi—namun masih di atas beberapa kabupaten yang berhasil mempertahankan tingkat stunting di bawah 4,5%. Stabilitasnya angka stunting di Bengkulu Tengah dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan bahwa belum terjadi perbaikan signifikan, sehingga menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi keluarga. Dengan potensi yang dimiliki dan capaian pembangunan yang terus meningkat, Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk menurunkan prevalensi stunting jika pendekatan penanganan dilakukan secara lebih terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam RPJMD mendatang.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan capaian pendidikan masyarakat dan menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS memberikan gambaran mengenai tingkat akses dan keberhasilan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan formal, serta menjadi refleksi kualitas dan pemerataan pendidikan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah, RLS memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Semakin tinggi angka RLS, semakin besar pula potensi masyarakat dalam mengakses informasi, memperoleh pekerjaan yang lebih produktif, serta memahami berbagai isu penting seperti kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, peningkatan RLS turut mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, peningkatan RLS menjadi salah satu prioritas pembangunan, khususnya dalam RPJMD 2025–2029. Upaya ini dapat ditempuh melalui pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah pelosok, penguatan program pendidikan non-formal untuk masyarakat dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah. Dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif, RLS bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari pembangunan masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel II-27. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	8,73	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04
Bengkulu Selatan	9,02	9,26	9,27	9,39	9,41	9,42
Rejang Lebong	8,26	8,28	8,33	8,55	8,8	8,81
Bengkulu Utara	7,86	7,87	8,09	8,1	8,11	8,32
Kaur	8,25	8,37	8,38	8,39	8,41	8,47
Seluma	7,91	7,99	8	8,09	8,13	8,14
Mukomuko	7,99	8,29	8,3	8,31	8,56	8,57
Lebong	7,9	7,99	8,18	8,24	8,26	8,41
Kepahiang	7,93	8,24	8,29	8,3	8,36	8,37
Bengkulu Tengah	7,22	7,47	7,48	7,49	7,51	7,71
Kota Bengkulu	11,78	11,79	11,8	11,82	11,83	11,84

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 7,22 tahun pada 2019 menjadi 7,71 tahun pada 2024. Meskipun mengalami tren naik, angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 9,04 tahun pada 2024. Bengkulu Tengah juga menempati posisi terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota lain di provinsi ini. Kabupaten seperti Bengkulu Selatan (9,42), Rejang Lebong (8,81), dan Mukomuko (8,57) memiliki capaian RLS yang jauh lebih tinggi, sementara daerah-daerah lain seperti Kaur (8,47), Lebong (8,41), dan Kepahiang (8,37) juga

berada di atas Bengkulu Tengah. Kota Bengkulu, sebagai ibu kota provinsi, mencatat angka tertinggi secara konsisten dengan 11,84 tahun pada 2024.

Rendahnya RLS di Bengkulu Tengah mencerminkan tantangan serius dalam sektor pendidikan, baik dari sisi akses, keberlanjutan pendidikan, maupun kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Kesenjangan ini menjadi perhatian penting dalam RPJMD 2025–2029 untuk mendorong peningkatan pendidikan formal bagi masyarakat dewasa, penguatan infrastruktur pendidikan, serta pemerataan tenaga pendidik guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang akan dijalani oleh anak usia sekolah dengan asumsi pola partisipasi pendidikan saat ini tetap berlangsung. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, HLS menjadi indikator penting dalam mengukur potensi pendidikan generasi mendatang dan merupakan salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingginya angka HLS mencerminkan terbukanya akses pendidikan dan harapan masyarakat terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka, sedangkan rendahnya HLS mengindikasikan masih adanya kendala seperti keterbatasan sarana, kendala ekonomi keluarga, atau tingginya angka putus sekolah.

Dalam konteks RPJMD 2025–2029, peningkatan HLS di Bengkulu Tengah menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Upaya ini perlu diarahkan pada pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok desa, peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah, serta bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Semakin tinggi HLS, semakin besar peluang Bengkulu Tengah menciptakan tenaga kerja terdidik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan sosial.

Tabel II-28. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	13,59	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75
Bengkulu Selatan	13,6	13,61	13,62	13,63	13,65	13,66
Rejang Lebong	13,68	13,83	13,93	14,01	14,19	14,2
Bengkulu Utara	12,86	12,87	12,88	12,89	12,91	12,92
Kaur	12,98	12,99	13,06	13,07	13,14	13,15
Seluma	13,27	13,28	13,29	13,3	13,32	13,33

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mukomuko	12,72	12,73	12,74	12,76	12,86	12,87
Lebong	12,56	12,57	12,58	12,75	12,9	12,91
Kepahiang	12,89	12,9	13,12	13,13	13,14	13,16
Bengkulu Tengah	13,02	13,03	13,28	13,45	13,46	13,47
Kota Bengkulu	16,01	16,02	16,03	16,04	16,06	16,07

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 13,02 tahun pada 2019 menjadi 13,47 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam potensi akses pendidikan jangka panjang bagi generasi muda di daerah tersebut. Meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 13,75 tahun pada 2024, capaian HLS Bengkulu Tengah relatif baik dan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, khususnya jika dibandingkan dengan daerah seperti Mukomuko (12,87), Lebong (12,91), dan Bengkulu Utara (12,92) yang angkanya cenderung stagnan atau meningkat secara perlahan.

Dibandingkan kabupaten lainnya, Bengkulu Tengah berada pada posisi menengah ke atas, mengungguli beberapa wilayah seperti Kaur (13,15), Kepahiang (13,16), dan Seluma (13,33). Sementara itu, Kota Bengkulu mencatat HLS tertinggi secara konsisten dengan 16,07 tahun pada 2024, diikuti oleh Rejang Lebong (14,20) yang juga menunjukkan peningkatan pesat. Dengan pencapaian yang terus membaik, Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, terutama melalui pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan di semua jenjang sekolah.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator strategis yang tersusun dari tujuh komponen utama yang saling terintegrasi dalam membentuk ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Komponen tersebut mencakup pemerataan akses layanan perpustakaan, kelengkapan bahan bacaan, ketersediaan dan kecukupan tenaga perpustakaan, serta tingkat kunjungan masyarakat harian. Selain itu, indikator ini juga menilai jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, dan jumlah anggota aktif perpustakaan. Setiap komponen mencerminkan seberapa besar akses dan pemanfaatan layanan literasi dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, pembangunan literasi masyarakat sebagaimana tercermin dalam capaian IPLM perlu menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat daerah. Keberadaan infrastruktur perpustakaan belum akan optimal tanpa disertai dengan peningkatan kualitas layanan serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada perluasan jangkauan layanan literasi hingga tingkat desa, peningkatan kompetensi pustakawan, serta pengembangan program literasi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Dengan menguatkan ketujuh komponen IPLM secara terpadu, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk membangun budaya literasi yang kuat di tengah masyarakat. Langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi sosial yang positif, memperkuat pendidikan non-formal, serta meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tabel II-29. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Bengkulu Selatan	2023	50,01	0,6667	0,2878	0,147	0,0464	0,3526	1	1
Rejang Lebong		60,77	0,7576	0,2165	0,2311	0,0487	1	1	1
Bengkulu Utara		60,72	0,6102	0,423	0,1569	0,0606	1	1	1
Kaur		70,34	0,5548	0,6684	0,6363	0,064	1	1	1
Seluma		54,45	0,4154	0,2122	0,152	0,032	1	1	1
Mukomuko		57,68	0,488	0,4989		0,0506	1	1	1
Lebong		48,86	0,6076	0,1104		0,0133	0,6891	1	1
Kepahiang		46,88	0,5893	0,0949	0,2922	0,0302	1	1	0,2747
Bengkulu Tengah		60,38	0,4263	0,0975	1	0,0288	0,6742	1	1
Kota Bengkulu		60,53	0,7368	0,1349	0,3313	0,0339	1	1	1
Provinsi Bengkulu		59,83	0,5833	0,2664	0,2952	0,0429	1	1	1
Bengkulu Selatan	2024	62,41	0,7363	0,4059	0,1604	0,0665	1	1	1
Rejang Lebong		62,12	0,7485	0,2506	0,2975	0,052	1	1	1
Bengkulu Utara		31,25	0,6034	0,1983	0,1549	0,1374	1	0,0509	0,0427
Kaur		61,02	0,5307	0,3183	1	0,3741	1	0,0481	1
Seluma		28,18	0,4511	0,0169	0,1511	0,1132	1	0,1999	0,0405
Mukomuko		64,29	0,5558	0,5769	0,3647	1	1	1	0,0028
Lebong		65,27	0,7301	0,4232		0,7153	1	0,6999	1
Kepahiang		51,21	0,6006	0,1808	0,3717	0,0562	1	1	0,3756
Bengkulu Tengah		45,8	0,4463	0,471	1	0,0363	1	0,0797	0,173
Kota Bengkulu		55,33	0,7619	0,1658	0,4794	0,1777	1	1	0,2882
Provinsi Bengkulu		65,96	0,6097	0,2859	0,4734	0,2481	1	1	1

Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, Bengkulu Tengah mencatat nilai IPLM sebesar 60,38, berada di

atas rata-rata provinsi yang saat itu sebesar 59,83. Namun, pada tahun 2024, indeksnya merosot tajam menjadi hanya 45,80, jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang meningkat menjadi 65,96. Penurunan ini menandakan adanya kemunduran dalam pembangunan ekosistem literasi, yang dapat berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Jika ditelaah lebih lanjut, beberapa komponen penyusun IPLM Bengkulu Tengah yang mengalami penurunan atau stagnasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi (dari skor 1 menjadi 0,0797) dan jumlah anggota perpustakaan (dari skor 1 menjadi 0,173). Meskipun rasio ketercukupan tenaga perpustakaan tetap tinggi di angka 1, beberapa komponen lain seperti pemerataan layanan perpustakaan dan kelengkapan koleksi juga masih tergolong rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,4463 dan 0,471 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas dan jangkauan layanan perpustakaan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program literasi berbasis komunitas sebagai bagian dari prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.

4. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator strategis dalam sektor pendidikan yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan formal. APM menunjukkan proporsi anak usia sekolah yang benar-benar sedang bersekolah sesuai jenjang usianya, sedangkan APK mencakup seluruh peserta didik pada jenjang tertentu tanpa memperhitungkan kesesuaian usia. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, kedua indikator ini menjadi acuan penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya dalam hal aksesibilitas, pemerataan, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Kinerja APM dan APK mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Tabel II-30. Angka Partisipasi Murni (APM) Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	99,11	99,19	99,83	99,18	97,75
SMP/MTs	79,97	80,85	80,07	81,34	81,72
SMA/SMK/MA	75,69	75,98	75,72	63,27	63,53

Data Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa pada jenjang SD/MI secara konsisten sangat tinggi, selalu di atas 97%, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 97,75% dari puncaknya 99,83% pada 2022. Hal ini mencerminkan bahwa akses pendidikan dasar di daerah ini relatif merata dan telah menjangkau hampir seluruh anak usia sekolah dasar.

Pada jenjang SMP/MTs, APM menunjukkan tren yang cenderung stabil dan perlahan meningkat, dari 79,97% pada tahun 2020 menjadi 81,72% pada 2024. Sementara itu, APM pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 75,69% pada 2020 menjadi hanya 63,53% pada 2024. Penurunan tajam ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga kelanjutan pendidikan pada jenjang menengah atas, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses, kondisi ekonomi keluarga, atau rendahnya minat melanjutkan sekolah. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam RPJMD untuk memastikan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel II-31. Angka Partisipasi Kasar (APK) Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	112,59	110,79	113,9	109,15	109,53
SMP/MTs	83,76	88,35	94,27	95,02	95,34
SMA/SMK/MA	95,09	93,41	93,87	93,58	89,7

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI, tingkat partisipasi selalu berada di atas 100%, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 113,90%. Hal ini menunjukkan bahwa selain anak usia sekolah dasar, terdapat pula anak usia lebih tua atau lebih muda yang masih bersekolah di jenjang tersebut. Meskipun demikian, tren cenderung menurun, dari 112,59%

pada 2020 menjadi 109,53% pada 2024, yang dapat mengindikasikan mulai terjadinya perbaikan dalam penyesuaian usia sekolah atau adanya pengurangan jumlah murid karena faktor demografi.

Pada jenjang SMP/MTs, APK menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari 83,76% pada tahun 2020 menjadi 95,34% pada 2024, menandakan adanya perluasan akses dan peningkatan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama. Sebaliknya, pada jenjang SMA/SMK/MA terjadi sedikit penurunan, dari 95,09% di tahun 2020 menjadi 89,70% pada tahun 2024. Meskipun angka ini masih tergolong tinggi, penurunan yang konsisten sejak 2022 perlu menjadi perhatian, karena dapat mencerminkan tantangan dalam mempertahankan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya penguatan intervensi kebijakan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK/MA, untuk mendorong partisipasi pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan alat ukur penting untuk menilai kemajuan kebudayaan suatu daerah melalui dimensi seperti keberagaman budaya, literasi, pendidikan, ketahanan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, IPK menjadi acuan dalam menyusun kebijakan berbasis nilai budaya dan sosial yang mencerminkan jati diri masyarakat. Peningkatan IPK mencerminkan keberhasilan pembangunan kebudayaan yang mampu memperkuat identitas lokal sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga seni, tradisi, dan kearifan lokal.

Dalam RPJMD 2025–2029, penguatan IPK di Bengkulu Tengah diarahkan untuk membentuk ekosistem budaya yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Potensi kebudayaan tidak hanya sebagai simbol warisan, tetapi juga sebagai sumber ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat mendorong transformasi budaya menjadi kekuatan pembangunan, melalui pendidikan berbasis budaya, dukungan terhadap pelaku seni, serta penguatan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas. Hal

ini akan memastikan kebudayaan menjadi kekuatan strategis dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkarakter.

Tabel II-32. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023

Tahun	Nasional	Bengkulu
2018	53.74	59.95
2019	55.91	61.13
2020	54.65	56.59
2021	51.90	54.56
2022	55.13	57.28
2023	57.13	61.45

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan dalam IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 6,59% pada tahun 2023, dari 74,44 menjadi 79,35. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan signifikan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian, yang meningkat sebesar 13,80%, dari 30,95 pada tahun 2022 menjadi 35,22 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah guru master yang mendapatkan pelatihan metode pengajaran bahasa daerah juga mengalami peningkatan, dari 252 orang menjadi 260 peserta pelatihan.

Dimensi Pendidikan IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 77,60 poin. Berdasarkan baseline tahun 2018, capaian dimensi ini telah melampaui target tahun 2024 dengan pencapaian sebesar 131,30%. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pendidikan tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun 2023, Bengkulu menjadi salah satu dari 22 provinsi yang mendapatkan program revitalisasi bahasa daerah dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Program ini mencakup pelatihan bagi guru bahasa daerah, kepala sekolah, pengawas, siswa, serta komunitas penutur bahasa daerah. Program revitalisasi ini berfokus pada tiga bahasa lokal, yaitu Enggano, Rejang, dan Bengkulu dialek Serawai. Pelatihan yang diberikan kepada guru master diharapkan dapat diteruskan kepada guru lain dan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah di tingkat kabupaten/kota.

b. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 57,60 menjadi 61,91. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam tiga bulan terakhir, yang meningkat sebesar 29,21%, dari 5,34 pada tahun 2022 menjadi 6,90 pada tahun 2023. Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 29 ribu orang, melampaui target 25 ribu pengunjung. Tren ini terus meningkat pada tahun 2023, dengan jumlah pengunjung mencapai 36 ribu orang, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi.

Dimensi Budaya Literasi IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 66,06 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini telah mencapai 68,26% dari target 2024. Untuk mencapai proyeksi tahun 2024, diperlukan peningkatan skor sebesar 4,15 poin. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu memiliki satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini diimplementasikan melalui Gerakan Satu Desa Satu Perpustakaan. Selain itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk penyediaan bahan bacaan "Pojok Raflesia Kantor Bahasa" di Perpustakaan Bank Indonesia, pojok baca di lobi perpustakaan daerah, serta kegiatan Jambore Literasi.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 75,77 menjadi 76,90. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong, yang naik sebesar 8,83%, dari 29,45 pada tahun 2022 menjadi 32,05 pada tahun 2023. Pemerintah Kota Bengkulu, melalui Rencana Strategis Kecamatan Kampung Melayu 2019-2023, terus mendorong semangat gotong royong dan peran aktif

masyarakat dalam pembangunan melalui program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 81,07 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini masih berada 17,72% di bawah target 2024. Untuk memenuhi target tersebut, skor IPK harus meningkat sebesar 4,17 poin dalam tahun mendatang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong praktik gotong royong secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Gotong royong tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya, tetapi juga meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Tradisi gotong royong tetap dijaga oleh masyarakat Bengkulu, seperti yang terlihat dalam berbagai praktik budaya lokal. Suku Rejang di Bengkulu Utara masih menjalankan tradisi “Bekejai” dalam upacara pernikahan adat kejai, yang bertujuan untuk melestarikan nilai tradisional sekaligus memperkuat persatuan.

Dengan berbagai strategi yang telah diimplementasikan, Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan IPK dalam berbagai dimensi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan bahwa pertumbuhan di setiap dimensi berjalan secara berkelanjutan, guna mencapai target pembangunan kebudayaan baik dalam jangka menengah maupun menuju visi Indonesia Emas 2045.

E. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak-hak anak di suatu wilayah, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap layanan sosial. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, IPA menjadi alat strategis untuk mengevaluasi kualitas perlindungan anak melalui lima dimensi utama: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan. Pendekatan ini memberikan

gambaran menyeluruh terhadap kondisi anak dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Dalam RPJMD 2025–2029, peningkatan IPA menjadi prioritas untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Bengkulu Tengah. Tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kurangnya sistem perlindungan terhadap kekerasan anak, masih perlu diatasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat peran keluarga, meningkatkan layanan dasar yang ramah anak, serta membangun mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan yang efektif. Dengan menjadikan IPA sebagai indikator pembangunan, Bengkulu Tengah dapat memastikan perlindungan anak yang menyeluruh guna membentuk generasi masa depan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Tabel II-33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.

Wilayah	Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Kota Bengkulu	2021	53,650	89,890	75,910	32,530	75,330	66,600
	2022	47,860	88,010	79,730	33,400	73,920	65,560
	2023	44,350	91,310	78,670	32,680	75,870	65,690
Seluma	2021	45,260	82,950	74,450	34,290	73,360	63,020
	2022	52,770	81,010	73,910	33,300	69,580	62,980
	2023	48,130	84,560	79,320	31,180	76,530	64,950
Rejang Lebong	2021	46,280	76,020	68,120	30,970	66,720	58,500
	2022	49,080	73,720	71,190	28,230	64,170	58,050
	2023	45,620	80,810	73,510	30,200	75,280	62,130
Mukomuko	2021	42,930	77,870	77,640	32,600	79,690	63,090
	2022	48,820	79,620	78,310	30,000	78,160	63,970
	2023	52,610	81,370	77,960	31,240	69,550	63,380
Lebong	2021	44,160	59,430	72,670	25,140	76,430	56,330
	2022	50,150	73,630	71,720	31,330	65,150	59,110
	2023	52,580	66,170	71,590	33,030	73,600	60,100
Kepahiang	2021	43,010	73,040	75,710	20,950	70,100	57,490
	2022	49,520	70,780	75,250	29,930	63,870	58,460
	2023	48,350	76,640	74,430	32,210	66,240	60,300
Kaur	2021	44,830	79,810	78,580	30,540	79,840	63,730
	2022	48,320	78,960	80,680	30,330	71,310	62,700
	2023	45,000	74,750	81,140	29,950	75,220	61,990
Bengkulu Utara	2021	44,460	83,960	72,550	27,900	70,760	61,010
	2022	49,910	82,520	73,100	29,960	71,700	62,460
	2023	52,040	92,620	79,780	27,980	74,900	66,660
Bengkulu Tengah	2021	46,500	65,830	74,650	32,160	80,610	60,740
	2022	50,340	77,010	77,440	31,550	72,340	62,540
	2023	50,010	63,890	72,760	30,300	74,210	58,940
Bengkulu Selatan	2021	45,870	85,010	74,000	21,690	66,000	59,620
	2022	51,500	82,230	74,670	32,770	69,050	62,920
	2023	46,160	82,580	76,010	32,190	70,340	62,350

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id/>

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2021–2023, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren yang fluktuatif. IPA Bengkulu Tengah meningkat dari 60,74 pada 2021 menjadi 62,54 pada 2022, namun kembali menurun cukup tajam menjadi 58,94 pada 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya skor pada dimensi D2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) dari 77,01 menjadi 63,89 dan D3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) dari 77,44 menjadi 72,76. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian IPA Bengkulu Tengah pada 2023 termasuk dalam kelompok bawah. Beberapa kabupaten seperti Kota Bengkulu (65,69), Bengkulu Utara (66,66), dan Seluma (64,95) mencatat skor lebih tinggi, sedangkan hanya Lebong (60,10) dan Rejang Lebong (62,13) yang memiliki skor relatif mendekati Bengkulu Tengah.

Dari sisi per dimensi, Bengkulu Tengah masih menunjukkan kekuatan pada dimensi D5 (Perlindungan Khusus) yang berada di angka 74,21 pada 2023, namun tetap memerlukan penguatan signifikan di dimensi D4 (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang) yang menurun menjadi 30,30—salah satu yang terendah di provinsi. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penurunan IPA Bengkulu Tengah menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program perlindungan anak, terutama dalam hal penguatan peran keluarga, pengasuhan yang aman, dan penyediaan ruang edukatif serta rekreatif yang ramah anak. Jika tidak segera diintervensi, penurunan ini berpotensi menghambat upaya pembangunan SDM anak secara berkelanjutan dan menyulitkan pencapaian target RPJMD di bidang perlindungan anak.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator penting untuk menilai kesejahteraan dan ketahanan keluarga melalui berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, tempat tinggal, dan relasi sosial. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, peningkatan IKK menjadi bagian strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga yang memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, serta kondisi ekonomi yang stabil akan lebih siap menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Keluarga yang kuat secara sosial dan ekonomi juga mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM serta menjaga kesehatan keluarga melalui pola hidup bersih dan gizi yang baik.

Peningkatan kualitas keluarga di Bengkulu Tengah juga menuntut pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi yang sehat, mengingat masih terdapat kesenjangan di beberapa wilayah. Selain itu, kekuatan relasi sosial dan budaya gotong royong yang hidup dalam masyarakat perlu terus diperkuat sebagai fondasi ketahanan sosial. Dengan menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, Bengkulu Tengah berpeluang menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tabel II-34. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	85,960	87,570	89,650	90,980
Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	70,040	78,380	82,110	77,650
Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	72,050	72,550	73,440	77,550
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	62,930	64,230	72,110	73,270
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial -Budaya	57,100	58,610	61,100	62,630
Nilai IKK Total	71,170	74,390	77,890	78,140

Data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dengan nilai total IKK naik dari 71,17 pada tahun 2020 menjadi 78,14 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Komponen legalitas-struktur keluarga mencatat nilai tertinggi secara konsisten, mencapai 90,98 pada 2023, menunjukkan bahwa aspek administratif dan struktur keluarga di Bengkulu sudah sangat kuat. Di sisi lain, ketahanan fisik sempat mengalami lonjakan signifikan dari 70,04 pada 2020 ke 82,11 pada 2022, namun sedikit menurun menjadi 77,65 pada 2023, yang mungkin mencerminkan adanya tantangan dalam aspek kesehatan, tempat tinggal, atau akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, ketahanan ekonomi keluarga menunjukkan peningkatan stabil dari 72,05 menjadi 77,55 selama periode empat tahun, mencerminkan perbaikan dalam stabilitas penghasilan dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Ketahanan sosial-psikologi dan sosial-budaya juga menunjukkan pertumbuhan positif—komponen sosial-psikologi meningkat dari 62,93 menjadi 73,27, dan sosial-budaya dari 57,10 menjadi 62,63. Hal ini menandakan perbaikan dalam hubungan antaranggota keluarga, dukungan sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Secara keseluruhan, data ini

menunjukkan bahwa pembangunan berbasis keluarga di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, terus mengalami kemajuan dan harus terus diperkuat agar dapat menjadi fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, IKG menjadi alat ukur strategis dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Nilai IKG yang tinggi mengindikasikan adanya hambatan struktural yang dihadapi perempuan, seperti rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, partisipasi politik yang terbatas, serta kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja.

Dalam RPJMD 2025–2029, pengurangan ketimpangan gender perlu menjadi prioritas pembangunan Bengkulu Tengah. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan, serta penguatan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.

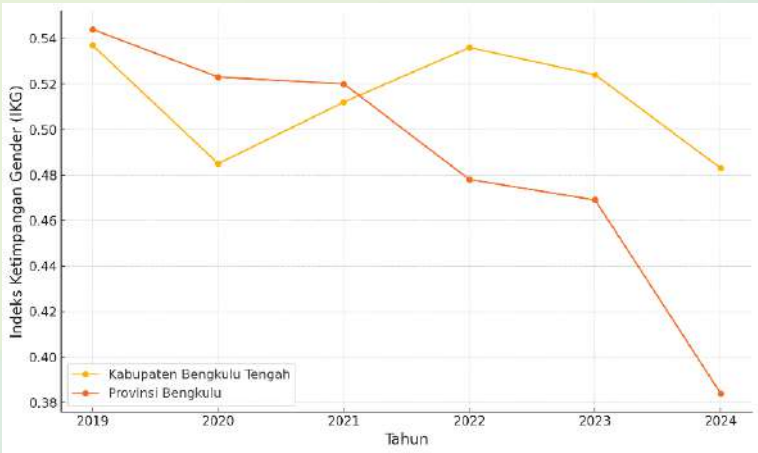
Tabel II-35. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,829	0,827	0,761	0,738	0,784	0,316
Rejang Lebong	0,52	0,469	0,537	0,46	0,45	0,392
Bengkulu Utara	0,588	0,6	0,592	0,538	0,513	0,477
Kaur	0,62	0,555	0,561	0,541	0,547	0,478
Seluma	0,566	0,572	0,541	0,552	0,505	0,493
Mukomuko	0,638	0,633	0,623	0,606	0,604	0,768
Lebong	0,557	0,545	0,474	0,499	0,52	0,432
Kepahiang	0,577	0,529	0,51	0,514	0,515	0,489
Bengkulu Tengah	0,537	0,485	0,512	0,536	0,524	0,483
Kota Bengkulu	0,443	0,412	0,464	0,328	0,319	0,159
Provinsi Bengkulu	0,544	0,523	0,52	0,478	0,469	0,384

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2024 menunjukkan tren penurunan secara umum, yang mencerminkan membaiknya kesetaraan gender di berbagai wilayah. Kabupaten Bengkulu

Tengah mencatat penurunan IKG dari 0,537 pada tahun 2019 menjadi 0,483 pada tahun 2024. Meskipun penurunannya berjalan relatif stabil dibandingkan kabupaten lain, angka ini masih sedikit di atas rata-rata Provinsi Bengkulu yang pada 2024 berada di angka 0,384. Hal ini menandakan bahwa kesenjangan gender di Bengkulu Tengah masih perlu mendapat perhatian lebih serius.



Gambar II-9. Tren Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Bengkulu Tengah berada di posisi menengah. Angkanya lebih baik dari Mukomuko yang pada 2024 justru mengalami lonjakan IKG menjadi 0,768—tertinggi di provinsi—serta lebih baik dari Kaur (0,478) dan Bengkulu Utara (0,477). Namun, Bengkulu Tengah masih tertinggal dari daerah dengan IKG terendah seperti Kota Bengkulu (0,159) dan Rejang Lebong (0,392). Capaian ini menunjukkan perlunya percepatan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses bagi perempuan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peran pengambilan keputusan agar ketimpangan gender di Bengkulu Tengah dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesetaraan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, IPG menjadi alat penting dalam mengevaluasi sejauh mana pembangunan telah memberikan akses dan manfaat yang setara bagi semua kelompok gender. Semakin kecil kesenjangan dalam capaian antara laki-laki dan perempuan, semakin tinggi nilai IPG, mendekati angka ideal 100 yang menandakan kesetaraan gender telah tercapai secara substansial.

Dalam RPJMD 2025–2029, peningkatan IPG perlu menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Dengan memperkuat kesetaraan gender melalui IPG, Bengkulu Tengah dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Tabel II-36. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

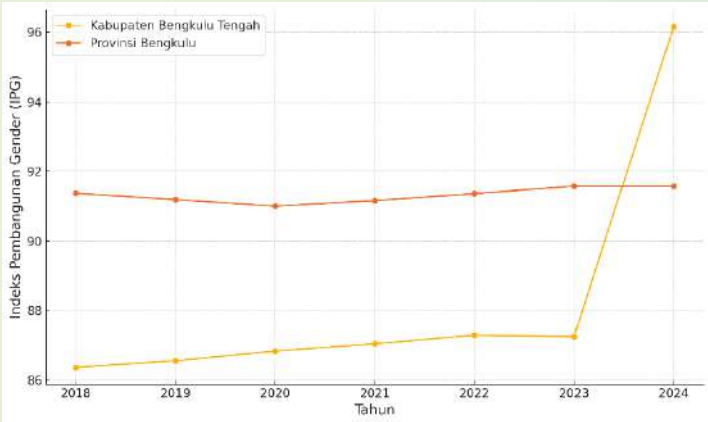
Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	91,37	91,19	91,00	91,16	91,36	91,57	91,89
Bengkulu Selatan	94,08	94,05	94,14	94,31	94,72	94,74	94,89
Rejang Lebong	94,59	94,15	93,78	93,72	93,83	94,24	94,83
Bengkulu Utara	91,19	91,25	91,23	91,39	91,39	91,47	91,81
Kaur	87,20	87,13	87,12	87,17	87,51	87,72	87,83
Seluma	85,28	85,32	85,65	85,93	86,16	86,30	86,48
Mukomuko	84,18	83,95	83,88	84,03	84,22	84,87	85,61
Lebong	90,99	91,49	91,60	91,86	92,19	92,06	92,35
Kepahiang	95,20	95,32	95,80	95,73	96,11	96,01	96,16
Bengkulu Tengah	86,36	86,55	86,83	87,04	87,29	87,25	87,51
Kota Bengkulu	96,55	95,97	95,67	95,77	96,07	96,12	96,13

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Bengkulu tahun 2018–2024 menunjukkan tren peningkatan secara konsisten di sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah. IPG Bengkulu Tengah meningkat dari 86,36 pada tahun 2018 menjadi 87,51 pada tahun 2024. Meskipun mengalami kemajuan, posisi Bengkulu Tengah masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 91,89 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Bengkulu Tengah masih tertinggal dibandingkan dengan capaian provinsi secara umum.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, IPG Bengkulu Tengah berada di posisi menengah bawah. Nilainya lebih tinggi dari Mukomuko (85,61) dan Seluma (86,48), namun masih tertinggal dari kabupaten seperti Bengkulu Selatan (94,89), Rejang Lebong (94,83), dan Lebong (92,35). Sementara itu, Kota Bengkulu dan Kepahiang mencatat IPG tertinggi di provinsi, masing-masing dengan angka 96,13 dan 96,16. Capaian ini menandakan bahwa meskipun Bengkulu Tengah menunjukkan tren positif, masih diperlukan upaya yang lebih

serius dalam memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi perempuan agar pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan gender.



Gambar II-10. Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dan setara dalam berbagai aspek kehidupan publik, khususnya dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Indeks ini mencerminkan tingkat partisipasi dan peran perempuan dalam sektor-sektor strategis, seperti keterlibatan dalam parlemen, jabatan manajerial, serta kontribusi terhadap pendapatan ekonomi. Nilai IPGd yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam memengaruhi arah pembangunan dan kebijakan publik, serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu indikator penting dalam analisis kesetaraan gender, IDG memberikan gambaran mengenai tingkat pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya, tidak hanya dari sisi akses terhadap layanan dasar, tetapi juga dalam peran aktif mereka di ruang-ruang pengambilan keputusan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen RPJMD, IDG menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program tidak hanya responsif terhadap kebutuhan perempuan, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi dan kepemimpinan mereka dalam proses pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel II-37. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu	69,78	70,48	70,22	70,13	70,06	75,69
Bengkulu Selatan	55,2	55,03	54,62	55,63	55,87	60,92
Rejang Lebong	64,71	64,82	65,7	63,57	63,13	64,53
Bengkulu Utara	65,77	62,32	62,52	62,39	61,88	59,07
Kaur	62,13	61,17	61,72	62,29	62,89	71,16
Seluma	65,68	65,6	61,92	62,98	59,07	66,86
Mukomuko	56,78	56,48	56,26	55,42	56,32	51,17
Lebong	67,14	70,74	70,41	74,79	74,25	80,46
Kepahiang	65,09	66,27	66,96	67,12	66,41	55,37
Bengkulu Tengah	76,71	76,78	77,1	76,85	74,93	75,3
Kota Bengkulu	77,58	77,68	77,67	77,54	75,94	76

Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bengkulu Tengah tergolong tinggi dan stabil dalam rentang tahun 2019 hingga 2024. Dengan capaian sebesar 75,30 pada tahun 2024, Bengkulu Tengah mencerminkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam sektor publik dan ekonomi, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari puncak capaian tahun 2021 sebesar 77,10, tingkat pemberdayaan perempuan di daerah ini tetap lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu.

Capaian tersebut menempatkan Bengkulu Tengah di antara wilayah dengan IDG tertinggi, bersaing dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Lebong. Sementara itu, sejumlah daerah seperti Mukomuko dan Bengkulu Selatan mencatat IDG yang jauh lebih rendah, menunjukkan masih terbatasnya peran perempuan dalam pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Keunggulan Bengkulu Tengah dalam indeks ini menunjukkan adanya fondasi sosial dan kelembagaan yang mendukung kesetaraan gender secara substantif, serta menjadi landasan penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kepemimpinan, partisipasi dan keterlibatan, serta gender dan inklusivitas. IPP mencerminkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap layanan dan kesempatan yang diperlukan untuk berkembang secara

optimal sebagai individu produktif dan berdaya saing. Nilai IPP berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi pembangunan pemuda di suatu wilayah.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, IPP memiliki peran penting sebagai tolak ukur kualitas pembangunan sumber daya manusia generasi muda, yang merupakan tulang punggung pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Pemuda merupakan kelompok usia produktif yang sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi sosial, dan transformasi digital di daerah. Oleh karena itu, pembangunan pemuda yang terarah akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pencapaian bonus demografi, dan penguatan ketahanan sosial daerah.

Rendahnya nilai IPP di suatu daerah dapat mencerminkan adanya hambatan dalam akses pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan reproduksi, hingga partisipasi pemuda dalam ruang-ruang publik dan politik. Sebaliknya, tingginya IPP menandakan keberhasilan daerah dalam memfasilitasi tumbuh-kembang pemuda secara seimbang, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan dan inovator dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, peningkatan IPP harus dijadikan salah satu prioritas strategis melalui kebijakan lintas sektor seperti: penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, perluasan layanan kesehatan ramah remaja, penyediaan ruang ekspresi dan kreatifitas pemuda, serta keterlibatan aktif pemuda dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Bengkulu Tengah yang berfokus pada pembangunan manusia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

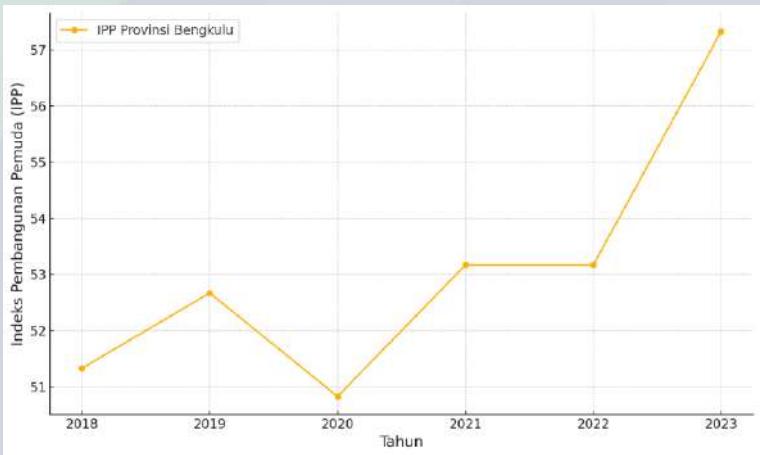
Tabel II-38. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	X1 (Rata-rata lama sekolah)	10,53	10,77	10,87	11,14	11,09	11,22
	X2 (APK Sekolah Menengah)	88,95	91,54	92,7	92,98	92,38	93,85
	X3 (APK Perguruan Tinggi)	38,31	37,63	38,39	38,66	38,15	38,01
	D1	70	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
Kesehatan dan Kesejahteraan	X4 (Angka kesakitan pemuda)	7,21	8,7	8,23	8,61	10,7	6,52
	X5 (Persentase korban kejahatan)	1,31	1,77	1,54	1,18	0,87	0,79
	X6 (Persentase pemuda yang merokok)	29,75	30	29,54	28,21	28,03	27,12
	X7 (Persentase remaja perempuan yang sedang hamil)	16,31	14,94	27,3	23,12	23,12	11,21
	D2	55	50	42,5	52,5	52,5	65
Lapangan dan	X8 (Persentase pemuda wirausaha kerah putih)	0,21	0,32	0,32	0,51	0,56	0,63

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kesempatan Kerja	X9 (Tingkat pengangguran terbuka)	9,96	8,34	9,86	9,67	8,84	9,39
	D3	45	50	45	50	50	55
Partisipasi dan Kepemimpinan	X10 (Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan)	78,65	78,65	78,65	64,8	64,8	65,73
	X11 (Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi)	7,79	7,79	7,79	4,54	4,54	5,88
	X12 (Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat)	9,9	9,9	9,9	5,2	5,2	5,97
	D4	46,67	46,67	46,67	40	40	40
Gender dan Diskriminasi	X13 (Angka perkawinan usia anak)	14,33	13,24	10,68	11,93	11,93	7,01
	X14 (Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas)	45,8	45,81	47,34	48,93	48,93	48,33
	X15 (Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)	15,89	21,29	19,17	19,36	18,85	20,07
	D5	40	43,33	46,67	50	50	53,33
IPP		51,33	52,67	50,83	53,17	53,17	57,33

Sumber: <https://ipp.sarikata.com>

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu tahun 2018–2023 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif. IPP meningkat dari 51,33 pada tahun 2018 menjadi 57,33 pada tahun 2023, menandakan adanya kemajuan dalam pembangunan pemuda di berbagai aspek penting. Salah satu lonjakan paling mencolok terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan (D2), yang naik signifikan dari 52,5 menjadi 65 pada 2023, didorong oleh menurunnya angka kesakitan dan penurunan tajam persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Selain itu, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja (D3) juga mencatat peningkatan dari 45 menjadi 55, yang menunjukkan semakin membaiknya akses pemuda terhadap pekerjaan, meskipun angka pengangguran masih perlu diwaspadai.



Gambar II-11. Tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023

Sementara itu, domain Pendidikan dan Keterampilan (D1) tetap stabil di angka 73,33 sejak 2019, menandakan bahwa capaian pendidikan formal pemuda telah mencapai titik yang cukup tinggi namun belum mengalami peningkatan baru. Di sisi lain, domain Partisipasi dan Kepemimpinan (D4) stagnan di angka 40 sejak 2021, menunjukkan masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam organisasi dan kegiatan sosial. Domain Gender dan Diskriminasi (D5) mencatat peningkatan menjadi 53,33, mencerminkan penurunan angka perkawinan usia anak dan meningkatnya keterlibatan perempuan muda dalam pendidikan dan sektor formal. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu telah mengalami kemajuan dalam pembangunan pemuda, namun masih memerlukan perhatian serius pada aspek partisipasi sosial, kewirausahaan, dan pendidikan tinggi agar potensi generasi muda dapat dimaksimalkan secara optimal.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan wilayah dalam mengelola potensi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem ekonomi secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, penguatan daya saing diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan inovasi, penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru, percepatan transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global.

Selain itu, pembangunan yang merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi makro turut menjadi penyangga dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Seluruh dimensi daya saing ini diukur melalui berbagai indikator sesuai konteks daerah, yang mencerminkan kesiapan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan secara adaptif dan berdaya saing tinggi.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai daya saing sumber daya manusia, khususnya dari sisi struktur demografi dan potensi ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, rasio ketergantungan yang rendah menandakan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif, sehingga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat basis tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi belanja sosial pemerintah. Sebaliknya, angka ketergantungan yang tinggi mengindikasikan beban ekonomi yang lebih besar bagi kelompok usia produktif, yang dapat menghambat akumulasi modal manusia dan menurunkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pemanfaatan potensi usia produktif yang besar harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja. Hal ini penting agar bonus demografi yang tercermin dari rasio ketergantungan rendah benar-benar dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Penguatan sektor pendidikan, pelatihan vokasional, serta penciptaan iklim investasi dan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa struktur penduduk produktif benar-benar mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bengkulu Tengah secara berkelanjutan.

Tabel II-39. Angka Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 & 65+)	Penduduk Usia Produktif (15-64)	Angka Ketergantungan (%)
2020	34.566	82.140	42,08
2021	34.937	83.163	42
2022	35.503	84.311	42,11
2023	36.464	84.675	43,07
2024	37.242	85.431	43,61

Data angka ketergantungan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024 menunjukkan tren kenaikan moderat dalam rasio beban penduduk tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 42,08%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 orang usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 42%,

namun kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 43,61% pada tahun 2024.

Kenaikan angka ketergantungan ini mengindikasikan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif perlahan meningkat, baik karena penambahan jumlah penduduk usia lanjut maupun anak-anak. Kondisi ini perlu dicermati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, karena dapat mempengaruhi struktur pembiayaan publik, seperti alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Strategi pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas dan produktivitas penduduk usia kerja, serta memastikan sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi kelompok tidak produktif agar ketahanan sosial dan ekonomi daerah tetap terjaga.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah selama periode tertentu, yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Industri pengolahan sendiri merupakan sektor ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, mencakup kegiatan seperti produksi makanan dan minuman, tekstil, furnitur, logam, kimia, dan produk industri lainnya. Sektor ini berperan penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), PDRB sektor industri pengolahan menjadi salah satu indikator strategis yang merefleksikan kapasitas daerah dalam mendorong transformasi ekonomi dari sektor primer (seperti pertanian dan perikanan) ke sektor sekunder yang lebih bernilai tambah. Peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB mencerminkan adanya kemajuan dalam hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan daya saing ekonomi lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan beragam. Oleh karena itu, dalam RPJMD Kabupaten, sektor ini perlu mendapat perhatian melalui kebijakan pembangunan kawasan industri, penguatan UMKM berbasis olahan, peningkatan

kualitas SDM industri, serta kemudahan perizinan dan insentif investasi industri lokal.

Tabel II-40. PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	843,80	854,82	871,63	910,85	926,60	954,71
B. Pertambangan dan Penggalian	451,33	418,72	418,57	423,24	455,96	463,79
C. Industri Pengolahan	426,64	418,19	427,22	440,09	446,52	450,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,20	1,34	1,46	1,58	1,64	1,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	3,25	3,32	3,51	3,67	3,90
F. Konstruksi	119,97	130,52	133,80	136,34	143,74	150,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	235,89	228,75	241,36	253,77	261,60	270,34
H. Transportasi dan Pergudangan	34,22	34,97	36,27	38,87	41,41	43,04
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	59,00	58,91	59,52	64,03	70,04	76,37
J. Informasi dan Komunikasi	19,63	20,33	21,67	23,28	25,17	27,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	60,57	71,91	77,15	76,49	72,37	76,35
L. Real Estate	118,32	120,93	121,58	125,84	132,53	138,31
M,N. Jasa Perusahaan	2,55	2,55	2,53	2,81	3,03	3,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428,81	436,24	448,45	449,15	476,27	519,02
P. Jasa Pendidikan	59,52	60,52	61,93	64,66	67,82	71,80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,83	15,35	16,85	17,63	19,11	20,79
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,06	8,05	8,16	8,88	9,77	10,69
Produk Domestik Regional Bruto	2.887,51	2.885,34	2.951,44	3.041,02	3.157,25	3.282,44
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	2.887,51	2.885,34	2.951,44	3.041,02	3.157,25	3.282,44

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren yang relatif stabil, namun pertumbuhannya cenderung lambat dibandingkan sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian. Pada tahun 2019, nilai PDRB sektor ini tercatat sebesar Rp426,64 miliar, dan meningkat menjadi Rp450,23 miliar pada tahun 2024. Ini berarti, dalam kurun waktu lima tahun, sektor industri pengolahan hanya mengalami peningkatan sebesar Rp23,59 miliar atau sekitar 5,53% secara kumulatif.

Jika dilihat dari rasio kontribusi terhadap total PDRB, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 14,8% pada tahun 2019, dan mengalami sedikit penurunan kontribusi menjadi 13,7% pada tahun 2024. Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tidak secepat pertumbuhan total PDRB daerah. Sementara sektor pertanian tetap mendominasi struktur ekonomi Bengkulu Tengah, sektor industri pengolahan belum menunjukkan performa yang cukup signifikan

sebagai penggerak transformasi ekonomi lokal menuju nilai tambah yang lebih tinggi.

Rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih perlu ditingkatkan, baik melalui kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas industri rumah tangga dan UMKM, maupun melalui fasilitasi investasi industri skala kecil dan menengah. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, penguatan sektor ini menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih modern, berbasis nilai tambah, dan membuka lebih banyak lapangan kerja produktif.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam periode 2019 hingga 2024. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan, nilai sektor ini meningkat dari Rp59,00 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp76,37 miliar pada tahun 2024. Dari sisi proporsi terhadap total PDRB, sektor ini menyumbang sekitar 2,04% pada tahun 2019 dan terus naik menjadi sekitar 2,33% pada tahun 2024. Kenaikan nilai dan persentase ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jasa akomodasi dan kuliner di daerah tersebut.

Konsistensi pertumbuhan sektor ini mencerminkan meningkatnya permintaan atas layanan konsumsi, baik oleh masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Beberapa faktor yang berkontribusi dalam peningkatan tersebut antara lain pertumbuhan jumlah UMKM di bidang kuliner, peningkatan kegiatan sosial dan pemerintahan yang mendorong kebutuhan konsumsi, serta bertambahnya kegiatan pariwisata lokal. Selain itu, perbaikan aksesibilitas antarwilayah di Bengkulu Tengah juga turut membuka peluang baru bagi pelaku usaha di bidang ini. Sektor ini dinilai potensial menjadi penggerak ekonomi baru yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan pertumbuhan sektor ini perlu dijaga melalui dukungan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas layanan, pengembangan sumber daya manusia, serta promosi produk-produk kuliner dan jasa penginapan berbasis lokal.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan peran yang semakin penting dalam struktur ekonomi daerah, khususnya sebagai pendorong pertumbuhan berbasis inovasi dan potensi lokal. Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih tergolong moderat, sektor-sektor yang merepresentasikan aktivitas ekonomi kreatif mencatat tren pertumbuhan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Lapangan usaha seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Perusahaan—yang identik dengan subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, media digital, periklanan, pengembangan perangkat lunak, desain, dan jasa konsultasi—mengalami peningkatan signifikan dari sisi output ekonominya.

Pada tahun 2024, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh mencapai Rp76,37 miliar, meningkat sekitar 29% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan serupa terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yang mencapai Rp27,22 miliar, mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan teknologi dan platform digital. Adapun Jasa Perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun masih kecil secara nominal, namun potensial sebagai penunjang produktivitas sektor lainnya. Jika digabungkan, kontribusi ketiga sektor ini terhadap total PDRB Bengkulu Tengah tahun 2024 mencapai lebih dari Rp106 miliar, atau setara dengan $\pm 3,3\%$ dari total PDRB sebesar Rp3.282,44 miliar.

Tren ini menandakan adanya peluang besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara lebih terstruktur. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang meningkat, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Pemerintah daerah melalui RPJMD 2025–2029 perlu menjadikan penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Langkah strategis dapat dilakukan melalui penguatan ekosistem industri kreatif, pengembangan pusat kreatif (creative hub), promosi warisan budaya lokal, digitalisasi UMKM, serta penyelenggaraan festival ekonomi kreatif dan inkubasi bisnis kreatif.

4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas ekonomi daerah, khususnya dalam melihat sejauh mana masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri melalui kegiatan usaha. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, tingginya rasio kewirausahaan mencerminkan dinamika ekonomi yang sehat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor produktif. Oleh karena itu, pemantauan dan peningkatan rasio kewirausahaan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2025–2029.

Hingga saat ini, data resmi mengenai rasio kewirausahaan di Kabupaten Bengkulu Tengah belum tersedia secara spesifik di publikasi BPS maupun dokumen kelembagaan daerah. Namun, estimasi dapat dilakukan dengan merujuk pada data demografi dan statistik Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sebesar 125.260 jiwa, dengan sekitar 66,34 persen di antaranya merupakan kelompok usia produktif (15–59 tahun), atau sekitar 83.097 jiwa. Mengacu pada data rasio wirausaha pemula Provinsi Bengkulu yang mencapai 37,78 persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2024, maka secara kasar jumlah wirausahawan di Bengkulu Tengah dapat diperkirakan berada pada kisaran 31.400 orang.

Estimasi tersebut tentunya belum mencerminkan angka pasti, mengingat karakteristik lokal, distribusi sektor ekonomi, serta tingkat urbanisasi dan akses modal yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mendorong pendataan kewirausahaan secara lebih terstruktur dan menyeluruh di Bengkulu Tengah. Pendataan ini penting untuk merancang intervensi program yang tepat sasaran, baik dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, penyediaan inkubator bisnis, maupun dukungan terhadap wirausaha muda dan perempuan.

Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, upaya peningkatan rasio kewirausahaan dapat diarahkan melalui penguatan ekosistem ekonomi lokal yang berbasis potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi sinergi antar-stakeholder, termasuk dunia pendidikan, pelaku usaha, perbankan, dan komunitas, untuk membentuk rantai nilai kewirausahaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, rasio kewirausahaan di

Bengkulu Tengah tidak hanya dapat ditingkatkan secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dalam menciptakan usaha yang inovatif, berdaya saing, dan inklusif

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator strategis dalam perencanaan pembangunan daerah karena menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Perhitungan TPAK dilakukan dengan membagi jumlah penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja (baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), kemudian dikalikan 100 persen. Dalam konteks ini, TPAK tidak hanya menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial-ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat.

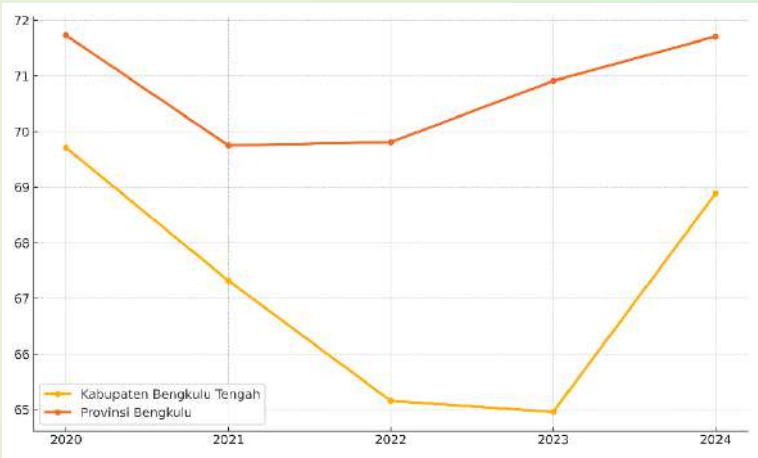
Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, TPAK dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat optimalisasi potensi sumber daya manusia. Jika TPAK tinggi, hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif secara ekonomi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif dan meningkatkan daya saing daerah. Sebaliknya, TPAK yang stagnan atau rendah dapat mengindikasikan adanya kendala struktural seperti rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, atau kurangnya keterampilan tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, upaya peningkatan TPAK melalui pelatihan vokasional, penciptaan iklim investasi yang inklusif, dan penyediaan lapangan kerja produktif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel II-41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	70,11	73,95	75,64	75,95	74,45
Rejang Lebong	77,93	76,09	74,46	77,86	74,92
Bengkulu Utara	72	67,62	67,72	68,6	71,9
Kaur	69,54	69,28	72,22	68,44	71,63
Seluma	76,45	70,13	70,57	73,44	73,45
Mukomuko	65,68	64,11	62,72	67,16	66,46
Lebong	74,38	72,01	72,8	70,23	71,67
Kepahiang	78,99	75,59	74,47	75,73	76,51
Bengkulu Tengah	69,71	67,32	65,16	64,96	68,89

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bengkulu	65,99	65,42	66,29	66,61	68,54
Provinsi Bengkulu	71,73	69,75	69,81	70,91	71,71

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2025



Gambar II-12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Kabupaten Bengkulu Tengah secara konsisten memiliki TPAK yang berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sebesar 69,71 persen, hanya sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar 71,73 persen. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, TPAK Bengkulu Tengah terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah sebesar 64,96 persen pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 tercatat terjadi sedikit peningkatan menjadi 68,89 persen, capaian ini masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 71,71 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, TPAK Kabupaten Bengkulu Tengah menempati posisi yang relatif rendah. Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong secara konsisten menunjukkan tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari 76 persen pada sebagian besar tahun. Sementara itu, Kota Bengkulu, meskipun merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi, mencatat TPAK yang lebih rendah dari Bengkulu Tengah pada tahun-tahun awal, namun pada 2023 dan 2024 berhasil melampaui Bengkulu Tengah. Rendahnya TPAK di Bengkulu Tengah dapat mengindikasikan adanya tantangan struktural, seperti keterbatasan lapangan kerja formal, kurangnya keterampilan kerja, atau masih dominannya sektor informal dan pekerjaan domestik yang belum tercatat sebagai aktivitas ekonomi resmi. Data ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memperkuat strategi pembangunan ketenagakerjaan dan peningkatan

kapasitas tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasional, pemberdayaan UMKM, serta perluasan investasi sektor produktif.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara umum. Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan dalam aspek ini. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023, Kabupaten Bengkulu Tengah meraih skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 40,24 dan masuk dalam kategori “Inovatif”. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mengembangkan ide-ide kreatif guna menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Peningkatan indeks inovasi tersebut juga didorong oleh pertumbuhan inisiatif di berbagai sektor yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dibandingkan tahun sebelumnya, indeks inovasi Bengkulu Tengah tercatat mengalami kenaikan sebesar 22,7 persen, yang merupakan indikasi adanya perbaikan dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan berbasis inovasi. Pemerintah daerah secara aktif melibatkan OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan inovasi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya inovatif di lingkungan birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mencakup penyederhanaan prosedur, penguatan kolaborasi antarinstansi, serta penciptaan program-program yang menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjukkan arah kebijakan yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ke depan, tantangan bagi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah mempertahankan bahkan meningkatkan status sebagai daerah inovatif. Upaya ini memerlukan kesinambungan dalam penguatan kelembagaan, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta ekosistem inovasi yang mendukung sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

Dengan langkah strategis dan kolaboratif, inovasi daerah tidak hanya menjadi simbol capaian administratif, tetapi juga instrumen nyata untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara berkelanjutan.

C. Transformasi Digital

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator komposit yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah. Indeks ini terdiri dari tiga subindeks utama, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian TIK. Ketiganya mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap teknologi, memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kemampuan atau literasi digital yang memadai. Peningkatan IP-TIK menunjukkan bahwa suatu daerah semakin siap menghadapi era digital, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, IP-TIK memiliki relevansi strategis karena berperan sebagai tolok ukur kesiapan daerah dalam menjalankan transformasi digital. Peningkatan indeks ini mendukung pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi digital termasuk UMKM. Selain itu, penguatan dimensi keahlian TIK juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses terhadap pendidikan dan informasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan IP-TIK seharusnya menjadi bagian integral dari arah kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

**Tabel II-42. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tahun Provinsi Bengkulu 2018-2023**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Akses & Infrastruktur	5,5	5,73	5,99	5,89	6,01	6,13
Penggunaan	3,61	4,13	4,58	5,52	5,66	5,74
Keahlian	6,2	6,29	6,37	6,41	6,4	6,45
IP-TIK	4,88	5,2	5,5	5,85	5,95	6,04

Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Nilai IP-TIK meningkat dari 4,88 pada tahun 2018 menjadi

6,04 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh kemajuan di ketiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian. Subindeks keahlian mencatat nilai tertinggi sepanjang periode, mencapai 6,45 pada tahun 2023, menandakan adanya kemajuan dalam kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi. Subindeks penggunaan TIK menunjukkan peningkatan paling signifikan, dari 3,61 di tahun 2018 menjadi 5,74 pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan kesadaran dan adopsi teknologi di kalangan masyarakat.

Peningkatan indeks ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur digital dan penguatan literasi TIK di Bengkulu telah memberikan dampak positif terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi digital. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perencanaan pembangunan ke depan, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029. Dengan mendorong percepatan pembangunan TIK melalui kebijakan yang memperluas akses, meningkatkan penggunaan, dan memperkuat keahlian digital, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, efisiensi pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan pendekatan penting untuk melihat kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. IMDI disusun berdasarkan pengembangan dari G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, dan menjadi kerangka kerja komprehensif dalam mengukur keterampilan digital masyarakat secara objektif dan terstandarisasi.

Kerangka IMDI terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Secara khusus, terdapat empat pilar utama dalam pengukuran IMDI, yaitu:

a. Infrastruktur dan Ekosistem

Pilar ini menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jangkauan, kualitas, dan biaya layanan internet. Pilar ini menekankan pentingnya

pemerataan akses terhadap infrastruktur digital, serta pentingnya keberadaan ekosistem pembelajaran yang mendukung kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

b. Keterampilan Digital

Pilar ini mencakup literasi digital dan keterampilan dasar penggunaan teknologi. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kesetaraan, seperti perbedaan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penguasaan teknologi antar kelompok masyarakat. Pilar ini merujuk pada Digital Literacy Global Framework dari UNESCO sebagai acuan pengembangan indikator.

c. Pemberdayaan

Pilar ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi, baik melalui usaha digital mandiri maupun partisipasi dalam ekonomi berbagi (sharing economy). Akses terhadap platform digital tidak hanya membuka ruang bagi peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

d. Pekerjaan

Pilar ini berfokus pada keterampilan digital yang dibutuhkan dalam dunia kerja, baik saat ini maupun di masa depan. Pengukuran meliputi kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan tugas kerja, serta kesesuaian antara permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Melalui keempat pilar ini, IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital. Bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, penguatan indikator-indikator IMDI menjadi bagian strategis dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berbasis teknologi informasi.

Gambar II-13. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024

Tahun	Kabupaten/ Kota	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	Bengkulu Selatan	36,17	31,65	53,82	20,74	37,83
	Bengkulu Tengah	42,30	36,52	62,38	27,11	42,26
	Bengkulu Utara	33,81	33,85	39,51	22,84	39,3
	Kaur	39,08	33,96	51,04	22,88	47,81
	Kepahiang	45,67	36,71	67,67	27,93	48,89
	Kota Bengkulu	40,99	40,7	59,9	23,38	40,22
	Lebong	41,48	32,43	67,53	25,46	38,89
	Mukomuko	41,09	37,86	56,14	26,89	43,07
	Rejang Lebong	34,31	33,48	42,01	21,35	40,53
	Seluma	43,48	31,49	70,07	27,81	42,36
	Provinsi Bengkulu	39,82	34,86	57,06	24,64	42,12
2023	Bengkulu Selatan	41,88	55,2	50,86	27,01	35,23
	Bengkulu Tengah	46,42	53,95	70,65	24,62	36,01
	Bengkulu Utara	44,65	53,13	63,2	26,58	35,22
	Kaur	45,90	55,24	65,18	27,68	34,23
	Kepahiang	48,45	54,95	71,26	30,24	35,07
	Kota Bengkulu	45,72	56,58	71,35	21,39	32,8
	Lebong	44,59	56,29	62,48	23,98	36,4
	Mukomuko	46,68	53,77	68,75	27,47	35,58
	Rejang Lebong	41,88	53,16	53,17	26,36	35,66
	Seluma	45,93	53,1	70,28	24,81	34,55
	Provinsi Bengkulu	45,21	56,55	58,38	27,51	36,16
2024	Bengkulu Selatan	38,65	51,94	49,73	19,8	36,21
	Bengkulu Tengah	42,18	50,71	59,73	23,1	36,37
	Bengkulu Utara	45,46	54,08	69,21	22,25	37
	Kaur	44,19	49,13	64,13	25,81	38,41
	Kepahiang	47,88	51,01	66,29	32,91	40,82
	Kota Bengkulu	47,25	58,58	63,56	29	37,7
	Lebong	39,78	51,86	54,4	19,15	36,6
	Mukomuko	44,58	50,52	63,25	26,78	38,33
	Rejang Lebong	44,13	54,86	62,56	22,42	38,63
	Seluma	41,60	51,77	58,46	21,62	36,25
	Provinsi Bengkulu	43,57	52,45	61,13	24,28	37,63

Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Selama periode 2022 hingga 2024, perkembangan Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mencatat capaian tertinggi sebesar 46,42 pada tahun 2023, skor IMD Bengkulu Tengah menurun menjadi 42,18 pada tahun 2024. Penurunan ini membuat posisi Bengkulu Tengah berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 43,57 pada tahun yang sama. Padahal pada dua tahun sebelumnya, Kabupaten Bengkulu Tengah masih mampu melampaui capaian provinsi. Jika ditelusuri lebih lanjut, skor masing-masing pilar penyusun indeks pada tahun 2024 juga menunjukkan posisi yang kurang kompetitif. Pilar infrastruktur dan ekosistem digital berada pada angka 50,71 (di bawah provinsi 52,45), pilar keterampilan digital sebesar 59,73 (lebih rendah dari provinsi

61,13), pilar pemberdayaan hanya 23,10 (dibandingkan dengan provinsi 24,28), dan pilar pekerjaan digital sebesar 36,37 (juga di bawah provinsi 37,63).

Capaian ini menandakan bahwa meskipun Bengkulu Tengah sempat menjadi salah satu daerah dengan indeks digital yang relatif baik, kinerjanya mengalami kemunduran pada tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain seperti Kepahiang (47,88), Kota Bengkulu (47,25), dan Bengkulu Utara (45,46), posisi Bengkulu Tengah tampak tertinggal dalam penguatan ekosistem dan kapasitas digital masyarakat. Penurunan paling mencolok terjadi pada pilar keterampilan digital, yang sebelumnya mencapai 70,65 pada 2023, turun drastis menjadi 59,73 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi transformasi digital di Bengkulu Tengah, khususnya dalam hal peningkatan literasi digital, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk pekerjaan dan layanan publik. Tanpa upaya pemulihan yang sistematis, Bengkulu Tengah berisiko tertinggal dalam upaya membangun masyarakat digital yang adaptif dan berdaya saing.

D. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah komponen utama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran, yang mencerminkan investasi atau penambahan aset tetap dalam suatu perekonomian. PMTB mencakup pengeluaran untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan kata lain, PMTB adalah indikator investasi fisik yang menggambarkan seberapa besar pembangunan aset produktif di suatu daerah.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, PMTB berperan strategis sebagai barometer pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan indikator kepercayaan pelaku ekonomi terhadap masa depan wilayah tersebut. Kenaikan nilai PMTB mengindikasikan adanya ekspansi usaha, peningkatan pembangunan infrastruktur, serta adanya investasi baru baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Peningkatan PMTB berarti struktur ekonomi semakin

kokoh karena didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan penyediaan layanan dasar yang memadai.

Untuk menganalisis PMTB secara tepat, penggunaan PDRB atas dasar harga konstan lebih disarankan dibandingkan harga berlaku. Hal ini karena harga konstan menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil atau volume fisik dari investasi yang terjadi. Dengan kata lain, analisis PMTB berdasarkan harga konstan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan investasi fisik dan pembangunan infrastruktur yang sesungguhnya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, jika menggunakan harga berlaku, angka yang dihasilkan masih terpengaruh oleh fluktuasi harga dan inflasi, sehingga lebih cocok untuk menggambarkan struktur ekonomi atau kontribusi sektoral secara nominal.

Sebaliknya, PMTB yang stagnan atau menurun dapat menjadi sinyal perlambatan investasi, ketidakpastian iklim usaha, atau hambatan regulasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menjadikan PMTB sebagai salah satu indikator penting dalam RPJMD untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik, kemudahan investasi, serta transformasi ekonomi jangka panjang. Upaya peningkatan PMTB dapat diarahkan melalui penguatan kemitraan investasi, peningkatan kualitas belanja modal, pembangunan infrastruktur strategis, serta penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif. Dengan demikian, PMTB menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel II-43. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2022-2024

Sektor PDRB Pengeluaran	Tahun	I	II	III	IV	Jumlah
Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	2022	467,73	503,37	485,23	497,51	1953,84
Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)		75,95	89,69	83,99	111,57	361,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		351,21	358,17	363,61	385,05	1458,05
Lainnya		-163,01	-177,29	-164,57	-227,21	-732,08
Produk Domestik Regional Bruto		731,88	773,95	768,27	766,93	3041,02
Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	2023	490,34	526,67	506,42	524,33	2047,76
Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)		77,74	99,17	89,18	117,5	383,6
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		363,24	364,66	381,97	390,89	1500,75
Lainnya		-172,59	-191,3	-185,77	-225,2	-774,86
Produk Domestik Regional Bruto		758,73	799,2	791,81	807,52	3157,25
Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	2024	517,68	552,97	531,62	552,02	2154,29
Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)		92,48	103,76	94,76	123,24	414,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		365,64	370,46	398,54	406,17	1540,81

Sektor PDRB Pengeluaran	Tahun	I	II	III	IV	Jumlah
Lainnya		-177,68	-219,32	-208,07	-221,81	-826,89
Produk Domestik Regional Bruto		798,11	807,87	816,85	859,62	3282,44

Pada tahun 2022, nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Bengkulu Tengah tercatat sebesar Rp1.458,05 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1.500,75 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp1.540,81 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan investasi tetap yang cukup stabil dengan rata-rata kenaikan tahunan sekitar 2,8%. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas pembangunan fisik dan pengadaan aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, serta alat produksi yang terus berlangsung dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika dilihat per triwulan, PMTB cenderung meningkat dari triwulan I hingga IV setiap tahunnya. Pada tahun 2024, PMTB triwulan I sebesar Rp365,64 miliar dan meningkat menjadi Rp406,17 miliar di triwulan IV. Pola serupa juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan signifikan pada triwulan akhir mengindikasikan bahwa realisasi investasi pemerintah dan swasta lebih intensif menjelang penutupan tahun anggaran. Hal ini dapat diasumsikan sebagai dampak dari percepatan belanja modal daerah serta penyelesaian proyek infrastruktur yang umumnya dirampungkan menjelang akhir tahun fiskal.

Pertumbuhan PMTB ini turut mendorong peningkatan kapasitas produksi dan memperkuat basis ekonomi jangka menengah. Oleh karena itu, untuk periode RPJMD selanjutnya, penting bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk terus mendorong investasi sektor produktif dan memprioritaskan pembangunan yang mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, seperti infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang sektor unggulan daerah. Optimalisasi belanja modal dan kemitraan investasi di sektor-sektor strategis akan berperan penting dalam menjaga pertumbuhan PMTB dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.

E. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur/Indeks Keseimbangan Layanan Infrastruktur

Meskipun data resmi mengenai Indeks Infrastruktur atau Indeks Keseimbangan Layanan Infrastruktur (IKLI) untuk Kabupaten Bengkulu Tengah belum tersedia secara publik, berbagai kebijakan dan alokasi anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat terhadap

pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan dana sebesar Rp184,2 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Anggaran tersebut difokuskan pada perbaikan sejumlah ruas jalan strategis, rehabilitasi fasilitas pendidikan, serta pembaruan data irigasi. Empat ruas jalan utama yang mendapat perhatian adalah Jalan Lubuk Sini–Batas Bengkulu Utara, Jalan Padang Betuah–Perbo, Jalan Kelindang–Susup, dan Jalan Tugu Hiu–Simpang Tahura–Simpang Kroya, yang semuanya memiliki peran penting dalam konektivitas wilayah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga memanfaatkan hasil efisiensi anggaran dengan mengalokasikan Rp51 miliar untuk membiayai perbaikan 22 ruas jalan dan dua jembatan di berbagai kecamatan. Langkah ini menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan infrastruktur bagi masyarakat secara merata, termasuk wilayah pedesaan. Meskipun belum tersaji dalam bentuk indeks kuantitatif seperti IKLI, berbagai kebijakan dan proyek infrastruktur tersebut memberikan gambaran nyata tentang arah pembangunan daerah yang bertumpu pada peningkatan konektivitas, pemerataan layanan dasar, dan penguatan struktur ekonomi wilayah. Oleh karena itu, aspek pembangunan infrastruktur ini patut menjadi bagian penting dalam perumusan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, terutama dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antarkawasan.

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan umum, khususnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jalan yang mantap dan terhubung dengan baik menjadi prasyarat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi jalan menjadi bagian krusial dalam perencanaan pembangunan daerah, guna memastikan infrastruktur transportasi darat mampu menjawab kebutuhan mobilitas penduduk dan mendukung penguatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel II-44. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	202,04	166,99	166,99	169,65	185,82
Sedang	73,4	90,5	90,5	123,28	31,14
Rusak	55,82	65,86	65,86	33,35	17,1
Rusak Berat	82,4	90,3	90,3	87,37	186,86
Jumlah	413,66	413,65	413,65	413,65	420,91

menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada perubahan kualitas infrastruktur jalan. Pada tahun 2020, panjang jalan dalam kondisi baik tercatat sebesar 202,04 km, namun mengalami penurunan drastis menjadi 166,99 km pada tahun 2021 dan stagnan hingga 2022. Baru pada tahun 2023 dan 2024 terlihat ada upaya perbaikan dengan peningkatan panjang jalan baik menjadi 169,65 km dan 185,82 km. Sebaliknya, jalan dalam kondisi sedang meningkat dari 73,4 km di tahun 2020 menjadi puncaknya 123,28 km di tahun 2023, namun justru turun tajam menjadi hanya 31,14 km di tahun 2024. Ini menunjukkan adanya pergeseran klasifikasi jalan, kemungkinan karena perbaikan jalan yang berhasil meningkatkan kondisi menjadi “baik” atau, sebaliknya, jalan menurun kualitasnya menjadi “rusak berat”.

Tren paling mencolok terlihat pada kategori “rusak berat”. Pada tahun 2020, panjang jalan rusak berat adalah 82,4 km, naik menjadi 90,3 km pada 2021 dan stagnan di 2022. Meskipun sempat menurun menjadi 87,37 km pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2024 menjadi 186,86 km atau hampir 45% dari total panjang jalan tahun tersebut. Di sisi lain, jalan dalam kondisi “rusak” menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 55,82 km di tahun 2020 menjadi hanya 17,1 km di tahun 2024. Kondisi ini dapat diartikan sebagai hasil dari perbaikan jalan menjadi lebih baik atau memburuk menjadi “rusak berat”. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik pada 2024, lonjakan jalan rusak berat menunjukkan tantangan besar yang perlu segera ditangani untuk menjamin keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan masyarakat, karena mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar tempat tinggal yang aman, sehat, dan memadai. Hunian layak mencakup aspek fisik bangunan, kecukupan ruang, akses terhadap

air bersih, sanitasi yang memadai, pencahayaan, ventilasi, serta ketahanan terhadap cuaca dan risiko bencana. Di samping itu, hunian yang layak juga menyangkut aspek non-fisik seperti keamanan, kenyamanan lingkungan, dan keterjangkauan terhadap layanan dasar seperti listrik, jalan, serta fasilitas umum lainnya.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, peningkatan akses terhadap hunian layak menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam RPJMD 2025–2029. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih berkembang dan memiliki tantangan geografis, terutama di kawasan pedesaan dan perbukitan, banyak rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal sesuai standar kelayakan. Penyediaan hunian layak yang terjangkau dan merata tidak hanya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi kunci dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, penurunan kemiskinan, serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah.

Tabel II-45. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen)

2020	2021	2022	2023	2024
47,94	51,36	54,98	54,74	56,52

Berdasarkan data Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup positif. Pada tahun 2020, hanya sekitar 47,94% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, namun angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 56,52% pada tahun 2024. Meskipun sempat sedikit menurun dari 54,98% pada tahun 2022 menjadi 54,74% di tahun 2023, tren secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang konsisten.

Kenaikan hampir 9 poin persentase dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas tempat tinggal telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas akses terhadap hunian yang layak, termasuk melalui intervensi perbaikan rumah tidak layak huni, pengembangan kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih,

sanitasi, dan listrik. Namun demikian, masih terdapat lebih dari 40% rumah tangga yang belum memiliki hunian sesuai standar kelayakan, yang menandakan perlunya kebijakan yang lebih agresif dan terintegrasi ke depan.

3. Persentase Desa Mandiri

Status Desa Mandiri merupakan pencapaian tertinggi dalam klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang menggambarkan kapasitas pembangunan desa dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, desa dengan status Mandiri menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai, pelayanan publik yang berjalan baik, partisipasi masyarakat yang aktif, serta kegiatan ekonomi yang tumbuh secara berkelanjutan. Desa Mandiri juga mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang kuat dan kemampuan dalam mengelola potensi serta menghadapi tantangan secara mandiri.

Dalam sistem IDM, terdapat lima tingkatan desa: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Desa Mandiri berada pada posisi tertinggi, sedangkan desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal masih menghadapi persoalan fundamental seperti akses infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, upaya sistematis untuk mengurangi jumlah desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, serta mendorong desa Berkembang menjadi Maju dan Mandiri, harus menjadi prioritas utama. Langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Percepatan peningkatan status desa di Bengkulu Tengah dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Perbaikan status IDM tidak hanya menjadi indikator kemajuan pembangunan pedesaan, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka kemiskinan, serta pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah.

Tabel II-46. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM
Bengkulu Selatan	0.6575	Berkembang	0,6749	Berkembang	0,7011	Berkembang	0,7161	Maju	0,7411	Maju
Rejang Lebong	0.6212	Berkembang	0,6461	Berkembang	0,6749	Berkembang	0,6909	Berkembang	0,7066	Berkembang
Bengkulu Utara	0.6627	Berkembang	0,6749	Berkembang	0,6925	Berkembang	0,7008	Berkembang	0,7187	Maju
Kaur	0.6341	Berkembang	0,6504	Berkembang	0,6659	Berkembang	0,6913	Berkembang	0,7092	Maju
Seluma	0.6235	Berkembang	0,6404	Berkembang	0,6531	Berkembang	0,6656	Berkembang	0,6796	Berkembang
Mukomuko	0.6820	Berkembang	0,6924	Berkembang	0,7018	Berkembang	0,7266	Maju	0,7485	Maju
Lebong	0.6190	Berkembang	0,6295	Berkembang	0,6469	Berkembang	0,666	Berkembang	0,6864	Berkembang
Kepahiang	0.6440	Berkembang	0,6518	Berkembang	0,669	Berkembang	0,6864	Berkembang	0,7106	Maju
Bengkulu Tengah	0.6160	Berkembang	0,6266	Berkembang	0,6563	Berkembang	0,6901	Berkembang	0,7104	Maju
Kota Bengkulu			0,7123	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju
Provinsi Bengkulu	0.6417	Berkembang	0,6559	Berkembang	0,6748	Berkembang	0,6935	Berkembang	0,7176	Maju

Berdasarkan perkembangan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan kemajuan yang konsisten dan signifikan dalam pembangunan desa. Nilai IDM Bengkulu Tengah meningkat dari 0,6160 pada tahun 2020 menjadi 0,7104 pada tahun 2024, yang mengubah statusnya dari “Berkembang” menjadi “Maju”. Perubahan status ini merupakan pencapaian penting karena mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan desa secara menyeluruh dalam lima tahun terakhir.

Kenaikan nilai IDM ini sejalan dengan perbaikan dalam berbagai aspek yang menjadi komponen penilaian IDM, seperti aspek sosial (akses terhadap pendidikan dan kesehatan), aspek ekonomi (tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif), serta aspek lingkungan (ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar desa). Peningkatan yang cukup tajam dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa program pembangunan desa telah mulai memberikan dampak nyata, baik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan desa maupun melalui distribusi pembangunan yang lebih merata ke desa-desa di wilayah kecamatan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu, capaian Bengkulu Tengah pada tahun 2024 telah sejajar dengan Kabupaten Kepahiang, dan mendekati angka yang dicapai oleh Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu yang konsisten berada dalam kategori “Maju”. Hal ini menandakan bahwa Bengkulu Tengah telah berada pada jalur yang benar menuju pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pencapaian status “Maju” ini harus menjadi titik tolak untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dalam RPJMD 2025–2029. Strategi ke depan perlu difokuskan pada pemerataan kemajuan antar desa, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, penguatan ketahanan ekonomi desa, serta akselerasi transformasi menuju desa mandiri. Keberhasilan mempertahankan dan meningkatkan status IDM secara berkelanjutan akan menjadi indikator penting dalam mendorong kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh di Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan penduduk dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mencerminkan sejauh mana layanan dasar telah tersedia dan merata di seluruh wilayah. Sanitasi yang baik tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka penyakit menular berbasis lingkungan, tetapi juga mendukung tumbuhnya masyarakat yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, analisis terhadap capaian dan dinamika akses sanitasi layak menjadi krusial dalam RPJMD sebagai dasar penetapan strategi, kebijakan, serta intervensi pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan ke depan.

Tabel II-47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten dan Kota di Provinsi Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,02	74,73	84,09	83,81	84,42
Rejang Lebong	70,02	71,5	70,3	64,41	71,81
Bengkulu Utara	79,23	83,37	83,43	82,44	85,53
Kaur	78,21	81,23	82,14	83,4	84,63
Seluma	76,96	80,84	81,66	81,77	85,75
Mukomuko	81,04	86,78	79,12	90,84	88,61
Lebong	66,8	51,55	59,12	65,23	59,49
Kepahiang	65,95	66,89	68,54	70,55	72,55
Bengkulu Tengah	85,44	74,05	75,45	78,9	81,37
Kota Bengkulu	95,71	97,49	94,99	93,94	96,15
Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28	83,01

Data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Bengkulu Tengah mencatat angka tertinggi di antara

kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 85,44%, jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya mencapai 78,10%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 74,05%, kemudian perlahan meningkat kembali menjadi 75,45% pada 2022, 78,90% pada 2023, dan mencapai 81,37% pada 2024. Sementara itu, rata-rata provinsi menunjukkan tren yang lebih stabil dan cenderung meningkat, dari 78,10% di tahun 2020 menjadi 83,01% pada 2024. Meskipun Bengkulu Tengah memulai periode ini dengan capaian yang sangat baik, keunggulan tersebut sempat hilang di tengah periode akibat penurunan signifikan pada 2021. Namun, dengan tren pemulihan yang terlihat hingga 2024, Bengkulu Tengah masih berada sedikit di bawah capaian rata-rata provinsi dan menunjukkan potensi untuk kembali menjadi salah satu daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi di Bengkulu jika upaya perbaikan terus dilakukan secara konsisten.

F. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Rasio ini dihitung dengan membagi total penerimaan pajak daerah dengan nilai PDRB (biasanya atas dasar harga konstan atau berlaku), kemudian dikalikan 100 untuk memperoleh persentase. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskalnya secara mandiri dari kegiatan ekonomi lokal.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah, rasio ini memiliki arti strategis sebagai salah satu ukuran kemandirian fiskal daerah. Kinerja rasio pajak daerah terhadap PDRB mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Jika rasio rendah atau menurun, itu berarti potensi penerimaan daerah belum tergarap secara maksimal, meskipun aktivitas ekonomi tumbuh. Hal ini bisa menjadi sinyal adanya kelemahan dalam sistem pemungutan, basis pajak yang sempit, atau masih kuatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dengan demikian, memasukkan indikator ini ke dalam RPJMD penting sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menjadikan rasio ini sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kapasitas aparatur pajak, penguatan sistem digitalisasi layanan perpajakan, serta perluasan basis objek dan subjek pajak. Dalam jangka menengah, meningkatnya rasio pajak terhadap PDRB akan memperbesar ruang fiskal daerah untuk membiayai program-program pembangunan prioritas secara lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel II-48. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PDRB ADHB (Rp)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	8.152.473.240	5.049.345.000.000	0,16
2021	8.960.404.405	5.165.020.000.000	0,17
2022	10.479.659.866	5.321.785.000.000	0,20
2023	11.584.996.312	5.525.187.500.000	0,21
2024	19.674.487.751	11.868.325.000.000	0,17

Jika ditinjau secara lebih mendalam, rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara nominal, namun masih berada pada level yang sangat rendah secara persentase, sehingga mencerminkan adanya ketimpangan antara aktivitas ekonomi yang terjadi dengan kontribusi fiskal yang dihasilkan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak daerah sebesar Rp8,15 miliar, dengan PDRB harga konstan sebesar Rp2.885,34 miliar, sehingga menghasilkan rasio pajak daerah terhadap PDRB hanya sekitar 0,28%. Meski nilai pajak meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024 menjadi Rp19,67 miliar, lonjakan PDRB ke Rp6.781,90 miliar menjadikan rasio tersebut hanya naik sedikit ke sekitar 0,29%. Dengan kata lain, pertumbuhan pajak daerah tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rasio yang masih berada di bawah 1% ini merupakan indikator rendahnya efektivitas pemanfaatan potensi ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah. Padahal, struktur ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah didominasi oleh sektor-sektor yang relatif memiliki basis pajak yang kuat, seperti perdagangan, pertambangan, pertanian, konstruksi, dan real estat, namun kontribusi fiskalnya masih belum optimal. Kemungkinan penyebabnya antara lain adalah masih

sempitnya basis objek pajak, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, kelemahan dalam sistem pemungutan, serta minimnya digitalisasi dan integrasi data perpajakan daerah.

Dalam perspektif penguatan fiskal jangka menengah, situasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki ruang yang luas untuk meningkatkan PAD melalui penguatan sistem perpajakan daerah. Strategi ini dapat ditempuh melalui optimalisasi pajak eksisting seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak penerangan jalan, dan juga dengan menggali potensi pajak baru yang sesuai kewenangan daerah. Di sisi lain, penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pajak, memperluas sistem pelaporan digital, memperkuat basis data pajak yang terintegrasi, serta mendorong edukasi dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB perlu dijadikan sebagai indikator target kinerja kemandirian fiskal, yang menunjukkan sejauh mana pembangunan ekonomi daerah benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kapasitas pembiayaan daerah. Target rasio minimal 1% dapat dijadikan acuan awal sebagai langkah menuju struktur APBD yang lebih sehat dan mandiri. Jika upaya ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, maka Kabupaten Bengkulu Tengah akan memiliki ketahanan fiskal yang lebih kuat dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah indikator ekonomi yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi umumnya diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dan mencerminkan tekanan harga yang dirasakan langsung oleh rumah tangga. Inflasi dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun faktor struktural seperti distribusi barang dan efisiensi logistik. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat menggerus daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan memperbesar beban kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, inflasi yang stabil dan terkendali merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya kestabilan ekonomi daerah. Hingga saat ini, Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki data inflasi tersendiri yang dihitung

oleh BPS karena wilayah ini belum ditetapkan sebagai kota IHK. Oleh sebab itu, dalam dokumen perencanaan ini digunakan data inflasi Kota Bengkulu sebagai pendekatan atau proxy, mengingat tingginya keterkaitan ekonomi, arus barang, dan konsumsi masyarakat antara Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, tingkat inflasi memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai aspek strategis. Inflasi memengaruhi daya beli, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penting diperhitungkan dalam penetapan sasaran pembangunan, khususnya dalam target pertumbuhan ekonomi riil dan proyeksi pendapatan daerah. Selain itu, inflasi juga berpengaruh terhadap efisiensi anggaran, terutama dalam penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran. Pengendalian inflasi menjadi bagian dari strategi pembangunan melalui penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pengembangan sentra produksi pangan, serta peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, stabilitas harga bukan hanya menjadi indikator ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel II-49. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,99	0,88	0,14	0,39	0,54	0,62
Februari	-0,3	-0,28	0,09	0,14	-0,1	0,04
Maret	0,37	-0,23	-0,02	0,23	0,74	0,25
April	0,26	0,54	-0,35	0,1	1,45	0,28
Mei	0,32	1,11	0,41	0,11	0,53	0,17
Juni	0,81	0,76	0,04	0,31	0,6	0,21
Juli	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91	0,49
Agustus	-1,8	0,86	-0,22	0,16	-0,24	-0,07
September	0,59	0,64	0,08	0,17	1,22	0,23
Oktober	-0,74	0,56	0,02	-0,02	-0,14	0,28
November	0,2	0,27	0,35	0,52	0,05	0,3
Desember	0,79	0,59	0,14	0,39	0,23	0,24
Tahunan	2,35	2,91	0,89	2,42	5,92	3,09

Selama periode 2018 hingga 2023, tingkat inflasi Kota Bengkulu mengalami fluktuasi tahunan dengan pola yang mencerminkan dinamika ekonomi regional dan nasional. Inflasi tahunan terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,89%, dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Sebaliknya, puncak inflasi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,92%, sejalan dengan

tren inflasi global akibat krisis energi dan terganggunya rantai pasok pangan. Rata-rata inflasi tahunan dalam enam tahun terakhir berada pada kisaran 2,76%, yang menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dan terkendali.

Meskipun Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki data inflasi tersendiri karena bukan wilayah penghitungan IHK oleh BPS, kondisi inflasi di Kota Bengkulu dapat digunakan sebagai pendekatan (proxy) yang relevan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah secara spasial dan ekonomi sangat bergantung pada Kota Bengkulu, baik sebagai pusat distribusi barang maupun sebagai pasar konsumsi utama. Arus barang kebutuhan pokok, jasa, serta aktivitas perdagangan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari Bengkulu Tengah sebagian besar melalui Kota Bengkulu. Oleh karena itu, dinamika inflasi di Kota Bengkulu mencerminkan tekanan harga yang juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, pemahaman terhadap tren inflasi ini menjadi penting sebagai dasar perencanaan pertumbuhan ekonomi riil, perumusan strategi pengendalian harga, serta perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penguatan reformasi hukum di daerah sangat diperlukan untuk mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat pelayanan publik berbasis kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, pelaksanaan reformasi hukum menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Reformasi ini mencakup

pembenahan regulasi, penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta pemberantasan praktik hukum yang diskriminatif atau koruptif. Oleh karena itu, pencapaian Indeks Reformasi Hukum di daerah menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan transformasi tata kelola hukum sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar II-14. Indeks Reformasi Hukum 2024

Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
Muko-Muko	98,58	AA / Istimewa
Kota Bengkulu	96,18	AA / Istimewa
Provinsi Bengkulu	87,66	A / Sangat Baik
Bengkulu Selatan	87,32	A / Sangat Baik
Seluma	86,78	A / Sangat Baik
Kepahiang	77,3	BB / Baik
Rejang Lebong	76,86	BB / Baik
Bengkulu Utara	76,66	BB / Baik
Bengkulu Tengah	67,9	B / Cukup Baik
Kaur	66,58	B / Cukup Baik
Lebong	66,24	B / Cukup Baik

Sumber: <https://bengkulu.kemenkum.go.id/>

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 67,90, yang menempatkan daerah ini pada kategori B atau Cukup Baik. Capaian ini merupakan yang ketiga terendah di Provinsi Bengkulu, hanya sedikit di atas Kabupaten Kaur (66,58) dan Kabupaten Lebong (66,24). Jika dibandingkan dengan rerata provinsi yang mencapai skor 87,66 dengan predikat A (Sangat Baik), posisi Bengkulu Tengah masih jauh tertinggal. Bahkan sejumlah kabupaten/kota seperti Mukomuko dan Kota Bengkulu berhasil meraih predikat AA (Istimewa) dengan skor masing-masing 98,58 dan 96,18. Sementara itu, sebagian besar kabupaten lainnya telah mencapai kategori BB (Baik), seperti Kepahiang (77,30), Rejang Lebong (76,86), dan Bengkulu Utara (76,66).

Posisi Bengkulu Tengah dalam kategori “cukup baik” menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan mendasar dalam pelaksanaan reformasi hukum di daerah ini. Rendahnya skor ini dapat mencerminkan lemahnya tata kelola regulasi, terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan, dan kurang optimalnya kualitas pelayanan hukum. Untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum ke depan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan hukum, mendorong transparansi dalam proses regulasi, serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Tanpa langkah perbaikan yang

terukur, Bengkulu Tengah berisiko terus tertinggal dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang adil, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pemerintahan digital pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan internal, manajemen layanan, infrastruktur digital, hingga kualitas layanan publik berbasis elektronik. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks SPBE memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik, kecepatan pengambilan keputusan, serta efisiensi penggunaan sumber daya daerah. Daerah yang memiliki indeks SPBE tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat mempercepat layanan, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pemerintahan. Dengan kata lain, implementasi SPBE yang baik dapat memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelayanan yang lebih cepat dan transparan.

Lebih jauh, penerapan SPBE yang optimal juga dapat membantu pemerintah daerah seperti Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang bersifat geografis maupun demografis, misalnya dengan menyediakan platform pelayanan publik daring di wilayah terpencil. Selain itu, SPBE juga menjadi salah satu indikator dalam transformasi digital nasional, sehingga pencapaiannya akan berkontribusi pada integrasi dan harmonisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, peningkatan nilai SPBE harus menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel II-50. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Nama Instansi	2021		2022		2023		2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Provinsi Bengkulu	2,79	Baik	3.14	Baik	3,12	Baik	3,92	Sangat Baik
Bengkulu Utara	1,44	Kurang	2.20	Cukup	2,9	Baik	3,28	Baik
Bengkulu Selatan	1,96	Cukup	2.34	Cukup	2,45	Cukup	2,87	Baik
Rejang Lebong	1,84	Cukup	2.80	Baik	3,23	Baik	3,24	Baik
Kaur			1.27	Kurang	2,24	Cukup	2,42	Cukup
Seluma	1,41	Kurang	2.57	Cukup	2,54	Cukup	2,26	Cukup
Mukomuko	1,74	Kurang	2.06	Cukup	2,07	Cukup	2,07	Cukup
Kepahiang	1,94	Cukup	2.13	Cukup	2,28	Cukup	2,47	Cukup
Lebong	1,55	Kurang	1.55	Kurang	2,93	Baik	3,38	Baik
Bengkulu Tengah	1,29	Kurang	2.37	Cukup	2,55	Cukup	2,84	Baik
Kota Bengkulu	1,68	Kurang	2.22	Cukup	2,61	Baik	2,63	Baik

Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat peningkatan nilai indeks SPBE dari 1,29 (predikat Kurang) pada 2021 menjadi 2,84 (predikat Baik) pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,55 poin dalam empat tahun terakhir. Dibandingkan dengan kabupaten lain, peningkatan Bengkulu Tengah termasuk signifikan, meskipun pada 2024 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai nilai 3,92 (predikat Sangat Baik).

Beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong dan Lebong juga mencatat indeks tinggi pada 2024, masing-masing 3,24 dan 3,38, keduanya dengan predikat Baik. Kota Bengkulu stagnan di kisaran 2,6 dan tidak mengalami peningkatan berarti. Sementara Kabupaten Kaur berada pada posisi yang relatif rendah dengan nilai indeks 2,42 (Cukup) di tahun 2024, setelah memulai dari 1,27 (Kurang) pada 2021. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, Bengkulu Tengah berada pada posisi menengah atas dan menjadi salah satu daerah dengan laju peningkatan indeks SPBE yang stabil dan konsisten.

3. Indeks Pelayanan Publik

Sistem zonasi penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI kini menggunakan klasifikasi yang lebih rinci berbasis interval nilai dan kategori kualitas dengan pendekatan “lampu lalu lintas.” Zona Hijau terdiri dari Kategori A (88,00–100) untuk Kualitas Tertinggi dan Kategori B (78,00–87,99) untuk Kualitas Tinggi. Zona Kuning (Kategori C: 54,00–77,99) menunjukkan Kualitas Sedang, sedangkan Zona Merah dibagi dalam Kategori D (32,00–53,99) dan E (0–31,99) sebagai Kualitas Rendah dan Terendah, yang mengindikasikan perlunya perbaikan serius.

Bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, sistem ini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang berlaku. Selain menjadi dasar perbaikan layanan, hasil penilaian juga digunakan untuk pemberian insentif atau penghargaan serta sebagai tolok ukur akuntabilitas birokrasi di mata masyarakat. Dengan implementasi sistem zonasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mendorong pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.

Tabel II-51. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Kaur	57,99	89,01	96,14	96,14
Bengkulu Selatan	72,21	84,48	95,57	95,27
Rejang Lebong	65,99	83,05	93,76	93,07
Lebong	97,65	84,23	93,07	93,76
Kepahiang	88,74	85,97	92,72	92,72
Bengkulu Tengah	51,05	64,89	91,33	91,33
Kota Bengkulu	89,05	83,21	90,47	90,74
Seluma	62,71	85,51	89,1	89,61
Bengkulu Utara	83,51	78,56	88,34	88,34
Mukomuko	54,79	60,35	90,02	90,64
Provinsi Bengkulu	91,91	80,2	87,05	88,3

Berdasarkan data Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Bengkulu tahun 2021–2024, Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, nilai kepatuhan Bengkulu Tengah hanya mencapai 51,05 dan masih berada di zona merah (kategori rendah). Namun, dalam kurun waktu dua tahun, terjadi lonjakan kinerja yang luar biasa hingga mencapai nilai 91,33 pada tahun 2023 dan tetap konsisten di angka yang sama pada tahun 2024, yang menempatkannya dalam Zona Hijau kategori B (Kualitas Tinggi).

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian Bengkulu Tengah tahun 2024 sejajar dengan kabupaten yang lebih dahulu konsisten berada di zona hijau seperti Kepahiang (92,72), Rejang Lebong (93,07), dan Bengkulu Selatan (95,27). Bahkan, Bengkulu Tengah berhasil melampaui nilai Provinsi Bengkulu yang pada tahun 2024 hanya memperoleh skor 88,30. Kinerja ini juga lebih tinggi dibandingkan Mukomuko (90,64), Kota Bengkulu (90,74), dan Bengkulu Utara (88,34), yang sebelumnya lebih unggul dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Tengah dalam memperbaiki kualitas layanan publik secara signifikan dan konsisten.

4. Indeks Integritas Nasional

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, penguatan integritas tata kelola pemerintahan menjadi aspek strategis yang perlu diarusutamakan. Salah satu instrumen penting yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan—baik internal birokrasi, masyarakat pengguna layanan, maupun kalangan ahli—terhadap praktik integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Skor SPI yang berada pada rentang 0–100 menjadi representasi sejauh mana prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih telah diterapkan di suatu daerah.

Integrasi SPI ke dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah dapat diwujudkan dengan menjadikannya sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam agenda reformasi birokrasi. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pembangunan tidak hanya berfokus pada pencapaian fisik dan ekonomi, melainkan juga pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang profesional. SPI dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk memetakan area rawan korupsi dan menyusun kebijakan pencegahan yang berbasis bukti.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain penguatan sistem pengawasan internal, khususnya peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan program pembangunan. Selain itu, peningkatan transparansi dapat didorong melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis digital yang memberikan akses publik terhadap informasi anggaran, program, dan kinerja pembangunan. Pendidikan etika dan integritas bagi aparatur sipil negara juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya birokrasi yang berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga perlu mendorong keterlibatan publik secara aktif, antara lain melalui pengembangan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses, aman, dan responsif. Keterlibatan ini tidak hanya menjadi mekanisme kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana

untuk memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, integrasi SPI dalam RPJMD tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban normatif, tetapi juga strategi penting dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Tabel II-52. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Nama Instansi	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	63,04	62,77	69,24	71,76
Kabupaten Bengkulu Selatan	63,5	63,45	70,6	72,12
Kabupaten Rejang Lebong	72,64	65,86	71,65	74,62
Kabupaten Bengkulu Utara	72,58	72,62	74,21	73,15
Kabupaten Kaur	67,9	68,98	71,54	70,72
Kabupaten Seluma	71,69	63,55	70,26	63,07
Kabupaten Mukomuko	64,7	72,74	73,77	73,02
Kabupaten Lebong	75,21	71,36	70,94	69,66
Kabupaten Kepahiang	75,74	74,66	73,7	74,44
Kabupaten Bengkulu Tengah	76,15	65,82	72,3	66,64
Kota Bengkulu	72,37	71,41	72,51	70,67

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021–2024, terlihat bahwa capaian Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2021, Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat skor SPI tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota dengan nilai 76,15. Namun, capaian ini tidak berlanjut secara konsisten, karena pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 65,82. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2023 menjadi 72,30, skor SPI Bengkulu Tengah kembali turun pada 2024 menjadi 66,64, menjadikannya salah satu dari sedikit kabupaten yang mengalami penurunan nilai dalam dua tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, yang menunjukkan tren peningkatan skor dari 63,04 di tahun 2021 menjadi 71,76 pada 2024, maka terlihat bahwa integritas tata kelola di Bengkulu Tengah cenderung kurang stabil dan masih memerlukan penguatan. Kabupaten lain seperti Kepahiang dan Rejang Lebong menunjukkan tren yang lebih konsisten dan lebih tinggi, dengan skor SPI tahun 2024 masing-masing sebesar 74,44 dan 74,62. Bahkan Mukomuko berhasil mempertahankan skor di atas 73 selama dua tahun berturut-turut. Sementara itu, Kabupaten Seluma mencatat penurunan signifikan dari 71,69 pada tahun 2021 menjadi hanya 63,07 di tahun 2024, menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan praktik integritas pelayanan publik.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi dan pengalaman untuk mencapai standar integritas yang tinggi, namun belum mampu menjaga konsistensi capaian tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam RPJMD 2025–2029, agar kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator kunci dalam mengukur kemajuan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap pelayanan publik. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, nilai Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan sejauh mana transformasi kelembagaan dan budaya kerja birokrasi telah berjalan sesuai prinsip good governance. Indeks ini juga menjadi dasar untuk menilai efektivitas berbagai upaya pembenahan sistem manajemen pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sistem pengawasan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, capaian dan perkembangan nilai Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah, khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani.

Tabel II-53. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024

	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	B	B	BB
Bengkulu Utara	CC	B	BB
Bengkulu Selatan	C	B	BB
Rejang Lebong	CC	BB	BB
Kaur	C	C	CC
Seluma	C	B	BB
Mukomuko	CC	CC	BB
Kepahiang	CC	CC	BB
Lebong	CC	CC	BB
Bengkulu Tengah	CC	CC	BB
Kota Bengkulu	CC	CC	BB

Data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kinerja tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2022 dan 2023, Bengkulu Tengah

masih berada pada kategori CC atau "Kurang", mencerminkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan nilai menjadi BB, yang berarti predikat "Baik". Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen dan kemajuan nyata dalam pembenahan sistem birokrasi, seperti perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bengkulu, yang mengalami peningkatan dari B pada 2022–2023 menjadi BB pada 2024, maka Kabupaten Bengkulu Tengah kini telah berhasil menyamai level reformasi birokrasi pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat tertinggal, Bengkulu Tengah mampu mengejar ketertinggalan dan menyelaraskan diri dengan standar tata kelola yang lebih baik di tingkat provinsi. Peningkatan ini penting untuk dijaga dan ditingkatkan lebih lanjut dalam RPJMD agar reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Kebebasan sipil mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan memperoleh informasi; hak-hak politik mencerminkan sejauh mana warga dapat berpartisipasi dalam proses pemilu dan pengambilan keputusan politik; sedangkan aspek lembaga demokrasi mengukur efektivitas institusi-institusi pemerintahan seperti DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi demokratis. IDI dinyatakan dalam skala 0 sampai 100, di mana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin kuat kualitas demokrasi di wilayah tersebut, dengan klasifikasi kategori baik (di atas 80), sedang (60–80), dan buruk (di bawah 60).

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, IDI menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Demokrasi yang sehat merupakan prasyarat untuk

menciptakan kebijakan publik yang responsif dan inklusif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. IDI yang tinggi juga mencerminkan adanya stabilitas politik daerah yang baik, yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi, penguatan layanan publik, serta pengendalian korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu terus mendorong penguatan kelembagaan demokrasi melalui peningkatan kapasitas legislatif dan eksekutif, menjamin kebebasan berpendapat masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Tabel II-54. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023

2021	2022	2023
72,73	73,23	74,26

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu tahun 2021 hingga 2023, terjadi tren peningkatan yang positif dan konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, IDI Provinsi Bengkulu berada pada angka 72,73, kemudian meningkat menjadi 73,23 di tahun 2022, dan kembali naik menjadi 74,26 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas demokrasi di wilayah tersebut, baik dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, maupun lembaga demokrasi.

Meningkatnya IDI menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu secara bertahap mengalami penguatan dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi proses politik, dan efektivitas lembaga pemerintahan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Tren ini menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, terutama melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Indeks Rasa Aman

Hingga saat ini, data resmi mengenai Indeks Rasa Aman (IRA) secara khusus untuk Kabupaten Bengkulu Tengah belum tersedia secara publik. Indeks ini umumnya diukur melalui survei yang mengkaji persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka, seperti rasa aman saat

berjalan sendirian di sekitar rumah. Meskipun belum terdapat data khusus untuk kabupaten, informasi serupa di tingkat Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa sekitar 67,42 persen penduduk merasa aman berjalan sendiri di lingkungan tempat tinggalnya. Angka ini dapat menjadi referensi awal untuk memahami kondisi keamanan di tingkat lokal, termasuk di Bengkulu Tengah.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, aspek keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat perlu mendapat perhatian strategis. Meskipun belum tersaji dalam bentuk angka indeks yang spesifik, upaya peningkatan rasa aman dapat direfleksikan melalui kebijakan yang memperkuat layanan kepolisian, pemantapan sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat, serta edukasi publik terkait peran serta warga dalam menjaga ketertiban. Peningkatan rasa aman bukan hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi pembangunan sektor lain seperti investasi, pariwisata, dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengarusutamaan isu keamanan dalam dokumen perencanaan menjadi langkah penting menuju Bengkulu Tengah yang lebih aman, inklusif, dan layak huni.

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi keamanan dan ketertiban umum di suatu daerah. Meskipun data kuantitatif resmi terkait IKK Kabupaten Bengkulu Tengah belum tersedia secara publik, informasi yang relevan dapat ditemukan melalui portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah. Portal ini menyediakan berbagai dataset dan infografis yang menggambarkan aspek keamanan wilayah, termasuk jumlah kejadian kriminal, pelanggaran ketertiban umum, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat terkait. Salah satu data yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 4 unit pos keamanan yang tersebar di lokasi strategis seperti Liku Sembilan, Pasar Pedati, Gerbang Tol, dan area Pemda, serta 273 pos kamling aktif yang tersebar di 141 desa di Bengkulu Tengah.

Keberadaan infrastruktur pengamanan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga rasa aman dan ketertiban sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, aspek ketenteraman dan ketertiban menjadi salah

satu prioritas yang harus diperkuat. Lingkungan yang aman tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penentu bagi iklim investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu mencakup peningkatan kapasitas Satpol PP, penguatan kolaborasi dengan aparat keamanan dan pemerintah desa, edukasi publik terkait ketertiban umum, serta pemanfaatan teknologi untuk sistem pelaporan dan pemantauan berbasis masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Bengkulu Tengah diharapkan dapat menjadi wilayah yang semakin aman, tertib, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD untuk di level provinsi terdapat 62 indikator dan di level kabupaten/kota, ada 48 indikator dari 12 pilar. Keduabelas pilar tersebut adalah:

a. Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

b. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

c. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.

d. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat

pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

e. Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

f. Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

g. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

h. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

i. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

j. Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

k. Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah,

dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

I. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Tabel II-55. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	3,14	5	2,62	3,26
Prov. Bengkulu	3,92	2,11	4,17	2,64	3,67	3,18	3,18	4,2	4,23	1,04	5	2,35	3,29
Bengkulu Selatan	3,84	1,35	2,87	2,36	3,69	3,72	3,53	3,6	4,21	0,25	5	0,76	2,94
Rejang Lebong	3,94	2,18	2,77	2,42	3,77	3,22	2,94	4,06	2,04	0,46	5	0,82	2,94
Bengkulu Utara	4,16	2,77	2,55	2,56	3,66	3,27	2,35	3,86	3,36	0,55	5	0,85	2,94
Kaur	3,8	1,83	2,09	2,36	3,6	2,94	2,4	2,85	2,1	0,94	5	0,95	2,91
Seluma	3,86	1,26	2,44	2,03	2,99	2,94	2,12	2,54	1,75	0,19	5	0,97	2,8
Mukomuko	3,88	2,28	2,32	2,24	3,36	3,13	2,18	2,77	2,01	0,94	5	0,76	2,9
Lebong	4,2	1,76	2,3	2,34	3,31	3,15	2,31	2,56	2,61	0,14	5	1,24	2,75
Kepahiang	4,11	1,7	2,9	2,38	3,16	2,58	2,45	2,61	1,65	0,95	5	0,45	2,65
Bengkulu Tengah	3,87	1,86	2,99	2,17	3,69	3,13	3,42	2,09	1,49	0,19	5	0,53	2,77
Kota Bengkulu	4,03	2,69	4,97	2,79	3,85	4,19	5	4,6	4,15	1,04	5	3,41	3,81

Tabel II-56. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,38	3,22	3,03	3,44
Prov. Bengkulu	4,26	2,67	4,26	3,43	3,73	3,24	3,1	4,5	2,96	3,96	2,52	2,28	3,47
Bengkulu Selatan	4,08	2,3	4,18	3,7	3,64	3,07	3,87	4,18	3,53	3,25	2,5	2,44	3,11
Rejang Lebong	4,09	2,39	3,99	3,32	3,77	3,39	3,85	3,91	3,44	4,15	2,78	2,64	3,19
Bengkulu Utara	4,19	2,81	3,77	3,2	3,73	3,55	3,07	3,6	3,6	3,25	2,57	2,24	2,91
Kaur	3,81	2,02	3,29	3,84	3,36	3,26	2,55	4,1	3,4	3,5	2,67	2,04	2,85
Seluma	3,87	1,95	3,76	3,6	3,15	3,24	2,45	3,96	3,57	3,33	2,22	1,84	2,74
Mukomuko	4,06	1,73	3,53	3,68	3,22	3,22	2,47	3,22	2,57	3,22	2,4	2,07	2,78
Lebong	4,09	2,05	3,65	3,51	3,41	3,55	2,55	3,56	3,05	3,55	2,5	2,01	2,99
Kepahiang	4,2	2,49	4,05	3,85	3,72	3,4	2,6	4,07	3,46	3,27	2,27	2,09	3,03
Bengkulu Tengah	4,16	2	4,12	3,86	3,72	3,44	2,7	4,11	3,41	3,57	2,35	2	2,95
Kota Bengkulu	4,16	2,98	5	2,81	3,88	4,35	5	4,67	4,33	4,52	2,79	3,52	3,83

Tabel II-57. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Bengkulu	4,28	2,56	3,52	4,02	3,75	4,33	3,07	3,38	3,35	3,99	2,68	2,83	3,48
Bengkulu Selatan	4,51	3,3	4,2	3,68	3,62	4,27	3,57	3,93	2,63	3,7	4,7	1,55	3,64

NAMA PROVINSI	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Rejang Lebong	4,6	3,1	4,24	3,61	3,69	4,28	3,79	3,86	2,27	3,93	4,49	1,69	3,63
Bengkulu Utara	4,64	3,2	3,76	3,79	3,65	3,98	2,1	3,86	2,55	3,86	3,41	1,41	3,35
Kaur	4,26	2,76	3,43	4,09	3,53	4,04	2,24	3,76	2,19	3,49	4,54	1,62	3,33
Seluma	4,37	3,04	3,94	4,03	3,62	4,08	2,25	3,34	2,35	3,58	3,68	1,57	3,32
Mukomuko	4,64	2,8	3,83	3,93	3,53	4,04	2,32	3,05	2,62	3,66	2,58	0,85	3,16
Lebong	4,27	3,08	3,29	4,13	3,25	4,11	2,43	3,93	2,35	3,45	4,12	2,44	3,4
Kepahiang	3,99	3,05	4,45	3,71	3,63	4,15	2,73	3,68	1,67	3,59	3,49	1,09	3,27
Bengkulu Tengah	4,53	3,23	4,38	3,77	3,63	4,12	1,97	4,05	1,27	3,59	3,1	1,18	3,24
Kota Bengkulu	4,18	3,12	4,91	3,46	3,82	4,21	5	4,93	3,16	4,36	3,28	3,7	4,01

Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Bengkulu Tengah selama periode 2022 hingga 2024 mencerminkan dinamika pembangunan yang cukup positif, meskipun masih menyisakan sejumlah tantangan struktural. Berdasarkan data resmi, skor IDSD daerah ini meningkat dari 2,77 pada tahun 2022 menjadi 2,95 pada tahun 2023, dan mencapai 3,24 pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 0,47 poin dalam kurun waktu tiga tahun mencerminkan adanya dorongan kebijakan yang mulai memberikan hasil pada dimensi-dimensi daya saing tertentu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Tengah tetap berada pada posisi terbawah, menunjukkan bahwa akselerasi perbaikan masih belum cukup untuk mengimbangi capaian daerah lain.

Secara sektoral, kekuatan daya saing Bengkulu Tengah tahun 2024 terkonsentrasi pada beberapa pilar. Pilar 1 (Lingkungan Pendukung Kelembagaan dan Kebijakan Publik) mencatat skor tertinggi yakni 4,53, menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, institusi, dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, terdapat fondasi yang relatif kuat. Demikian pula Pilar 3 (Infrastruktur) memperoleh skor tinggi 4,38, menandakan bahwa infrastruktur fisik seperti jalan, akses transportasi, dan fasilitas dasar lainnya cukup mendukung aktivitas pembangunan dan perekonomian. Pilar 6 (Kesehatan) juga mencatat angka positif (4,12), yang berarti cakupan layanan kesehatan dan kapasitas fasilitas dasar tergolong baik. Pilar 8 (Ukuran Pasar) juga menunjukkan skor memadai sebesar 4,05, memberi sinyal bahwa pasar domestik memiliki potensi untuk tumbuh jika disertai dengan intervensi kebijakan yang tepat.

Namun, di balik capaian tersebut, Bengkulu Tengah menghadapi tantangan serius pada aspek pasar dan inovasi. Pilar 7 (Dinamika Pasar Tenaga Kerja) mencatat skor hanya sebesar 1,97—terendah di antara semua pilar—mengindikasikan masih rendahnya efisiensi dan daya serap pasar tenaga kerja

lokal, serta kemungkinan adanya mismatch antara kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi sumber daya manusia. Pilar 9 (Efisiensi Pasar Barang) juga sangat rendah di angka 1,27, yang merefleksikan lemahnya produktivitas pelaku usaha, rendahnya nilai tambah produk lokal, serta keterbatasan konektivitas dan distribusi antarwilayah. Bahkan pada Pilar 12 (Keluaran Inovasi), skor hanya mencapai 1,18, menunjukkan bahwa kontribusi inovasi terhadap pembangunan daerah masih sangat minim, baik dari sisi pengembangan produk baru, adopsi teknologi, maupun hilirisasi riset.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam aspek kelembagaan dan infrastruktur, daya saing Bengkulu Tengah masih sangat bergantung pada faktor-faktor dasar, dan belum ditopang oleh kekuatan struktural seperti inovasi, efisiensi pasar, dan dinamika tenaga kerja. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan ke depan harus diarahkan pada penguatan ekosistem inovasi yang berbasis pada potensi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar, serta pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan menjadi kunci untuk memperbaiki ketimpangan antar pilar daya saing dan membawa Bengkulu Tengah pada posisi yang lebih kompetitif secara regional.

D. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Tabel II-58. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Pendidikan						
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	72.406	72.439	73.761	85.22	85.22
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.709	88.91	93.735	86.064	86.064
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	103.555	108.074	99.882	84.484	84.484
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	0.141	0	4.46	4.46
- Kesehatan						
1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0.131	0.094	1.271	24.048	24.048
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	0	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	88.166	94.97	90.286	89.067	89.067
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84.32	91.913	87.233	87.636	87.636
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87.025	93.464	88.836	91.026	91.026
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60.734	84.748	85.788	95.355	95.355
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92.841	19.722	80.956	84.43	84.43
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	18.587	58.684	24.511	61.229	61.229
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70.37	75.503	35.833	85.041	85.041
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53.453	66.835	19.361	44.827	44.827
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91.006	60.173	21.578	44.444	44.444
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98.137	93.396	61.86	80.632	80.632
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	39.931	54.307	85.315	85.315
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	20.577	31.002	18.747	80.889	80.889
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	0	100

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	0	0	100
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	68.5	77.208	84.139	85.38	85.38
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	48.229	73.502	83.59	87.965	87.965
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	62.238	62.036	62.276	62.069	62.069
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	100	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	66.692	62.248	66.665	70.816	70.816
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	56.604	60.345	87.413	95.455	95.455
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	100	100	0	0
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	0	0	100
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	0	100	100
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	47.798	47.798	0	0	0
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.913	6.85	7.059	7.366	7.366
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	92.087	100	0	100	100
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	87.5	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	18.75	25	18.75	18.75
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	77.683	118561	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	71.018	73975	73.267	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	100	75.63	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	0	38.298	38.298
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	20	13	16.38	19	19
- Sosial						
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	98.852	100	100	100	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
- Tenaga Kerja						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	72.906	66.244	0	100	100
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5.236.876	5.274.195.854.182	5.295.545.571.692	51.974.363.357	51.974.363.357
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	100	100	97.5	97.5
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100	100	0	69.903	69.903
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.15	0.69	0	0.046	0.046
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0.027	0.027	100	100	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	5.181	0	31.338	31.338
- Pangan						
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	114.45	285.119	163.364	43.855	43.855
- Pertanian						
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	100	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	100	100	100	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	98.819	100	84.746	0	100
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	100	100	100	100
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100
- Lingkungan Hidup						
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	93.14	57.77	56.01	62.35	62.35
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	77.273	33.325	22.354	23.136	23.136
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	1.818	0	100	100
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	100	100	97.672	99.54	99.54
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	49.914	63.242	57.04	61.467	61.467

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	98.344	91.01	94.488	95.955	95.955
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	20	17.241	17.241	17.241	17.241
- Pemberdayaan masyarakat dan desa						
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	50.926	40.909	0	84.615	84.615
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	28	20.482	0	95.604	95.604
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.48	2.48	2.31	2.3	2.3
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	84.539	84.125	78.713	74.935	74.935
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.461	15.875	21.287	8.122	8.122
- Perhubungan						
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	0	0	1	0
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0	0.44	0.44	0.44	0.44
- Komunikasi dan Informatika						
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	77.5	67.5	87.5	56.098	56.098
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	57.143	64.286	64.286	100	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	65.367	64.091	62.707	82.581	82.581
- Koperasi, usaha kecil dan menengah						
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	42.105	42.632	50.802	50.265	50.265
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	62.815	34.72	51.041	49.282	49.282
- Penanaman Modal						
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	162.5	19.048	64.342	-65.956	-65.956
- Kepemudaan dan Olahraga						
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.371	2.924	2.9	3.025	3.025
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.152	6.649	6.989	6.973	6.973
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	34	1	15	15	15
- Statistik						
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100	100	100	0	0

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	pembangunan daerah					
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	0	0
	- Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	0	0	0	100
	- Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	43.333	100	100	100
	- Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	49	50	61.58	69.82	60.79
	- Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	25	29.3	37.95	16	16
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0.33	66.67	28	0	0
	3. Urusan Pilihan					
	- Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1140.79	1760.77	36.795	670.553	670.553
	- Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-31.25	2.054.545	24.262	-16.808	-16.808
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-14.279	2.146.748	13.076	-23.677	-23.677
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	4.005	245.477	244.546	245.121	245.121
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0.27	0.27	0.268	0.292	0.292
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3.037	3.91	4.263	4.168	4.168
	- Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	401.351	347.046	378.523	469.399	469.399
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	203.448	26.894	258.507	-26.461	-26.461
	- Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	0	0	100	100

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
- Perdagangan						
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	57.88	81.304	0	5.388	5.388
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	100	30.854	0	32.456	32.456
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70	25.743	27.723	28.383	28.383
- Perindustrian						
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0	22.099	0	6.109	6.109
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	27.62	0	1	1	1
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	1.266	0	100	100
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	60	100	100	0	100
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	0	0	100
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	0	1	85	85
- Transmigrasi						
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota					
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
- Perencanaan dan Keuangan						
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	53.759	23.453	0	36.856	36.856
4.a.2	Rasio PAD	724.216.804	0.792	3.372	3.487	3.487
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	2	2	2
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	0	3	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	23.067	33.565	0	31.118	31.118
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	1	7	0	7	7
- Pengadaan						
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	6.812	100	48.571	20	20
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	14.739	37.81	16.789	13.135	13.135

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		6.612	155.103	50.385	50.385
- Kepegawaian						
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91.632	89.729	0	41.449	41.449
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45.797	56.783	0	45.455	45.455
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.397	5.491	0	72.706	72.706
- Manajemen Keuangan						
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0	47.038	0	26.001	26.001
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0	0.2877	0	54.172	54.172
4.d.3	Manajemen Aset	100	4	4	4	4
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5.072	8.796	0	7.64	7.64
- Transparansi dan Partisipasi Publik						
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	104.012	104.916	96.54	97.436	97.436
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	70	8.333	0	8.333	8.333

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

A. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Tabel II-59. Realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah 2020-2024

URAIAN	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	771.880.695.089,78	767.382.612.414,87	828.813.309.891,27	776.558.962.427,60	785.125.709.970,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.343.267.689,76	23.368.837.146,87	27.646.156.332,27	32.655.027.996,60	31.663.862.295,18
Pajak Daerah	8.152.473.239,69	8.960.404.405,00	10.479.659.865,70	11.584.996.312,07	19.674.487.751,00
Retribusi Daerah	4.846.124.133,00	1.510.395.706,00	583.654.002,00	730.717.631,00	19.674.487.751,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	878.170.228,74	1.126.737.881,17	803.394.597,00	1.107.518.693,56	775.673.178,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.466.500.088,33	11.771.299.154,70	15.779.447.867,57	19.231.795.359,97	10.247.426.617,00
PENDAPATAN TRANSFER	700.855.758.336,02	727.306.830.259,00	784.641.231.755,00	726.079.675.512,00	744.407.467.675,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.337.367.160,00	697.213.420.568,00	748.561.586.868,00	696.236.389.727,00	722.087.875.347,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	8.518.391.176,02	30.093.409.691,00	36.079.644.887,00	29.843.285.785,00	22.319.592.328,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.681.669.064,00	16.706.945.009,00	16.525.921.804,00	17.824.258.919,00	9.054.380.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.681.669.064,00	16.706.945.009,00	16.525.921.804,00	17.824.258.919,00	9.054.380.000,00
BELANJA DAERAH	758.041.847.105,75	790.593.097.550,90	794.012.157.030,67	799.192.919.938,50	821.456.302.740,00
BELANJA OPERASI	446.999.466.029,00	482.190.112.082,97	482.771.908.429,97	519.349.192.132,50	531.815.554.544,00
Belanja Pegawai	315.340.314.956,00	301.854.817.111,00	306.179.390.407,00	317.243.057.860,00	323.398.381.448,00
Belanja Barang dan Jasa	129.148.424.773,00	174.791.249.189,50	168.083.424.639,40	176.242.742.333,50	181.767.169.016,00
Belanja Hibah	2.423.400.000,00	5.379.045.782,47	8.359.093.383,57	25.774.391.939,00	26.600.004.080,00
Belanja Bantuan Sosial	87.326.300,00	165.000.000,00	150.000.000,00	89.000.000,00	50.000.000,00
BELANJA MODAL	120.826.017.578,75	141.455.649.488,73	153.641.622.747,70	116.824.156.762,00	124.386.389.036,00
Belanja Modal Tanah	285.961.000,00		149.365.850,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.575.629.543,00	15.178.266.991,00	43.641.907.215,00	22.016.143.078,00	15.918.582.080,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.871.554.012,00	24.026.743.040,00	24.772.968.305,44	18.881.461.555,00	10.128.878.114,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.022.920.777,75	92.636.394.250,00	81.694.109.350,00	69.898.503.938,00	87.634.706.308,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.069.952.246,00	9.614.245.207,73	3.383.272.027,26	6.028.048.191,00	10.430.222.534,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	24.540.818.700,00	1.137.476.678,00	246.979.959,00	42.000.000,00	81.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		1.137.476.678,00	246.979.959,00	42.000.000,00	81.000.000,00
BELANJA TRANSFER	165.675.544.798,00	165.809.859.301,20	157.351.645.894,00	162.977.571.044,00	165.173.359.160,00
Belanja Bagi Hasil	831.388.762,00	772.040.412,00	1.363.918.348,00	1.145.073.044,00	1.842.177.808,00
Belanja Bantuan Keuangan	164.844.156.036,00	165.037.818.889,20	155.987.727.546,00	161.832.498.000,00	163.331.181.352,00
SURPLUS / DEFISIT	13.838.847.984,03	(23.210.485.136,03)	34.801.152.860,60	(22.633.957.510,90)	(36.330.592.769,82)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.119.400.707,25	52.074.502.944,28	27.659.728.453,25	60.664.001.313,85	36.330.043.802,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.119.400.707,25	52.074.502.944,28	27.659.728.453,25	60.664.001.313,85	36.330.043.802,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.765.981.000,00	1.204.290.000,00	1.796.880.000,00	1.700.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	1.765.981.000,00	1.204.290.000,00	1.796.880.000,00	1.700.000.000,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	38.353.419.707,25	50.870.212.944,28	25.862.848.453,25	58.964.001.313,85	35.330.043.802,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	52.192.267.691,28	27.659.727.808,25	60.664.001.313,85	36.330.043.802,95	(1.000.548.967,82)

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024, pendapatan daerah menunjukkan dinamika yang mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat, disertai dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas. Total pendapatan daerah berkisar antara Rp767 miliar hingga Rp828 miliar, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp828,81 miliar, namun kembali turun pada tahun 2023 dan

hanya sedikit meningkat pada 2024. Fluktuasi ini menjadi cerminan bahwa ketahanan fiskal daerah masih rentan terhadap perubahan kebijakan dan alokasi transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, meskipun secara nominal mengalami peningkatan dari Rp23,34 miliar pada 2020 menjadi Rp31,66 miliar pada 2024. Pangsa PAD terhadap total pendapatan hanya berada pada kisaran 3–4%, angka yang masih jauh dari ideal untuk mencerminkan kemandirian fiskal. Kenaikan PAD sebagian besar ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak daerah, yang meningkat secara signifikan dari Rp8,15 miliar pada 2020 menjadi Rp19,67 miliar pada 2024, menunjukkan adanya penguatan sistem pemungutan pajak atau perluasan basis pajak. Namun demikian, komponen retribusi daerah justru mengalami penurunan drastis, dari Rp4,85 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp730 juta pada 2023, dan secara mencurigakan melonjak menjadi identik dengan nilai pajak daerah pada 2024. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kesalahan input atau perlu pendalaman evaluasi pengelolaan retribusi.

Sementara itu, pendapatan transfer secara konsisten menjadi tulang punggung keuangan daerah dengan kontribusi di atas 90% setiap tahunnya. Pada tahun 2024, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp744,40 miliar, yang hampir 25 kali lipat lebih besar dibanding PAD. Ketergantungan ini memberi sinyal bahwa ruang fiskal daerah masih sempit dan bergantung pada kebijakan pusat, yang bisa berisiko terhadap kesinambungan pembiayaan pembangunan jika terjadi penyesuaian anggaran transfer nasional. Selain itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan tajam, dari Rp47,68 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp9,05 miliar pada 2024, yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi penurunan potensi dari sumber-sumber pendapatan non-konvensional.

Untuk mendorong kemandirian fiskal jangka menengah hingga panjang, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu merumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara komprehensif. Langkah ini dapat mencakup digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, pembenahan regulasi daerah yang menghambat penggalan potensi pendapatan, peningkatan pelayanan publik berbasis tarif, serta penguatan kelembagaan BUMD dan

pengelolaan aset. Selain itu, perluasan sinergi dengan pelaku usaha dan sektor informal juga penting untuk memperluas basis pajak secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan fiskal dan kapasitas pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat ditingkatkan secara bertahap dan lebih mandiri, sesuai arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD 2025–2029.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024, belanja daerah menunjukkan kecenderungan meningkat secara nominal, mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp758,04 miliar, dan meningkat menjadi Rp821,46 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini utamanya didorong oleh peningkatan pada komponen belanja operasi dan belanja modal, dua jenis belanja yang mencerminkan belanja rutin pemerintahan sekaligus investasi pembangunan.

Komponen belanja operasi selalu menjadi bagian terbesar dalam struktur belanja daerah, mencapai lebih dari 60% setiap tahunnya. Pada tahun 2024, belanja operasi mencapai Rp531,82 miliar, yang didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp323,40 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp181,77 miliar. Sementara itu, belanja hibah juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari hanya sekitar Rp2,4 miliar pada 2020 menjadi lebih dari Rp26,6 miliar pada 2024, menunjukkan adanya dorongan peningkatan partisipasi masyarakat dan organisasi sosial dalam pembangunan daerah.

Di sisi lain, belanja modal yang berfungsi sebagai alat untuk menciptakan aset tetap pemerintah daerah menunjukkan pola fluktuatif, namun secara umum tetap menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, belanja modal sebesar Rp120,83 miliar, dan meningkat menjadi Rp124,39 miliar pada 2024. Sebagian besar belanja modal dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi, yang pada 2024 menyerap anggaran lebih dari Rp87,63 miliar, menandakan komitmen pemerintah dalam penguatan infrastruktur dasar. Namun demikian, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih nyata oleh masyarakat.

Komponen lain yang relatif kecil namun penting adalah belanja tidak terduga, yang berfungsi sebagai cadangan untuk penanganan bencana atau

keadaan darurat, serta belanja transfer, yang mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa. Belanja transfer cukup stabil dari tahun ke tahun, dengan total mencapai sekitar Rp165 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan adanya keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan, meskipun rasio belanja operasional yang tinggi masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk belanja produktif dan infrastruktur jangka panjang. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi efisiensi belanja operasi dan optimalisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

3. Pembiayaan Daerah

Data realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa komponen pembiayaan daerah memainkan peran penting dalam menyeimbangkan anggaran, khususnya ketika terjadi defisit antara pendapatan dan belanja. Selama lima tahun terakhir, pola pembiayaan daerah cenderung bersifat responsif terhadap fluktuasi defisit anggaran. Ketika terjadi defisit, seperti pada tahun 2021 dan 2023, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, untuk menutupi kekurangan belanja.

Secara nominal, penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp60,66 miliar, dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp27,66 miliar. Sumber utama dari penerimaan ini berasal dari SiLPA, yang menandakan adanya akumulasi dana yang belum terpakai pada tahun anggaran sebelumnya. Ini dapat menjadi indikasi adanya efisiensi, namun juga bisa mencerminkan ketidakterserapan anggaran secara optimal. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan, yang utamanya berupa penyertaan modal daerah, relatif kecil, berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,8 miliar per tahun, mencerminkan kebijakan yang cukup konservatif dalam ekspansi fiskal melalui BUMD atau investasi daerah.

Pembiayaan netto, sebagai selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selalu menunjukkan nilai positif, yang artinya pembiayaan digunakan untuk menutup defisit atau memperkuat cadangan kas daerah. Pada tahun 2020 dan 2022, bahkan tercatat adanya sisa lebih pembiayaan tahun

berkenaan (SiLPA baru) yang cukup besar, masing-masing sebesar Rp52,19 miliar dan Rp60,66 miliar, yang kemudian menjadi bagian dari pembiayaan tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2024, untuk pertama kalinya tercatat sisa pembiayaan negatif sebesar Rp1 miliar, yang bisa menjadi sinyal awal terjadinya ketidakseimbangan kas atau mulai menurunnya kapasitas pembiayaan dari SiLPA.

Dari dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah selama 2020–2024 masih sangat bergantung pada pengelolaan SiLPA, dan belum menunjukkan diversifikasi sumber pembiayaan lain seperti penerbitan obligasi daerah atau pinjaman. Untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas belanja pembangunan, ke depan perlu dirancang strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih proaktif dan produktif, termasuk evaluasi terhadap penyertaan modal BUMD, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, dan potensi skema pembiayaan alternatif berbasis kemitraan. Pembiayaan daerah yang sehat dan terencana akan menjadi instrumen penting dalam mendukung kesinambungan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencerminkan selisih positif antara penerimaan dan pengeluaran dalam komponen pembiayaan daerah pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020–2024, SiLPA menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2020, SiLPA tercatat sangat tinggi yakni sebesar Rp52,19 miliar, bahkan meningkat menjadi Rp60,66 miliar pada tahun 2022, sebelum akhirnya menurun menjadi Rp36,33 miliar pada tahun 2023, dan berubah menjadi negatif sebesar Rp1 miliar pada tahun 2024.

Fluktuasi SiLPA ini dapat ditafsirkan dari dua sisi. Di satu sisi, SiLPA yang tinggi dapat mencerminkan adanya efisiensi anggaran atau kemampuan daerah mengelola belanja secara hati-hati, namun di sisi lain juga bisa mengindikasikan rendahnya serapan anggaran atau keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak termanfaatkan secara optimal. Pada sisi berikutnya, munculnya nilai negatif pada tahun 2024 menjadi

catatan serius, karena bisa menandakan adanya potensi defisit kas atau kesenjangan antara kebutuhan belanja dengan ketersediaan dana, yang bila tidak dikendalikan dapat mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan ke depan, terutama untuk RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, keberadaan dan tren SiLPA perlu menjadi perhatian strategis. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan efektif, sehingga anggaran dapat terserap sesuai rencana dan menghasilkan manfaat pembangunan yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan SiLPA secara bijak dalam tahun berikutnya juga penting untuk mendukung kesinambungan pembiayaan, terutama bagi program prioritas daerah yang memerlukan dana tambahan di luar sumber pendapatan reguler. Dengan demikian, pengelolaan SiLPA yang baik akan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

B. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

Neraca Daerah adalah gambaran menyeluruh kondisi faktual wilayah yang mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan, serta menjadi landasan teknokratik penting dalam penyusunan RPJMD. Dalam konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, Neraca Daerah membantu mengidentifikasi masalah dan potensi pembangunan secara objektif, sehingga arah kebijakan dalam RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Misalnya, rendahnya akses air minum layak dan kenaikan angka kemiskinan di tengah membaiknya indikator makro menjadi sinyal perlunya intervensi yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Dengan demikian, RPJMD tersusun bukan berdasarkan asumsi, melainkan berpijak pada realitas dan data yang terukur.

Tabel II-60. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	87.001.422.398,94	64.035.159.303,78	94.781.793.061,51	79.958.848.959,80	50.914.692.522,80
	B. Investasi Jangka Panjang	55.040.028.279,92	40.483.354.540,92	40.106.508.483,92	39.138.059.736,92	37.712.698.060,92
	C. Aset Tetap	1.299.240.305.634,57	1.337.828.567.862,16	1.426.395.314.617,25	1.437.020.751.604,06	1.475.770.586.645
	D. Aset Lainnya	6.499.862.573,76	39.714.617.567,59	23.548.136.512,76	23.548.136.512,76	18.808.844.209,24
	JUMLAH ASET	1.447.781.618.887,19	1.482.061.699.274,45	1.584.831.752.675,44	1.579.665.796.813,54	1.583.206.821.437,96
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	5.410.143.929,63	802.930.113,97	1.365.666.502,97	1.365.666.502,97	31.031.514.040,06
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	
3	EKUITAS	1.442.371.474.957,56	1.481.258.769.160,48	1.576.146.043.861,40	1.578.300.130.310,57	1.552.175.307.398,08
	JUMLAH EKUITAS	1.442.371.474.957,56	1.481.258.769.160,48	1.576.146.043.861,40	1.578.300.130.310,57	1.552.175.307.398,08

Neraca Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan aset yang relatif stabil dan positif. Total aset meningkat dari Rp1,447 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,583 triliun pada tahun 2024, dengan komponen aset tetap sebagai penyumbang terbesar yang terus tumbuh dari Rp1,299 triliun menjadi Rp1,475 triliun. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan aset strategis lainnya untuk mendukung pelayanan publik. Namun demikian, terdapat penurunan yang cukup mencolok pada aset lancar, dari Rp87 miliar menjadi hanya Rp50,9 miliar dalam periode yang sama, serta penurunan pada investasi jangka panjang. Penurunan ini patut dicermati karena berpotensi memengaruhi likuiditas dan kemampuan pembiayaan jangka pendek daerah.

Di sisi lain, kewajiban jangka pendek yang relatif rendah selama empat tahun pertama tiba-tiba melonjak drastis pada tahun 2024, dari sekitar Rp1,3 miliar menjadi Rp31 miliar. Kenaikan ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena dapat menunjukkan adanya penundaan kewajiban atau pengeluaran yang belum tertutupi pada tahun anggaran berjalan. Meskipun demikian, ekuitas daerah sebagai cerminan kekayaan bersih juga menunjukkan tren

positif, meningkat dari Rp1,442 triliun menjadi Rp1,578 triliun pada 2023, sebelum sedikit menurun menjadi Rp1,552 triliun pada 2024. Penurunan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh naiknya kewajiban jangka pendek dan menurunnya aset lancar. Secara keseluruhan, struktur neraca ini menunjukkan bahwa keuangan daerah cukup sehat dalam jangka panjang, namun tetap diperlukan perhatian khusus terhadap manajemen likuiditas, pengendalian kewajiban jangka pendek, dan strategi pemeliharaan aset untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.

C. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi Keuangan Daerah merupakan estimasi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan, yang disusun berdasarkan tren pendapatan, belanja, pembiayaan, dan berbagai asumsi makroekonomi serta kebijakan fiskal yang berlaku. Proyeksi ini berfungsi sebagai acuan utama untuk menilai seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang direncanakan. Dengan proyeksi ini, pemerintah daerah dapat mengantisipasi risiko fiskal, mengelola belanja secara efisien, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran agar tetap berada dalam kerangka keberlanjutan fiskal jangka menengah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, proyeksi keuangan berperan penting dalam menentukan batas dan ruang fiskal yang realistis untuk merancang prioritas pembangunan. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD harus mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, agar rencana pembangunan tidak hanya ambisius secara visi, tetapi juga dapat dilaksanakan secara terukur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, proyeksi keuangan menjadi penghubung antara aspirasi pembangunan dan kemampuan nyata pemerintah daerah dalam merealisasikannya, serta memastikan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran selama lima tahun ke depan.

Tabel II-61. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN							
1	Pendapatan Asli Daerah	36.283.528.961	59.994.822.275,00	63.283.528.961	67.368.837.146,87	69.343.267.689,76	70.655.027.996,60
2	Pendapatan Transfer	811.994.822.275,00	859.906.105.239,07	874.909.557.064,41	900.969.620.924,16	916.253.057.058,64	932.079.675.512,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.836.052.996,00	7.110.940.295,86	27.836.052.996,00	29.706.945.009,00	28.102.971.240,02	27.824.258.919,00
BELANJA							
4	Belanja Operasi	594.566.771.581,00	597.566.771.581,00	608.329.078.432,00	612.190.112.082,97	613.814.975.745,00	616.349.192.132,50
5	Belanja Modal	145.329.078.432,00	186.691.025.959,00	210.949.929.741,46	256.250.579.186,73	260.503.553.254,03	275.896.200.564,95
6	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
7	Belanja Transfer	165.848.598.021,00	173.961.561.024,00	174.483.314.530,67	179.748.797.200,36	183.500.167.696,64	179.578.523.613,58
PEMBIAYAAN							
8	Penerimaan	36.330.043.802,00	32.207.490.754,07	28.733.183.682,72	51.144.085.390,03	45.119.400.707,25	42.264.953.883,43
9	Pengeluaran	1.700.000.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL APBD PERTAHUN		908.444.448.034,00	959.219.358.564,00	994.762.322.704,13	1.049.189.488.470,06	1.058.818.696.695,67	1.072.823.916.311,03

Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2026–2030 menunjukkan tren pertumbuhan fiskal yang positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat secara bertahap dari baseline tahun 2024 sebesar Rp36,28 miliar menjadi Rp70,66 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini menggambarkan adanya penguatan kapasitas fiskal yang dilakukan secara bertahap melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal. Di sisi lain, pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, dengan nilai proyeksi yang meningkat dari Rp859,91 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp932,08 miliar pada tahun 2030. Hal ini akan memberikan stabilitas pembiayaan bagi program-program strategis daerah. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan angka tertinggi pada tahun 2028 sebesar Rp29,71 miliar dan kemudian menurun menjadi Rp27,82 miliar di tahun 2030.

Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi yang konsisten berada pada kisaran Rp597 miliar hingga Rp616 miliar per tahun selama periode proyeksi. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan dasar kepada masyarakat. Belanja modal mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp186,69 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp275,89 miliar pada tahun 2030, mencerminkan prioritas daerah dalam penguatan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Belanja tak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp1 miliar setiap tahun sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat. Belanja transfer juga mengalami kenaikan yang moderat, dari Rp173,96 miliar menjadi Rp179,58 miliar, yang menunjukkan kesinambungan dukungan keuangan kepada pemerintah desa atau pihak ketiga.

Dalam aspek pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan tetap berada dalam kisaran moderat antara Rp32,2 miliar hingga Rp51,1 miliar. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2028 yang dapat menjadi indikasi adanya kebutuhan pembiayaan tambahan untuk mendukung belanja modal. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan hanya tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp1,7 miliar, dan tidak muncul lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren peningkatan dari Rp959,2 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp1,07 triliun pada tahun 2030. Proyeksi ini mencerminkan optimisme fiskal yang realistis, sejalan dengan pertumbuhan kapasitas

pendapatan daerah dan peningkatan ruang belanja pembangunan. Meskipun demikian, penguatan kualitas belanja, pengendalian efisiensi operasional, serta perluasan basis pendapatan lokal tetap menjadi agenda penting untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah secara jangka panjang..

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan, serta antara kondisi saat ini dengan visi masa depan yang ingin dicapai. Permasalahan pembangunan tidak hanya mencerminkan belum tercapainya indikator-indikator utama pembangunan, tetapi juga mencakup kondisi yang sudah baik namun masih perlu ditingkatkan agar pelayanan publik lebih optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan prioritas yang berdampak luas terhadap keberhasilan pembangunan daerah, bersifat lintas sektor, memerlukan intervensi kebijakan secara sistemik, serta relevan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

2.6.1. Permasalahan Kabupaten Bengkulu Tengah

Permasalahan pembangunan daerah mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara hasil pembangunan yang telah dicapai dengan yang telah direncanakan, serta ketimpangan antara kondisi saat ini dengan target yang ingin dicapai di masa mendatang. Dengan demikian, permasalahan pembangunan tidak hanya diartikan sebagai kegagalan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga mencakup kondisi yang telah menunjukkan capaian baik namun tetap memerlukan peningkatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, diperlukan perumusan analisis permasalahan pembangunan daerah yang tepat. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah di setiap bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah yang telah diuraikan pada sebelumnya, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah, diketahui lima permasalahan utama di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar serta ketimpangan konektivitas antarwilayah.

2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi.
3. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan tingginya tingkat pengangguran.
4. Ketergantungan pada sektor ekonomi primer tanpa dukungan hilirisasi dan lemahnya kapasitas UMKM.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan kehidupan religius.
6. Rendahnya efektivitas dan responsiveness dalam birokrasi, minimnya digitalisasi pelayanan publik terintegrasi, dan kurangnya transparansi serta partisipasi masyarakat.
7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat degradasi lahan, minimnya kawasan lindung, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah dijawabarkan berikut ini.

A. Masih rendahnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar serta ketimpangan konektivitas antarwilayah

1. Kualitas Layanan Transportasi belum optimal

Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antara kawasan pesisir, pusat provinsi, dan dataran tinggi. Dengan total luas wilayah 1.223,94 km² yang mencakup 11 kecamatan dan 143 desa/kelurahan, kabupaten ini seharusnya memiliki posisi unggul sebagai simpul penggerak pertumbuhan wilayah. Namun, realita menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur dasar, khususnya infrastruktur jalan, masih menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio jalan mantab di Bengkulu Tengah masih tergolong rendah, yaitu sekitar 60%. Artinya, sebagian besar ruas jalan, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan antar kecamatan, masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Ketidakmerataan pembangunan jalan berdampak langsung terhadap

rasio konektivitas antarwilayah yang merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi upaya peningkatan mobilitas transportasi yang seharusnya mendukung aktivitas masyarakat, baik dalam sektor ekonomi seperti pertanian dan perdagangan, maupun sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Jalur distribusi hasil komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan karet, yang selama ini menjadi andalan ekonomi lokal, mengalami keterlambatan pengangkutan akibat buruknya infrastruktur jalan. Dampaknya adalah biaya logistik yang meningkat, waktu tempuh yang panjang, serta risiko kerusakan produk yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan harga jual menjadi tidak kompetitif dan mengurangi pendapatan petani serta pelaku usaha lokal, yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Tidak hanya sektor ekonomi, terbatasnya aksesibilitas juga menghambat upaya pemerataan layanan dasar masyarakat. Masyarakat di wilayah terpencil seperti Kecamatan Pagar Jati, Merigi Kelindang, dan Merigi Sakti masih mengalami kesulitan untuk menjangkau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan jauh di atas jalan yang licin dan rusak, terlebih saat musim hujan. Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terkendala oleh jarak tempuh dan minimnya transportasi yang layak, yang bisa berujung pada keterlambatan penanganan medis dalam situasi darurat.

Keterbatasan infrastruktur publik yang layak dan berkelanjutan juga terlihat dari belum meratanya layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Ketiadaan moda transportasi yang handal di daerah terpencil tidak hanya mengisolasi masyarakat dari pusat pertumbuhan, tetapi juga memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar pusat kabupaten seperti Pondok Kelapa dan Karang Tinggi, yang relatif lebih maju dalam hal akses jalan, fasilitas layanan publik, dan konektivitas jaringan digital, dibandingkan kecamatan-kecamatan di wilayah timur dan selatan yang masih tertinggal.

Sebagai respons atas permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk

menjembatani permasalahan tersebut. Alokasi dana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki rasio jalan mantab dan meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendongkrak capaian infrastruktur secara keseluruhan. Namun, besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin perbaikan yang merata, apabila tidak disertai dengan strategi perencanaan yang berpihak pada daerah tertinggal dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu menerapkan pendekatan afirmatif dalam pembangunan infrastruktur, seperti memberikan prioritas anggaran pada wilayah-wilayah yang memiliki rasio konektivitas rendah, serta melakukan penataan infrastruktur berbasis potensi lokal. Misalnya, pengembangan desa wisata berbasis alam dan budaya di Merigi Kelindang harus didukung oleh akses jalan yang layak, infrastruktur digital, serta sarana pendukung lainnya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kabupaten, tetapi juga menyebar ke seluruh wilayah secara inklusif dan berkeadilan.

Dengan peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar, diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

2. Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas belum Optimal

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menjadi tantangan signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang mencuat adalah rendahnya akses rumah tangga terhadap infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan. Kondisi ini tercermin dari capaian indikator layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu.

Meskipun terdapat upaya peningkatan dari tahun ke tahun, tren capaian akses air bersih layak menunjukkan ketidakkonsistenan. Setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, capaian ini justru menurun kembali pada 2023 dan menjadikan Bengkulu Tengah sebagai salah satu kabupaten dengan akses air bersih terendah di provinsi. Situasi serupa juga terjadi pada indikator akses sanitasi dan listrik yang belum merata di seluruh kecamatan, terutama di wilayah perdesaan yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan kabupaten. Ketimpangan akses ini juga diperparah oleh

minimnya infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah yang masih mengalami blank spot jaringan telepon.

Ketertinggalan dalam penyediaan infrastruktur ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas lingkungan permukiman, kesehatan masyarakat, dan keterhubungan wilayah. Masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau air bersih dan sanitasi layak berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan seperti penyakit berbasis lingkungan. Sementara itu, keterbatasan akses listrik dan jaringan telepon menghambat produktivitas ekonomi rumah tangga, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan keluarga yang bergantung pada konektivitas digital.

B. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi

1. Permasalahan Aksesibilitas dan Pemerataan Layanan

Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas wilayah 1.223,94 km² dan terdiri dari 11 kecamatan serta 143 desa/kelurahan, menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Meskipun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar telah mencapai 92% untuk SD dan 78% untuk SMP, kesenjangan dalam jangkauan layanan pendidikan masih nyata, terutama di wilayah terpencil. Kondisi geografis yang menantang, akses transportasi yang terbatas, dan minimnya sarana pendukung menjadi hambatan utama bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Sekolah-sekolah di daerah pelosok sering kali menghadapi keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung, yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan pencapaian akademik siswa. Beberapa kecamatan masih belum memiliki sekolah yang representatif, sehingga banyak siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, yang tidak hanya membebani mereka secara fisik tetapi juga meningkatkan risiko putus sekolah. Ketersediaan fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, serta ruang kelas yang memadai masih menjadi tantangan, yang berdampak pada mutu pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Di sektor kesehatan, keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan juga menjadi kendala besar. Keberadaan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan posyandu yang belum merata membuat masyarakat

di beberapa wilayah kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar yang cepat dan berkualitas. Situasi ini diperburuk dengan minimnya tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas-puskesmas terpencil, sehingga masyarakat sering kali harus menempuh perjalanan jauh ke fasilitas yang lebih lengkap di ibu kota kabupaten atau kota terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan.

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru mencapai 80% menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan memadai. Banyak masyarakat, terutama di kelompok ekonomi rendah, masih bergantung pada layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh JKN, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan akses terhadap program jaminan kesehatan serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah kabupaten.

2. Permasalahan Layanan Kesehatan yang Terjangkau dan Bermutu

Permasalahan layanan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah mencerminkan tantangan mendalam dalam mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, terjangkau, dan bermutu masih belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil. Ketimpangan ini tampak jelas dari masih terbatasnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki sarana kesehatan yang memadai, seperti Puskesmas, Pustu, maupun Posyandu yang aktif. Masyarakat di kecamatan-kecamatan seperti Merigi Kelindang, Merigi Sakti, dan Pagar Jati masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan dasar, terutama ketika menghadapi situasi kegawatdaruratan, di mana waktu dan aksesibilitas menjadi faktor krusial dalam penyelamatan nyawa.

Keterbatasan infrastruktur kesehatan ini semakin diperburuk oleh rendahnya rasio tenaga kesehatan per kecamatan. Distribusi dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya belum merata, bahkan masih banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang hanya dilayani oleh satu atau dua tenaga kesehatan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah menjadi sangat terbatas dan rentan terhadap penumpukan pasien

serta keterlambatan penanganan kasus. Ketimpangan ini juga menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi tenaga medis di lapangan, yang pada akhirnya mempengaruhi mutu layanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan publik.

Dampak dari keterbatasan tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator kesehatan kunci, seperti angka kematian bayi dan angka kematian ibu (AKI), yang hingga saat ini masih menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung belum menunjukkan perbaikan secara signifikan. Kematian ibu sering kali disebabkan oleh keterlambatan dalam mendapatkan pertolongan medis, terbatasnya fasilitas persalinan dengan layanan kegawat daruratan obstetri neonatal dasar (PONED), serta belum optimalnya program kesehatan ibu dan anak di tingkat desa. Sementara itu, tingginya angka kematian bayi berkaitan erat dengan kondisi gizi, sanitasi, serta kurangnya pelayanan neonatal yang terjangkau dan berkualitas. Permasalahan ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat belum sepenuhnya memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai rumah sakit rujukan utama, masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun telah tersedia layanan dasar, RSUD Bengkulu Tengah belum mampu menyediakan layanan spesialis yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat, seperti penyakit dalam, mata, THT, dan ortopedi. Akibatnya, banyak pasien harus dirujuk ke rumah sakit di luar kabupaten, terutama ke Kota Bengkulu. Rujukan ini tidak hanya menambah beban biaya perjalanan dan akomodasi bagi pasien dan keluarganya, tetapi juga memperpanjang waktu tunggu untuk mendapatkan penanganan medis, yang dapat berdampak fatal pada kasus-kasus tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem rujukan dan kapasitas layanan sekunder di tingkat kabupaten masih perlu diperkuat secara signifikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan besar dalam pencapaian target pembangunan kesehatan, yang seharusnya berorientasi pada peningkatan jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan, peningkatan rasio tenaga kesehatan, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu merumuskan strategi yang holistik dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan infrastruktur kesehatan yang lebih merata, peningkatan

insentif bagi tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah terpencil, peningkatan kualitas dan cakupan layanan di RSUD, hingga penguatan layanan promotif dan preventif di tingkat komunitas.

Lebih jauh lagi, kolaborasi lintas sektor juga harus ditingkatkan, termasuk dengan melibatkan dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, diharapkan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih merata, responsif, dan berkualitas, guna memperkuat fondasi pembangunan manusia dan meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..

3. Permasalahan Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Publik

Pemanfaatan teknologi dalam sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat keterbatasan akses terhadap layanan komunikasi dan jaringan internet yang merata. Meskipun di wilayah perkotaan telah mulai diterapkan sistem pembelajaran daring dan digitalisasi informasi akademik, kesenjangan masih sangat terasa di wilayah pedesaan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh masih adanya sekitar 20 persen wilayah yang tergolong sebagai blank spot, yakni daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet sama sekali. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga menghambat pemerataan mutu layanan pendidikan antarwilayah.

Minimnya infrastruktur komunikasi dan jaringan internet yang memadai juga berdampak pada lambannya transformasi digital di sektor kesehatan. Sistem informasi kesehatan seperti rekam medis elektronik dan layanan konsultasi jarak jauh (telemedicine) belum bisa berjalan optimal, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berada di daerah tanpa akses internet. Akibatnya, koordinasi layanan kesehatan menjadi lambat, proses rujukan pasien tidak efisien, dan pelayanan publik cenderung bersifat manual serta tidak terdokumentasi dengan baik.

Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Banyak guru dan tenaga medis yang belum memiliki keterampilan dalam menggunakan perangkat teknologi dan platform digital secara efektif. Hal ini menyebabkan rendahnya pemanfaatan potensi teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas akses informasi, serta mempercepat administrasi dan pelaporan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, isu wilayah tanpa *blank spot* menjadi sangat krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan berbasis digital. Pemerataan akses layanan komunikasi dan internet bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menjadi prasyarat utama untuk mendukung pendidikan yang inklusif, aktivitas ekonomi berbasis teknologi, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menjadikan pengurangan jumlah blank spot sebagai prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Langkah-langkah seperti pembangunan menara BTS di daerah tertinggal, penyediaan akses internet publik di fasilitas layanan dasar, serta pelatihan digital bagi guru dan tenaga kesehatan harus segera diimplementasikan. Dengan menargetkan penurunan signifikan terhadap wilayah blank spot, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mempercepat transformasi digital, memperkecil kesenjangan antarwilayah, dan memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan bermutu.

C. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal Dan Tingginya Tingkat Pengangguran

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan aspek krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi.

Kabupaten Bengkulu Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi pengembangan SDM, seperti rendahnya daya saing tenaga kerja, kesenjangan akses pendidikan, kualitas

ekonomi masyarakat, permasalahan kemiskinan. Kelima permasalahan tersebut membentuk lingkaran yang saling memperkuat, sehingga menghambat peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal secara keseluruhan.

Permasalahan ini perlu segera diatasi melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat guna mewujudkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju dan berkelanjutan.

1. Permasalahan kesenjangan akses pendidikan

Permasalahan kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menjadi hambatan mendasar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana anak-anak di desa masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya dukungan teknologi pembelajaran menjadi penyebab utama tidak meratanya kesempatan belajar. Akibatnya, angka partisipasi pendidikan masih rendah, terutama pada jenjang menengah dan atas, sementara angka putus sekolah cenderung tinggi di wilayah-wilayah terpencil.

Rendahnya akses pendidikan ini turut tercermin dalam sejumlah indikator. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum mencapai target minimal 12 tahun wajib belajar, yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun capaian tersebut masih jauh dari ideal untuk mencerminkan sistem pendidikan yang mendukung partisipasi penuh masyarakat dalam pendidikan hingga tingkat tinggi. Indeks literasi dan numerasi sebagai ukuran kemampuan dasar siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung juga menunjukkan nilai yang masih rendah. Hal ini menandakan bahwa kualitas pembelajaran yang diterima siswa belum memadai untuk membentuk generasi yang adaptif dan siap bersaing.

Permasalahan pendidikan ini berkaitan erat dengan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan tingginya angka pengangguran. Tanpa latar belakang pendidikan yang kuat dan keterampilan dasar yang memadai, lulusan sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah sulit bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Banyak di antara mereka yang akhirnya hanya mampu mengakses pekerjaan sektor informal dengan penghasilan rendah, atau bahkan menjadi pengangguran karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya pelatihan vokasional dan akses terhadap program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Kesenjangan akses pendidikan juga berdampak pada terbatasnya peluang mobilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Rendahnya tingkat pendidikan pada generasi muda tidak hanya membatasi peluang ekonomi mereka, tetapi juga melemahkan daya tahan sosial dan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat upaya pemerataan kesempatan belajar sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan kapasitas guru, pengembangan kurikulum yang menanamkan karakter dan keterampilan hidup, serta penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi yang mendukung pembelajaran adaptif. Dengan mengatasi permasalahan ini secara sistematis dan berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mendorong tumbuhnya generasi muda yang unggul, berdaya saing tinggi, dan siap membangun daerahnya melalui kontribusi yang lebih luas di berbagai sektor pembangunan.

2. Permasalahan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan persoalan fundamental yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi kesehatan masyarakat yang belum optimal menjadi salah satu faktor utama penyebab terbatasnya produktivitas kerja, rendahnya partisipasi

angkatan kerja yang sehat dan siap pakai, serta tingginya ketergantungan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Dalam konteks pembangunan daerah, perbaikan derajat kesehatan bukan hanya soal pelayanan medis, melainkan menjadi prasyarat penting bagi penciptaan tenaga kerja yang tangguh, adaptif, dan mampu bersaing di tengah dinamika dunia kerja modern.

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam beberapa tahun terakhir, AHH di Kabupaten Bengkulu Tengah memang menunjukkan kecenderungan meningkat, namun lajunya masih relatif lambat dan tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup sehat dan produktif di masyarakat belum dapat sepenuhnya terwujud, terutama di kalangan usia kerja dan lansia. AHH yang rendah sering kali mencerminkan tingginya beban penyakit, rendahnya kualitas gizi, serta kurangnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Indeks Keluarga Sehat sebagai indikator komposit yang mencakup berbagai aspek perilaku dan akses terhadap layanan kesehatan dasar, juga masih menunjukkan angka yang perlu menjadi perhatian. Banyak keluarga di Bengkulu Tengah belum memiliki pola hidup sehat, masih minim dalam hal kepesertaan dalam program jaminan kesehatan, dan belum maksimal dalam memanfaatkan layanan kesehatan preventif seperti imunisasi anak, pemeriksaan kehamilan, serta deteksi dini penyakit tidak menular. Situasi ini berpotensi melanggengkan masalah kesehatan kronis dan akut di tingkat keluarga, yang berdampak pada tingginya biaya kesehatan, beban ekonomi rumah tangga, dan pada akhirnya melemahkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga masih menjadi tantangan besar. Beberapa wilayah, terutama di kecamatan terpencil seperti Merigi Kelindang, Merigi Sakti, dan Pagar Jati, belum sepenuhnya dijangkau oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Keterbatasan jumlah Puskesmas, minimnya tenaga medis, serta infrastruktur jalan yang buruk menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak, terutama dalam kondisi darurat. Akibatnya, banyak kasus kesehatan yang terlambat ditangani, termasuk pada ibu hamil dan bayi, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan bahwa

belum terjadi pemerataan dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana yang menjadi target pembangunan daerah.

Keterbatasan dalam derajat kesehatan ini sangat berkaitan erat dengan rendahnya kualitas tenaga kerja. Individu yang tumbuh dalam lingkungan dengan gizi buruk, akses kesehatan terbatas, dan minimnya edukasi kesehatan akan memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting, rendahnya kemampuan kognitif, dan lemahnya kebugaran fisik, yang pada akhirnya menurunkan peluang mereka untuk mengakses pendidikan lanjutan dan pelatihan kerja. Dalam jangka panjang, ini akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terbuka dan tersembunyinya potensi ekonomi daerah akibat tenaga kerja yang tidak produktif.

Pembangunan sektor kesehatan harus dipandang sebagai strategi utama dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat sistem layanan kesehatan primer secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh desa, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, hingga perluasan cakupan jaminan kesehatan. Program promotif dan preventif seperti penyuluhan gizi, sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta edukasi kesehatan reproduksi harus digencarkan agar indeks keluarga sehat dapat meningkat.

3. Permasalahan Kualitas Ekonomi Masyarakat

Permasalahan kualitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menjadi tantangan nyata dalam upaya menciptakan kemandirian dan kesejahteraan sosial yang merata. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan pendapatan per kapita di kabupaten ini cenderung stagnan dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan mengalami fluktuasi akibat tekanan eksternal seperti pandemi, inflasi, dan lemahnya akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Kondisi ini menandakan bahwa penguatan ekonomi lokal dan perluasan basis kewirausahaan belum berjalan secara optimal dan belum menjangkau sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Keterbatasan dalam kualitas ekonomi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan utama berupa rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan tingginya tingkat pengangguran. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, banyak keluarga tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anak hingga jenjang yang lebih tinggi, mengakses pelatihan keterampilan kerja, atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Situasi ini melahirkan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi muda tumbuh dalam keterbatasan sumber daya ekonomi yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Rendahnya pengembangan kewirausahaan juga menjadi salah satu akar masalah. Masyarakat, terutama generasi muda, belum memiliki ekosistem yang mendorong tumbuhnya inovasi, akses permodalan, serta pendampingan usaha mikro dan kecil. Banyak potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, peternakan, dan kerajinan, yang belum dikelola secara profesional dan masih bertumpu pada pola usaha tradisional tanpa diversifikasi nilai tambah. Kurangnya pelatihan kewirausahaan, lemahnya jejaring pasar, serta belum maksimalnya dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah membuat sektor ini belum mampu menjadi pengungkit peningkatan pendapatan masyarakat.

Peningkatan taraf pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal dan kewirausahaan menjadi penting tidak hanya sebagai tujuan pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai solusi untuk menurunkan pengangguran secara struktural. Masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri akan berkontribusi langsung terhadap penyediaan peluang kerja lokal, menumbuhkan perekonomian berbasis komunitas, dan mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja formal yang jumlahnya terbatas. Selain itu, ekonomi lokal yang kuat akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan meningkatkan daya beli, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat, mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan muda, memberikan kemudahan akses permodalan dan pelatihan usaha, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pemasaran produk lokal. Peningkatan

pendapatan per kapita harus menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, karena dari sinilah akan lahir tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan masa depan. Tanpa transformasi ekonomi masyarakat yang menyeluruh, upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan pengangguran akan terus terhambat.

4. Permasalahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, kenyataannya angka kemiskinan menunjukkan tren yang belum sepenuhnya membaik, bahkan mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pasca pandemi dan belum kembali ke level sebelum krisis, yang menandakan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat masih lemah dan akses terhadap layanan dasar serta peluang kerja belum sepenuhnya merata.

Salah satu penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan di Bengkulu Tengah adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan sanitasi. Ketimpangan antarwilayah masih sangat terasa, terutama di desa-desa terpencil yang infrastruktur dasarnya belum memadai. Ketika masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, produktivitas menurun, dan beban pengeluaran meningkat, sehingga memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga. Hal ini semakin diperparah dengan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi berbasis lokal.

Tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin berada dalam kelompok usia produktif yang tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai. Mereka umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki akses terhadap pelatihan atau modal usaha, sehingga hanya mampu mengakses pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Ketiadaan peluang kerja yang layak menyebabkan siklus kemiskinan terus berulang, terutama di keluarga-keluarga yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang baik.

Masalah kemiskinan ini juga berdampak lintas sektor, mulai dari tingginya angka putus sekolah, rendahnya status gizi anak, hingga keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengurangan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan yang menyeluruh dengan fokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar dan penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan pada penguatan sistem perlindungan sosial, perluasan program padat karya dan kewirausahaan, serta pembangunan ekonomi lokal yang memberdayakan masyarakat miskin secara langsung. Upaya peningkatan keterampilan kerja dan literasi keuangan juga harus menjadi bagian integral dari program pengurangan kemiskinan agar penduduk miskin tidak hanya keluar dari kemiskinan secara sementara, tetapi mampu mandiri dan bertahan dalam jangka panjang.

Dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin melalui peningkatan akses ke layanan dasar dan peluang kerja, akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Langkah ini menjadi penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal serta menurunkan angka pengangguran secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal

Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan akar dari berbagai persoalan yang saling berkaitan, dan sangat terlihat dari tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda. Tenaga kerja lokal belum mampu bersaing secara optimal di pasar kerja regional maupun nasional karena keterbatasan dalam penguasaan keterampilan, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pengalaman kerja praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini bukan semata disebabkan oleh rendahnya minat kerja, melainkan karena sistem pendidikan dan pelatihan yang belum sepenuhnya responsif terhadap tuntutan pasar tenaga kerja saat ini.

Sebagian besar lulusan pendidikan formal di Bengkulu Tengah tidak dibekali dengan keterampilan teknis yang relevan. Kurikulum yang masih dominan berorientasi pada teori tidak mendorong penguasaan keterampilan kerja berbasis praktik. Hal ini diperparah oleh terbatasnya fasilitas pelatihan dan minimnya program magang yang dapat memberikan pengalaman langsung

kepada pemuda tentang dunia kerja. Ketika tenaga kerja lokal tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, maka ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja menjadi tak terhindarkan, dan akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka.

Kurangnya akses terhadap pelatihan vokasional berbasis industri juga menyebabkan sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah hanya mampu bekerja di sektor informal dan tradisional seperti pertanian dan perdagangan kecil, yang umumnya memiliki produktivitas dan pendapatan rendah. Padahal, sektor-sektor unggulan seperti pertanian modern, industri pengolahan hasil pertanian, serta sektor digital menawarkan peluang besar yang belum dimanfaatkan karena rendahnya kesiapan tenaga kerja lokal. Akibatnya, tenaga kerja dari luar daerah sering kali lebih mudah terserap di sektor-sektor tersebut karena memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Literasi digital yang rendah semakin memperlemah daya saing tenaga kerja lokal. Di era transformasi digital, kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak kerja, pemasaran digital, e-commerce, hingga pengelolaan data menjadi keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh hampir semua sektor. Ketika tenaga kerja lokal tidak menguasai hal-hal tersebut, mereka tidak hanya tertinggal dalam memperoleh pekerjaan, tetapi juga tertutup dari peluang usaha baru yang berbasis teknologi. Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana potensi tenaga kerja lokal tidak berkembang dan bahkan tergantikan oleh tenaga kerja luar yang lebih siap.

Upaya penanggulangan pengangguran pemuda dan peningkatan kualitas tenaga kerja tidak bisa dipisahkan dari strategi peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Diperlukan kebijakan dan intervensi yang terarah, seperti pelatihan berbasis kebutuhan industri, program magang yang terintegrasi, serta pengembangan keterampilan digital untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terserap, tetapi juga mampu berkompetisi di pasar tenaga kerja yang dinamis dan berbasis inovasi.

Dengan memperkuat keterampilan, memperluas akses informasi kerja, dan meningkatkan literasi digital, tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkulu Tengah akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Hal ini pada akhirnya

akan menurunkan tingkat pengangguran, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis pada potensi sumber daya manusianya sendiri.

D. Ketergantungan pada sektor ekonomi primer tanpa dukungan hilirisasi dan lemahnya kapasitas UMKM

Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi sejumlah tantangan mendasar dalam sektor ekonomi dan investasi yang perlu segera diatasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Meskipun memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pertambangan, perekonomian daerah masih sangat tergantung pada komoditas mentah dan belum diimbangi dengan pengembangan sektor hilir maupun sektor tersier. Hal ini menjadikan struktur ekonomi rentan terhadap gejolak harga global dan terbatas dalam menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja berkualitas. Permasalahan tersebut dapat dirinci ke dalam beberapa aspek utama berikut:

1. Fenomena Anomali Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah

Meskipun kemiskinan secara umum dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, kualitas pendidikan, dan ketimpangan pendapatan, namun hubungan antara faktor-faktor tersebut tidak selalu menunjukkan pola yang searah atau linier di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam beberapa kasus, perbaikan pada indikator-indikator makro pembangunan tidak serta-merta diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Hal ini menandakan adanya dinamika sosial dan ekonomi yang lebih kompleks di balik angka-angka makro yang terlihat di permukaan.

Sebagai contoh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren menurun dari 4,45% pada 2020 menjadi 2,56% pada 2024. Namun, pada saat yang sama, angka kemiskinan justru mengalami peningkatan dari 9,40% pada 2023 menjadi 10,14% pada 2024. Ketidaksejajaran ini mengindikasikan bahwa meskipun semakin banyak masyarakat yang bekerja, kualitas pekerjaan yang tersedia kemungkinan masih rendah—baik dari sisi upah, perlindungan kerja, maupun ketahanan terhadap gejolak ekonomi.

Demikian pula, indikator pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan

bahwa peningkatan akses pendidikan belum langsung menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, atau belum cukup menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Aspek ketimpangan juga menunjukkan hasil yang paradoksal. Gini Ratio Kabupaten Bengkulu Tengah yang stabil di angka 0,27 mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif merata. Namun, dalam konteks pendapatan masyarakat yang secara umum masih rendah, pemerataan tersebut belum mampu mendorong sebagian besar penduduk untuk keluar dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, masyarakat Bengkulu Tengah cenderung “sama-sama miskin,” dan bukan “sama-sama sejahtera.”

Jika dicermati secara lebih mendalam, terdapat keanehan atau anomali dalam dinamika data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berbagai indikator sosial dan ekonomi yang membaik dalam lima tahun terakhir tidak selaras dengan tren kemiskinan yang justru meningkat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas data, keandalan metodologi pengukuran, serta efektivitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Hingga saat ini, belum ditemukan literatur atau kajian akademik yang secara spesifik mengupas penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam konteks perbaikan indikator makro yang telah terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang bersifat partisipatif dan kontekstual, untuk menggali faktor-faktor yang belum tercermin dalam data statistik konvensional. Kajian ini penting agar arah perencanaan dan kebijakan pengentasan kemiskinan di masa mendatang dapat lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Ketergantungan Pada Sektor Primer Dan Rendahnya Hilirisasi, Serta Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian masih sangat tinggi. Komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor-sektor ini menyumbang lebih dari 50 persen terhadap perekonomian daerah. Ketergantungan yang besar terhadap sektor-sektor berbasis komoditas ini menjadikan struktur ekonomi daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketika harga kelapa sawit, karet,

atau batu bara mengalami penurunan, maka langsung berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, menurunnya daya beli, serta berkurangnya penerimaan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini memperlihatkan lemahnya ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tekanan eksternal.

Potensi nilai tambah dari sektor primer belum mampu dimaksimalkan karena rendahnya kontribusi sektor sekunder, terutama industri pengolahan. Data menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan hanya menyumbang sekitar 11,95 persen terhadap total PDRB. Ini mencerminkan bahwa hilirisasi dan industrialisasi lokal belum berkembang secara optimal. Sebagian besar hasil pertanian dan tambang masih dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan di daerah. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh daerah atau negara pembeli, sementara Kabupaten Bengkulu Tengah hanya berperan sebagai penyedia bahan baku, tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari siklus produksi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing industri dan perdagangan lokal masih rendah. Minimnya jumlah industri pengolahan skala kecil dan menengah, terbatasnya akses pembiayaan untuk UMKM, serta belum berkembangnya sistem rantai pasok (*supply chain*) yang efisien menjadi hambatan utama. Selain itu, infrastruktur logistik seperti jalan menuju sentra produksi yang masih rusak, belum tersambungnyajaringan distribusi antarwilayah, dan lemahnya dukungan teknologi produksi menyebabkan biaya logistik tinggi dan menurunkan daya saing harga produk lokal di pasar.

Peningkatan daya saing industri dan perdagangan menjadi prioritas strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu mendorong berkembangnya industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti kelapa sawit, kopi, karet, hasil laut, dan hasil hutan bukan kayu, serta potensi dari jeruk kalamansi. Pembangunan kawasan industri terpadu skala kecil menengah, serta penyediaan insentif dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha lokal, dapat menjadi langkah awal untuk memacu pertumbuhan sektor sekunder. Dengan berkembangnya industri pengolahan, maka akan tercipta lapangan kerja baru, penguatan nilai tambah, serta peluang usaha bagi pelaku UMKM dan generasi muda.

Sektor perdagangan juga perlu didorong agar lebih kompetitif melalui integrasi pasar lokal, penguatan promosi produk unggulan, dan digitalisasi

sistem pemasaran. Pelatihan kewirausahaan, pemanfaatan platform e-commerce, dan pembangunan pusat distribusi modern akan memperluas akses pasar bagi produk lokal. Selain itu, penting untuk mengembangkan ekosistem usaha yang mendukung kolaborasi antara industri, koperasi, UMKM, dan komunitas ekonomi kreatif di daerah.

Upaya peningkatan daya saing industri dan perdagangan tidak hanya akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan tangguh, tetapi juga memperluas lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada sektor primer, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi. Perubahan ini akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Rendahnya Daya Saing UMKM dan Akses Terbatas ke Pasar dan Modal

UMKM di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu pilar penting perekonomian daerah. Namun, mayoritas dari 7.120 unit UMKM yang tercatat masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak pelaku usaha masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari sumber informal yang bunganya tinggi. Sementara itu, akses ke perbankan dan lembaga pembiayaan formal kerap terhambat oleh persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi, seperti agunan dan kelengkapan legalitas usaha.

Kendala lain yang krusial adalah keterbatasan akses pasar. Sebagian besar pelaku UMKM hanya mampu memasarkan produk mereka di pasar lokal dengan metode konvensional. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dan minimnya literasi digital menjadi penghambat utama dalam mengembangkan jangkauan pasar ke tingkat regional atau nasional. UMKM juga belum secara maksimal memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan strategi branding digital untuk memperluas basis pelanggan.

Selain itu, regulasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya berpihak pada UMKM memperlambat proses formalitas usaha. Masih banyak pelaku UMKM yang beroperasi tanpa izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan, pelatihan, maupun kemitraan dari pemerintah atau pihak swasta.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem UMKM melalui program peningkatan literasi keuangan dan digital, kemudahan perizinan, penyediaan inkubator bisnis, serta pengembangan platform promosi produk lokal berbasis digital. Insentif bagi UMKM yang mampu tumbuh dan menyerap tenaga kerja juga dapat dijadikan kebijakan afirmatif guna meningkatkan skala dan daya saing usaha.

4. Regulasi dan Iklim Investasi yang Kurang Kondusif

Kabupaten Bengkulu Tengah menyimpan potensi besar dalam investasi, baik di bidang pertanian terpadu, pertambangan berwawasan lingkungan, hingga pengembangan kawasan pariwisata. Namun, iklim investasi di daerah ini masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Salah satu hambatan utama adalah proses perizinan usaha yang panjang, birokratis, dan tidak terintegrasi secara digital. Investor seringkali dihadapkan pada regulasi yang tumpang tindih dan minimnya kepastian hukum, sehingga lebih memilih berinvestasi di daerah lain yang dianggap lebih responsif dan kondusif.

Selain itu, belum terintegrasinya perencanaan ruang dan investasi menyebabkan banyak lahan potensial yang belum dapat dimanfaatkan karena statusnya belum jelas atau terbentur oleh ketidaksinkronan antara RTRW, RDTR, dan rencana pengembangan kawasan ekonomi. Minimnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan layanan perizinan dan informasi juga menjadi penyebab lambatnya realisasi investasi.

Di sisi lain, strategi promosi daerah belum dilakukan secara maksimal. Potensi investasi daerah belum dipublikasikan secara luas dan profesional, baik melalui media digital, website resmi, maupun partisipasi dalam forum-forum investasi nasional dan internasional. Kurangnya publikasi ini menyebabkan potensi investasi yang sebenarnya besar menjadi tidak dikenal oleh calon investor.

Solusi dari tantangan ini meliputi reformasi pelayanan perizinan melalui sistem OSS yang terintegrasi dan efisien, penyusunan peta peluang investasi daerah (investment opportunity map), pembangunan kawasan industri dengan fasilitas lengkap, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang promosi dan pelayanan investasi. Diperlukan pula penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi pusat dalam

membangun ekosistem investasi yang proaktif dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Dengan memahami dan mengatasi ketiga kelompok permasalahan di atas—yakni ketergantungan terhadap sektor primer, lemahnya daya saing UMKM, serta belum kondusifnya iklim investasi—Kabupaten Bengkulu Tengah dapat memulai transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi masa depan. Upaya ini harus dibarengi dengan perencanaan jangka menengah yang menyeluruh, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antar pemangku kepentingan, agar visi pembangunan daerah sebagai wilayah yang mandiri, sejahtera, dan kompetitif dapat terwujud secara nyata.

E. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan kehidupan religius.

1. Rendahnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Terhadap Anak

Permasalahan rendahnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Bengkulu Tengah masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan.

Data terbaru menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender di Kabupaten Bengkulu Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencerminkan adanya kesenjangan nyata dalam capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini terlihat pada tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta partisipasi dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks pemberdayaan gender yang mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya ekonomi juga menunjukkan nilai yang masih rendah, yang berarti perempuan belum memperoleh ruang yang setara dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Permasalahan ini diperkuat dengan tingginya indeks ketimpangan gender, yang menunjukkan bahwa perempuan masih lebih rentan terhadap kemiskinan, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Banyak perempuan di wilayah pedesaan masih bekerja di

sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial, serta menghadapi beban ganda antara peran domestik dan publik. Ketiadaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, tempat penitipan anak, dan transportasi umum yang aman juga turut memperkuat hambatan keterlibatan perempuan dalam ruang sosial dan ekonomi.

Dari sisi perlindungan anak, indeks perlindungan anak di kabupaten ini menunjukkan nilai yang belum optimal. Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, maupun berbasis digital, masih sering terjadi. Keterbatasan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan psikologis, dan lemahnya kapasitas lembaga perlindungan anak menyebabkan banyak kasus tidak tertangani secara tuntas. Di samping itu, praktik perkawinan usia dini masih dijumpai di beberapa wilayah, yang berakibat buruk pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak perempuan.

Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kehidupan religius yang sejatinya dapat menjadi pilar dalam mendorong kesadaran kolektif untuk menghargai perempuan dan melindungi anak. Ketika nilai-nilai tersebut mulai ditinggalkan, maka ketimpangan gender dan pelanggaran terhadap hak-hak anak tidak lagi dianggap sebagai persoalan sosial, melainkan hal yang biasa dan dibiarkan.

Strategi peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan, meningkatkan kapasitas lembaga layanan sosial, serta memperluas program pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang ekonomi dan kepemimpinan. Di sisi lain, masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya membangun budaya yang mendukung keadilan gender dan perlindungan anak melalui pendidikan karakter, pelibatan tokoh masyarakat, serta kampanye publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya akan memperbaiki indikator pembangunan sosial, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan sejahtera.

2. Belum Optimalnya Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Permasalahan belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan

tantangan penting yang perlu segera diatasi dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan kondusif. Di beberapa wilayah, masih terjadi konflik horizontal antarwarga, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian remaja, serta tindakan kriminalitas ringan yang mengganggu rasa aman masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa jaminan atas rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya terwujud, dan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum masih belum optimal.

Indikator yang menunjukkan kondisi ini adalah nilai indeks penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori sedang dan belum mengalami peningkatan signifikan. Nilai indeks ini mencerminkan sejauh mana kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi ketertiban, pengamanan lingkungan, dan perlindungan masyarakat. Rendahnya nilai indeks ini mengindikasikan masih lemahnya pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban sosial, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya koordinasi lintas sektor dalam menangani potensi gangguan sosial di tingkat lokal.

Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya jumlah personel dan kapasitas kelembagaan penegak ketertiban seperti Satpol PP, serta belum terbangunnya mekanisme kolaboratif yang kuat antara aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat. Selain itu, sistem pelaporan dan penyelesaian konflik sosial di tingkat desa atau kelurahan belum berjalan secara efektif, sehingga banyak permasalahan yang berlarut-larut dan berpotensi memicu ketegangan baru dalam masyarakat.

Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kehidupan religius. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan rasa hormat yang selama ini menjadi penopang keharmonisan sosial mulai tergerus oleh perubahan gaya hidup dan melemahnya ikatan komunitas. Ketika norma dan nilai sosial tidak lagi dijadikan rujukan dalam interaksi masyarakat, maka potensi munculnya konflik, perpecahan, dan pelanggaran ketertiban menjadi lebih besar.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparat penegak ketertiban, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta mendorong revitalisasi nilai-nilai sosial budaya yang mendukung keharmonisan dan ketentraman. Forum kemasyarakatan seperti FKPM, kelompok pemuda, organisasi keagamaan, dan lembaga adat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya menjaga ketertiban di tingkat lokal.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan *trantibumlinmas* bukan hanya berdampak pada rasa aman, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang rukun, tertib, dan sejahtera. Ketika masyarakat merasa aman dan terlindungi, maka partisipasi dalam pembangunan akan meningkat, dan iklim sosial akan lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

3. Belum Optimalnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Spiritual Keluarga

Permasalahan belum optimalnya ketahanan sosial, ekonomi, dan spiritual keluarga di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sosial. Ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, dan produktif. Namun, kenyataannya masih banyak keluarga yang menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan stabilitas sosial, ekonomi, dan spiritual mereka, terutama di tengah dinamika sosial dan tekanan ekonomi saat ini.

Indikator yang mencerminkan kondisi ini adalah nilai Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*), yang mengukur kualitas keluarga dari tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan spiritual. Data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai *iBangga* di Kabupaten Bengkulu Tengah masih berada pada kategori sedang, bahkan cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas keluarga secara umum belum mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak keluarga yang masih menghadapi permasalahan dalam hal pengasuhan anak, komunikasi antarkeluarga, perencanaan keuangan, serta pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi ketahanan sosial, masih terdapat ketimpangan dalam pola pengasuhan dan pembinaan karakter anak. Kasus kekerasan dalam rumah

tangga, pernikahan usia dini, serta rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak merupakan gejala nyata lemahnya struktur sosial dalam keluarga. Kondisi ini dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dan meningkatkan risiko kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta konflik dalam rumah tangga.

Aspek ekonomi, sebagian besar keluarga di wilayah pedesaan masih bergantung pada sektor informal dan pekerjaan berupah rendah, tanpa jaminan sosial maupun tabungan jangka panjang. Kondisi ini membuat banyak keluarga rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Ketidakstabilan ekonomi rumah tangga juga mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi anak.

Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam kehidupan keluarga turut memperlemah ketahanan moral dan etika generasi muda. Aktivitas keagamaan keluarga yang minim, kurangnya keteladanan orang tua, dan melemahnya pengaruh adat serta norma lokal menyebabkan banyak keluarga kehilangan arah dalam membentuk harmoni sosial dan spiritual dalam rumah tangga. Padahal nilai-nilai religius dan budaya lokal berperan penting sebagai penyangga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern.

Permasalahan ini juga berkaitan langsung dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan kehidupan religius. Ketika nilai-nilai lokal tidak lagi menjadi landasan dalam kehidupan keluarga, maka fungsi keluarga sebagai pusat pembentukan karakter, etika, dan solidaritas sosial menjadi melemah. Hal ini pada akhirnya berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas harus dilakukan secara holistik melalui peningkatan edukasi keluarga, penguatan program bimbingan keluarga melalui PKK, Posyandu, dan penyuluh agama, serta perluasan akses terhadap layanan ekonomi produktif bagi keluarga. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam kebijakan pembangunan keluarga, serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang mendukung ketahanan keluarga secara

berkelanjutan. Meningkatkan nilai iBangga bukan hanya soal meningkatkan skor indeks, tetapi juga tentang memperkuat fondasi sosial masyarakat dari unit terkecilnya keluarga demi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, berdaya, dan religius.

F. Bidang Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, Kabupaten Bengkulu Tengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat terciptanya pemerintahan yang modern dan responsif. Permasalahan dalam hal efisiensi birokrasi, rendahnya pemanfaatan teknologi, lemahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi isu-isu utama yang perlu segera diatasi secara sistematis dan terarah. Berbagai tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Rendahnya Efisiensi dan Profesionalisme Birokrasi

Salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendahnya efisiensi dan profesionalisme birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Meskipun beberapa unit kerja telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, masih banyak prosedur pelayanan yang bersifat manual, tidak terstandarisasi, dan berbelit-belit. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan publik menjadi lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan administratif. Masyarakat kerap mengeluhkan lamanya waktu penyelesaian dokumen atau ketidakjelasan informasi, yang mencerminkan lemahnya manajemen internal pemerintahan.

Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penempatan dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di berbagai OPD sering kali belum sepenuhnya berdasarkan kinerja dan kompetensi. Akibatnya, banyak pegawai yang tidak bekerja sesuai bidang keahliannya, sehingga potensi individu tidak termanfaatkan secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas birokrasi dan minimnya inovasi dalam pelaksanaan program kerja. Di sisi lain, mekanisme evaluasi kinerja ASN masih bersifat administratif dan kurang mengukur hasil kerja yang sesungguhnya. Pengawasan internal terhadap kedisiplinan, efektivitas kerja, serta orientasi pelayanan masyarakat juga belum berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah perlu melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif yang menitikberatkan pada efisiensi proses, sistem berbasis kinerja, serta peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis dan manajerial yang relevan. Modernisasi tata kelola birokrasi harus dimulai dengan penyusunan SOP yang jelas, penegakan disiplin kerja, dan penguatan sistem reward and punishment yang transparan dan adil.

2. Rendahnya Penerapan Teknologi dalam Pelayanan Publik (Digitalisasi Pemerintahan)

Transformasi digital dalam pemerintahan telah menjadi kebutuhan di era modern, namun penerapannya di Kabupaten Bengkulu Tengah masih tergolong rendah. Banyak layanan publik yang seharusnya dapat diakses secara daring, seperti pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan pengaduan, masih dilakukan secara manual. Hal ini tidak hanya memperpanjang waktu pelayanan, tetapi juga menyulitkan masyarakat—khususnya mereka yang berada di wilayah pedesaan—untuk mengakses layanan secara mudah dan cepat.

Permasalahan ini berakar pada minimnya infrastruktur teknologi informasi, terutama di kantor-kantor pelayanan tingkat kecamatan dan desa. Ketersediaan jaringan internet yang tidak merata, kurangnya perangkat komputer, serta tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi antar-OPD menjadi hambatan utama dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi pemerintahan menyebabkan banyak aplikasi pelayanan tidak diperbarui atau tidak berjalan optimal.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Masih banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital atau tidak memiliki keterampilan teknologi informasi dasar, sehingga potensi digitalisasi belum termanfaatkan secara maksimal. Untuk mendorong digitalisasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital secara merata, menyediakan pelatihan literasi teknologi secara berkala, dan mulai membangun sistem e-government yang terintegrasi, seperti e-office, e-budgeting, dan e-monitoring sebagai fondasi layanan publik berbasis teknologi.

3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sayangnya, di Kabupaten Bengkulu Tengah, aspek ini masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Transparansi anggaran, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Masyarakat sulit mengakses informasi terkait penggunaan dana publik, sehingga potensi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi sangat terbatas.

Proses pelaporan keuangan juga belum sepenuhnya berbasis sistem digital yang andal. Banyak laporan keuangan yang masih disusun secara manual, mengakibatkan keterlambatan, ketidaktepatan data, dan potensi penyimpangan. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal belum memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk melakukan audit secara berkala dan menyeluruh terhadap program-program pemerintah daerah. Ditambah lagi, tidak semua kegiatan pembangunan dilengkapi dengan mekanisme pelaporan hasil yang transparan kepada masyarakat.

Upaya untuk memperbaiki kondisi ini harus dimulai dengan implementasi sistem keuangan berbasis digital yang memungkinkan pelaporan real-time, audit berbasis risiko, serta akses informasi publik melalui laman resmi pemerintah daerah. Penguatan fungsi Inspektorat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga harus didorong melalui forum-forum keterbukaan anggaran, konsultasi publik, dan pelaporan berbasis masyarakat (citizen report card).

4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif dan responsif. Namun, partisipasi tersebut masih tergolong rendah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang seharusnya menjadi ajang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat, sering kali hanya dijadikan agenda formalitas yang melibatkan segelintir kelompok. Akses informasi yang minim dan belum meratanya literasi pembangunan menyebabkan banyak warga—terutama di

daerah terpencil—tidak mengetahui hak dan ruang mereka untuk terlibat dalam perencanaan.

Kesenjangan informasi ini diperparah oleh belum adanya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Media komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun dialog dua arah dengan publik. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang diambil pemerintah berisiko tidak tepat sasaran karena tidak merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah perlu menciptakan forum yang lebih terbuka, interaktif, dan berbasis komunitas. Sosialisasi program pembangunan, penguatan kapasitas kelompok masyarakat, serta penyediaan platform digital untuk aspirasi publik adalah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong partisipasi lebih luas dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Dengan mengatasi keempat aspek krusial ini—yakni birokrasi yang tidak efisien, lambatnya digitalisasi layanan publik, rendahnya transparansi keuangan, serta minimnya partisipasi masyarakat—Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat membangun tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan akuntabel. Pemerintahan yang terbuka dan efisien tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat efektivitas pembangunan di berbagai sektor. Langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan terintegrasi perlu segera dilaksanakan sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang lebih baik, adil, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

G. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Isu lingkungan hidup dan tata ruang di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat berbagai tantangan ekologis yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Masalah lingkungan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas sektor ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup secara umum.

Permasalahan utama dalam bidang ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Degradasi Lingkungan Akibat Aktivitas Ekonomi

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Namun, aktivitas eksploitasi yang tidak terkontrol dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup parah. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit serta kegiatan pertambangan, terutama tambang batu bara, telah mengubah lanskap ekologi daerah secara signifikan. Kawasan hutan yang semestinya menjadi penyangga ekosistem dan pelindung keanekaragaman hayati kini terus menyusut. Luas hutan yang mencapai 27.330,83 hektar mencakup kawasan hutan lindung dan produksi, namun sebagian besar telah mengalami tekanan dari ekspansi ekonomi.

Dampak nyata dari aktivitas ini terlihat pada memburuknya kualitas air sungai, seperti Air Bengkulu dan Air Palik, yang mengalami sedimentasi tinggi dan pencemaran akibat limbah perkebunan maupun pertambangan. Penurunan debit air di musim kemarau dan meningkatnya intensitas banjir di musim hujan menunjukkan terganggunya siklus hidrologi. Erosi tanah dari lahan terbuka dan perbukitan yang tidak dikelola dengan baik mempercepat pengendapan sedimen di badan sungai, sehingga kapasitas tampung air menurun drastis. Di sisi lain, penurunan tutupan hutan juga berdampak pada keanekaragaman hayati—flora dan fauna lokal kehilangan habitatnya, dan sebagian spesies terancam punah akibat tekanan lingkungan yang semakin besar.

Untuk meredam laju degradasi ini, perlu diambil kebijakan tegas yang mengatur aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, termasuk penerapan reklamasi pasca-tambang, kewajiban tata kelola lingkungan bagi perusahaan, serta promosi sistem agroforestry dan pertanian konservasi sebagai alternatif praktik yang ramah lingkungan. Upaya restorasi ekologis harus menjadi prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

2. Kurangnya Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau

Dalam konteks perencanaan tata ruang, Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan serius dalam menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai, terutama di kawasan perkotaan yang terus berkembang.

Hingga saat ini, ketersediaan RTH masih belum mencapai target ideal 30% dari luas wilayah perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional. Pembangunan kawasan permukiman, fasilitas publik, dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Karang Tinggi, Pondok Kelapa, dan Talang Empat kerap mengorbankan ruang terbuka yang seharusnya dilindungi.

Ketiadaan RTH yang memadai berakibat langsung pada penurunan kualitas lingkungan kota, seperti peningkatan suhu udara, berkurangnya daerah resapan air, dan minimnya ruang rekreasi publik. Di samping itu, kurangnya kawasan lindung juga memperbesar risiko bencana alam, terutama di wilayah-wilayah perbukitan seperti Taba Penanjung dan Merigi Kelindang, yang rawan longsor akibat lereng gundul dan kurangnya vegetasi penahan tanah. Daya dukung lingkungan pun semakin menurun karena konversi lahan tidak selalu mempertimbangkan faktor ekologis.

Solusi yang dapat ditempuh adalah penguatan regulasi tata ruang yang berpihak pada pelestarian kawasan hijau, termasuk revisi RTRW dan penegakan zonasi kawasan lindung. Pemerintah daerah juga perlu mendorong program penghijauan kota, pemanfaatan ruang sempit menjadi taman kota, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi ruang terbuka. Ruang hijau yang dikelola secara baik bukan hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan sosial masyarakat urban.

3. Peningkatan Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim global telah dirasakan secara nyata di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peningkatan frekuensi dan intensitas hujan, perubahan pola musim, serta meningkatnya suhu permukaan menjadi faktor pendorong risiko bencana yang semakin tinggi. Kabupaten ini kini termasuk dalam kategori risiko bencana menengah hingga tinggi, dengan indeks risiko bencana mencapai 163,99 pada tahun 2023. Banjir dan tanah longsor menjadi ancaman utama, terutama di kawasan hilir dan perbukitan.

Hujan ekstrem dalam waktu singkat menyebabkan banjir besar di wilayah seperti Talang Empat dan Pondok Kelapa, yang sering kali menggenangi permukiman dan merusak infrastruktur jalan serta fasilitas umum. Sementara itu, di daerah perbukitan yang telah kehilangan tutupan vegetasi, seperti di Kecamatan Merigi Sakti dan Pagar Jati, potensi tanah

longsor semakin meningkat, mengancam keselamatan penduduk dan mengganggu jalur distribusi ekonomi antarwilayah. Ketidaksiapan infrastruktur menghadapi bencana, seperti buruknya sistem drainase dan belum adanya tanggul pengendali banjir, turut memperbesar dampak kerugian ekonomi dan sosial.

Langkah mitigasi yang dapat dilakukan mencakup penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan tanah longsor, pembangunan sistem peringatan dini, serta integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan desa. Edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana juga penting agar masyarakat lebih tanggap dan mandiri dalam menghadapi situasi darurat. Adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari strategi pembangunan lintas sektor.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Akan Lingkungan Berkelanjutan

Salah satu tantangan non-struktural dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendahnya kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di tingkat masyarakat. Praktik seperti pembakaran sampah, pembuangan limbah ke sungai, serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebih di sektor pertanian masih sering ditemukan. Hal ini menjadi indikator rendahnya literasi lingkungan di berbagai kalangan, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, minimnya sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat rumah tangga menyebabkan sebagian besar sampah tidak terkelola dengan baik. Sekitar 45% rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki akses terhadap fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah yang layak. Di sisi lain, program sosialisasi dan edukasi lingkungan dari pemerintah daerah belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara intensif dan konsisten.

Untuk meningkatkan kesadaran, diperlukan pendekatan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Pemerintah dapat mendorong terbentuknya kelompok-kelompok sadar lingkungan, seperti bank sampah, kelompok tani organik, dan sekolah adiwiyata, yang mampu menjadi motor penggerak perubahan perilaku masyarakat. Insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menjalankan praktik ramah lingkungan juga dapat mendorong perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan penanganan yang tepat terhadap isu degradasi lingkungan, minimnya ruang terbuka hijau, risiko perubahan iklim, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menata arah pembangunan yang lebih selaras dengan prinsip keberlanjutan. Pendekatan tata ruang yang berbasis ekosistem, pengelolaan lingkungan yang kolaboratif, serta penguatan kelembagaan dan regulasi akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan jangka panjang.

2.7. Isu Strategis

2.7.1. Isu Strategis KLHS

A. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat

Salah satu isu strategis yang menonjol dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta akses terhadap layanan dasar lainnya. Berdasarkan hasil kajian dalam dokumen KLHS RPJMD, diketahui bahwa tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, keterbatasan infrastruktur sosial, rendahnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia menjadi akar dari rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, yang berdampak pada ketimpangan distribusi sumber daya dan layanan publik. Masih terdapat wilayah-wilayah yang belum mendapatkan akses air bersih, sanitasi layak, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini turut berkontribusi terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbatas, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali belum menjawab kebutuhan kelompok rentan secara utuh.

Dari sisi lingkungan strategis, KLHS menyoroti bahwa tekanan terhadap lingkungan hidup, seperti degradasi lahan, bencana alam, dan perubahan iklim, secara tidak langsung memperburuk kondisi sosial masyarakat. Kelompok

masyarakat miskin umumnya tinggal di wilayah yang lebih rentan terhadap bencana dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam yang kian menurun kualitasnya. Hal ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi maupun ekologis.

Secara keseluruhan, isu ini berkaitan erat dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 5 (Kesetaraan Gender), TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas dimensi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, penguatan kapasitas masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah harus menjadi prioritas utama, melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta pengarusutamaan inklusi dan kesetaraan dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah.

B. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya Saing daerah

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya saing daerah. Meskipun Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta kekayaan ekoregion yang beragam, kenyataannya sektor-sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara maksimal untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), isu ini berkaitan erat dengan TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), serta TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan). KLHS menekankan pentingnya transformasi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis potensi wilayah. Rendahnya daya saing juga diperparah oleh belum optimalnya infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan

teknologi dan inovasi, yang kesemuanya berdampak pada terbatasnya investasi dan lapangan kerja berkualitas.

KLHS merekomendasikan agar pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator TPB melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur ekonomi hijau, serta penguatan tata kelola yang mendorong inovasi dan kolaborasi multipihak. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial antarwilayah dan antar kelompok masyarakat.

C. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur Strategis

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu isu utama yang mengemuka dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antarwilayah, sarana air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan akses terhadap layanan publik lainnya, masih menjadi kendala yang nyata di berbagai kecamatan. Hal ini tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperlemah konektivitas ekonomi lokal. Infrastruktur yang belum merata turut memperbesar risiko kerentanan terhadap bencana, menghambat pelayanan dasar yang layak, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat terutama di wilayah yang secara geografis terisolasi atau rentan.

Isu ini juga sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara khusus, TPB 9 mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan inovatif sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, TPB 11 menekankan pentingnya pembangunan kawasan pemukiman yang aman, layak huni, inklusif, dan tangguh terhadap bencana. Dalam konteks Bengkulu Tengah, kondisi infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat pencapaian target-target TPB ini, khususnya dalam memperluas akses terhadap transportasi publik, fasilitas layanan dasar, serta menciptakan kawasan yang aman dan tangguh.

Percepatan penyediaan infrastruktur strategis perlu menjadi agenda prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang responsif terhadap tantangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berbasis pada prinsip-prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur tidak hanya menjadi pendorong utama dalam membangun daya saing daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Tingginya resiko bencana dan ancaman Perubahan iklim

Isu tingginya risiko bencana dan ancaman perubahan iklim di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan tantangan strategis yang perlu segera direspon dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025–2029, fenomena perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan, yang semuanya memperparah degradasi lingkungan dan meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki topografi bergelombang dan berbukit serta ekoregion yang kompleks turut memperbesar potensi risiko tersebut.

Permasalahan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Dalam konteks TPB 13, Kabupaten Bengkulu Tengah dituntut untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan memperkuat ketahanan terhadap bencana melalui kebijakan mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen RPJMD. Selain itu, pendekatan pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berbasis ekosistem sangat penting diterapkan, terutama pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terbatas.

KLHS juga menekankan pentingnya memperhatikan kerentanan dan kapasitas adaptasi masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan, agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan ekologis. Oleh karena itu, isu perubahan iklim dan risiko bencana harus menjadi dasar dalam merumuskan misi, sasaran, strategi, serta program pembangunan daerah, agar Kabupaten Bengkulu Tengah mampu mewujudkan pembangunan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Menurunnya Kualitas Lingkungan dan terjadinya degradasi lahan

Isu strategis “Menurunnya Kualitas Lingkungan dan Terjadinya Degradasi Lahan” di Kabupaten Bengkulu Tengah mencerminkan tantangan nyata dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029, kerusakan lingkungan telah terjadi secara signifikan, terutama pada kawasan hutan konservasi dan wilayah dengan potensi konflik lahan yang tinggi. Kabupaten ini juga menghadapi tekanan dari aktivitas pembangunan yang tidak selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta lemahnya kontrol terhadap alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan konversi kawasan lindung.

Permasalahan ini berimplikasi langsung terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 15 (Ekosistem Daratan), dan TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Kerusakan hutan yang terus berlangsung tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati seperti flora endemik *Rafflesia Arnoldii* dan fauna khas lainnya, tetapi juga memperparah risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Degradasi lahan turut menurunkan produktivitas pertanian dan merusak jasa ekosistem penting yang mendukung kehidupan masyarakat lokal.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, isu ini menuntut adanya kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih kuat, pengelolaan ruang yang berwawasan ekologis, serta pengendalian pemanfaatan lahan berbasis analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan demi menjamin kualitas hidup generasi mendatang.

2.7.2. Isu Strategis Global

Isu strategis global merupakan tantangan atau permasalahan berskala internasional yang berdampak luas dan lintas batas negara, mencakup berbagai aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, kesehatan, dan keamanan. Isu-isu ini muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi, kemajuan teknologi, dan ketimpangan pembangunan antarnegara, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen kolektif dari seluruh dunia. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi di tingkat nasional dan daerah,

termasuk dalam aspek ketahanan pangan, bencana alam, inflasi, kemiskinan, dan stabilitas sosial. Pemerintah daerah perlu memahami dan merespons isu strategis global dalam setiap perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, agar kebijakan yang diambil mampu adaptif terhadap dinamika global dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Merujuk dari world bank report, UNICEF Global Report, UN Desa, CDC's Global, Global Climate Report dan European Central Bank terdapat 8 (delapan) isu Global sebagai berikut ini:

A. Ketidak Setaraan Sosial dan Ekonomi Global

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi global merupakan salah satu isu paling mendasar yang terus membayangi tatanan dunia modern. Di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya masih jauh dari merata. Data dari World Inequality Database tahun 2024 menunjukkan bahwa 10% individu terkaya menguasai lebih dari 50% pendapatan nasional di banyak negara besar seperti India, Rusia, dan Amerika Serikat. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, sekitar 3,4 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan pendapatan kurang dari \$6,85 per hari, angka yang mencerminkan kondisi kerentanan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya polarisasi, tetapi juga menjadi hambatan utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan yang merata, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan yang layak.

Ketidaksetaraan yang semakin melebar juga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global, karena melemahkan daya beli masyarakat luas dan mempersempit basis konsumsi domestik di banyak negara. Selain itu, ketimpangan dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan, memperkuat populisme, dan menciptakan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, isu ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan di tingkat global maupun nasional untuk merumuskan strategi redistribusi ekonomi yang adil, memperkuat perlindungan sosial, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.

B. Transformasi Digital dan Revolusi Industri 4.0

Transformasi digital dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah secara fundamental cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengelola sumber daya. Perkembangan pesat teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan, big data, dan otomatisasi cerdas menjadi pendorong utama dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi lintas sektor mulai dari manufaktur, pertanian, hingga layanan publik. Diperkirakan pasar global Industri 4.0 akan mencapai nilai sebesar 279,75 miliar dolar AS pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang tak terelakkan dalam lanskap pembangunan global, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inovatif dan terintegrasi.

Namun, di balik potensi besar tersebut, transformasi digital juga membawa tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan digital, yakni disparitas akses terhadap teknologi antara negara maju dan berkembang, atau bahkan antara kawasan urban dan rural di dalam satu negara. Ketimpangan ini berisiko memperlebar jurang ketidaksetaraan, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi berbasis digital. Selain itu, meningkatnya pemanfaatan data dan teknologi canggih juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang komprehensif, baik terkait perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI, maupun keamanan siber. Penguatan kapasitas digital dan penyusunan kebijakan yang adaptif menjadi kunci agar transformasi ini dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

C. Krisis Pangan dan Energi

Krisis pangan dan energi telah menjadi isu strategis yang mengancam ketahanan global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok. Laporan Global Report on Food Crises 2024 mencatat bahwa sekitar 282 juta orang di 59 negara mengalami kelaparan akut, yang sebagian besar disebabkan oleh konflik bersenjata, tekanan ekonomi, dan kejadian iklim ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Lonjakan harga pangan global turut memperparah kerentanan kelompok miskin dan rentan, serta menghambat pencapaian tujuan pengentasan kelaparan dan malnutrisi di berbagai wilayah. Ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi pangan

juga menunjukkan lemahnya sistem pertanian dan logistik global dalam menghadapi guncangan berskala besar.

Krisis energi global semakin memperkuat tekanan terhadap perekonomian dunia. Ketidakstabilan pasokan energi akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak dan gas, serta keterbatasan akses terhadap energi bersih menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan energi antarnegara. Harga energi yang tinggi tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga menurunkan daya saing industri, khususnya di negara-negara berkembang. Situasi ini menunjukkan urgensi transisi menuju energi terbarukan yang lebih stabil, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong investasi dalam ketahanan energi nasional dan sistem pangan yang adaptif terhadap krisis global.

D. Migrasi, Urbanisasi dan Perkotaan Global

Migrasi internasional dan urbanisasi menjadi fenomena global yang terus meningkat seiring dengan perubahan demografi, ketimpangan pembangunan, serta tekanan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2024, jumlah migran internasional tercatat mencapai 304 juta orang, naik signifikan dari 275 juta pada tahun 2020. Migrasi terjadi karena berbagai faktor seperti konflik, perubahan iklim, kemiskinan, serta harapan terhadap kehidupan yang lebih baik di negara atau kota tujuan. Mobilitas manusia dalam skala besar ini tidak hanya berdampak pada negara tujuan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks bagi negara asal maupun transit.

Urbanisasi yang berlangsung dengan sangat cepat telah menciptakan tekanan besar terhadap kota-kota global, terutama di negara berkembang. Pertumbuhan populasi perkotaan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai menyebabkan munculnya berbagai permasalahan seperti kemacetan, kekurangan perumahan layak, sanitasi buruk, dan akses terbatas terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu, urbanisasi juga memperbesar risiko ketimpangan sosial dan segregasi wilayah di dalam kota itu sendiri, yang dapat memicu konflik sosial dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan kebijakan migrasi yang inklusif agar proses urbanisasi dan perpindahan penduduk dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan.

E. Penurunan Kepercayaan Terhadap Institusi Pemerintahan

Penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menjadi fenomena global yang kian mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hasil survei Pew Research Center pada Mei 2024 menunjukkan bahwa hanya 22% warga Amerika Serikat yang percaya bahwa pemerintah mereka akan melakukan hal yang benar. Kondisi serupa juga terlihat di negara-negara OECD, di mana 44% responden menyatakan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kepercayaan terhadap pemerintah nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidaktransparanan, korupsi, ketidakefisienan layanan publik, serta kegagalan pemerintah dalam merespons krisis seperti pandemi dan perubahan iklim. Ketika kepercayaan publik menurun, legitimasi pemerintah pun turut tergerus, memicu apatisme politik, penurunan partisipasi warga negara, hingga meningkatnya populisme dan disinformasi.

Dampak dari fenomena global ini juga berpotensi dirasakan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketika masyarakat mulai meragukan integritas dan kapabilitas pemerintah daerah, akan muncul hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan, resistensi terhadap kebijakan publik, dan menurunnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal. Kurangnya kepercayaan dapat memperlambat reformasi birokrasi dan melemahkan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif. Penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi digital seperti Command Center, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kebijakan menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan daerah yang inklusif dan akuntabel.

F. Ancaman Pandemi dan Kesehatan Global

Ancaman pandemi dan gangguan kesehatan global masih menjadi perhatian utama dunia, bahkan setelah berakhirnya fase krisis dari pandemi COVID-19. Tahun 2024 mencatat setidaknya 17 wabah penyakit menular yang tergolong berbahaya, termasuk kemunculan virus Marburg dan varian baru flu burung (H5Nx), yang menunjukkan bahwa potensi penyebaran penyakit lintas negara tetap tinggi. Selain itu, kasus demam berdarah dilaporkan mencapai lebih dari 12 juta di berbagai wilayah tropis, menjadikannya angka tertinggi sepanjang sejarah. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya respons cepat,

koordinasi lintas negara, serta investasi berkelanjutan dalam sistem pengawasan dan deteksi dini.

Di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi, urbanisasi yang padat, dan perubahan iklim yang memperluas habitat vektor penyakit, sistem kesehatan masyarakat harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap ancaman baru maupun yang terus berkembang. Pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menghantam stabilitas ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial. Oleh karena itu, pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif, termasuk di tingkat lokal seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi sangat penting. Upaya ini meliputi penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan dan pengawasan penyakit, serta edukasi masyarakat secara masif agar siap menghadapi risiko kesehatan global di masa depan.

G. Geopolitik dan Fragmentasi Global

Geopolitik dan fragmentasi global menjadi salah satu isu strategis yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antarnegara, terutama antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan internasional yang ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, sanksi ekonomi, serta pembentukan blok-blok aliansi baru yang saling bersaing. Situasi ini memicu ketidakstabilan global dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan internasional, aliran modal, serta rantai pasok global. Data terbaru menunjukkan bahwa fragmentasi geopolitik telah menyebabkan penurunan aliran investasi langsung asing (FDI) global sekitar 3% atau setara dengan €30 miliar pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dunia turut tergerus akibat eskalasi ketegangan politik antarnegara.

Dampak dari fragmentasi geopolitik ini tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi juga menular ke tingkat nasional dan daerah. Ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi internasional dapat memengaruhi stabilitas harga komoditas, kelangkaan barang impor penting, serta menurunkan daya saing ekspor daerah. Bagi daerah seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui penguatan sektor ekonomi lokal, diversifikasi sumber

pertumbuhan, serta membangun iklim investasi yang kondusif agar tetap resilien terhadap dampak dinamika geopolitik global.

H. Perubahan Iklim dan Krisis Ekologis

Perubahan iklim dan krisis ekologis merupakan tantangan terbesar umat manusia di abad ke-21 yang dampaknya semakin nyata dan luas. Tahun 2024 mencatat rekor suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, dengan 14,5% permukaan bumi mengalami suhu ekstrem pada bulan Juni. Kenaikan suhu ini mendorong peningkatan intensitas dan frekuensi bencana alam seperti gelombang panas, banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan badai tropis. Selain itu, kebakaran hutan besar-besaran, terutama di wilayah tropis seperti Amazon, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara, telah menyebabkan kehilangan hutan seluas 6,7 juta hektar angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memperburuk krisis keanekaragaman hayati, meningkatkan emisi karbon, serta mengganggu siklus air dan pertanian global.

Di tengah tekanan tersebut, krisis ekologis juga memperbesar risiko terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi, terutama bagi negara berkembang dan daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Kabupaten Bengkulu Tengah, misalnya, yang memiliki wilayah pesisir, pertanian, dan hutan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti abrasi pantai, gagal panen, dan berkurangnya debit air bersih. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kebijakan sektoral, termasuk melalui konservasi lingkungan, penggunaan energi terbarukan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta edukasi masyarakat terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

2.7.3. Isu Strategis Nasional

Untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis nasional menjadi hal krusial bagi Kabupaten Bengkulu Tengah. Isu-isu ini tidak hanya merefleksikan arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2025–2029, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan utama bagi pemerintah daerah dalam merancang rencana pembangunan jangka menengah

yang adaptif, relevan, dan sesuai dengan dinamika serta potensi lokal. Kesesuaian antara agenda transformasi nasional dan kondisi riil di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi fondasi penting dalam menentukan strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin pembangunan yang efektif, inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya saing daerah. Analisis yang komprehensif terhadap isu-isu strategis nasional beserta relevansinya dengan konteks Kabupaten Bengkulu Tengah, agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka menyusun isu strategis Kabupaten Bengkulu Tengah, diperlukan analisa yang tepat terhadap isu-isu yang mempengaruhinya. Berdasarkan kajian pada dokumen RPJMN 2025-2029, telah diidentifikasi terdapat lima isu strategis nasional seperti, Isu Transformasi Sosial Nasional, Isu Transformasi Ekonomi Nasional, Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dan Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi. Berdasarkan isu-isu tersebut secara lebih mendalam akan dibahas isu dan permasalahan yang mendasarinya.

A. Isu Transformasi Sosial Nasional

Agenda pembangunan nasional 2025–2029 menempatkan pemenuhan pelayanan dasar sebagai prioritas utama, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Namun, pelaksanaan agenda ini masih menghadapi tantangan di berbagai sektor yang memerlukan kebijakan yang tepat dan strategi yang terarah.

Sektor kesehatan, Kabupaten Bengkulu Tengah masih menghadapi rendahnya cakupan layanan, tingginya angka penyakit menular dan tidak menular, serta ketimpangan akses antarwilayah. Di bidang pendidikan, persoalan meliputi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, distribusi guru yang belum merata, serta rendahnya daya saing perguruan tinggi. Perlindungan sosial masih menghadapi persoalan akurasi sasaran, keterbatasan layanan bagi kelompok rentan, serta rendahnya literasi dan cakupan program jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu merumuskan kebijakan yang selaras dengan strategi nasional dan

berbasis pada kebutuhan lokal, agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II-62. Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Kesehatan untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi (189/100.000)
		Stunting masih tinggi (21,6%)
		Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)
		Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk usia ≥10 tahun masih rendah (66,5%)
		Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
		Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
		43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
		20,36% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
		78,35% rumah sakit terakreditasi paripurna
		63,54% FKTP terakreditasi paripurna
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Akses pendidikan belum merata (APK PAUD rendah; tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA sederajat 76,79%)
		Kualitas pendidikan masih rendah (skor PISA: membaca 359; matematika 366; sains 383)
		Kualitas fasilitas, dan distribusi guru terbatas (<50% memiliki sertifikat pendidik dan hanya 870 ribu guru)
		Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah (55,43% berpendidikan SMP ke bawah)
		Rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah (40,9% yang bekerja di bidang keahlian non tinggi)
		Daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional masih rendah (peringkat 75 dari 132 negara dalam GII pada tahun 2022)
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Akurasi program bantuan sosial masih rendah
		Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
		Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
		Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
		Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif

B. Isu Transformasi Ekonomi Nasional

Isu-isu strategis transformasi ekonomi nasional mencerminkan tantangan utama yang juga dirasakan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satunya adalah lemahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, kegiatan industri masih terbatas, nilai tambah produk pertanian dan perikanan belum optimal, serta pemanfaatan teknologi masih rendah.

Potensi perikanan dan pesisir belum dikelola secara maksimal. Diversifikasi usaha di wilayah pesisir masih minim, dan belum ada kebijakan tata kelola ekonomi biru yang kuat. Ekonomi kreatif juga belum berkembang karena kurangnya dukungan terhadap pelaku usaha kreatif, lemahnya promosi, dan terbatasnya akses pasar.

Mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal. Ini mempengaruhi produktivitas daerah dan menyulitkan pengembangan sektor industri atau jasa modern. Pertanian sebagai sektor utama juga menghadapi masalah produktivitas rendah, minimnya regenerasi petani muda, dan degradasi lahan.

UMKM dan koperasi di Kabupaten Bengkulu Tengah masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki pendampingan usaha dan belum siap terhubung dengan pasar digital. Sementara itu, infrastruktur dasar di wilayah perdesaan masih belum memadai. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Transformasi energi ke arah yang lebih bersih juga belum berjalan cepat. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi energi terbarukan seperti mikrohidro dan surya, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Kesadaran terhadap pekerjaan hijau pun masih rendah.

Digitalisasi belum merata. Banyak desa masih belum terjangkau jaringan internet yang stabil, sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum bisa mendorong ekonomi lokal secara optimal. Sektor pariwisata juga belum mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian karena keterbatasan akses, promosi, dan infrastruktur.

Melihat kondisi ini, Kabupaten Bengkulu Tengah perlu fokus pada pengembangan sektor unggulan yang berbasis potensi lokal. Langkah ini perlu diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan UMKM, percepatan digitalisasi, serta pembangunan infrastruktur dan energi ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis nasional dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-63. Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Industri	Deindustrialisasi akibat penurunan rasio PDB industri pengolahan
		Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam industri
		Kompleksitas dan daya saing produk industri masih rendah
		Adopsi teknologi lama masih dominan
		Mismatch produk dengan permintaan global
		Rendahnya kemampuan inovasi dalam industri
		Tuntutan energi hijau semakin besar dalam industri
2.	Ekonomi Biru	Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum maksimal
		Rendahnya diversifikasi usaha ekonomi biru
		Kurangnya kebijakan tata kelola pada sektor ekonomi biru
3.	Ekonomi Kreatif	Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
		Indeks kekayaan intelektual Indonesia masih di bawah rata-rata

No.	Kategori	Permasalahan
		Kurangnya akses dalam komersialisasi kekayaan intelektual
		Kurangnya kemitraan dalam ekosistem ekonomi kreatif
		Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih rendah
4.	Produktivitas Tenaga Kerja	Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah
		Ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri
		Belum terbangunnya sistem informasi pasar tenaga kerja yang kredibel
		Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
5.	Pertanian	Rendahnya nilai tambah produk pertanian
		Rendahnya produktivitas pertanian
		Rendahnya adopsi teknologi pertanian
		Aging farmer
		Degradasi kualitas lahan
6.	UMKM dan Koperasi	Rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian
		Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM
		Belum optimalnya akses UMKM terhadap pendanaan
		Rendahnya wirausaha yang berorientasi tumbuh
7.	Perkotaan dan Perdesaan	Belum optimalnya kontribusi perkotaan terhadap ekonomi nasional
		Pola pembangunan perkotaan yang tidak merata
		Kurangnya layanan perkotaan yang memadai
		Masalah sosial-ekonomi di perkotaan
		Degradasi lingkungan perkotaan dan risiko bencana
		Tata kelola wilayah yang belum terpadu
		Ketimpangan kesejahteraan antara perkotaan dan perdesaan
8.	Pekerjaan Hijau	Perubahan struktur ekonomi akibat pembangunan urbanisasi
		Minimnya pemahaman dunia industri terhadap pekerjaan hijau
		Belum terintegrasinya strategi SDM dalam pekerjaan hijau
		Belum memadainya pengembangan keahlian SDM untuk pekerjaan hijau
		Terbatasnya akses pendanaan dalam mendukung pekerjaan hijau
9.	Pengelolaan Hutan Lestari	Lemahnya peran dunia usaha dan akademisi dalam pekerjaan hijau
		Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional masih rendah
		Rendahnya produktivitas sektor hasil hutan kayu
		Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi sektor kehutanan
		Kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Rendahnya dukungan regulasi dalam pengelolaan hutan
		Tingginya tingkat deforestasi
10.	Percepatan Transisi Energi	Belum optimalnya kerja sama multistakeholder dalam pengelolaan hutan
		Ketergantungan terhadap energi fosil yang terus meningkat
		Emisi GRK sektor energi cukup tinggi
		Potensi energi terbarukan masih belum dimanfaatkan optimal
		Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan belum memadai
		Kurangnya dukungan regulasi dalam transisi energi
		Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil masih tinggi
11.	Digital	Ketergantungan pada impor energi meningkat
		Belum optimalnya rantai nilai dalam transisi energi
		Kurangnya pondasi dalam percepatan digitalisasi nasional
		Belum meratanya akses infrastruktur digital
		Kurangnya adopsi teknologi digital dalam industri dan layanan publik
12.	Badan Usaha Milik Negara	Kurangnya investasi dalam SDM digital
		Belum optimalnya sistem keamanan siber
		Rendahnya daya saing BUMN dalam sektor ekonomi
13.	Pariwisata	Kurangnya kontribusi BUMN dalam ekonomi nasional
		Kurangnya efisiensi pengelolaan BUMN dalam pembangunan nasional
		Destinasi wisata menghadapi masalah keberlanjutan budaya
		Aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata masih belum optimal
		Kurangnya kualitas layanan wisata

No.	Kategori	Permasalahan
		Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan akibat minimnya pilihan wisata
		Kurangnya keterampilan SDM pariwisata
14.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Keterbatasan integrasi ekonomi domestik dan global
		Ketimpangan sektor perdagangan antarwilayah
		Kurangnya partisipasi dalam perdagangan global
		Kurangnya akses keuangan untuk mendukung ekspor
		Regulasi yang menghambat ekspor dan investasi
		Ketimpangan sektor perdagangan dalam negeri akibat regulasi yang belum efisien

C. Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam proses perencanaan pembangunan dan telah diakui secara luas sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan publik. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, tata kelola tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi politik dan hukum. Esensi utama dari tata kelola yang baik terletak pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien, berintegritas, serta menjamin transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Perubahan global yang berlangsung cepat, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan responsif, menjadikan transformasi tata kelola sebagai agenda yang semakin mendesak. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menyesuaikan sistem tata kelolanya agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan mampu menjaga konsistensi serta kesinambungan program lintas sektor.

Implementasi tata kelola di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan cenderung berfokus pada aspek prosedural dan belum menyentuh substansi tata kelola secara komprehensif. Hal ini terlihat dari rendahnya efektivitas dalam mencegah praktik-praktik korupsi, yang tercermin pula dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya distribusi tugas dan kewenangan antarunit kerja menjadi hambatan utama dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan adaptif. Keadaan ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, terganggunya kelancaran pelayanan publik, dan berkurangnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Intervensi politik dalam birokrasi turut menjadi persoalan yang memengaruhi stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Fluktuasi dinamika politik lokal seringkali menyebabkan inkonsistensi arah kebijakan, yang pada akhirnya melemahkan tata kelola yang berbasis prinsip-prinsip good governance. Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas regulasi, dan menanamkan budaya birokrasi yang profesional serta independen dari pengaruh politik.

Jika berbagai tantangan ini tidak segera diatasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terus terhambat dan pencapaian pembangunan tidak akan mampu menjawab kebutuhan serta ekspektasi masyarakat. Reformasi tata kelola yang berkelanjutan perlu dikawal sebagai dasar yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah yang modern, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-64. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

No.	Kategori	Permasalahan
1	Integritas Partai Politik	Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal.
2	Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan	Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
3	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
4	Sistem Penggajian Tunggal	Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya dual sistem penggajian ASN.
5	Manajemen Talenta	Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34% ASN berusia 50 tahun ke atas (aging).
6	Kualitas Regulasi	Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi tersebar di beberapa Kementerian, SDM di bidang regulasi belum memadai, serta partisipasi dalam pembentukan regulasi belum optimal.
7	Integrasi Proses Bisnis	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi, tidak efektif, serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

D. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Sistem hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, belum maksimalnya penerapan hak asasi manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Akibatnya, kepatuhan hukum masih rendah, dan akses terhadap keadilan belum merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk memperkuat keamanan dan kesadaran bela negara, namun belum didukung oleh sistem yang merata. Demokrasi lokal masih bersifat prosedural, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat, maraknya politik uang, serta belum kuatnya peran lembaga legislatif. Nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan juga belum sepenuhnya membentuk kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat tata kelola hukum, politik, dan ekonomi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar pembangunan bisa berjalan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-65. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

No.	Kategori	Permasalahan
1	Stabilitas Makro	Risiko climate action; deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis utang; konfrontasi geoekonomi; asset bubble burst; inflasi tinggi; tingkat suku bunga tinggi; masih geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlemahan ekonomi global; transisi demografi; potensi pandemi ke depan; rendahnya penerimaan perpajakan; terbatasnya belanja negara; serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
2	Demokrasi	Demokrasi masih prosedural dengan ciri: kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; politik electoral masih memiliki permasalahan seperti politik uang dan polarisasi isu SARA; serta fungsi-fungsi asasi demokrasi belum terlaksana optimal.
3	Politik Luar Negeri	Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri; konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global; tren global economic decoupling; belum selesainya perundingan batas wilayah; serta postur dan sinergi diplomasi Indonesia yang belum ideal.
4	Hukum	Praktik penegakan hukum yang belum terpadu; efisiensi rendah; HAM belum menjadi dasar utama; rendahnya budaya hukum masyarakat akibat minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses terhadap keadilan; serta kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.
5	Keamanan	Ancaman insurgensi; konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah; kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perbatasan; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.
6	Pertahanan	Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang semakin kompleks; perang berbasis Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, dan High Yield Explosive (CBRNE); serta meningkatnya respons negara-negara dalam memperkuat industri pertahanan.

E. Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah perlu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai agama, budaya lokal, dan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut penting sebagai dasar dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Peran sumber daya manusia, khususnya dari lingkungan keluarga, sangat penting dalam membentuk karakter dan etika masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan semua

kelompok secara setara, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, terutama dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan terhadap sumber daya alam, Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Alih fungsi hutan yang tidak terkendali mengganggu fungsi ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan. Petani dan nelayan juga belum menikmati peningkatan kesejahteraan karena rendahnya produktivitas dan akses pasar. Di sisi lain, pengelolaan sampah menjadi isu yang mendesak karena kapasitas TPA mendekati batas maksimal tanpa solusi pengelolaan yang terintegrasi.

Kabupaten Bengkulu Tengah juga menghadapi risiko perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, perikanan, air bersih, dan kesehatan masyarakat. Masalah bencana alam, kelangkaan air, serta infrastruktur sanitasi yang belum memadai memperparah kondisi sosial dan ekonomi warga. Untuk itu, arah pembangunan daerah harus dirancang secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-66. Isu Ketahanan Sosial dan Politik

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Isu Agama	Nilai agama belum optimal dalam pembangunan, wawasan dan identitas nasional belum maju, serta rendahnya literasi keagamaan.
2.	Isu Budaya	Karakter dan jati diri bangsa menghadapi tantangan negatif budaya global, nilai Pancasila belum terinternalisasi, serta rendahnya peran budaya dalam pembangunan.
3.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Belum optimalnya peran keluarga, rendahnya pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, serta masih adanya ketimpangan gender.
4.	Pangan	Belum idealnya kualitas pangan, rendahnya kapasitas produksi pangan, serta tata kelola sistem pangan yang masih lemah.
5.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Kualitas air, udara, dan lahan semakin menurun, meningkatnya pembuangan limbah ilegal, serta ancaman kepunahan spesies tumbuhan dan hewan.
6.	Energi	Akses energi yang belum merata, pemanfaatan energi baru-terbarukan masih rendah, serta tata kelola energi yang belum efektif.
7.	Bencana dan Perubahan Iklim	Frekuensi bencana meningkat drastis, jutaan keluarga tinggal di daerah rawan bencana, serta dampak perubahan iklim yang makin luas.

2.7.4. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Dalam upaya memperkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Provinsi Bengkulu, sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan prioritas daerah, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap isu-isu strategis tingkat provinsi menjadi kunci dalam merancang perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, kontekstual, dan berdampak nyata. Dengan membangun keterkaitan yang kuat antara isu provinsi dan kebutuhan lokal, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya sinkron dengan agenda provinsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan mengoptimalkan potensi wilayah secara berkelanjutan. Adapun terdapat 6 (enam) isu strategis Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan.
2. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.
3. Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan.
6. Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

Provinsi Bengkulu saat ini dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih adanya praktik birokrasi yang belum efisien, rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi

ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pada sektor ketahanan pangan, Provinsi Bengkulu juga menghadapi tantangan serius. Ketergantungan pada pasokan luar daerah, belum kuatnya sistem produksi lokal, serta lemahnya infrastruktur pendukung menjadikan ketahanan pangan masih rentan terhadap gejolak harga dan krisis distribusi. Hal ini diperparah dengan kurang optimalnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kopi, karet, sawit, dan perikanan. Potensi besar sektor-sektor ini belum mampu dimaksimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Sebagian wilayah di Bengkulu masih mengalami keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Ketimpangan infrastruktur ini berdampak pada rendahnya konektivitas antarwilayah dan lambatnya pertumbuhan kawasan potensial. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, serta lemahnya sistem mitigasi kebencanaan, membuat wilayah ini rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Ketimpangan juga terjadi dalam aspek sosial, khususnya pada akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah, tetapi juga menghambat terwujudnya pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis di atas, pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi. Pendekatan ini akan memastikan sinergi yang kuat antar level pemerintahan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.7.5. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Tengah

Perumusan isu strategis yang relevan dan berdampak nyata, perlu keterkaitan antara potensi dan permasalahan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan isu-isu lingkungan dinamis (KLHS, Global, Nasional dan Provinsi

Bengkulu). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi tolok ukur dalam isu-isu lingkungan hidup, serta memperhatikan dinamika isu global, nasional, dan provinsi Bengkulu, guna memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya adaptif terhadap tantangan eksternal, tetapi juga berkelanjutan dan berakar pada kekuatan lokal. Tabel dibawah ini menggambarkan keterkaitan potensi daerah, permasalahan daerah, serta isu lingkungan dinamis (KLHS, Global, Nasional dan Provinsi Bengkulu) dengan isu strategis Kabupaten Bengkulu Tengah:

Tabel II-67. Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Tengah

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Kabupaten
		Isu Klhs	Global	Nasional	Provinsi	
Geografis Strategis	Masih rendahnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar serta ketimpangan konektivitas antarwilayah	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur Strategis	Migran, Urbanisasi, dan Perkotaan Global	Pembangunan Wilayah dan Saran Prasarana	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas.	Kurangnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Serta Konektivitas yang Optimal untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Konektivitas Trnasportasi						
Sumber Daya Manusia Usia Produktif	Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat,	Ancaman Pandemi dan Kesehatan Global	Transformasi Sosial	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	Terbatasnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Teknologi dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing
	Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan tingginya tingkat pengangguran,		Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi Global			Kurangnya Daya Saing SDM dan Perlunya Peningkatan Kualitas untuk Menghadapi Perkembangan Industri dan Teknologi
Pertanian dan Perkebunan	Ketergantungan pada sektor ekonomi primer tanpa dukungan hilirisasi dan lemahnya kapasitas UMKM	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya Saing daerah	Geopolitik dan Fragmentasi Global	Transformasi Ekonomi	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.	Perlunya Peningkatan Diversifikasi Ekonomi dan Daya Tarik Investasi dalam Mendukung Pertumbuhan dan Kesejahteraan Daerah
Peternakan dan Perikanan			Krisis Pangan dan Energi			
Potensi Pariwisata dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif			Migran, Urbanisasi, dan Perkotaan Global		Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	
Lahan dan Kawasan Pengembangan industri, perumahan, pertanian terpadu, serta kawasan wisata						
Kekayaan budaya dan tradisi masyarakat, serta keragaman etnis dan harmoni sosial	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan kehidupan religius			Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		belum optimalnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan religiusitas dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada melemahnya identitas dan kohesi sosial daerah
penerapan sistem merit dan e-kinerja, infrastruktur digital, kolaborasi kelembagaan, serta peluang regenerasi birokrasi	Rendahnya efektivitas dan responsiveness dalam birokrasi, minimnya digitalisasi pelayanan publik		Penurunan Kepercayaan Terhadap Institusi Pemerintahan; Transformasi	Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good and clean governance dalam tata	Perlunya Peningkatan Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Kabupaten
		Isu Kllhs	Global	Nasional	Provinsi	
	terintegrasi, dan kurangnya transparansi serta partisipasi masyarakat		Digital dan Revolusi Industri		kelola pemerintahan	yang Efektif dan Responsif
Fungsi Ekologis dan Ketahanan Lingkungan	Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat degradasi lahan, minimnya kawasan lindung, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	Tingginya resiko bencana dan ancaman Perubahan iklim; Menurunnya Kualitas Lingkungan dan terjadinya degradasi lahan	Perubahan Iklim dan Krisis Ekologis	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan.	Terbatasnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dalam Mendukung Keseimbangan Ekologis dan Pembangunan Daerah

Perumusan isu strategis yang kontekstual dan terarah, penting untuk memahami keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta dinamika isu lingkungan pada berbagai level mulai dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga isu global, nasional, dan Provinsi Bengkulu.

A. Kurangnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Serta Konektivitas yang Optimal untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai daerah penyangga (*hinterland*) bagi Kota Bengkulu sekaligus menjadi jalur penghubung utama antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Potensi ini diperkuat oleh keberadaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Karang Tinggi, Talang Empat, dan Pondok Kelapa, serta ketersediaan lahan pengembangan yang luas untuk sektor industri, pertanian terpadu, permukiman, dan pariwisata. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terwujud akibat permasalahan struktural, khususnya rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar serta belum optimalnya konektivitas antarwilayah. Rasio jalan mantap di Bengkulu Tengah masih rendah dan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, hanya sekitar 30% wilayah yang memiliki akses transportasi umum reguler, yang mengakibatkan keterisolasian wilayah-wilayah pedesaan dari pusat layanan publik dan ekonomi.

Isu ini mencerminkan tantangan pembangunan global yang menggarisbawahi ketimpangan antara pusat dan daerah, serta urbanisasi yang tidak seimbang. Secara nasional, isu transformasi wilayah dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan

pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di tingkat provinsi, RPJMD Provinsi Bengkulu juga menegaskan bahwa belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi hambatan utama dalam mendorong integrasi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pembangunan pesat di Kota Bengkulu membuka peluang besar bagi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memperkuat perannya sebagai daerah penyangga. Peningkatan kebutuhan lahan, perumahan, kawasan industri, logistik, serta tenaga kerja di Kota Bengkulu dapat diakomodasi oleh Bengkulu Tengah melalui perencanaan tata ruang yang sinergis dan pengembangan infrastruktur pendukung. Kawasan strategis seperti Talang Empat dan Pondok Kelapa berpotensi menjadi simpul logistik, kawasan industri satelit, dan bahkan kota baru yang menopang beban Kota Bengkulu. Namun, agar peluang ini benar-benar dapat dimanfaatkan, konektivitas antarwilayah harus ditingkatkan melalui pembangunan jalan, jembatan, angkutan umum antar kecamatan dan desa, serta penyediaan layanan digital dan energi yang andal.

Isu strategis yang muncul dari kondisi ini adalah perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta pengembangan sistem transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengembangan ini bukan hanya akan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menurunkan beban ekonomi rumah tangga dan membuka peluang investasi di sektor jasa transportasi dan logistik. Di sisi lain, penerapan moda transportasi berbasis energi bersih seperti bus listrik atau kendaraan rendah emisi sejalan dengan tren global pembangunan hijau dan agenda perubahan iklim.

Kemitraan dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP), kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendanaan hijau, serta edukasi publik tentang pentingnya beralih ke transportasi umum, merupakan langkah-langkah penting untuk mewujudkan sistem konektivitas yang inklusif dan modern.

Pembenahan infrastruktur dan pengoptimalan peran sebagai penyangga Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam sistem wilayah provinsi, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

B. Terbatasnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Teknologi dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki struktur demografi yang potensial, ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan lemahnya daya saing tenaga kerja lokal, baik di tingkat regional maupun nasional.

Data sektor pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah stagnan dan masih berada di bawah target nasional. Harapan lama sekolah juga menunjukkan peningkatan yang sangat lambat dalam lima tahun terakhir. Keterbatasan jumlah dan distribusi guru berkualitas, serta masih minimnya fasilitas sekolah di wilayah terpencil, menjadi kendala utama dalam peningkatan mutu pendidikan secara merata.

Di bidang kesehatan, meskipun terjadi penurunan angka stunting secara bertahap, namun persentase balita gizi buruk dan rendahnya indeks keluarga sehat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk masih di bawah standar, dan fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan masih belum memadai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan rujukan yang terbatas.

Aspek teknologi dan digitalisasi, meskipun akses jaringan internet telah menjangkau sebagian besar wilayah kecamatan, namun pemanfaatannya untuk pendidikan, layanan publik, dan produktivitas ekonomi masih terbatas. Literasi digital masyarakat terutama di kalangan UMKM, pelajar, dan perangkat desa masih rendah, dan belum ada ekosistem inovasi teknologi yang dapat mendorong digitalisasi layanan pemerintahan maupun ekonomi lokal secara signifikan.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tantangan global seperti pandemi yang telah membuka kesenjangan digital dan akses layanan dasar, serta tekanan transformasi sosial dan ketimpangan gender yang menguat. Di tingkat nasional, isu transformasi sosial menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029, dengan fokus

pada peningkatan akses kesehatan untuk semua melalui penguatan layanan kesehatan dasar, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, serta pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah. Selain itu, pelaksanaan pemenuhan pendidikan berkualitas yang merata, penurunan tingkat kemiskinan, pemeliharaan kehidupan yang layak, serta reformasi sistem jaminan sosial nasional menjadi bagian integral dari agenda transformasi sosial nasional yang perlu diadopsi dalam konteks daerah.

Provinsi Bengkulu sendiri telah menyoroti rendahnya capaian indikator pendidikan dan kesehatan di beberapa kabupaten, termasuk Bengkulu Tengah, sebagai salah satu isu prioritas dalam dokumen perencanaannya. Oleh karena itu, isu strategis tentang terbatasnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta teknologi bukan hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga masalah struktural yang harus diatasi melalui kebijakan afirmatif dan intervensi lintas sektor. Diperlukan penguatan layanan publik yang berbasis pemerataan, peningkatan kapasitas SDM secara terencana, dan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau wilayah-wilayah tertinggal. Inovasi dalam sistem pembelajaran jarak jauh, digitalisasi layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi menjadi strategi penting dalam mendongkrak daya saing lokal. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menciptakan fondasi SDM yang kuat untuk menuju pembangunan yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

C. Kurangnya Daya Saing SDM dan Perlunya Peningkatan Kualitas untuk Menghadapi Perkembangan Industri dan Teknologi

Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan serius terkait dengan tingkat pengangguran dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Berdasarkan data BPS dan dokumen perencanaan daerah, tingkat pengangguran terbuka di Bengkulu Tengah cenderung fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, khususnya dari kelompok usia muda yang terus meningkat. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja masih terserap pada sektor informal dan ekonomi primer seperti pertanian dan perkebunan, yang cenderung memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah.

Rendahnya kompetensi dan keterampilan kerja juga menjadi persoalan utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Sebagian besar angkatan kerja hanya berpendidikan sampai jenjang sekolah menengah pertama

atau setara, dan sangat terbatas yang memiliki sertifikasi keahlian atau pernah mengikuti pelatihan kerja formal. Ini menyebabkan tenaga kerja lokal sulit bersaing, baik di pasar kerja regional maupun dalam menghadapi masuknya tenaga kerja dari luar daerah yang lebih terampil.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur pelatihan vokasi dan minimnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Padahal, potensi wilayah Bengkulu Tengah sebagai hinterland Kota Bengkulu dan kawasan pengembangan industri membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih produktif apabila kualitas SDM dapat ditingkatkan secara sistematis.

Untuk menjawab permasalahan ini, perlu didorong upaya peningkatan sumber daya manusia yang produktif dan adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi. Langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup penguatan pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), peningkatan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta penyediaan inkubasi kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan. Pemerintah daerah juga perlu memperluas kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk mendorong link and match dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sejalan dengan agenda nasional dalam RPJMN 2025–2029, peningkatan daya saing SDM diarahkan pada pembangunan manusia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing global. Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bengkulu menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai prioritas pembangunan, mengingat masih tingginya ketimpangan antarwilayah dan tingginya angka pengangguran di daerah-daerah penyangga seperti Bengkulu Tengah.

Dengan intervensi kebijakan yang terintegrasi, pengembangan SDM yang produktif di Bengkulu Tengah tidak hanya akan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan revolusi industri, transformasi digital, serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

D. Perlunya Peningkatan Diversifikasi Ekonomi dan Daya Tarik Investasi dalam Mendukung Pertumbuhan dan Kesejahteraan Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di sektor primer, terutama pada subsektor pertanian, perkebunan,

peternakan, dan perikanan. Potensi ini telah menjadi penopang utama perekonomian daerah. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada komoditas mentah tanpa dukungan hilirisasi menyebabkan nilai tambah ekonomi yang diperoleh masih rendah. Keterbatasan dalam pengolahan hasil, minimnya industri kecil dan menengah, serta lemahnya ekosistem UMKM menjadi hambatan serius dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi lokal. Berdasarkan data, hingga tahun 2020 hanya terdapat 177 unit usaha industri kecil di Bengkulu Tengah, hal ini mencerminkan keterbatasan dalam pengembangan sektor hilir dan ekonomi kreatif.

Permasalahan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan tantangan global seperti krisis pangan, disrupsi rantai pasok, dan volatilitas harga komoditas, serta agenda nasional yang menekankan transformasi ekonomi dan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru, sementara di tingkat Provinsi Bengkulu, arah kebijakan juga mulai bergeser kearah penguatan sektor sekunder dan tersier guna memperkuat daya saing wilayah. Bengkulu Tengah yang memiliki wilayah potensial untuk kawasan industri, wisata agro-maritim, serta lokasi strategis sebagai penyangga Kota Bengkulu menyimpan peluang besar untuk menjadi simpul penggerak ekonomi regional apabila mampu mengembangkan sektor hilir secara optimal.

Salah satu titik masuk utama dalam strategi diversifikasi ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sektor pariwisata, khususnya berbasis agro wisata dan wisata alam. Dukungan kondisi geografis yang strategis dan bentang alam yang beragam seperti dataran tinggi, sungai, serta lahan pertanian dan perkebunan yang luas, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki keunggulan dalam pengembangan wisata pertanian terpadu, wisata edukasi, dan ekowisata. Letaknya yang hanya sekitar 45 menit dari Kota Bengkulu menambah nilai strategis sebagai destinasi wisata penyangga yang mudah diakses oleh wisatawan lokal maupun luar daerah.

Potensi ini membuka ruang besar bagi pelaku UMKM, petani, dan komunitas lokal untuk masuk ke dalam rantai ekonomi pariwisata, baik melalui penyediaan akomodasi, produk olahan khas daerah, maupun jasa wisata berbasis komunitas. Salah satu komoditas unggulan yang sangat potensial adalah jeruk kalamansi, yang telah terdaftar sebagai kekayaan intelektual (HaKI) Kabupaten

Bengkulu Tengah. Selain menjadi komoditas segar, jeruk kalamansi memiliki peluang ekonomi tinggi melalui produk turunannya seperti sirup, minuman kemasan, permen, dan aromaterapi yang dapat menyasar pasar wisata dan industri makanan-minuman modern.

Sinergitas antara penguatan sektor pariwisata, hilirisasi produk unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan akses wisata, kawasan industri kecil, dan pelatihan SDM pariwisata, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat membangun fondasi ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan dunia pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan SDM kreatif dan adaptif terhadap dinamika industri berbasis potensi lokal dan teknologi. Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata..

E. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan religiusitas dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada melemahnya identitas dan kohesi sosial daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah menyimpan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang mencerminkan identitas masyarakat yang multietnis, religius, dan hidup dalam harmoni sosial. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, penghormatan terhadap sesama, serta adat istiadat setempat menjadi fondasi kuat dalam membentuk karakter masyarakat. Salah satu simbol nyata dari warisan budaya tersebut adalah Batik Sungai Lemau, yang telah didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan ditetapkan sebagai identitas budaya Bengkulu Tengah. Penguatan batik lokal ini tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya, tetapi juga berpotensi mendorong ekonomi kreatif melalui pengembangan produk-produk turunan seperti fesyen etnik, kerajinan tangan, dan cendera mata wisata.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi. Rendahnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam pelestarian budaya dan nilai religiusitas menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin melemahnya identitas lokal dan kohesi sosial. Data nasional memperlihatkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia tahun 2022 hanya sebesar 55,13, mencerminkan masih rendahnya perhatian terhadap aspek-aspek budaya dan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan. Di tingkat nasional, isu ini

diperkuat oleh berbagai tantangan seperti belum optimalnya peran nilai agama dalam praktik pembangunan yang membawa kemaslahatan bersama, krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda akibat melemahnya peran keluarga, serta ancaman nilai-nilai negatif dari budaya global yang berpotensi mengikis jati diri bangsa.

Secara global, transformasi budaya akibat arus informasi digital dan globalisasi turut mempercepat pergeseran nilai-nilai lokal. Fenomena homogenisasi budaya global seringkali menyebabkan terpinggirkannya identitas budaya lokal yang unik, termasuk di Bengkulu Tengah. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya ruang edukasi publik tentang pentingnya pelestarian budaya dan peran aktif masyarakat dalam menjaga warisan lokal.

Di tingkat Provinsi Bengkulu, tantangan serupa juga dihadapi, terutama dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya budaya sebagai penguat karakter daerah. Banyak potensi budaya belum tergarap maksimal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, pelaksanaan program-program revitalisasi budaya dan penguatan religiusitas di berbagai kabupaten/kota masih belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan pembangunan lintas sektor.

Isu strategis belum optimalnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan religiusitas dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada melemahnya identitas dan kohesi sosial daerah menjadi sangat relevan dan mendesak. Bengkulu Tengah perlu mendorong revitalisasi budaya lokal secara sistematis melalui kurikulum pendidikan, pelatihan generasi muda, dukungan terhadap komunitas budaya, serta festival budaya tahunan. Penguatan peran keluarga, tokoh agama, dan lembaga adat juga menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai moral dan religius dalam kehidupan masyarakat. Jika ditangani secara serius, pelestarian budaya tidak hanya akan memperkuat jati diri masyarakat Bengkulu Tengah, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal.

F. Perlunya Peningkatan Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif

Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif. Meskipun terdapat potensi yang menjanjikan seperti komitmen

terhadap sistem merit, pemanfaatan teknologi melalui e-kinerja, serta upaya awal dalam digitalisasi pelayanan publik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Masih banyak pelayanan yang dilakukan secara konvensional, tingkat literasi digital ASN yang belum merata, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan menjadi hambatan nyata dalam reformasi birokrasi daerah. Hal ini berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan memperlemah legitimasi publik terhadap program pembangunan.

Isu penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dalam konteks Global menjadi ancaman serius di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Gelombang transformasi digital dan revolusi industri 4.0 menuntut setiap entitas pemerintahan, termasuk di tingkat kabupaten, untuk mampu beradaptasi dan melakukan reformasi digital menyeluruh. Apabila tidak segera ditanggapi, Bengkulu Tengah berisiko tertinggal dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan modern, sehingga memperbesar kesenjangan sosial dan memperlemah daya saing daerah.

Pemerintah Indonesia pada tingkat nasional telah menegaskan pentingnya pemerataan akses pelayanan publik dan peningkatan kompetensi digital bagi penyelenggara layanan. Sayangnya, di Bengkulu Tengah, tantangan tersebut masih nyata. Beberapa pelayanan dasar masih dilakukan secara manual, dan sistem informasi pemerintahan belum terintegrasi sepenuhnya. Lemahnya budaya antikorupsi dan kontrol internal turut memperburuk situasi, di mana masih ditemukan celah bagi praktik maladministrasi dan korupsi dalam pengelolaan anggaran publik. Lebih lanjut, belum adanya sistem penilaian kinerja daerah yang menggabungkan aspek anggaran, output pembangunan, dan integritas juga memperlemah akuntabilitas publik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun belum optimal dalam memberikan peringatan dini dan manajemen risiko, sehingga tata kelola yang diharapkan belum berjalan efektif.

Dari perspektif provinsi, Pemerintah Provinsi Bengkulu secara eksplisit menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip *good and clean governance* belum sepenuhnya diterapkan oleh kabupaten/kota, termasuk di Bengkulu Tengah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya integrasi data antar-perangkat daerah, rendahnya keterbukaan informasi publik, serta minimnya pengawasan berbasis digital. Kesenjangan antara ekspektasi reformasi birokrasi dan realita

implementasi di tingkat daerah menjadi indikasi perlunya perubahan struktural dan budaya organisasi secara menyeluruh.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi *multipronged* yang menysasar pada empat aspek utama. Pertama, percepatan digitalisasi pelayanan publik menjadi prioritas mutlak. Pemerintah daerah perlu membangun sistem layanan berbasis digital terpadu (*single-window system*) yang mencakup administrasi kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, dan layanan sosial lainnya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi birokrasi, meminimalkan interaksi langsung yang rawan pungli, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Kedua, peningkatan kapasitas ASN harus dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, pelayanan publik berbasis data, serta pengelolaan program pembangunan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem merit dalam promosi jabatan untuk memastikan bahwa ASN yang menduduki posisi strategis adalah mereka yang benar-benar kompeten dan berintegritas.

Ketiga, penguatan partisipasi masyarakat harus diinstitusionalisasi melalui mekanisme partisipatif digital seperti e-Musrenbang, dashboard monitoring pembangunan, dan forum konsultasi daring. Transparansi anggaran dan program perlu disampaikan secara rutin agar masyarakat merasa dilibatkan dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan.

Keempat, penguatan sistem pengawasan internal merupakan pilar penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efektivitas program. Penguatan APIP sebagai watchdog internal, pemanfaatan sistem audit digital, serta sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK, BPKP, dan KPK harus dijadikan sistem yang saling melengkapi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Dengan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi role model tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, adaptif terhadap digitalisasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Transformasi ini tidak hanya penting untuk menjawab isu global dan nasional, tetapi juga menjadi prasyarat mutlak dalam memperkuat daya saing daerah dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

G. Terbatasnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dalam Mendukung Keseimbangan Ekologis dan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi tantangan serius dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat degradasi lahan, alih fungsi kawasan lindung, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi ekologi yang cukup besar, mulai dari hutan lindung, kawasan perairan, hingga lahan pertanian yang mendukung keberlanjutan ekosistem lokal. Potensi ekologi tersebut belum dikelola secara optimal sehingga menimbulkan berbagai persoalan ekologis yang mengancam keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Pada konteks global, perubahan iklim dan krisis ekologis menjadi isu mendesak yang menuntut setiap wilayah untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan lingkungan. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya bersifat jangka panjang, namun juga langsung dirasakan melalui meningkatnya frekuensi bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Tren global ini tercermin di tingkat nasional, di mana data menunjukkan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan laut Indonesia semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (*Ocean Health Index/OHI*) Indonesia pada 2022 hanya mencapai skor 63 dan berada di peringkat ke-152 dari 220 negara. Kondisi tersebut menggambarkan lemahnya pengelolaan kawasan pesisir dan laut. Selain itu, biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan terus meningkat, sejalan dengan tingginya paparan masyarakat terhadap polusi. Tren kejadian bencana juga meningkat hampir tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir, dengan dominasi bencana *hidrometeorologis* seperti banjir dan angin puting beliung, yang sebagian besar dipicu oleh lemahnya pengelolaan ruang dan rusaknya ekosistem penyangga.

Pada tataran regional, Provinsi Bengkulu juga mencatatkan persoalan yang serupa. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta rendahnya kapasitas mitigasi kebencanaan menjadi isu strategis yang terus dihadapi. Hal ini diperparah dengan meningkatnya luasan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat praktik pembuangan ilegal yang belum ditangani secara komprehensif. Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri masih banyak kawasan yang tidak memiliki rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan, sehingga rawan

terhadap konflik pemanfaatan lahan, degradasi kawasan lindung, dan meningkatnya risiko bencana.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kabupaten Bengkulu Tengah perlu memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif, berbasis mitigasi risiko, serta berorientasi pada pelibatan masyarakat. Pengembangan kebijakan tata ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memperhatikan kerentanan bencana berbasis spasial. Edukasi publik, pengawasan ketat terhadap praktik eksploitasi alam, serta penegakan hukum lingkungan harus berjalan secara simultan untuk menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang kuat dan akuntabel.

Isu strategis terbatasnya pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan ekologis dan pembangunan daerah menjadi semakin relevan di tengah kondisi global dan nasional yang mengindikasikan krisis lingkungan yang nyata. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah harus meletakkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai arus utama dalam setiap program pembangunan lintas sektor. Kepala daerah bersama perangkat daerah perlu menjadikan isu ini sebagai acuan prioritas untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan, ketahanan terhadap bencana, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menyajikan visi, misi, janji kerja, tujuan, sasaran pembangunan, program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Visi, misi, dan janji kerja yang menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kepemimpinan tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan strategi pembangunan yang sistematis dan terukur guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Tujuan pembangunan dalam RPJMD merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang telah dirumuskan, yang menggambarkan arah strategis serta hasil yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Setiap tujuan dirancang untuk mencerminkan prioritas pembangunan yang harus diwujudkan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Selanjutnya, tujuan ini dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih spesifik, dengan merinci capaian yang ingin dicapai melalui kebijakan dan program pemerintah daerah. Sasaran pembangunan disusun dalam bentuk indikator kuantitatif yang dapat diukur, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.

Pendekatan berbasis indikator kuantitatif ini memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berjalan secara lebih terarah, fokus, dan efektif. Dengan adanya parameter yang jelas, program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan hasilnya dapat dipantau secara berkala untuk menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi jika ditemukan kendala dalam implementasi kebijakan, sehingga pembangunan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu

Tengah. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

A. Visi dan Misi

Visi adalah pernyataan cita-cita jangka panjang yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dalam periode 2025-2029. Visi menjadi arah utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun, dengan berlandaskan pada potensi daerah, tantangan, serta aspirasi masyarakat. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.”

Maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah, sejalan dengan semangat "Membangun dari Bawah" yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, serta tokoh adat dan agama berperan penting dalam menghimpun aspirasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mendorong kemandirian dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Penyeimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah berorientasi pada keberlanjutan untuk generasi mendatang. Prinsip membangun dari bawah menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam pembangunan, mendorong gotong royong, dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

Maju mencerminkan pembangunan yang progresif dan inovatif di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, serta teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan yang maju tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sistem tata kelola yang modern dan efisien.

Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang memiliki kesejahteraan tinggi, baik secara ekonomi, sosial, maupun akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Kesejahteraan ini dicapai melalui pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja yang memadai, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan kesejahteraan yang merata, kesenjangan sosial dapat diminimalkan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Bahagia mencerminkan kondisi psikologis positif masyarakat, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang bermakna, aman, dan nyaman, dengan keseimbangan antara kesejahteraan fisik, sosial, dan emosional. Kebahagiaan masyarakat terwujud melalui lingkungan sosial yang harmonis, minim konflik, serta tersedianya fasilitas publik yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Selain itu, kebahagiaan juga dipengaruhi oleh tingginya rasa kepuasan hidup, banyaknya emosi positif, serta sedikitnya tekanan psikologis dalam kehidupan sehari-hari.

Berkelanjutan mengacu pada pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan stabilitas sosial, sehingga manfaat pembangunan saat ini tidak merugikan generasi mendatang. Pembangunan yang berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, kebijakan ekonomi yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga daerah dapat berkembang secara harmonis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah disusun untuk mengarahkan langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mewujudkan visi daerah secara efektif dan terukur. Setiap misi merupakan perwujudan dari visi yang telah ditetapkan, serta menguraikan berbagai upaya konkret dalam

kebijakan dan program pembangunan dengan tetap memperhatikan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Misi ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan, diperlukan strategi pembangunan yang terarah, komprehensif, dan berbasis data. Misi pembangunan ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Setiap misi mencerminkan prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan konektivitas infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis keberlanjutan, pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Setiap program yang dilaksanakan akan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuh misi utama akan menjadi pedoman dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi pondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan penguatan infrastruktur jalan, jembatan, serta transportasi yang dapat mempercepat mobilitas barang dan jasa. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, dan telekomunikasi akan terus ditingkatkan guna memastikan setiap kecamatan dan desa memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar. Dengan infrastruktur yang berkualitas, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menciptakan daya saing ekonomi yang lebih kuat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Pemerintah daerah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan penguatan kurikulum berbasis keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Di sektor kesehatan, akses layanan kesehatan yang merata dan berbasis teknologi akan diperkuat melalui pengembangan sistem kesehatan digital serta peningkatan kapasitas tenaga medis. Sementara itu, pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, akan menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah.

Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing. Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif, berdaya saing, dan berbudaya. Kabupaten Bengkulu Tengah akan memperkuat pendidikan vokasional, memperluas akses pelatihan kerja, serta mendorong pengembangan program kewirausahaan guna menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, penguatan karakter dan budaya kerja berbasis nilai-nilai kearifan lokal juga akan ditanamkan agar SDM di Bengkulu Tengah tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki etos kerja dan keunggulan kompetitif yang dapat mendorong kemajuan daerah.

Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan didorong melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Pemerintah daerah akan meningkatkan ekosistem investasi dengan penyederhanaan regulasi, penyediaan insentif bagi investor, serta penguatan kemitraan antara UMKM dan industri skala besar. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas akan menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi daerah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Misi 5: Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya. Identitas budaya Kabupaten Bengkulu Tengah perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pelestarian seni dan

budaya lokal akan diperkuat melalui program-program berbasis komunitas, festival budaya, serta pendidikan berbasis kearifan lokal di sekolah-sekolah. Selain itu, peran adat dan lembaga sosial masyarakat akan terus didorong agar dapat menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi warisan yang dijaga, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya.

Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Kabupaten Bengkulu Tengah akan mengedepankan profesionalisme dalam birokrasi dengan mempercepat implementasi sistem e-Government, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kompetensi ASN. Reformasi birokrasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan zaman akan terus diupayakan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang. Pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Kabupaten Bengkulu Tengah akan mengembangkan kebijakan tata ruang berbasis daya dukung lingkungan, memperkuat mitigasi bencana, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pengelolaan sampah yang lebih modern dan pengurangan emisi lingkungan akan menjadi prioritas untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi generasi mendatang.

Melalui ketujuh misi ini, Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, progresif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat regional dan nasional.

Tabel III-1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Keterkaitan Visi & Misi
Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.	Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi bagian dari visi daerah yang maju dan sejahtera.
	Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Kualitas pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang maju, sehat, dan produktif, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	SDM yang unggul dan berdaya saing akan mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan produktivitas daerah, sehingga mendukung kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Visi	Misi	Keterkaitan Visi & Misi
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi yang inklusif akan memperkuat fondasi kemajuan daerah, menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keberlanjutan bagi masyarakat.
	Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	Pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal akan memperkuat identitas daerah, menciptakan harmoni sosial, serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional akan meningkatkan efektivitas layanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.
	Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan akan memastikan keseimbangan ekologi, ketahanan sumber daya alam, serta menciptakan kehidupan yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan.

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Visi “Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan” menggambarkan harapan daerah untuk berkembang secara ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai langkah konkret dalam mengatasi tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi daerah.

Misi RPJMD meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, serta teknologi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, perhatian terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal serta keseimbangan tata ruang dan lingkungan menjadi langkah strategis dalam menciptakan keharmonisan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Pentingnya visi dan misi ini tidak hanya terletak pada arah kebijakan yang jelas, tetapi juga sebagai komitmen bersama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan adanya visi dan misi yang terarah, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menghadapi

tantangan global, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara berkelanjutan.

Keselarasan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan RPJPD serta Asta Cita Tahun 2025-2029 menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Keterpaduan strategi antara kebijakan jangka panjang, menengah, dan nasional, setiap program yang dijalankan dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Hal ini mencerminkan sinergi antara upaya pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini tabel Keselarasan Misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029:

Tabel III-2. Keselarasan Misi pada Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2045, serta Asta Cita Tahun 2025-2029

Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJPD 2025-2045	Misi Provinsi Bengkulu 2025-2029	Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Misi 6: Meningkatkan pembangunan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan perencanaan yang berkesinambungan	Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah	Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing			
Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Misi 4: Mewujudkan stabilitas ekonomi dengan meningkatkan inovasi dan daya saing daerah	Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan		Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Misi 5: Penanaman nilai-nilai kearifan lokal	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, aman dan berkelanjutan	Misi 1: .Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius	Asta Cita 8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan yang berintegritas		Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJPD 2025-2045	Misi Provinsi Bengkulu 2025-2029	Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, aman dan berkelanjutan	Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan"	Asta Cita 8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keselarasan ini mencerminkan keterpaduan antara strategi pembangunan daerah, Provinsi dan nasional, yang dirancang untuk menciptakan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan adanya keselarasan antara RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bengkulu Tengah, RPJMD 2025-2029 Provinsi Bengkulu dan, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, setiap kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harmonis.

Konektivitas infrastruktur yang diperkuat akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan inovasi teknologi menjadi faktor kunci dalam membangun masyarakat yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global. Transformasi ekonomi berbasis hilirisasi industri dan kemandirian sumber daya diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan yang berpihak pada lingkungan dan kearifan lokal akan memastikan keberlanjutan sumber daya alam serta menjaga harmoni sosial. Reformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transparan juga akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta narkoba.

Dengan strategi yang selaras antara tingkat daerah dan nasional, Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berkontribusi dan mengambil peran secara signifikan dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Semua langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berkeadilan di masa depan.

B. Janji Kerja

Janji kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimandatkan oleh masyarakat merupakan proses politik yang mencerminkan aspirasi publik yang harus diakomodiasi dalam penyusunan program pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029. Adapun Janji Kerja yang dimaksud terdiri dari 14 program prioritas sebagai berikut:

Tabel III-3. Janji Kerja Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

No	Janji Kerja Kepala Daerah
1	Jalan Mulus
2	Jaminan Kesehatan Gratis
3	Seragam dan Peralatan Sekolah Gratis
4	Bantuan Pupuk Gratis
5	Ibu Kota Modern
6	Benteng Kalamambu
7	Penanganan Wilayah Blind Spot
8	Benteng Bersahabat
9	Berbinar
10	Benteng Comand Center
11	ASN Berdikari
12	Gerakan Cinta Batik Sungai Lemau
13	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
14	Percepatan Pembangunan Daerah

Janji kerja Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berfokus pada pemerataan pembangunan dengan pendekatan "Membangun dari Bawah," yang menekankan peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta pelestarian budaya. Dalam bidang infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan untuk memastikan akses yang lebih baik, serta penanganan wilayah *blind spot* guna memperluas jangkauan komunikasi dan teknologi. Selain itu, modernisasi ibu kota dirancang melalui penguatan infrastruktur perkotaan dan penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan melalui Benteng *Command Center*.

Janji kerja kepala daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat mencakup jaminan kesehatan gratis, seragam dan peralatan sekolah gratis, serta bantuan pupuk gratis bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dengan mendorong ASN Berdikari, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pelestarian budaya juga menjadi bagian dari program pembangunan dengan menggerakkan Gerakan Cinta Batik Sungai Lemau. Selain itu, percepatan pembangunan daerah didukung oleh berbagai program unggulan

seperti Benteng Kalamambu, Benteng Bersahabat, dan Berbinar. Dengan fokus ini, janji kerja Kepala Daerah diharapkan mampu membawa Kabupaten Bengkulu Tengah menuju kemajuan yang lebih merata dan berkelanjutan.

C. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan elemen kunci dalam merumuskan arah strategis yang akan menjadi dasar bagi penyusunan arsitektur kinerja pembangunan secara menyeluruh. Tujuan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun, yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis yang mempengaruhi perkembangan daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, pemerintah daerah mempertimbangkan tantangan serta peluang yang ada guna memastikan kebijakan yang diterapkan dapat menjawab permasalahan nyata dan mendukung pencapaian visi jangka panjang. Sasaran yang ditetapkan harus terukur dan realistis, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang efektif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keselarasan antara misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029 menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan pembangunan daerah. Keterpaduan ini juga diperkuat dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian yang optimal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, pembangunan daerah dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel III-4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.	1. Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
			Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
	2. Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia melalui pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan
			Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan
			Wilayah tanpa blank spot
	3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1. Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur

Tabel III-5. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	IE7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, IE8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio jalan mantab
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih layak
				Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
			Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak

Dalam upaya mewujudkan visi “Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan”, Pemerintah Daerah menetapkan serangkaian misi strategis yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Salah satu misi utama yang diusung adalah meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini tidak hanya menjadi tulang punggung pembangunan wilayah, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Misi ini diterjemahkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan daerah yang secara strategis diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar. Tujuan ini memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan nasional, yaitu Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (IE7) serta Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE8). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kerangka besar pembangunan nasional yang terintegrasi dan berorientasi pada keseimbangan pembangunan antarwilayah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran utama yang masing-masing memiliki indikator kinerja yang terukur dan relevan. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas layanan transportasi yang

nyaman, aman, dan terjangkau. Sasaran ini mencerminkan pentingnya keberadaan infrastruktur jalan yang andal dalam menunjang pergerakan manusia dan barang, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong konektivitas antarkawasan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah rasio jalan mantap, yang menunjukkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan kabupaten. Rasio ini menjadi indikator penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Sasaran kedua adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Infrastruktur dasar yang memadai menjadi penopang utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang kesehatan, produktivitas, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Sasaran ini diukur melalui tiga indikator utama, yakni persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak, dan persentase rumah tangga yang teraliri listrik. Ketiga indikator tersebut menjadi cerminan dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak menjadi penentu utama kesehatan lingkungan dan keluarga, sementara akses listrik menjadi penunjang utama bagi kegiatan ekonomi rumah tangga serta peningkatan akses informasi dan teknologi.

Sasaran ketiga adalah terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Hunian layak tidak hanya menyangkut keberadaan tempat tinggal secara fisik, tetapi juga mencakup kualitas bangunan, kecukupan ruang hidup, ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, serta faktor keamanan dan kenyamanan. Indikator yang digunakan adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal yang sesuai dengan standar kelayakan yang ditetapkan. Penyediaan hunian layak juga menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat, tertata, dan mendukung pengembangan komunitas yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis indikator yang relevan, strategi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian sasaran ini juga akan menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan

berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, melalui perencanaan yang terintegrasi, penganggaran yang tepat sasaran, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

2. Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi

Tabel III-6. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia (pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi)	IE1 Kesehatan untuk Semua, IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata, IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif, IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, IE6 Transformasi Digital	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	APM SD
				APM SMP
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
			Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah
				Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan
				Rasio Tenaga Kesehatan per Kecamatan
				Angka kematian Bayi/100 per kelahiran bayi
				Angka Kematian Ibu/100.00 kelahiran hidup
			Wilayah tanpa blank spot	Jumlah blank spot (lemah Sinyal & Tidak ada Sinyal)

Dalam upaya mewujudkan visi “Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan,” misi kedua yang menjadi prioritas pembangunan adalah menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi. Misi ini diarahkan untuk menjawab tantangan fundamental dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tujuan strategis dari misi ini adalah menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Tujuan ini selaras dengan arah pembangunan nasional, terutama IE1 (Kesehatan untuk Semua), IE2 (Pendidikan Berkualitas yang Merata), IE3 (Perlindungan Sosial yang Adaptif), IE4 (Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi), serta IE6

(Transformasi Digital). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di tingkat kabupaten diarahkan untuk mendukung agenda nasional melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan perluasan akses teknologi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama yang dilengkapi dengan indikator kinerja terukur. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan. Sasaran ini diukur melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP, serta jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah. APM dan APK merupakan indikator penting dalam menilai tingkat keterlibatan anak-anak usia sekolah dalam sistem pendidikan, baik dari sisi kesesuaian usia maupun cakupan akses pendidikan. Sementara itu, ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata di desa atau kelurahan menjadi dasar utama dalam menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan. Kinerja sasaran ini dinilai melalui beberapa indikator utama, yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sarana kesehatan, rasio tenaga kesehatan per kecamatan, angka kematian bayi per 100 kelahiran hidup, serta angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu menjadi indikator keberhasilan intervensi kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan ibu-anak yang menyeluruh.

Sasaran ketiga adalah menciptakan wilayah tanpa blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau sinyal komunikasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya adalah jumlah blank spot, baik yang mengalami sinyal lemah maupun tidak ada sinyal sama sekali. Pengurangan jumlah blank spot menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, memperluas konektivitas informasi, serta meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis teknologi, termasuk pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, serta aktivitas ekonomi digital di wilayah pedesaan.

Dengan arah kebijakan yang terstruktur dan indikator kinerja yang terukur, pelaksanaan misi kedua ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas

layanan dasar, tetapi juga pada pembangunan pondasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang sehat, cerdas, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam dinamika pembangunan yang semakin berbasis pada teknologi dan inovasi.

3. Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Tabel III-7. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IE1 Kesehatan untuk Semua, IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	Indeks Modal Manusia (IMM)	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)
			Pengentasan kemiskinan	Angka Kemiskinan
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pemabangunan Pemuda
				Indeks Partisipasi Olahraga

Dalam upaya mewujudkan visi “Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan”, salah satu misi utama yang menjadi prioritas adalah pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Misi ini diarahkan untuk membentuk manusia yang unggul baik dari aspek pendidikan dan kesehatan, maupun dari segi karakter, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya IE1 (Kesehatan untuk Semua) dan IE2 (Pendidikan Berkualitas yang Merata), yang menekankan pentingnya pembangunan manusia secara menyeluruh sebagai fondasi pembangunan nasional dan daerah. Keterkaitan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam memastikan pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Tujuan strategis ini dijabarkan ke dalam lima sasaran utama yang masing-masing memiliki indikator kinerja yang relevan dan terukur. Sasaran pertama adalah meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah. Sasaran ini diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah

(HLS), dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Rata-rata lama sekolah mencerminkan pencapaian aktual terhadap akses pendidikan yang telah dijalani penduduk, sedangkan angka harapan lama sekolah mencerminkan potensi masa depan dalam memperoleh pendidikan. Indeks literasi masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan dasar membaca, memahami informasi, dan kemampuan berpikir kritis yang menjadi pondasi pembentukan karakter dan keterampilan abad 21.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), yang mencerminkan kondisi kesehatan umum penduduk serta ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan, gizi, sanitasi, perilaku hidup sehat, dan penanganan penyakit. Peningkatan indikator ini menunjukkan perbaikan sistem kesehatan yang menyeluruh, termasuk pelayanan dasar, kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan UHH menjadi indikator penting dalam mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sasaran ketiga berfokus pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Indikator yang digunakan adalah pendapatan per kapita, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi individu dalam suatu wilayah. Peningkatan pendapatan per kapita merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat.

Sasaran keempat adalah pengentasan kemiskinan, yang diukur melalui indikator angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan keberhasilan kebijakan yang mendukung distribusi ekonomi yang adil, efektivitas program perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Sasaran kelima adalah meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga. Indikatornya terdiri dari indeks pembangunan pemuda dan indeks partisipasi olahraga. Indeks pembangunan pemuda mengukur kontribusi pemuda dalam pembangunan melalui dimensi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta partisipasi sosial dan politik. Sementara itu, indeks partisipasi olahraga menggambarkan keterlibatan generasi muda dalam aktivitas

fisik dan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kesehatan, dan prestasi di bidang olahraga.

Dengan arah kebijakan dan indikator kinerja yang terstruktur, misi pengembangan sumber daya manusia ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global dan perkembangan zaman.

4. Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Tabel III-8. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi berkelanjutan	IE5. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Proporsi distribusi PDRB unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)
			Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah penanaman modal asing
				Jumlah penanaman modal dalam negeri
				Indeks Daya Saing Daerah
			Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan
Meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
			Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam rangka mewujudkan visi “Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan”, pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama yang dilaksanakan secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Misi ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan kemandirian desa serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tujuan strategis yang ditetapkan untuk mendukung misi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam kerangka Indonesia Emas, khususnya IE5

(Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan) dan IE4 (Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi). Keterkaitan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadikan sektor ekonomi sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran pembangunan dengan indikator yang terukur dan relevan. Pertama, meningkatnya proporsi sektor unggulan daerah, yang mencakup sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diukur melalui proporsi distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor-sektor tersebut terhadap total PDRB. Sektor unggulan ini menjadi fondasi utama ekonomi lokal yang harus terus diperkuat melalui teknologi, akses pasar, dan peningkatan produktivitas.

Sasaran kedua adalah meningkatnya jumlah investasi, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Keberhasilan pencapaian sasaran ini akan tercermin melalui peningkatan jumlah investasi dan indeks daya saing daerah. Lingkungan investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif baru di daerah. Sasaran ketiga adalah meningkatnya daya saing industri dan perdagangan, yang diukur melalui kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB. Peningkatan kinerja sektor ini menandai berkembangnya aktivitas ekonomi hilir, nilai tambah produksi, serta konektivitas perdagangan antarwilayah.

Sasaran keempat adalah meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Ini ditunjukkan melalui Indeks Ketahanan Pangan, yang menggambarkan kecukupan, stabilitas harga, dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Sasaran kelima mencakup pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa, yang diukur melalui Indeks Desa Membangun. Penguatan kapasitas desa dan ekonomi lokal akan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi eksternal.

Sasaran keenam adalah meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini ditandai dengan peningkatan rasio PDRB dari sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman, yang menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya, dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, Kabupaten Bengkulu Tengah juga menetapkan tujuan meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Sasaran utama dari tujuan ini adalah

meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas dan inklusif, baik di sektor formal maupun informal, serta terbukanya peluang usaha yang dapat diakses oleh kelompok rentan, perempuan, dan pemuda.

Melalui arah kebijakan yang terintegrasi dan dukungan indikator kinerja yang kuat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, merata, dan mampu menciptakan peluang kerja yang luas serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini akan memperkuat daya saing daerah sekaligus menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Misi 5: Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya

Tabel III-9. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 5: Menanamkan Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	IE14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender
				Indeks Pemberdayaan Gender
				Indeks Ketimpangan Gender
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)
			Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Dalam rangka mewujudkan visi “Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan”, Misi 5 diarahkan pada penguatan nilai-nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender. Misi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas budaya lokal, menciptakan tatanan sosial yang harmonis, serta membangun masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan, inklusi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Tujuan strategis dari misi ini adalah meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender. Tujuan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya IE14 (Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif), yang mendorong penguatan budaya dan tata nilai dalam mendukung pembangunan manusia dan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang mencerminkan sejauh mana nilai-nilai budaya dan praktik

kebudayaan lokal dapat dipertahankan, dikembangkan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pertama yang ditetapkan adalah meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Keempat indikator ini secara komprehensif menggambarkan tingkat pencapaian dalam membangun masyarakat yang lebih adil gender, serta memastikan bahwa anak-anak memperoleh perlindungan dan lingkungan tumbuh kembang yang layak. IPG mengukur kesetaraan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; IDG menggambarkan sejauh mana perempuan dapat mengambil peran dalam proses pembangunan; IKG mengukur kesenjangan gender yang terjadi di berbagai aspek; sementara IPA menilai komitmen daerah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak.

Sasaran kedua adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini mencerminkan kondisi keluarga dari berbagai dimensi seperti ketahanan fisik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Keluarga yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, harmonis, dan berdaya. Melalui arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menempatkan nilai-nilai budaya, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai landasan penting dalam membangun masyarakat yang toleran, adil, dan berdaya. Penguatan kapasitas sosial masyarakat melalui pelestarian budaya dan pembangunan keluarga menjadi strategi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan inklusif, serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

6. Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel III-10. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	IE9 Regulasi dan Tata kelola yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan daerah	Nilai Sakip
				Opini BPK
				Nilai SPBE

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Berintegritas dan Adaptif		Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN
			Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib;	IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial,	Indeks Demokrasi Indonesia	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat	Tingkat kriminalitas
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal	Laju Pertumbuhan PAD

Dalam upaya mewujudkan visi “Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan,” salah satu misi strategis yang diusung adalah peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan demokrasi dan ketertiban sosial, serta kemandirian fiskal daerah. Misi ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, ditetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan pertama adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional. Tujuan ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya IE10 (Pemerintahan Bersih, Melayani, dan Terpercaya), IE11 (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Demokrasi), dan IE12 (Data dan Tata Kelola Digital Terpadu). Kualitas tata kelola pemerintah daerah diukur melalui sejumlah indikator penting, seperti Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN menjadi fokus utama yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN. Di sisi lain, untuk menjamin pengambilan kebijakan yang berbasis data, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang mencerminkan kualitas data dan informasi statistik yang akurat dan dapat diandalkan.

Tujuan kedua adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib. Hal ini diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai demokrasi dan ketertiban sosial yang terukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia. Salah satu

indikator penting yang menjadi perhatian adalah menurunnya jumlah kriminalitas di masyarakat. Upaya ini sejalan dengan penguatan kelembagaan sosial, penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan yang demokratis dan inklusif.

Tujuan ketiga adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan daerah yang tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi mampu menggali potensi ekonominya sendiri secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Sasaran utamanya adalah meningkatnya laju pertumbuhan PAD sebagai indikator utama dari efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Optimalisasi ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola penerimaan daerah, inovasi pelayanan publik, serta pemanfaatan aset dan potensi lokal yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Dengan landasan arah kebijakan yang sejalan dengan agenda nasional Indonesia Emas, ketiga tujuan tersebut diharapkan mampu membangun pondasi pemerintahan yang modern, masyarakat yang tertib dan demokratis, serta daerah yang kuat secara fiskal dan berdaya saing tinggi.

7. Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang

Tabel III-11. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang

Tujuan	Keterkaitan Arah Pembangunan Nasional	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas, IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan, IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Lahan
			Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Persentase Tutupan Lahan
			Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana
				Indeks Ketahanan Energi
				Indeks Ketahanan Air

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan tujuan strategis untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Tujuan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam kerangka Indonesia Emas, khususnya IE15 (Lingkungan Hidup

Berkualitas), IE16 (Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan), serta IE17 (Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim). Ketiga arah ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan ketahanan lingkungan, serta adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Pencapaian tujuan ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merepresentasikan kondisi umum lingkungan suatu wilayah. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkan beberapa sasaran prioritas. Sasaran pertama adalah terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas. Sasaran ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Indeks kualitas air menunjukkan tingkat kebersihan dan kelayakan air yang tersedia bagi masyarakat untuk berbagai kebutuhan, baik konsumsi maupun aktivitas domestik. Indeks kualitas udara mencerminkan tingkat pencemaran udara yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan indeks kualitas lahan mengukur tingkat kerusakan maupun daya dukung tanah terhadap aktivitas pertanian, permukiman, dan konservasi.

Sasaran kedua adalah terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan, yang diukur melalui indikator persentase tutupan lahan. Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana upaya konservasi dan pengelolaan hutan berhasil menjaga fungsi ekologisnya, termasuk dalam mengendalikan banjir, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga siklus air.

Sasaran ketiga berkaitan dengan peningkatan ketangguhan wilayah terhadap ancaman bencana dan krisis sumber daya alam. Hal ini diukur melalui tiga indikator, yakni indeks risiko bencana, indeks ketahanan energi, dan indeks ketahanan air. Indeks risiko bencana menilai tingkat kerentanan wilayah terhadap potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Sementara itu, indeks ketahanan energi menggambarkan kemampuan daerah dalam menjaga ketersediaan energi yang cukup, aman, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sektor produktif. Adapun indeks ketahanan air mengukur kapasitas daerah dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Melalui arah kebijakan yang terintegrasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan tangguh terhadap perubahan iklim serta bencana, sebagai

landasan penting menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah merumuskan misi pembangunan yang dijabarkan secara sistematis ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memiliki arah yang jelas, dapat dipantau pencapaiannya, serta selaras dengan visi daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029 dengan tujuan strategis, sasaran yang ingin dicapai, serta indikator kinerja utama sebagai alat ukur capaian pembangunan.

Tabel III-12. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
1.	Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	1.1	Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	73,69	74,47	75,25	76,03	76,81	77,6
		1. 1. 1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio jalan mantab	51.55	56,03	58,27	60,52	62,76	65
		1.1. 2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih layak	89,04	89,72	90,06	90,4	90,74	91,08
				Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	62,07	62,15	62,2	62,24	62,28	62,32
				Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	99,49	99,53	99,55	99,57	99,59	99,6
				Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak	56,52	61,01	63,26	65,51	67,75	70
		1.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan							
2.	Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	2.1	Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia (pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.256	0.346	0.376	0.406	0.436	0.466
		2.1.1	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	APM SD	97,75	98,5	98,75	99	99,25	99,5
				APM SMP	81,72	82,39	82,78	83,18	83,58	83,98
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	109,53	108,1	107,31	106,53	105,76	104,98
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,34	100,3	106,26	109,25	112,23	115,21
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah	94	94	94	94	94	94
		2.1.2	Meningkatnya kualitas pembangunan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang	34	34	34	34	34	s

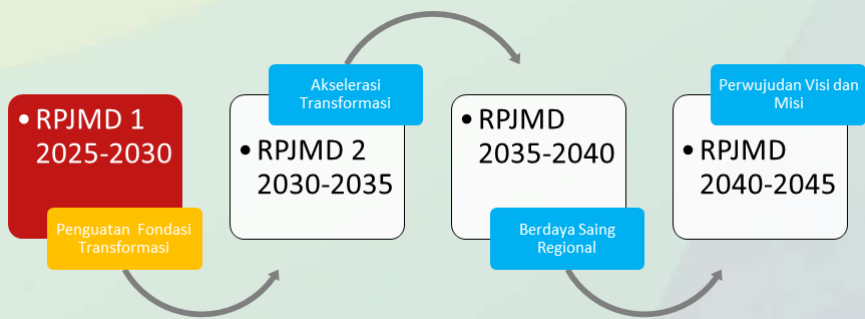
No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
			kebutuhan kesehatan	Memiliki Sarana Kesehatan						
				Rasio Tenaga Kesehatan per Kecamatan	68	70	72	74	76	77
				Angka kematian Bayi/100 per kelahiran bayi	18	17	16	15	14	13
				Angka Kematian Ibu/100.00 kelahiran hidup	4	3	3	2	2	2
		2.1.3	Wilayah tanpa blank spot	Jumlah blank spot (lemah Sinyal & Tidak ada Sinyal)	15	10	7	5	2	0
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	3.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54	0,545	0,55	0,557	0,561	0,567
		3.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata lama sekolah	7,71	8,03	8,19	8,35	8,51	8,67
				Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,47	13,762	13,86	13,97	14,08	14,18
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45,80	53,20	56,90	60,60	64,30	68
		3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,67	72,61	73,15	73,71	74,26	74,81
		3.1.3	Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	55,28	59,71-66	63,31-69.97	66.91-73,95	70,5-77,92	74,1-81,9
		3.1.4	Pengentasan kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,14	9,61	9,33	8,95	8,46	7,88
		3.1.5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pemabangunan Pemuda	57,33	58,40	59,37	60,33	61,3	62,2
Indeks Partisipasi Olahraga										
4.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,97%	4,21-4,61	4,44-4,84	4,66-5,06	4,88-5,28	5,1-5,5
		4.1.1	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Proporsi distribusi PDRB unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	42,8	43,4	43,7	44	44,30	44,60
		4.1.2	Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah penanaman modal asing	348.881	371.926	386.803	404.208	424.418	445.639

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
				Jumlah penanaman modal dalam negeri	3.422.939	3.746.133	3.933.440	4.138.909	4.359.271	4.598.026
				Indeks Daya Saing Daerah	3,24	3,69	3,93	4,16	4,40	4,63
		4.1.3	Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	13,90	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,23	8,48	8,56	8,63	8,70	8,77
		4.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	62.14	65	66,5	68	69,5	71
		4.1.5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0,7104	0,7608	0,78603	0,81126	0,83649	0,86172
		4.1.6	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	0,83	0,89	0,92	0,95	0,98	1,02
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,89	70,4	71,1	71,9	72,7	73,5
5.	Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	4.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.56	2.22	2.05	1.88	1.71	1.54
		5.1	Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,45					
		5.1.1	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	87.51	87,812	87,969	88,126	88,283	88,44
				Indeks Pemberdayaan Gender	75,3	76,3	76,9	77,4	78	78,5
				Indeks Ketimpangan Gender	0.483	0,5112	0,512	0,5128	0,5136	0,5144
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,94	61,2	62,5	63,8	65,2	66,5
		5.1.2	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55,28	57,8	59,1	60,5	61,8	63
6.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6.1	Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	76,8	78,2	78,9	79,6	80,3	81,0
		6.1.1	Meningkatnya kualitas Tata kelola	Nilai Sakip	61,98	65,00	67,00	68,00	69,00	71,00

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
			pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SPBE	2,84	3,23	3,42	3,61	3,81	4,00
		6.1.2	Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75,53	76,8	77,5	78,3	79	79,8
		6.1.3	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,76	2,8	2,85	2,9	2,95	3
		6.2	Terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib	Indeks Demokrasi Indonesia	72,2	74	75	76	77	78
		6.2.1	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat	Jumlah kriminalitas	304	275	259	244	227	211
		6.3	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.283 Juta	54.998 Juta	59.994 Juta	63.283 Juta	81.368 Juta	96.343 Juta
		6.3.1	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal	Laju Pertumbuhan PAD		15-35	5,08-35	5,48-35	10,4-35	15,4-35
7.	Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	7.1	Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,91	68,20	70,49	72,78	75,07	77,36
		7.1.1	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Indeks Kualitas Air	61,11	66,05	70,99	75,93	80,87	85,81
				Indeks Kualitas Udara	90,37	91,17	91,97	92,77	93,57	94,37
				Indeks Kualitas Lahan	27,40	27,88	28,37	28,85	29,34	29,82
		7.1.2	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Persentase Tutupan Lahan	43	45.33	46.5	47.67	48.83	50
		7.1.3	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	82,63	70	65	60	56	52
				Indeks Ketahanan Energi	55	59.33	61.5	63.67	65.83	68
				Indeks Ketahanan Air	60	64	66	68	70	72

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk periode 2025-2029. Perumusan strategi dilakukan dengan memastikan keselarasan dengan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta disesuaikan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Dalam prosesnya, strategi ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta dinamika isu strategis di tingkat lokal, nasional, dan global.



Gambar III-1. Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Setiap strategi pembangunan akan difokuskan pada peningkatan konektivitas infrastruktur, penguatan daya saing sumber daya manusia, percepatan investasi, reformasi birokrasi, serta pelestarian lingkungan dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menciptakan daerah yang lebih maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini berada pada tahap 1 RPJMD periode 2025-2030 dengan fokus utama pada penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan untuk membangun dasar yang kuat dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan

kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kesiapan daerah dalam menghadapi perubahan serta tantangan di masa mendatang. Serta, mempersiapkan memasuki tahap 2 RPJMD dengan arah akselerasi transformasi.

A. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025-2029 berfokus pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, Sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan kualitas SDM, serta penanganan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi jangka menengah ini dijabarkan dalam 5 (lima) strategi utama yaitu:



1. Peningkatan Infrastruktur Fisik dan Konektivitas Wilayah

Strategi ini berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta sistem transportasi publik untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Peningkatan konektivitas ini bertujuan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi juga menjadi bagian dari strategi ini guna mendukung transformasi berbasis teknologi.

2. Penguatan Ekonomi Unggulan dan Daya Saing Berbasis Lokal

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi unggulan yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan bagi UMKM dan koperasi melalui akses pembiayaan, pelatihan, serta kemudahan perizinan. Selain itu, strategi ini juga mencakup peningkatan investasi dan daya saing daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong inovasi dalam sektor ekonomi.

3. Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Fokus utama dari strategi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional guna menciptakan SDM yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan global. Program beasiswa, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan berbasis keterampilan menjadi bagian dari upaya ini. Selain itu, strategi ini juga mencakup peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

4. Kualitas Pelayanan Publik dan Digitalisasi Sektor Strategis

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik melalui reformasi birokrasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi pemerintahan. Digitalisasi layanan strategis, seperti e-government, smart city, dan pelayanan terpadu berbasis teknologi, akan diterapkan guna mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang

Strategi ini menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan kebijakan tata ruang berbasis daya dukung lingkungan. Program rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah terpadu, serta pengurangan emisi karbon akan menjadi prioritas utama. Selain itu, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga diperkuat untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko lingkungan.

Rincian strategi dari setiap misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025-2029 akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel perencanaan pembangunan daerah berikut ini:

Tabel III-13. Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.		
Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur		
Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatkan mutu jalan strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten serta jalan desa.
		Penguatan infrastruktur transportasi umum untuk meningkatkan mobilitas masyarakat
		Meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur guna memastikan kualitas dan keberlanjutan
		Melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi infrastruktur secara berkala (jalan dan jembatan)
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kapasitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri.
		Pengembangan dan rehabilitasi sistem penyediaan air bersih (SPAM).
		Perluasan jaringan listrik dan penerangan jalan umum melalui kerja sama dengan PLN
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pengolahan limbah rumah tangga dan air limbah domestik
		Penyediaan infrastruktur pengolahan limbah rumah tangga dan air limbah domestik
		Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang berbasis hunian terjangkau yang terintegrasi dengan pusat kegiatan masyarakat
Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi		
Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia melalui pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	Peningkatan akses pendidikan dengan membangun dan merehabilitasi fasilitas sekolah.
	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan	Pembangunan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.
	Wilayah tanpa blank spot	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah dengan blank spot.
		Kemitraan dengan penyedia layanan internet untuk perluasan jaringan.
Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing		
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kampanye kesadaran kesehatan masyarakat
	Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Pemberdayaan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.
	Pengentasan kemiskinan	Program bantuan sosial berbasis pemberdayaan
	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatkan fasilitas dan sarana olahraga di tingkat desa dan kecamatan
		Menyelenggarakan kompetisi olahraga rutin dari tingkat lokal hingga regional untuk menjaring bibit atlet muda
Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi berkelanjutan	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Penguatan sektor unggulan berbasis potensi daerah
	Meningkatnya jumlah investasi	Penyederhanaan regulasi dan perizinan bagi investor
	Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan	Mendorong pengembangan kawasan industri dan fasilitasi UMKM untuk peningkatan akses pasar dan daya saing produk
	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan	Mengembangkan sistem pertanian terpadu dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.		
	pangan yang berkualitas dan terjangkau	memperkuat rantai pasok serta cadangan pangan daerah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas desa dan penguatan BUMDes berbasis potensi lokal
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi wisata tematik dan produk ekonomi kreatif melalui promosi digital dan pelibatan masyarakat
Meningkatkan kesempatan kerja menciptakan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja menciptakan ekonomi masyarakat	Program padat karya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja.
Misi 5: Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya		
Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Mendorong edukasi berbasis komunitas dan tokoh adat untuk memperkuat peran perempuan dan perlindungan anak
		Menguatkan nilai budaya lokal dalam pengasuhan, pendidikan karakter, dan ketahanan keluarga.
	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Penyediaan fasilitas dan layanan ramah anak di ruang publik
Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		
Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan daerah	Reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang cepat dan transparan
Terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat	Peningkatan keamanan melalui kerja sama dengan aparat hukum dan masyarakat.
Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal	Mengoptimalkan pemetaan potensi lokal dan digitalisasi layanan perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang		
Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Penguatan kebijakan tata ruang yang berbasis daya dukung lingkungan
	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Mengembangkan program hutan desa dan agroforestri, memperkuat kelembagaan masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan hutan, serta meningkatkan patroli dan rehabilitasi kawasan hutan kritis secara terpadu
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi dan komunitas

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan daerah merupakan pedoman strategis yang digunakan untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Kebijakan ini disusun berdasarkan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi. Melalui arah kebijakan yang jelas, setiap program dan kegiatan pembangunan dapat lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada tahap pertama transformasi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah, fokus utama adalah penguatan fondasi transformasi. Tahap ini bertujuan

untuk membangun dasar yang kokoh dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fondasi yang kuat diharapkan dapat menjadi pijakan bagi percepatan transformasi pada tahap berikutnya, sehingga pembangunan yang dilakukan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya saing daerah. Berikut ini adalah tabel transformasi tahap pertama RPJPN dengan arah kebijakan Penguatan Fondasi Transformasi:

Tabel III-14. Transformasi Tahap Pertama RPJPN/Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029

Transformasi	Penguatan Fondasi Trasnfromasi
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil
Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam merumuskan fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD, diperlukan pertimbangan terhadap berbagai faktor, termasuk pencapaian indikator sasaran dalam setiap misi. Hal ini menjadi dasar penting dalam menetapkan langkah-langkah strategis guna memastikan target indikator sasaran dapat dicapai secara efektif. Dengan pendekatan ini, tahapan pembangunan dan ukuran pencapaian target di setiap tahunnya akan semakin jelas dan terarah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menetapkan arah kebijakan, fokus dan tema pembangunan untuk lima tahun ke depan, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III-15. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	2026	2027	2028	2029	2030
Sosial	Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah	√	√	√		
	Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Penguatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur telekomunikasi	√	√			√
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan,	√	√			√

Transformasi	Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	2026	2027	2028	2029	2030
	Berdaya Saing	pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi					
Ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Meningkatkan investasi dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah			√	√	√
Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Menanamkan Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	Meningkatkan kesadaran budaya dan kearifan lokal melalui pendidikan dan festival budaya	√	√	√	√	√
Tata Kelola	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	√	√	√	√	√
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	Memastikan keberlanjutan lingkungan dengan tata ruang berbasis daya dukung dan mitigasi bencana				√	√

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus tahunan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel III-16. Fokus Pembangunan

No.	Fokus Pembangunan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Infrastruktur	√	√	√	√	√
2.	Pendidikan	√	√	√	√	√
3.	Kesehatan	√	√	√	√	√
4.	Teknologi dan Informasi	√	√	√	√	√
5.	Peningkatan Perekonomian Sektor Unggulan	√	√	√	√	√
6.	Kemiskinan	√	√	√	√	√
7.	Ketahanan Pangan	√	√	√	√	√
8.	Pengangguran	√	√	√	√	√
9.	Tata Kelola Pemerintahan	√	√	√	√	√
10.	Gender	√	√	√	√	√
11.	Perlindungan Anak	√	√	√	√	√
12.	Kualitas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√
13.	Kearifan Lokal	√	√	√	√	√
14.	Keamanan dan Ketertiban Sosial	√	√	√	√	√

Berdasarkan tabel arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah diatas, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah selama kurun waktu 5 tahun (periode RPJMD) adalah sebagai berikut:

Tabel III-17. Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
2026	Penguatan Fondasi Transformasi Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
2027	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik dan Digitalisasi Sektor Strategis
2028	Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Daya Saing Regional
2029	Akselerasi Investasi dan Keberlanjutan Pembangunan Lingkungan
2030	Evaluasi, Konsolidasi, dan Penguatan Keberlanjutan Pembangunan Menuju Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan

Tema pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2026-2030 disusun secara sistematis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun dalam periode ini memiliki fokus pembangunan yang saling berkesinambungan, dimulai dari penguatan fondasi hingga konsolidasi hasil pembangunan.

Pada tahun 2026, pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi transformasi infrastruktur dan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperbaiki layanan dasar, serta membangun kapasitas sumber daya manusia agar siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Memasuki tahun 2027, fokus bergeser pada optimalisasi kualitas pelayanan publik dan digitalisasi sektor strategis, dengan mengedepankan reformasi birokrasi serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tahun 2028 menjadi momentum untuk penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan daya saing regional, dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan daya saing ekonomi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selanjutnya, pada tahun 2029, pembangunan diarahkan pada akselerasi investasi dan keberlanjutan pembangunan lingkungan, yang berfokus pada peningkatan iklim investasi, pengembangan kawasan strategis, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan.

Sebagai tahap akhir dalam RPJMD ini, tahun 2030 menjadi periode evaluasi, konsolidasi, dan penguatan keberlanjutan pembangunan, di mana seluruh capaian pembangunan dalam lima tahun terakhir akan dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat. Pada tahap ini, kebijakan dan program strategis akan dikonsolidasikan guna memperkuat

pondasi pembangunan yang telah dibangun, serta menjamin kesinambungan program menuju visi jangka panjang Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tabel III-18 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatkan mutu jalan strategis untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten serta jalan desa.	
			Meningkatkan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur guna memastikan kualitas dan keberlanjutan	
			Melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi infrastruktur secara berkala (jalan dan jembatan)	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kapasitas pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri.	
			Pengembangan dan rehabilitasi sistem penyediaan air bersih (SPAM).	
			Perluasan jaringan listrik dan penerangan jalan umum melalui kerja sama dengan PLN	
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur pengolahan limbah rumah tangga dan air limbah domestik	
			Penyediaan infrastruktur pengolahan limbah rumah tangga dan air limbah domestik	
			Menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang berbasis hunian terjangkau yang terintegrasi dengan pusat kegiatan masyarakat	
Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia melalui pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	Peningkatan akses pendidikan dengan membangun dan merehabilitasi fasilitas sekolah.	Penguatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur telekomunikasi
		Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan	Pembangunan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.	
		Wilayah tanpa blank spot	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah dengan blank spot.	
			Kemitraan dengan penyedia layanan internet untuk perluasan jaringan.	
Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kampanye kesadaran kesehatan masyarakat	
		Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Pemberdayaan UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif.	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengentasan kemiskinan	Program bantuan sosial berbasis pemberdayaan	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatkan fasilitas dan sarana olahraga di tingkat desa dan kecamatan	
			Menyelenggarakan kompetisi olahraga rutin dari tingkat lokal hingga regional untuk menjaring bibit atlet muda	
Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi berkelanjutan	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Penguatan sektor unggulan berbasis potensi daerah	Meningkatkan investasi dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah
		Meningkatnya jumlah investasi	Penyederhanaan regulasi dan perizinan bagi investor	
		Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan	Mendorong pengembangan kawasan industri dan fasilitasi UMKM untuk peningkatan akses pasar dan daya saing produk	
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Mengembangkan sistem pertanian terpadu dan memperkuat rantai pasok serta cadangan pangan daerah	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatkan kapasitas desa dan penguatan BUMDes berbasis potensi lokal	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi wisata tematik dan produk ekonomi kreatif melalui promosi digital dan pelibatan masyarakat	
	Meningkatkan kesempatan kerja menciptakan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja menciptakan ekonomi masyarakat	Program padat karya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja.	
Misi 5: Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Mendorong edukasi berbasis komunitas dan tokoh adat untuk memperkuat peran perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kesadaran budaya dan kearifan lokal melalui pendidikan dan festival budaya
			Menguatkan nilai budaya lokal dalam pengasuhan, pendidikan karakter, dan ketahanan keluarga.	
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Penyediaan fasilitas dan layanan ramah anak di ruang publik	
Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan daerah	Reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang cepat dan transparan	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
	Terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat	Peningkatan keamanan melalui kerja sama dengan aparat hukum dan masyarakat.	
	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi	Mengoptimalkan pemetaan potensi lokal dan digitalisasi layanan perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis penerimaan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.	pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal	Pendapatan Asli Daerah (PAD).	
Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Penguatan kebijakan tata ruang yang berbasis daya dukung lingkungan	Memastikan keberlanjutan lingkungan dengan tata ruang berbasis daya dukung dan mitigasi bencana
		Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Mengembangkan program hutan desa dan agroforestri, memperkuat kelembagaan masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan hutan, serta meningkatkan patroli dan rehabilitasi kawasan hutan kritis secara terpadu	
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi dan komunitas	

C. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional yang selaras dengan visi dan misi daerah. Dalam RPJMD yang disusun saat ini, keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok dan arah kebijakan dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah, serta strategi dan kebijakan pembangunannya. Program pembangunan daerah merupakan agenda strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMD dan menjadi target utama selama lima tahun. Program ini secara langsung diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan.

Dalam implementasinya, program pembangunan daerah dijalankan sesuai dengan kewenangan daerah untuk menjawab berbagai isu strategis. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan spesifik Kabupaten Bengkulu Tengah, yang meliputi:

1. Kurangnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Serta Konektivitas yang Optimal untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Terbatasnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Teknologi dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing.

3. Kurangnya Daya Saing SDM dan Perlunya Peningkatan Kualitas untuk Menghadapi Perkembangan Industri dan Teknologi.
4. Perlunya Peningkatan Diversifikasi Ekonomi dan Daya Tarik Investasi dalam Mendukung Pertumbuhan dan Kesejahteraan Daerah.
5. Perlunya Peningkatan Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Responsif.
6. Terbatasnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dalam Mendukung Keseimbangan Ekologis dan Pembangunan Daerah.

Program pembangunan daerah ini merupakan bentuk upaya dalam menyelesaikan permasalahan strategis di Kabupaten Bengkulu Tengah, yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan nasional. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam janji kerja kepala daerah diantaranya:

Tabel III-19. Janji Kerja Kepala Daerah

No	Janji Kerja/Kampanye	Deskripsi	Kategori
1.	Jalan Mulus	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.	Bengkulu Tengah Maju
2.	Pembangunan Ibukota Modern	Pengembangan fasilitas dan tata kota untuk menjadikan ibu kota lebih modern dan nyaman.	Bengkulu Tengah Maju
3.	Penanganan Wilayah Blank Spot Area	Menyediakan akses internet di daerah terpencil untuk meningkatkan konektivitas digital.	Bengkulu Tengah Maju
4.	ASN Berdikari	Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN melalui pelatihan serta reformasi birokrasi.	Bengkulu Tengah Maju
5.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset dan inovasi pajak.	Bengkulu Tengah Maju
6.	Percepatan Pembangunan Daerah	Mendorong proyek strategis daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.	Bengkulu Tengah Maju
7.	Ketahanan Pangan (Bantuan Pupuk Gratis)	Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan	Bengkulu Tengah Sejahtera

No	Janji Kerja/Kampanye	Deskripsi	Kategori
		pangan masyarakat.	
8.	Bantuan Seragam & Peralatan Sekolah Gratis	Menyediakan seragam dan alat tulis gratis bagi siswa kurang mampu.	Bengkulu Tengah Sejahtera
9.	Jaminan Kesehatan Gratis	Memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.	Bengkulu Tengah Sejahtera
10.	Benteng Kalamambu	Program pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas daerah.	Bengkulu Tengah Sejahtera
11.	Program Benteng Bersahabat	Program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas untuk kesejahteraan sosial.	Bengkulu Tengah Bahagia
12.	Program Berbinar (Benteng Bersih dan Bersinar)	Inisiatif pencahayaan jalan dan penerangan umum untuk meningkatkan keamanan.	Bengkulu Tengah Bahagia
13.	Benteng Command Center	Pusat komando digital untuk monitoring keamanan dan pelayanan publik.	Bengkulu Tengah Bahagia
14.	Gerakan Cinta Batik Sungai Lemau	Kampanye promosi batik khas daerah untuk meningkatkan ekonomi kreatif.	Bengkulu Tengah Berkelanjutan

Program prioritas kepala daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan jangka menengah yang disusun secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan nyata serta mengoptimalkan potensi daerah. Program-program ini selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menyusun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, janji politik/ program prioritas kepala daerah, serta keselarasan dengan arah kebijakan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III-20. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2025-2029

Visi	Misi	Janji Kerja Kepala Daerah	Asta Cita	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah
Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan	Misi 1: Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Jalan Mulus Ibu Kota Modern Percepatan Pembangunan Daerah	Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	PP 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antarwilayah	Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru
	Misi 2: Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	Bantuan Seragam & Peralatan Sekolah Gratis Jaminan Kesehatan Gratis Penanganan Wilayah Blank Spot Area	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	PP 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak	Memastikan akses pendidikan dasar yang merata melalui penyediaan bantuan seragam serta peralatan sekolah gratis bagi seluruh siswa kurang mampu

Visi	Misi	Janji Kerja Kepala Daerah	Asta Cita	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	penyandang disabilitas	
	Misi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Bantuan Seragam & Peralatan Sekolah Gratis	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	PP 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan layanan pengobatan gratis yang merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
	Misi 4: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	Benteng Kalamambu (Kalamansi dan Bambu) Ketahanan Pangan (Bantuan Pupuk Gratis)	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PP 5: Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal	Mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah serta hilirisasi komoditas unggulan daerah
			Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 6: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggulan	Mewujudkan ketahanan pangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
	Misi 5: Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	Program Benteng Bersahabat Gerakan Cinta Batik Sungai Lemau	Asta Cita 8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP 2: Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmu	Membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui penguatan nilai-nilai sosial, budaya, serta tata kehidupan yang rukun dan bersahabat
	Misi 6: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Berdikari Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Benteng <i>Command Center</i>	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	PP 1: Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai	Meningkatkan kinerja dan kemandirian Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembinaan asn berdikari yang profesional, adaptif,

Visi	Misi	Janji Kerja Kepala Daerah	Asta Cita	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah
			pemberantasan korupsi dan narkoba.	religius	dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
					Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis inovasi dan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah
	Misi 7: Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	Bengkulu Tengah Bersih dan Bersinar	Asta Cita 8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP 2: Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung pembangunan daerah

Setelah merumuskan keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025–2029 secara internal, langkah berikutnya adalah mengkaji keterpaduan program-program prioritas daerah dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Tabel berikut menyajikan keselarasan program prioritas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan program prioritas Provinsi Bengkulu dan program nasional, guna memastikan integrasi vertikal dalam perencanaan pembangunan serta memperkuat efektivitas pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel III-21 Keselarasan Program Prioritas Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Program Provinsi dan Nasional Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas Bengkulu Tengah	Program Provinsi	Program Nasional
1	Program Jalan Mulus	Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan melalui Program Seribu Jalan Mulus	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas
2	Program Pembangunan Ibu Kota Modern		SPAM Regional Benteng - Kobema
3	Program Ketahanan Pangan	Cetak Sawah Baru (CSB) dan perbaikan serta peningkatan irigasi dalam mewujudkan ketahanan pangan	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	

No	Program Prioritas Bengkulu Tengah	Program Provinsi	Program Nasional
		Dan Nelayan Melalui Bantuan Bibit, Peralatan Pertanian, Alat Tangkap Dan Stabilitas Harga Dengan Mengembangkan Pusat-Pusat Pengolahan Agropolitan	
4	Program Bantuan Seragam & Peralatan Sekolah Gratis	Merdeka Ijazah Bagi Anak Bangsa	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
5	Program Berobat Gratis	Perwujudan Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin Seluruh Masyarakat Provinsi Bengkulu Mendapatkan BPJS Gratis	Program Penuntasan TBC
6	Program Benteng Kalamansi dan Bambu	Penyelarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan pemberdayaan pemerintahan desa dengan penguatan BUMDes, Desa Wisata melalui One Village-One Product	Hilirisasi dan Industrialisasi
7	Program Penanganan Wilayah Blank Spot		Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
8	Program Benteng Bersahabat	Pengangkatan dan Penyantunan Anak Yatim	
9	Program Benteng Bersih dan Bersinar (Berbinar)		Penguatan Tata Kelola Persampahan
10	Program Benteng Command Center		Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu
11	Program ASN Berdikari	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui kenaikan TPP, pemberian insentif serta penyediaan jasa medis.	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN
12	Program Gerakan Cinta Batik Sungai Lemau		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
13	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
		Optimalisasi pemanfaatan Aset Terbengkalai	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
14	Program Percepatan Pembangunan Daerah	Penyelarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai, Bandara Fatmawati, dan Kereta Api Lubuk Linggau-Kota Bengkulu	Makan Bergizi Gratis; Swasembada Pangan; Hilirisasi, Industrialisasi dan Transforamsi Digital; Konektivitas;

3.3. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah untuk “Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi, serta Kawasan Komoditas Unggulan”. Dokumen RPJMN 2025-2029 memuat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama, dan 77 Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 8 indikasi dalam mencapai sasaran nasional, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Proyek Strategis Nasional (PSN) Pada dokumen RPJMN 2025-2029 disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis, dimana pelaksanaannya dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran RPJMN Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini berkomitmen penuh untuk mendukung PSN dimana indikasi nya dijelaskan sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis: Program Makan Bergizi Gratis (Nasional)
2. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Revitalisasi sarana dan prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas; Program Penuntasan TBC;
3. Swasembada Pangan: Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat; Layanan irigasi pendukung lumbung pangan Nasional; SPAM Regional Benteng- Kobema (Nasional)
4. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Pengembangan kawasan industri terpadu; pengembangan layanan digital pemerintah terpadu (Nasional)
5. Konektivitas dan Kawasan: Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas
6. Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah (Nasional)

3.3.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tertuang dalam RTRW Tahun 2023–2043 disusun untuk menciptakan keterpaduan antarwilayah, efisiensi pemanfaatan ruang, serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Struktur ruang ini mengatur sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah sebagai kerangka dasar pembangunan. Kecamatan Karang Tinggi ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berperan sebagai pusat pelayanan utama skala kabupaten, mencakup fungsi pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik. Sementara itu, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dikembangkan di wilayah Pondok Kelapa, Talang Empat, dan Pematang Tiga, sebagai simpul pelayanan antara kawasan pedesaan dengan pusat kabupaten.

Kawasan strategis yang meliputi kawasan budidaya, hutan lindung, kawasan rawan bencana, dan kawasan pertumbuhan ekonomi juga diatur untuk menjaga keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Pengembangan sistem jaringan transportasi dan prasarana wilayah difokuskan pada peningkatan konektivitas melalui jalur kolektor primer dan integrasi jaringan nasional serta provinsi. Dengan demikian, struktur ruang ini menjadi landasan penting dalam penentuan lokus dan arah pembangunan RPJMD 2025–2029 agar seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat diselaraskan dengan potensi wilayah dan daya dukung lingkungan secara optimal.

B. Rencana Pola Ruang

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023–2043, pola ruang wilayah dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung difungsikan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang bernilai strategis bagi kehidupan masyarakat. Penetapannya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kawasan ini mencakup wilayah-wilayah dengan karakteristik fisik rentan seperti lereng terjal, tanah dangkal, dan struktur geologi labil. Kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi badan air dan hutan

lindung, termasuk Hutan Lindung Rindu Hati di Kecamatan Taba Penanjung dan Bukit Daun di Kecamatan Merigi Kelintang. Wilayah ini berperan penting sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir, serta pelindung kawasan budidaya di sekitarnya.

Kawasan budidaya selanjutnya diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan permukiman, pertanian, industri, pariwisata, serta perdagangan dan jasa. Kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dengan pusat pertumbuhan utama di Karang Tinggi, Talang Empat, dan Pondok Kelapa. Kawasan pertanian terfokus di Pematang Tiga, Merigi Sakti, dan Pondok Kubang, sedangkan kawasan industri diarahkan di Talang Empat. Adapun pengembangan kawasan pariwisata dilakukan di Taba Penanjung dan Merigi Sakti, yang memiliki potensi wisata alam dan budaya.

Pola ruang ini dirancang untuk mendorong keterpaduan pembangunan antarwilayah, menjaga keseimbangan ekologis, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, pola ruang Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi dasar penting dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

C. Rencana Kawasan Strategis

Rencana kawasan strategis wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. Berdasarkan dokumen RTRW, kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan agropolitan, industri, pertambangan, dan pariwisata. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kawasan Agropolitan di Kecamatan Pagar Jati dan sekitarnya, Kawasan Pariwisata Lintas Kecamatan yang mencakup wilayah Taba Penanjung, Talang Empat, dan Pondok Kelapa, serta Kawasan Perdagangan dan Jasa di Karang Tinggi, Kembang Seri, dan Pekik Nyaring. Rencana ini diarahkan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan sistem jaringan jalan dan prasarana lainnya.

Dari sudut kepentingan sosial budaya, kawasan strategis dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kawasan permukiman dan pelayanan sosial difokuskan pada pusat-pusat pelayanan kawasan (PPK) seperti

Pondok Kubang, Bajak I, Keroya, dan Arga Indah II, serta pusat pelayanan lingkungan (PPL) seperti Lubuk Unen Baru, Sekayun, dan Pematang Tiga. Wilayah ini dikembangkan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, ketersediaan sarana prasarana, dan kemudahan akses antarwilayah.

Sementara itu, dari sudut kepentingan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup, kawasan strategis ditetapkan untuk menjaga kelestarian kawasan lindung, sistem irigasi pertanian, dan sumber daya air, serta mitigasi bencana. Wilayah pesisir dan sempadan sungai, seperti Sungai Rindu Hati dan Sungai Bajak Sidodadi, ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana yang perlu penanganan berbasis mitigasi.

Tabel III-22. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	Outcome	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun					Program Prioritas
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.												
1.	Percepatan Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	1.1	Meningkatkan konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan mobilitas transportasi untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	73,69	74,47	75,25	76,03	76,81	77,6	
			1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Peningkatan infrastruktur publik yang layak dan berkelanjutan	Rasio jalan mantab	51.55	56,03	58,27	60,52	62,76	65
		1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan infrastruktur publik yang layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih layak	89,04	89,72	90,06	90,4	90,74	91,08	Ibu Kota Modern
					Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	62,07	62,15	62,2	62,24	62,28	62,32	
					Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	99,49	99,53	99,55	99,57	99,59	99,6	
					Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak	56,52	61,01	63,26	65,51	67,75	70	
		1.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur publik yang layak dan berkelanjutan	Tangga dengan akses hunian layak							
2.	Pemenuhan Kebutuhan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Teknologi	2.1	Menciptakan pembangunan kebutuhan dasar manusia (pendidikan, kesehatan masyarakat, dan teknologi)	terpenuhinya layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan akses teknologi secara merata untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.256	0.346	0.376	0.406	0.436	0.466	
		2.1.1	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan pendidikan	ayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk mendukung peningkatan	APM SD	97,75	98,5	98,75	99	99,25	99,5	Bantuan seragam dan peralatan seolah gratis
APM SMP	81,72				82,39	82,78	83,18	83,58	83,98			
					Angka Partisipasi Kasar	109,53	108,1	107,31	106,53	105,76	104,98	

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	Outcome	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun					Program Prioritas
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.												
				kompetensi dan partisipasi peserta didik	(APK) SD							
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,34	100,3	106,26	109,25	112,23	115,21	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah	94	94	94	94	94	94	
		2.1.2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebutuhan kesehatan	Masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan bermutu								
					Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan	34	34	34	34	34	34	
					Rasio Tenaga Kesehatan per Kecamatan	68	70	72	74	76	77	
					Angka kematian Bayi/100 per kelahiran bayi	18	17	16	15	14	13	
					Angka Kematian Ibu/100.00 kelahiran hidup	4	3	3	2	2	2	
		2.1.3	Wilayah tanpa blank spot	Pemerataan akses layanan komunikasi dan internet untuk mendukung pendidikan, aktivitas ekonomi dan layanan publik berbasis digital	Jumlah blank spot (lemah Sinyal & Tidak ada Sinyal)	15	10	7	5	2	0	Penanganan Wilayah Blank Spot Area
		3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	3.1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya Daya Saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54	0,545	0,55	0,557	0,561
3.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah			Memperkuat kesetaraan kesempatan belajar dan menekan angka putus sekolah serta mendukung tumbuhnya generasi muda yang unggul dan berkarakter	Rata-rata lama sekolah	7,71	8,03	8,19	8,35	8,51	8,67	Bantuan seragam dan peralatan seolah gratis
					Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,47	13,762	13,86	13,97	14,08	14,18	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	45,80	53,20	56,90	60,60	64,30	68	
				Usia Harapan Hidup (UHH)	71,67	72,61	73,15	73,71	74,26	74,81	Pengobatan gratis	

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	Outcome	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun					Program Prioritas
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.												
				berkualitas								
		3.1.3	Kualitas ekonomi masyarakat meningkat	Meningkatnya taraf pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal dan pengembangan kewirausahaan	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	55,28	59,71-66	63,31-69,97	66,91-73,95	70,5-77,92	74,1-81,9	
		3.1.4	Pengentasan kemiskinan	Berkurangnya jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan akses ke layanan dasar dan peluang kerja	Angka Kemiskinan	10,14	9,61	9,33	8,95	8,46	7,88	
		3.1.5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Tumbuhnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat lokal dan nasional	Indeks Pemabangunan Pemuda Indeks Partisipasi Olahraga	57,33 	58,40 	59,37 	60,33 	61,3 	62,2 	
4.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	4.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi berkelanjutan	meningkatkan kinerja ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui optimalisasi investasi, pengembangan sektor unggulan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,97%	4,21-4,61	4,44-4,84	4,66-5,06	4,88-5,28	5,1-5,5	
		4.1.1	Meningkatnya Proporsi sektor unggulan	Peningkatan sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi	Proporsi distribusi PDRB unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	42,8	43,4	43,7	44	44,30	44,60	Benteng Kalamambu (Kalamansi dan Bambu)
		4.1.2	Meningkatnya jumlah investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusi dan berdaya saing daerah	Jumlah penanaman modal asing	348.881	371.926	386.803	404.208	424.418	445.639	Benteng Kalamambu (Kalamansi dan Bambu)
					Jumlah penanaman modal dalam negeri	3.422.939	3.746.133	3.933.440	4.138.909	4.359.271	4.598.026	
					Indeks Daya Saing Daerah	3,24	3,69	3,93	4,16	4,40	4,63	
		4.1.3	Meningkatnya daya saing industri dan Perdagangan	Berkembangnya industri dan perdagangan lokal yang kompetitif	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	13,90	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	
Kontribusi Sektor	8,23				8,48	8,56	8,63	8,70	8,77			

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	Outcome	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun					Program Prioritas
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.												
					Perdagangan terhadap PDRB							
		4.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Peningkatan ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	62.14	65	66,5	68	69,5	71	Ketahanan Pangan
		4.1.5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Penguatan kapasitas dan akses sumber daya lokal	Indeks Desa Membangun	0,7104	0,7608	0,78603	0,81126	0,83649	0,86172	
		4.1.6	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Berkembangnya sektor Parekraf sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	0,83	0,89	0,92	0,95	0,98	1,02	
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,89	70,4	71,1	71,9	72,7	73.5	
		4.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.56	2.22	2.05	1.88	1.71	1.54	
5.	Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Budaya	5.1	Meningkatkan nilai budaya yang inklusif dan berkeadilan gender	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan produktivitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	61,45						
		5.1.1	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya keharmonisan antar individu dan komunitas Terwujudnya kehidupan sosial yang inklusif, harmonis, dan partisipatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial	Indeks Pembangunan Gender	87.51	87,812	87,969	88,126	88,283	88,44	
					Indeks Pemberdayaan Gender	75,3	76,3	76,9	77,4	78	78,5	
					Indeks Ketimpangan Gender	0.483	0,5112	0,512	0,5128	0,5136	0,5144	
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,94	61,2	62,5	63,8	65,2	66,5	
		5.1.2	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Keluarga memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan spiritual	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55,28	57,8	59,1	60,5	61,8	63	Bengkulu Tengah Bersahabat"bersama selalu hadir

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	Outcome	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun					Program Prioritas
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.												
												buat masyarakat"
6.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6.1	Terciptanya Tata kelola pemerintahan yang baik dengan ASN profesional	Meningkatnya kinerja birokrasi yang akuntabel, transparan, dan responsif melalui pelayanan publik yang efektif serta didukung oleh aparatur sipil negara yang kompeten dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	76,8	78,2	78,9	79,6	80,3	81,0	
		6.1.1	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan daerah	terselenggaranya tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Nilai Sakip	61,98	65,00	67,00	68,00	69,00	71,00	
					Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
					Nilai SPBE	2,84	3,23	3,42	3,61	3,81	4,00	Bengkulu Tengah Command Center
		6.1.2	Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan profesionalitas ASN	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN	75,53	76,8	77,5	78,3	79	79,8	ASN Berdikari
			Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam mendukung pengambilan kebijakan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,76	2,8	2,85	2,9	2,95	3	
6.2	Terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, dan tertib	Terwujudnya partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses demokrasi serta meningkatnya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan sosial	Indeks Demokrasi Indonesia	72,2	74	75	76	77	78			
6.2.1	Menurunnya angka kriminalitas di masyarakat	Peningkatan keamanan wilayah yang responsif dan terintegrasi	Jumlah kriminalitas	304	275	259	244	227	211			
6.3	Meningkatkan kapasitas dan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkeadilan, efisien, dan berbasis potensi lokal.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui pertumbuhan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi ekonomi lokal	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.283 Juta	54.998 Juta	59.994 Juta	63.283 Juta	81.368 Juta	96.343 Juta	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		

No.	MISI	KODE	TUJUAN/ SASARAN	Outcome	INDIKATOR	BASELINE (2024)	Target Tahun					Program Prioritas
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah yang Maju, Sejahtera, Bahagia, dan Berkelanjutan.												
		6.3.1	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal	Daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari potensi lokal secara adil, efisien, dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan PAD		5,08-35	5,08-35	5,48-35	10,4-35	15,4-35	
7.	Pelestarian Lingkungan dan Tata Ruang	7.1	Menciptakan lingkungan hidup berkualitas	Terjaganya kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas air, udara, dan lahan serta penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,91	68,20	70,49	72,78	75,07	77,36	Bengkulu Tengah Bersih Berbudaya, indah dan religius
		7.1.1	Terciptanya lingkungan hidup berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, serta kesadaran masyarakat masyarakat untuk menjaganya	Indeks Kualitas Air	61,11	66,05	70,99	75,93	80,87	85,81	
					Indeks Kualitas Udara	90,37	91,17	91,97	92,77	93,57	94,37	
					Indeks Kualitas Lahan	27,40	27,88	28,37	28,85	29,34	29,82	
		7.1.2	Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan	Hutan terjaga fungsinya dalam mendukung ekosistem, ekonomi, dan mitigasi bencana	Persentase Tutupan Lahan	43	45.33	46.5	47.67	48.83	50	
		7.1.3	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Masyarakat dan pemerintah daerah lebih siap dan tanggap terhadap bencana untuk meminimalkan risiko kerugian	Indeks Resiko Bencana	82,63	70	65	60	56	52	
Indeks Ketahanan Energi	55				59.33	61.5	63.67	65.83	68			
					Indeks Ketahanan Air	60	64	66	68	70	72	

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah dirancang sebagai instrumen utama untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Program-program ini menjadi arah operasional dari kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun, dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana sektoral yang terintegrasi dengan tujuan strategis pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan program sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diemban, baik dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan pilihan yang mendukung potensi unggulan daerah. Program pembangunan mencakup berbagai bidang, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, penguatan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pembangunan sosial dan budaya. Pelaksanaan program ini didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, agar mampu menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan yang merata antarwilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan program perangkat daerah didukung oleh berbagai sumber anggaran, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, Dana Desa, maupun sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah, alokasi anggaran untuk program daerah disusun secara proporsional berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil masyarakat, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan antarwilayah kecamatan dan desa.

Agar implementasi program berjalan secara optimal, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, serta partisipasi

aktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mendorong pola kerja kolaboratif dan kemitraan strategis dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen pembangunan lainnya. Pendekatan kolaboratif ini diyakini dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program perangkat daerah menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Setiap perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur capaian program, menilai efektivitas pelaksanaan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan. Melalui evaluasi yang sistematis dan berkesinambungan, program yang belum optimal dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki, sedangkan program yang berhasil dapat direplikasi atau diperluas untuk menjangkau lebih banyak manfaat.

Penyelenggaraan program perangkat daerah dalam kerangka RPJMD Kabupaten Bengkulu Tengah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang terarah, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, serta pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif.

Tabel IV-1. Program Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					201.719.065.248,00		206.043.423.440,00		213.123.830.161,00		215.614.833.076,00		224.012.789.423,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					157.314.599.498,00		160.196.799.595,00		163.057.706.316,00		163.285.784.144,00		165.432.427.211,00	
Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD					157.314.599.498,00		160.196.799.595,00		163.057.706.316,00		163.285.784.144,00		165.432.427.211,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					41.814.765.750,00		44.001.923.845,00		48.221.423.845,00		50.464.348.932,00		56.715.662.212,00	
1					28.200.000,00		28.200.000,00		29.981.915,00		34.652.128,00		34.652.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningaknya Partisipasi Anak Usia Sekolah					90.280.000,00		95.280.000,00		97.061.915,00		101.732.128,00		101.732.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					64.983.333,00		65.816.666,00		65.816.666,00		78.358.333,00		78.358.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					64.983.333,00		65.816.666,00		65.816.666,00		78.358.333,00		78.358.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					45.160.000,00		55.160.000,00		56.941.915,00		61.612.128,00		61.612.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					16.920.000,00		16.920.000,00		18.701.915,00		23.372.128,00		23.372.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					74.340.000,00		74.340.000,00		76.121.915,00		80.792.128,00		80.792.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					409.560.000,00		409.560.000,00		419.560.000,00		509.560.000,00		509.560.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					93.960.000,00		93.960.000,00		93.960.000,00		93.960.000,00		93.960.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					97.440.000,00		97.440.000,00		97.440.000,00		97.440.000,00		97.440.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah					27.840.000,00		27.840.000,00		27.840.000,00		27.840.000,00		27.840.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					811.120.000,00		821.120.000,00		821.120.000,00		911.120.000,00		911.120.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					327.120.000,00		327.120.000,00		327.120.000,00		327.120.000,00		327.120.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					422.000.000,00		422.000.000,00		422.000.000,00		422.000.000,00		422.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					152.560.000,00		152.560.000,00		152.560.000,00		152.560.000,00		152.560.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					222.720.000,00		222.720.000,00		222.720.000,00		222.720.000,00		222.720.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					200.920.000,00		200.920.000,00		200.920.000,00		200.920.000,00		200.920.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					194.880.000,00		194.880.000,00		194.880.000,00		194.880.000,00		194.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					129.800.000,00		129.800.000,00		129.800.000,00		129.800.000,00		129.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					97.440.000,00		97.440.000,00		97.440.000,00		97.440.000,00		97.440.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					201.280.000,00		211.280.000,00		201.280.000,00		201.280.000,00		201.280.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					12.760.000,00		12.760.000,00		12.760.000,00		12.760.000,00		12.760.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					70.920.000,00		70.920.000,00		70.920.000,00		70.920.000,00		70.920.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					54.680.000,00		54.680.000,00		54.680.000,00		54.680.000,00		54.680.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					49.880.000,00		49.880.000,00		49.880.000,00		49.880.000,00		49.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					96.280.000,00		96.280.000,00		96.280.000,00		96.280.000,00		96.280.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					35.960.000,00		35.960.000,00		35.960.000,00		35.960.000,00		35.960.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					59.160.000,00		59.160.000,00		59.160.000,00		59.160.000,00		59.160.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					22.040.000,00		22.040.000,00		22.040.000,00		33.040.000,00		33.040.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					45.240.000,00		45.240.000,00		45.240.000,00		45.240.000,00		45.240.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					34.800.000,00		34.800.000,00		34.800.000,00		34.800.000,00		34.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					52.200.000,00		52.200.000,00		52.200.000,00		52.200.000,00		52.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					100.880.000,00		100.880.000,00		100.880.000,00		100.880.000,00		100.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					30.160.000,00		30.160.000,00		30.160.000,00		30.160.000,00		30.160.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					53.360.000,00		53.360.000,00		53.360.000,00		53.360.000,00		53.360.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					327.120.000,00		327.120.000,00		327.120.000,00		327.120.000,00		327.120.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					149.640.000,00		149.640.000,00		149.640.000,00		149.640.000,00		149.640.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					559.225.750,00		270.344.313,00		257.126.228,00		261.796.441,00		715.528.515,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					464.800.000,00		164.800.000,00		163.363.830,00		278.341.135,00		571.252.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					242.920.000,00		97.920.000,00		99.701.915,00		104.372.128,00		254.372.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					287.100.000,00		92.100.000,00		93.881.915,00		98.552.128,00		298.552.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					283.340.000,00		138.340.000,00		140.121.915,00		144.792.128,00		394.792.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					203.440.000,00		108.440.000,00		110.221.915,00		114.892.128,00		214.892.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					272.060.000,00		122.060.000,00		123.841.915,00		128.512.128,00		278.512.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					87.500.000,00		107.500.000,00		109.281.915,00		113.952.128,00		113.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					90.320.000,00		70.320.000,00		72.101.915,00		76.772.128,00		76.772.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					73.360.000,00		78.360.000,00		80.141.915,00		84.812.128,00		84.812.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					47.040.000,00		52.040.000,00		53.821.915,00		58.492.128,00		58.492.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					55.500.000,00		60.500.000,00		62.281.915,00		66.952.128,00		66.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					255.180.000,00		125.180.000,00		126.961.915,00		131.632.128,00		281.632.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					74.300.000,00		79.300.000,00		81.081.915,00		85.752.128,00		85.752.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					296.500.000,00		96.500.000,00		98.281.915,00		102.952.128,00		402.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					344.140.000,00		99.140.000,00		100.921.915,00		105.592.128,00		455.592.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					63.960.000,00		68.960.000,00		70.741.915,00		75.412.128,00		75.412.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					244.500.000,00		104.500.000,00		106.281.915,00		110.952.128,00		260.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					261.420.000,00		121.420.000,00		123.201.915,00		127.872.128,00		277.872.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					58.320.000,00		58.320.000,00		60.101.915,00		64.772.128,00		64.772.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					97.500.000,00		97.500.000,00		99.281.915,00		103.952.128,00		103.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					33.880.000,00		33.880.000,00		35.661.915,00		40.332.128,00		40.332.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					281.500.000,00		81.500.000,00		83.281.915,00		87.952.128,00		287.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					223.820.000,00		123.820.000,00		125.601.915,00		130.272.128,00		230.272.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					252.960.000,00		102.960.000,00		104.741.915,00		109.412.128,00		259.412.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					20.680.000,00		20.680.000,00		22.461.915,00		27.132.128,00		27.132.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					113.480.000,00		113.480.000,00		115.261.915,00		119.932.128,00		119.932.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					41.060.000,00		41.060.000,00		42.841.915,00		47.512.128,00		47.512.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					104.420.000,00		104.420.000,00		106.201.915,00		110.872.128,00		110.872.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					134.500.000,00		134.500.000,00		136.281.915,00		140.952.128,00		140.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					69.600.000,00		69.600.000,00		71.381.915,00		76.052.128,00		76.052.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					66.780.000,00		66.780.000,00		68.561.915,00		73.232.128,00		73.232.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					36.700.000,00		36.700.000,00		38.481.915,00		43.152.128,00		43.152.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					70.540.000,00		70.540.000,00		72.321.915,00		76.992.128,00		76.992.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					112.880.000,00		112.880.000,00		114.661.915,00		119.332.128,00		119.332.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					53.620.000,00		53.620.000,00		55.401.915,00		60.072.128,00		60.072.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					42.000.000,00		42.000.000,00		43.781.915,00		48.452.128,00		48.452.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					220.400.000,00		70.400.000,00		72.181.915,00		76.852.128,00		226.852.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					54.560.000,00		54.560.000,00		56.341.915,00		61.012.128,00		61.012.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					93.140.000,00		93.140.000,00		94.921.915,00		99.592.128,00		99.592.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					11.280.000,00		11.280.000,00		13.061.915,00		17.732.128,00		17.732.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					26.960.000,00		26.960.000,00		28.741.915,00		33.412.128,00		33.412.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					211.000.000,00		111.000.000,00		112.781.915,00		117.452.128,00		217.452.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					46.100.000,00		46.100.000,00		47.881.915,00		52.552.128,00		52.552.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					66.780.000,00		66.780.000,00		68.561.915,00		73.232.128,00		73.232.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					57.380.000,00		57.380.000,00		59.161.915,00		63.832.128,00		63.832.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					37.300.000,00		37.300.000,00		39.081.915,00		43.752.128,00		43.752.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					25.080.000,00		25.080.000,00		26.861.915,00		31.532.128,00		31.532.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					42.640.000,00		42.640.000,00		44.421.915,00		49.092.128,00		49.092.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					101.860.000,00		101.860.000,00		103.641.915,00		108.312.128,00		108.312.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					40.760.000,00		40.760.000,00		42.541.915,00		47.212.128,00		47.212.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					84.340.000,00		84.340.000,00		86.121.915,00		90.792.128,00		90.792.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					48.920.000,00		48.920.000,00		50.701.915,00		55.372.128,00		55.372.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					45.460.000,00		45.460.000,00		47.241.915,00		51.912.128,00		51.912.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					85.580.000,00		85.580.000,00		87.361.915,00		87.361.915,00		92.032.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					31.660.000,00		31.660.000,00		33.441.915,00		38.112.128,00		38.112.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					75.240.000,00		75.240.000,00		77.021.915,00		81.692.128,00		81.692.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					207.500.000,00		107.500.000,00		109.281.915,00		113.952.128,00		213.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					44.820.000,00		44.820.000,00		46.601.915,00		51.272.128,00		51.272.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					94.680.000,00		94.680.000,00		96.461.915,00		101.132.128,00		101.132.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					30.080.000,00		30.080.000,00		31.861.915,00		36.532.128,00		36.532.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					59.560.000,00		59.560.000,00		61.341.915,00		66.012.128,00		66.012.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					349.440.000,00		99.440.000,00		101.221.915,00		105.892.128,00		355.892.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					53.620.000,00		53.620.000,00		55.401.915,00		60.072.128,00		60.072.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					65.840.000,00		65.840.000,00		67.621.915,00		72.292.128,00		72.292.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					49.860.000,00		49.860.000,00		51.641.915,00		56.312.128,00		56.312.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					237.920.000,00		97.920.000,00		99.701.915,00		104.372.128,00		254.372.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					51.740.000,00		51.740.000,00		53.521.915,00		58.192.128,00		58.192.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					53.620.000,00		53.620.000,00		55.401.915,00		60.072.128,00		60.072.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					68.660.000,00		68.660.000,00		70.441.915,00		75.112.128,00		75.112.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					83.700.000,00		83.700.000,00		85.481.915,00		90.152.128,00		90.152.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					45.460.000,00		45.460.000,00		47.241.915,00		51.912.128,00		51.912.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					95.620.000,00		95.620.000,00		97.401.915,00		102.072.128,00		102.072.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					62.080.000,00		62.080.000,00		63.861.915,00		68.532.128,00		68.532.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					81.520.000,00		81.520.000,00		83.301.915,00		87.972.128,00		87.972.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					39.820.000,00		39.820.000,00		41.601.915,00		46.272.128,00		46.272.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					56.740.000,00		56.740.000,00		58.521.915,00		63.192.128,00		63.192.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					71.480.000,00		76.480.000,00		78.261.915,00		82.932.128,00		82.932.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					39.180.000,00		39.180.000,00		40.961.915,00		45.632.128,00		45.632.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					33.540.000,00		33.540.000,00		35.321.915,00		39.992.128,00		39.992.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					31.660.000,00		31.660.000,00		33.441.915,00		38.112.128,00		38.112.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					45.760.000,00		45.760.000,00		47.541.915,00		52.212.128,00		52.212.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					269.827.134,00		82.700.000,00		84.481.915,00		89.152.128,00		389.152.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					55.500.000,00		55.500.000,00		57.281.915,00		61.952.128,00		61.952.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					91.220.000,00		96.220.000,00		98.001.915,00		102.672.128,00		102.672.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					49.320.000,00		49.320.000,00		51.101.915,00		55.772.128,00		55.772.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah					49.220.000,00		49.220.000,00		51.001.905,00		55.672.096,00		55.672.096,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/MTs					26.533.326.200,00		32.179.826.200,00		36.251.826.200,00		37.728.701.287,00		39.778.701.287,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/MTs					138.040.000,00		138.040.000,00		138.040.000,00		138.040.000,00		138.040.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Meningkatnya Pemerataan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD,SD/MI dan SMP/Mts					149.540.000,00		169.540.000,00		171.321.915,00		175.992.128,00		175.992.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					900.200.000,00		910.200.000,00		910.200.000,00		930.200.000,00		930.200.000,00	
Persentase Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum					900.200.000,00		910.200.000,00		910.200.000,00		930.200.000,00		930.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					972.500.000,00		372.500.000,00		372.500.000,00		372.500.000,00		372.500.000,00	
Persentase Tenaga Pendidk dan Kependidikan yang Berkopetensi					972.500.000,00		372.500.000,00		372.500.000,00		372.500.000,00		372.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					557.000.000,00		402.000.000,00		402.000.000,00		402.000.000,00		402.000.000,00	
JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN					557.000.000,00		402.000.000,00		402.000.000,00		402.000.000,00		402.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
Telestarikannya bahasa dan sastra daerah					160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					176.516.755.102,00		186.040.446.395,31		193.227.764.397,70		200.852.842.382,68		208.501.075.204,89	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					85.582.157.500,00		86.699.139.500,00		91.032.528.351,00		95.582.858.086,00		100.359.791.700,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					6.978.000,00		7.001.940,00		7.211.998,00		7.428.358,00		7.651.208,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Evaluasi Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	106.400.000,00	B	111.720.000,00	B	117.306.000,00	B	123.171.300,00	B	129.329.865,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Pengelolaan Retribusi					3.900.000,00		4.095.000,00		4.299.750,00		4.514.738,00		4.740.474,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					7.100.000,00		7.384.000,00		7.641.000,00		7.946.000,00		8.637.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah dan Tata Kelolah Pemerintahan OPD					5.616.000,00		5.840.640,00		6.074.266,00		6.317.236,00		6.569.926,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	85.373.078.000,00	100	86.481.531.900,00	100	90.805.408.495,00	100	95.345.590.848,00	100	100.111.669.952,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	5.500.000,00	100	5.610.000,00	100	5.890.500,00	100	6.185.025,00	100	6.494.276,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD					3.600.000,00		3.670.000,00		3.800.000,00		4.000.000,00		4.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	2.575.000,00	100	2.655.000,00	100	2.735.000,00	100	2.850.000,00	100	2.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	6.025.500,00	100	6.206.300,00	100	6.392.500,00	100	6.584.300,00	100	6.781.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD					6.200.000,00		6.386.000,00		6.705.300,00		7.100.000,00		7.455.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	4.120.000,00	100	4.243.600,00	100	4.370.000,00	100	4.502.000,00	100	4.637.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	5.040.000,00	100	5.292.000,00	100	5.556.600,00	100	5.834.430,00	100	6.126.151,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.250.000,00	100	3.315.000,00	100	3.480.750,00	100	3.654.788,00	100	3.837.527,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD					2.496.000,00		2.595.800,00		2.699.600,00		2.807.600,00		2.919.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	2.132.000,00	100	2.217.280,00	100	2.305.971,00	100	2.398.210,00	100	2.494.138,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	5.150.000,00	100	5.300.000,00	100	5.450.000,00	100	5.600.000,00	100	5.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	4.635.000,00	100	4.775.000,00	100	4.918.000,00	100	5.065.000,00	100	5.217.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.193.000,00	100	3.288.790,00	100	3.387.458,00	100	3.489.082,00	100	3.593.754,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Pemerintahan OPD					4.400.000,00		4.550.000,00		4.700.000,00		4.900.000,00		5.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
presentasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan, barang milik daerah, dan tata kelola pemerintahan OPD					17.304.000,00		17.823.000,00		18.375.000,00		18.908.000,00		19.475.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RETRIBUSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.465.000,00	100	3.638.250,00	100	3.820.163,00	100	4.011.171,00	100	4.211.729,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					85.485.847.722,00		93.617.089.888,31		96.234.329.801,70		98.926.487.994,68		101.533.642.603,89	
Angka Kematian Ibu					530.930.000,00		557.476.500,00		584.575.000,00		613.803.750,00		643.650.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	86.7	88	89	96.748.000,00	91	99.650.000,00	93	102.550.000,00	95	105.624.000,00	97	108.754.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
ANGKA KEMATIAN IBU	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	86.7	88	89	83.291.520,00	91	86.623.181,00	93	90.088.108,00	95	93.691.632,00	97	97.439.298,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	86.7	88	99	66.900.000,00	91	70.295.000,00	93	74.000.000,00	95	77.900.000,00	97	82.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	86.7	88	89	63.450.000,00	91	65.270.000,00	93	67.190.000,00	95	69.210.000,00	97	71.330.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					88.538.800,00		91.194.964,00		93.930.813,00		96.748.737,00		99.651.199,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					41.800.000,00		43.890.000,00		46.084.500,00		48.388.725,00		50.808.160,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					24.790.500,00		26.030.025,00		27.331.526,00		28.698.103,00		30.133.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Angka Kematian Ibu (AKI)					34.800.000,00		36.184.000,00		37.623.120,00		39.119.557,00		40.675.597,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	189	122	109	51.240.000,00	97	53.802.000,00	86	56.492.100,00	77	59.316.705,00	75	62.282.540,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					92.611.200,00		97.241.760,00		102.103.848,00		107.209.040,00		112.569.492,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					14.768.000,00		15.358.720,00		15.973.069,00		16.611.992,00		17.276.471,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					72.600.000,00		76.230.000,00		80.041.000,00		84.043.000,00		88.245.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					115.374.000,00		121.142.700,00		127.199.835,00		133.559.826,00		140.237.818,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					40.260.000,00		41.870.400,00		43.545.216,00		45.287.024,00		47.098.505,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					61.460.000,00		63.220.000,00		64.980.000,00		66.840.000,00		68.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					110.930.560,00		115.367.782,00		119.982.493,00		124.781.793,00		129.773.065,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					60.092.800,00		63.097.440,00		66.252.312,00		69.564.928,00		73.043.174,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)					74.970.000,00		78.718.500,00		82.654.425,00		86.787.147,00		91.126.504,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)					78.600.000,00		82.530.000,00		86.656.500,00		90.989.325,00		95.538.791,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat Memperoleh Layanan Kesehatan Yang Mudah Diakses, Terjangkau dan Bermutu	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	92.00	100	100	21.107.275.083,00	100	27.397.512.677,31	100	28.315.329.352,00	100	29.094.000.909,18	100	29.694.085.934,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan					29.389.555.800,00		29.585.438.810,00		29.791.115.971,00		30.007.076.990,00		30.233.836.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	95	96	98	833.200.000,00	98.2	874.860.000,00	98.4	918.603.000,00	98.5	964.533.150,00	98.6	1.012.759.808,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100	100	100	11.231.000.000,00	100	11.931.150.000,00	100	12.381.412.500,00	100	13.000.301.875,00	100	13.650.316.969,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15	20	35	759.180.000,00	46	797.364.000,00	60	837.267.200,00	70	879.040.560,00	80	923.037.588,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	71.67	71.67	72.61		73.15		73.71		74.26		74.81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.50	96	98		98.2		98.4		98.5		98.6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.50	98	98	377.670.000,00	98.2	388.880.000,00	98.4	400.470.000,00	98.5	412.360.000,00	98.6	424.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15	20	35		45		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					586.416.024,00		549.011.448,00		565.481.787,00		582.446.244,00		599.919.630,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					503.184.000,00		525.743.000,00		552.030.360,00		579.631.878,00		608.613.470,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.50	98	98	638.565.638,00	98.2	664.108.263,00	98.4	690.672.594,00	98.5	718.299.498,00	98.6	747.031.478,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15	20	35		45		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.5	96	98	779.407.440,00	98.2	818.377.812,00	98.4	859.296.703,00	98.5	902.261.538,00	98.6	947.374.615,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	95	96	98	393.714.600,00	98.2	409.463.184,00	98.4	425.841.711,00	98.5	442.875.379,00	98.6	460.590.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	65	67	69	559.362.600,00	71	587.330.730,00	73	616.697.267,00	75	647.532.130,00	77	679.908.736,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15	20	35		45		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					330.401.284,00		346.921.348,00		364.267.415,00		382.480.786,00		401.604.826,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					428.054.837,00		445.177.031,00		462.984.111,00		481.503.475,00		500.763.616,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.5	98	98	648.160.000,00	98.2	680.568.000,00	98.4	714.580.900,00	98.5	738.700.000,00	98.6	775.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.5	96	98	788.661.000,00	98.2	828.094.050,00	98.4	869.498.752,00	98.5	912.973.690,00	98.6	958.622.374,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98.50	98	98	545.150.000,00	98.2	561.489.000,00	98.4	578.429.000,00	98.5	595.679.000,00	98.6	613.468.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15	20	35		45		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					533.972.000,00		552.246.880,00		571.076.755,00		590.575.823,00		610.858.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					695.011.200,00		722.811.648,00		751.724.114,00		781.793.078,00		813.064.802,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					466.899.280,00		490.244.244,00		514.756.456,00		540.494.279,00		567.518.993,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu					1.627.179.960,00		1.708.538.958,00		1.793.965.906,00		1.883.664.202,00		1.977.847.412,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu					650.610.000,00		669.859.300,00		689.608.079,00		709.516.821,00		729.946.326,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu					696.930.000,00		731.776.500,00		768.365.325,00		806.783.591,00		847.122.771,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	100	100	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					829.390.000,00		870.859.500,00		914.402.475,00		958.660.000,00		1.006.593.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					191.100.000,00		200.800.000,00		211.000.000,00		221.700.000,00		233.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	0.013	0.012	0.010	149.154.000,00	0.009	153.530.000,00	0.008	157.970.000,00	0.0075	162.585.000,00	0.0067	167.370.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	0.0025	0.0027	0.003		0.0033		0.0036		0.004		0.0044		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					189.423.180,00		195.105.875,00		200.959.051,00		206.987.822,00		213.035.423,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					151.940.000,00		159.537.000,00		167.513.850,00		175.889.542,00		184.684.018,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	0.27	0.23	0.19	180.438.960,00	0.17	187.656.518,00	0.15	195.162.779,00	0.13	202.969.290,00	0.9	211.088.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	0.25	0.27	0.30		0.33		0.37		0.40		0.45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					159.367.320,00		167.335.686,00		175.702.470,00		184.487.594,00		193.711.974,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					148.320.000,00		154.252.800,00		160.422.912,00		166.839.828,00		173.513.421,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	140.524.099,00	100	147.550.304,00	100	154.927.819,00	100	162.674.210,00	100	170.807.920,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					117.200.000,00		123.060.000,00		129.213.000,00		135.673.650,00		142.457.322,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					137.608.640,00		143.112.986,00		148.837.505,00		154.791.005,00		160.982.645,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					163.600.000,00		171.780.000,00		180.369.000,00		189.386.836,00		198.854.991,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					195.673.000,00		205.456.650,00		215.729.482,00		226.515.956,00		237.841.754,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	0.0028	0.0028	0.0025	170.222.000,00	0.0023	175.281.000,00	0.002	180.525.000,00	0.0018	185.900.000,00	0.0015	191.319.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	0.0033	0.0037	0.0040		0.0045		0.0049		0.005		0.006		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					135.650.000,00		141.076.000,00		146.719.040,00		152.587.800,00		158.691.310,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					197.032.368,00		204.913.663,00		213.110.209,00		221.634.618,00		230.500.002,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					151.101.000,00		158.656.050,00		166.588.853,00		174.918.295,00		183.664.210,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					357.360.439,00		375.228.461,00		393.989.885,00		413.689.378,00		434.373.847,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit					258.663.000,00		271.596.150,00		285.175.958,00		299.434.755,00		314.404.493,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit					124.500.000,00		128.000.000,00		131.400.000,00		135.100.000,00		138.520.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					203.365.050,00		213.533.303,00		224.209.968,00		235.420.466,00		247.191.489,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Pravalensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					194.700.000,00		200.400.000,00		206.000.000,00		211.700.000,00		217.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Balita Stunting					223.600.000,00		234.780.000,00		246.519.000,00		258.844.950,00		271.787.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					533.233.000,00		559.894.650,00		587.000.000,00		616.350.000,00		638.425.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	21.5	17.5	16.3	209.000.000,00	15.2	219.500.000,00	14.2	230.500.000,00	14	242.100.000,00	13	254.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	21.5	18.8	17.5	143.500.000,00	16.3	147.800.000,00	15.2	152.200.000,00	14.2	156.700.000,00	12.2	161.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					173.905.200,00		179.122.356,00		184.496.026,70		190.030.907,50		195.731.834,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					174.200.000,00		179.426.000,00		184.808.780,00		190.353.043,00		196.063.634,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	21.5	18.8	17.5	194.230.400,00	16.3	201.999.616,00	15.2	210.079.601,00	14.2	218.482.785,00	12.2	227.222.096,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					142.260.000,00		147.950.400,00		153.868.416,00		160.023.152,00		166.424.078,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	21.5	18.8	17.5	173.863.200,00	16.3	182.556.360,00	15.2	191.684.178,00	14.2	201.268.387,00	14	211.331.806,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					85.276.000,00		87.834.280,00		90.469.308,00		93.183.388,00		95.978.890,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					132.055.040,00		137.337.242,00		142.830.731,00		148.543.961,00		154.485.719,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					398.486.000,00		410.440.000,00		422.753.000,00		435.436.000,00		448.499.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					309.195.000,00		318.470.850,00		328.024.975,00		337.865.724,00		348.001.696,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	21.5	18.8	17.5	181.200.000,00	16.3	186.636.000,00	15.2	192.235.000,00	14.2	198.000.000,00	12.2	203.940.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					163.440.000,00		169.977.600,00		176.776.704,00		183.847.772,00		191.201.682,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					227.739.200,00		236.848.768,00		246.322.719,00		256.175.627,00		266.422.653,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					147.068.000,00		151.480.040,00		156.024.441,00		160.705.174,00		165.526.330,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)					353.547.500,00		364.153.925,00		375.078.543,00		386.330.899,00		397.920.826,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.590.965.000,00		4.824.219.000,00		5.016.635.700,00		5.268.673.235,00		5.480.812.647,00	
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					6.280.000,00		6.594.000,00		6.923.700,00		7.269.885,00		7.633.379,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan					4.084.685.000,00		4.267.625.000,00		4.459.712.000,00		4.661.403.350,00		4.873.179.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	BB	BB	500.000.000,00	BB	550.000.000,00	A	550.000.000,00	A	600.000.000,00	A	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					539.784.000,00		566.773.200,00		595.111.860,00		624.867.453,00		656.110.826,00	
Persentase cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman					539.784.000,00		566.773.200,00		595.111.860,00		624.867.453,00		656.110.826,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					318.000.880,00		333.224.807,00		349.158.685,00		449.955.614,00		470.717.428,00	
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					11.649.200,00		12.115.168,00		12.599.774,00		13.103.765,00		13.627.916,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					12.043.200,00		12.645.360,00		13.277.628,00		13.941.509,00		14.638.585,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					173.000.000,00		181.650.000,00		190.732.500,00		200.269.125,00		210.282.581,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1	1	1	9.700.000,00	1	10.200.000,00	1	10.700.000,00	1	11.300.000,00	1	11.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					17.100.000,00		17.955.000,00		18.852.750,00		19.795.388,00		20.785.157,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	7.200.000,00	100	7.400.000,00	100	7.600.000,00	100	7.800.000,00	100	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					7.395.400,00		7.765.170,00		8.153.428,00		8.561.099,00		8.989.154,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					3.600.000,00		3.780.000,00		3.969.000,00		4.167.450,00		4.375.823,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					5.425.888,00		5.642.924,00		5.868.640,00		6.103.386,00		6.347.522,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					8.820.000,00		9.261.000,00		9.724.050,00		10.210.253,00		10.720.765,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					8.300.000,00		8.632.000,00		8.977.280,00		93.363.712,00		97.098.260,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	7.455.000,00	100	7.827.750,00	100	8.219.138,00	100	8.630.094,00	100	9.061.599,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					4.609.280,00		4.793.651,00		4.985.397,00		5.184.813,00		5.392.206,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					4.800.000,00		5.040.000,00		5.292.000,00		5.556.000,00		5.834.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					9.240.000,00		9.702.000,00		10.187.100,00		10.696.455,00		11.231.277,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	3.600.000,00	100	3.700.000,00	100	3.811.000,00	100	3.925.000,00	100	4.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					6.877.312,00		7.152.404,00		7.438.501,00		7.736.041,00		8.045.482,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					5.731.600,00		6.018.180,00		6.319.089,00		6.635.043,00		6.966.796,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan					6.804.000,00		7.144.200,00		7.501.410,00		7.876.481,00		8.270.305,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan					4.650.000,00		4.800.000,00		4.950.000,00		5.100.000,00		5.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					121.952.479.786,00		131.746.171.742,87		136.159.668.496,25		139.904.059.379,90		141.751.421.012,85	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.447.114.786,00		12.366.402.743,00		12.780.677.496,00		13.132.144.380,00		13.305.549.013,00	
Meningkatnya capaian pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	A	A	A	11.447.114.786,00	A	12.366.402.743,00	A	12.780.677.496,00	A	13.132.144.380,00	A	13.305.549.013,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.941.623.000,00		5.338.473.000,00		5.517.311.000,00		5.669.037.000,00		5.743.894.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Pengendali Banjir	Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang mendapat penanganan (%)	0.971	2.71	3.64	4.941.623.000,00	4.05	5.338.473.000,00	4.16	5.517.311.000,00	4.25	5.669.037.000,00	4.32	5.743.894.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase desa yg mendapat penanganan infrastruktur pengendali banjir (%)	0	0	0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					11.500.000.000,00		9.635.827.787,87		8.624.342.038,25		6.235.827.787,90		11.135.827.787,85	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan (%)	89.04	90.02	90.08	11.500.000.000,00	90.30	9.635.827.787,87	90.53	8.624.342.038,25	90.79	6.235.827.787,90	91.08	11.135.827.787,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	0	0	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	62.07	62.16	62.20		62.23		62.26		62.29		62.32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.770.000.000,00		3.970.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		2.016.913.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem drainase	Persentase desa dengan sistem drainase baik (%)	78.32	78.32	79.02	3.770.000.000,00	79.72	3.970.000.000,00	80.42	1.650.000.000,00	81.12	1.650.000.000,00	81.82	2.016.913.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					22.654.461.000,00		25.324.096.212,00		30.009.984.962,00		33.547.568.212,00		28.847.568.212,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	76	77.2	77.5	22.654.461.000,00	78.3	25.324.096.212,00	80.2	30.009.984.962,00	81.3	33.547.568.212,00	83.2	28.847.568.212,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					63.630.868.000,00		70.901.515.000,00		73.276.716.000,00		75.291.826.000,00		76.286.016.000,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	51.54	56.5	60.1	63.630.868.000,00	64.3	70.901.515.000,00	69.1	73.276.716.000,00	73.8	75.291.826.000,00	78.4	76.286.016.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.398.833.000,00		1.511.170.000,00		1.561.794.000,00		1.604.744.000,00		1.625.933.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	273	273	333	1.398.833.000,00	393	1.511.170.000,00	453	1.561.794.000,00	513	1.604.744.000,00	573	1.625.933.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.109.580.000,00		1.198.687.000,00		1.238.843.000,00		1.272.912.000,00		1.289.720.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	100	100	100	1.109.580.000,00	100	1.198.687.000,00	100	1.238.843.000,00	100	1.272.912.000,00	100	1.289.720.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.472.500.000,00		15.853.500.000,00		37.304.999.999,00		19.929.500.000,00		20.660.000.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.117.500.000,00		7.098.500.000,00		8.009.999.999,00		8.929.500.000,00		9.885.000.000,00	
Optimalnya Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	6.117.500.000,00	100	7.098.500.000,00	100	8.009.999.999,00	100	8.929.500.000,00	100	9.885.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					-		150.000.000,00		20.060.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0	-	25	150.000.000,00	25	20.060.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.580.000.000,00		3.205.000.000,00		3.460.000.000,00		4.700.000.000,00		4.100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	0	20	2.580.000.000,00	20	3.205.000.000,00	20	3.460.000.000,00	20	4.700.000.000,00	20	4.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.500.000.000,00		1.900.000.000,00		2.300.000.000,00		2.800.000.000,00		3.100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	0	20	1.500.000.000,00	20	1.900.000.000,00	20	2.300.000.000,00	20	2.800.000.000,00	20	3.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					275.000.000,00		3.500.000.000,00		3.475.000.000,00		3.400.000.000,00		3.475.000.000,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	0	0	20	275.000.000,00	20	3.500.000.000,00	20	3.475.000.000,00	20	3.400.000.000,00	20	3.475.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					20.423.001.146,00		20.641.771.289,36		21.333.270.627,18		21.919.935.569,64		22.522.733.799,97	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.788.501.146,00		18.191.771.289,36		18.271.001.088,18		18.747.683.599,64		18.892.493.966,97	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kinerja bidang Perencanaan,Keuangan,Kepegawaian dan Umum OPD	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	6.695.932.508,00	B	6.624.191.457,36	B	6.788.993.871,18	BB	6.957.318.702,64	BB	7.173.564.967,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah					3.928.702.753,00		4.284.898.319,00		3.896.697.753,00		4.016.802.753,00		4.175.402.753,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terlaksana Pelayanan Penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	7.163.865.885,00	100	7.282.681.513,00	100	7.585.309.464,00	100	7.773.562.144,00	100	7.543.526.246,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					935.000.000,00		903.000.000,00		874.592.379,00		918.987.000,00		1.388.068.000,00	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	935.000.000,00	100	903.000.000,00	100	874.592.379,00	100	918.987.000,00	100	1.388.068.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					899.500.000,00		595.000.000,00		1.146.677.160,00		1.165.264.970,00		1.149.171.833,00	
PERSENTASE PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA					899.500.000,00		595.000.000,00		1.146.677.160,00		1.165.264.970,00		1.149.171.833,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					800.000.000,00		952.000.000,00		1.041.000.000,00		1.088.000.000,00		1.093.000.000,00	
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran,Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran					800.000.000,00		952.000.000,00		1.041.000.000,00		1.088.000.000,00		1.093.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.642.018.569,00		5.702.427.661,00		5.893.458.988,00		6.055.529.111,00		6.222.056.161,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.639.101.569,00		4.694.636.861,00		4.840.636.854,00		4.952.706.977,00		5.019.234.027,00	
Persentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	4.639.101.569,00	100	4.694.636.861,00	100	4.840.636.854,00	100	4.952.706.977,00	100	5.019.234.027,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Perencanaan ()	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	100:100	100:100	100:100		100:100		100:100		100:100		100:100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00	
Persentase partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi (Lembaga)	31	31	32	108.000.000,00	33	108.000.000,00	34	108.000.000,00	35	108.000.000,00	36	108.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					201.895.000,00		201.895.000,00		242.926.326,00		242.926.326,00		242.926.326,00	
Persentase kelompok rentan yang Mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	35	38	40	201.895.000,00	50	201.895.000,00	50	242.926.326,00	50	242.926.326,00	50	242.926.326,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					201.500.000,00		204.500.000,00		208.500.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00	
Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	Persentase Fasilitasi ()	38	38	40	201.500.000,00	42	204.500.000,00	42	208.500.000,00	45	258.500.000,00	45	258.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	31.70	38	40		40		42		42		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					491.522.000,00		493.395.800,00		493.395.808,00		493.395.808,00		593.395.808,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase layanan dan pembagian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. (Persentase)	76.60	77	79	491.522.000,00	80	493.395.800,00	80	493.395.808,00	80	493.395.808,00	82	593.395.808,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	21	25	26		27		30		33		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.867.550.719,00		3.909.388.865,00		4.041.693.392,00		4.146.939.960,00		4.262.273.309,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.398.550.719,00		3.440.388.865,00		3.572.693.392,00		3.652.939.960,00		3.768.273.309,00	
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.398.550.719,00		3.440.388.865,00		3.572.693.392,00		3.652.939.960,00		3.768.273.309,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	69.50	70	70.50	350.000.000,00	71	350.000.000,00	71.50	350.000.000,00	72	350.000.000,00	72.50	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00	
TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	45000000	45000000	45000000	45.000.000,00	45000000	45.000.000,00	54000000	45.000.000,00	54000000	54.000.000,00	54000000	54.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					74.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	20	22	24	74.000.000,00	26	74.000.000,00	28	74.000.000,00	30	90.000.000,00	32	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.899.027.415,00		9.986.847.536,53		10.312.429.429,01		10.520.526.238,30		10.765.315.709,86	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.474.027.415,00		7.481.847.536,53		7.652.429.429,01		7.765.526.238,30		7.775.315.709,86	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)	100	100	100	7.474.027.415,00	100	7.481.847.536,53	100	7.652.429.429,01	100	7.765.526.238,30	100	7.775.315.709,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					310.000.000,00		330.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	20	22	24	310.000.000,00	26	330.000.000,00	28	360.000.000,00	30	380.000.000,00	32	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	30	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					295.000.000,00		295.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	295.000.000,00	100	295.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.585.000.000,00		1.635.000.000,00		1.650.000.000,00		1.655.000.000,00		1.700.000.000,00	
meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	1	1.585.000.000,00	1	1.635.000.000,00	1	1.650.000.000,00	1	1.655.000.000,00	1	1.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	
meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	100.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	58	59	60	80.000.000,00	61	80.000.000,00	62	90.000.000,00	63	100.000.000,00	64	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					115.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatkan Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	63	64	65	115.000.000,00	66	115.000.000,00	67	150.000.000,00	68	170.000.000,00	69	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					6.243.336.602,00		6.453.884.718,00		6.631.500.938,00		7.311.500.938,00		7.003.500.938,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.506.336.602,00		5.512.884.718,00		5.671.500.938,00		5.851.500.938,00		5.503.500.938,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola opd	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)	85	85	100	5.506.336.602,00	100	5.512.884.718,00	100	5.671.500.938,00	100	5.851.500.938,00	100	5.503.500.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					10.000.000,00		10.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	11500	11500	11500	10.000.000,00	12000	10.000.000,00	13000	80.000.000,00	14000	80.000.000,00	15000	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					597.000.000,00		341.000.000,00		450.000.000,00		350.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	98	98	94.8	597.000.000,00	96	341.000.000,00	97.4	450.000.000,00	98.7	350.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					-		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	10	10	8	-	6	150.000.000,00	4	100.000.000,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					130.000.000,00		440.000.000,00		330.000.000,00		930.000.000,00		630.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	130.000.000,00	100	440.000.000,00	100	330.000.000,00	100	930.000.000,00	100	630.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					245.000.000,00		275.000.000,00		310.000.000,00		345.000.000,00		380.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Tanah	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	0	20	55.000.000,00	20	65.000.000,00	20	75.000.000,00	20	85.000.000,00	20	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					190.000.000,00		210.000.000,00		235.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	0	20	190.000.000,00	20	210.000.000,00	20	235.000.000,00	20	260.000.000,00	20	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.458.501.030,00		9.862.569.937,00		9.738.991.030,00		10.152.660.738,00		11.300.934.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.146.001.030,00		5.507.934.937,00		5.725.891.030,00		6.155.960.738,00		6.300.000.000,00	
Nilai Evaluasi SAKIP DLH					5.146.001.030,00		5.507.934.937,00		5.725.891.030,00		6.155.960.738,00		6.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000,00		460.100.000,00		581.100.000,00		590.100.000,00		600.000.000,00	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun					200.000.000,00		460.100.000,00		581.100.000,00		590.100.000,00		600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.270.000.000,00		680.000.000,00		190.000.000,00		443.000.000,00		550.934.000,00	
Jumlah Pencegahan,Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					1.270.000.000,00		680.000.000,00		190.000.000,00		443.000.000,00		550.934.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					560.000.000,00		295.500.000,00		582.000.000,00		378.000.000,00		400.000.000,00	
Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					560.000.000,00		295.500.000,00		582.000.000,00		378.000.000,00		400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					130.000.000,00		275.500.000,00		285.000.000,00		49.000.000,00		300.000.000,00	
Persentase Limbah B3 yang di tangani					130.000.000,00		275.500.000,00		285.000.000,00		49.000.000,00		300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					350.000.000,00		385.000.000,00		422.000.000,00		358.000.000,00		360.000.000,00	
Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten					350.000.000,00		385.000.000,00		422.000.000,00		358.000.000,00		360.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					150.000.000,00		185.500.000,00		197.000.000,00		59.000.000,00		200.000.000,00	
Laporan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Serta Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					150.000.000,00		185.500.000,00		197.000.000,00		59.000.000,00		200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					185.000.000,00		255.035.000,00		266.000.000,00		240.000.000,00		300.000.000,00	
Jumlah Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan					185.000.000,00		255.035.000,00		266.000.000,00		240.000.000,00		300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					120.000.000,00		130.000.000,00		175.000.000,00		17.600.000,00		200.000.000,00	
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup					120.000.000,00		130.000.000,00		175.000.000,00		17.600.000,00		200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					65.000.000,00		48.000.000,00		87.000.000,00		83.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani					65.000.000,00		48.000.000,00		87.000.000,00		83.000.000,00		90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.282.500.000,00		1.640.000.000,00		1.228.000.000,00		1.779.000.000,00		2.000.000.000,00	
Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah					1.282.500.000,00		1.640.000.000,00		1.228.000.000,00		1.779.000.000,00		2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.578.635.932,00		4.668.087.667,00		4.826.468.604,00		4.967.141.490,00		5.111.962.881,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.383.635.932,00		4.448.087.667,00		4.574.468.604,00		4.688.141.490,00		4.799.462.881,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Hal Perencanaan dan Administrasi Umum					4.383.635.932,00		4.448.087.667,00		4.574.468.604,00		4.688.141.490,00		4.799.462.881,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					35.000.000,00		41.000.000,00		51.000.000,00		61.000.000,00		71.500.000,00	
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien					35.000.000,00		41.000.000,00		51.000.000,00		61.000.000,00		71.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					35.000.000,00		41.000.000,00		51.000.000,00		57.000.000,00		67.000.000,00	
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien					35.000.000,00		41.000.000,00		51.000.000,00		57.000.000,00		67.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					123.000.000,00		135.000.000,00		146.000.000,00		156.000.000,00		168.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan dan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil					123.000.000,00		135.000.000,00		146.000.000,00		156.000.000,00		168.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas profil Kependudukan					2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.082.436.266,00		8.168.974.911,00		8.442.635.571,00		8.674.808.049,00		8.913.365.270,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.104.111.415,00		4.279.011.060,00		4.388.927.835,00		4.302.949.539,00		4.247.330.909,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.104.111.415,00		4.279.011.060,00		4.388.927.835,00		4.302.949.539,00		4.247.330.909,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					133.100.000,00		266.200.000,00		266.200.000,00		213.100.000,00		133.100.000,00	
Penyelenggaraan Penataan Desa					133.100.000,00		266.200.000,00		266.200.000,00		213.100.000,00		133.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					287.375.000,00		287.375.000,00		316.112.500,00		347.723.750,00		382.496.125,00	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa					287.375.000,00		287.375.000,00		316.112.500,00		347.723.750,00		382.496.125,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.004.274.851,00		2.659.274.851,00		2.912.702.336,00		3.196.972.570,00		3.446.569.827,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					3.004.274.851,00		2.659.274.851,00		2.912.702.336,00		3.196.972.570,00		3.446.569.827,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					553.575.000,00		677.114.000,00		558.692.900,00		614.062.190,00		703.868.409,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					553.575.000,00		677.114.000,00		558.692.900,00		614.062.190,00		703.868.409,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.105.000.000,00		1.135.000.000,00		1.182.000.000,00		1.290.000.000,00		1.370.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					540.000.000,00		540.000.000,00		560.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2.35	2.34	2.33	540.000.000,00	2.32	540.000.000,00	2.31	560.000.000,00	2.3	600.000.000,00	2.29	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	31	32-32	33.5-33.5		33.3-33.3		33-33		32.8-32.8		32.5-32.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					540.000.000,00		570.000.000,00		590.000.000,00		650.000.000,00		670.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	34	34.1	34.3	540.000.000,00	35.1	570.000.000,00	36	590.000.000,00	38	650.000.000,00	40	670.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	4.2	4.1	4.0		3.5		3.2		3.0		2.5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					25.000.000,00		25.000.000,00		32.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	32.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.530.313.847,00		5.589.526.917,00		5.776.776.069,00		5.935.637.410,00		6.098.867.439,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00		4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.530.313.847,00		1.589.526.917,00		1.576.776.069,00		1.735.637.410,00		2.098.867.439,00	
Meningkatnya kualitas Layanan Transportasi Darat					1.530.313.847,00		1.589.526.917,00		1.576.776.069,00		1.735.637.410,00		2.098.867.439,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.059.600.413,00		8.186.068.899,00		8.314.372.297,00		8.444.533.396,00		8.613.424.065,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.422.145.114,00		5.547.949.770,00		5.641.199.777,00		5.754.023.772,00		5.869.104.248,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam Hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi Umum	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)	69	75	75	5.422.145.114,00	75	5.547.949.770,00	75	5.641.199.777,00	75	5.754.023.772,00	75	5.869.104.248,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					724.257.651,00		716.172.518,00		770.341.203,00		785.748.027,00		801.462.988,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	100	100	724.257.651,00	100	716.172.518,00	100	770.341.203,00	100	785.748.027,00	100	801.462.988,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.913.197.648,00		1.921.946.611,00		1.902.831.317,00		1.904.761.597,00		1.942.856.829,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika					1.913.197.648,00		1.921.946.611,00		1.902.831.317,00		1.904.761.597,00		1.942.856.829,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					350.000.000,00		396.000.000,00		427.000.000,00		446.000.000,00		459.000.000,00	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	15.00	16.00	17.00	15.000.000,00	18.00	16.000.000,00	19.00	17.000.000,00	20.00	18.000.000,00	21.00	19.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	80	81	82	50.000.000,00	83	60.000.000,00	84	65.000.000,00	85	68.000.000,00	86	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	4.50	5.00	5.50	50.000.000,00	5.75	60.000.000,00	5.85	65.000.000,00	6.00	68.000.000,00	6.25	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	100	100	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	78.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	80	81	82	50.000.000,00	83	60.000.000,00	84	65.000.000,00	85	68.000.000,00	86	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		73.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.00	2.30	2.34	60.000.000,00	2.40	65.000.000,00	2.45	70.000.000,00	2.50	73.000.000,00	2.58	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.00	2.30	2.34		2.40		2.45		2.50		2.58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		73.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	30	32	34	60.000.000,00	36	65.000.000,00	38	70.000.000,00	40	73.000.000,00	41	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.648.691.492,00		4.713.501.402,00		5.041.852.699,00		5.205.803.648,00		5.131.389.383,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.348.691.492,00		4.341.501.402,00		4.426.852.699,00		4.512.803.648,00		4.636.389.383,00	
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah					4.348.691.492,00		4.341.501.402,00		4.426.852.699,00		4.512.803.648,00		4.636.389.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					75.000.000,00		113.000.000,00		330.000.000,00		365.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi					75.000.000,00		113.000.000,00		330.000.000,00		365.000.000,00		125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					40.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal					40.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					80.000.000,00		92.000.000,00		100.000.000,00		112.000.000,00		120.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko					80.000.000,00		92.000.000,00		100.000.000,00		112.000.000,00		120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					80.000.000,00		91.000.000,00		100.000.000,00		116.000.000,00		130.000.000,00	
Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal					80.000.000,00		91.000.000,00		100.000.000,00		116.000.000,00		130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal					25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.598.611.945,00		8.690.677.283,10		8.981.814.972,08		9.228.814.883,81		9.482.607.293,12	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.741.811.945,00		4.786.646.552,00		4.914.616.552,00		5.031.116.552,00		5.131.407.293,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dalam hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan administrasi umum					4.741.811.945,00		4.786.646.552,00		4.914.616.552,00		5.031.116.552,00		5.131.407.293,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					973.800.000,00		993.830.731,00		1.030.898.420,00		1.069.798.331,00		1.110.200.000,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan					973.800.000,00		993.830.731,00		1.030.898.420,00		1.069.798.331,00		1.110.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.773.000.000,00		2.797.200.000,00		2.906.300.000,00		2.987.900.000,00		3.091.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga					2.773.000.000,00		2.797.200.000,00		2.906.300.000,00		2.987.900.000,00		3.091.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					110.000.000,00		113.000.000,10		130.000.000,08		140.000.000,81		150.000.000,12	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan					110.000.000,00		113.000.000,10		130.000.000,08		140.000.000,81		150.000.000,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					391.490.622,00		442.724.829,00		486.997.312,00		532.863.605,00		543.520.877,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					391.490.622,00		442.724.829,00		486.997.312,00		532.863.605,00		543.520.877,00	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.76	2.76	2.80	391.490.622,00	2.85	442.724.829,00	2.90	486.997.312,00	2.95	532.863.605,00	3.00	543.520.877,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					59.574.660,00		52.085.274,00		53.126.980,00		54.189.519,00		55.273.310,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					59.574.660,00		52.085.274,00		53.126.980,00		54.189.519,00		55.273.310,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	1.36	1.36	1.37	59.574.660,00	1.38	52.085.274,00	1.40	53.126.980,00	1.50	54.189.519,00	1.60	55.273.310,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.224.000.000,00		3.396.000.000,00		3.407.000.000,00		3.413.000.000,00		3.413.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					572.000.000,00		1.092.000.000,00		1.092.000.000,00		1.092.000.000,00		1.092.000.000,00	
Terciptanya masyarakat yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal					572.000.000,00		1.092.000.000,00		1.092.000.000,00		1.092.000.000,00		1.092.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL					460.500.000,00		461.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00	
Persentase Festival yang diikuti					460.500.000,00		461.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					526.500.000,00		526.500.000,00		526.500.000,00		526.500.000,00		526.500.000,00	
Persentase Sejarah Lokal yang di kembangkan					526.500.000,00		526.500.000,00		526.500.000,00		526.500.000,00		526.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					560.000.000,00		1.211.000.000,00		1.221.000.000,00		1.227.000.000,00		1.227.000.000,00	
Persentase benda ,bangunan,struktur,situs dan kawasan cagar budaya yang telah diregistrasi					560.000.000,00		1.211.000.000,00		1.221.000.000,00		1.227.000.000,00		1.227.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
Persentase Pengelolaan Permusiuman					105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.181.921.389,00		8.148.498.341,00		8.426.944.825,00		8.633.571.158,00		8.860.787.215,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.091.921.389,00		7.354.471.341,00		7.585.234.825,00		7.791.861.158,00		8.010.861.165,00	
Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi					7.091.921.389,00		7.354.471.341,00		7.585.234.825,00		7.791.861.158,00		8.010.861.165,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.090.000.000,00		794.027.000,00		841.710.000,00		841.710.000,00		849.926.050,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	60.79	60.79	61.68	1.090.000.000,00	62.27	794.027.000,00	63.13	841.710.000,00	65.35	841.710.000,00	66.78	849.926.050,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					160.000.000,00		177.470.000,00		295.740.000,00		319.740.000,00		343.740.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					160.000.000,00		177.470.000,00		295.740.000,00		309.740.000,00		323.740.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis					160.000.000,00		177.470.000,00		295.740.000,00		309.740.000,00		323.740.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		10.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK					-		-		-		10.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.300.000.000,00		1.145.000.000,00		1.005.000.000,00		1.083.000.000,00		1.135.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					620.000.000,00		740.000.000,00		650.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1357.32	1467	1501	620.000.000,00	1546	740.000.000,00	1592	650.000.000,00	1640	280.000.000,00	1689	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					500.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	662	782	700	500.000.000,00	703	150.000.000,00	706	150.000.000,00	708	550.000.000,00	712	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					180.000.000,00		255.000.000,00		205.000.000,00		253.000.000,00		305.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	25	25.14	25.66	180.000.000,00	26.16	255.000.000,00	26.68	205.000.000,00	27.18	253.000.000,00	27.71	305.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.119.911.123,00		5.174.730.011,00		5.348.083.467,00		5.495.155.762,00		5.646.272.546,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.569.911.123,00		4.624.730.011,00		4.798.083.467,00		4.945.155.762,00		5.096.272.546,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)	8	8	8	4.569.911.123,00	9	4.624.730.011,00	9	4.798.083.467,00	9	4.945.155.762,00	9	5.096.272.546,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					16.079.246.036,00		16.301.031.808,00		16.556.031.808,00		16.845.148.768,00		17.169.168.168,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.828.946.036,00		12.251.731.808,00		12.546.731.808,00		12.895.848.768,00		13.565.868.168,00	
Persentase Capaian Urusan Perencanaan , Keuangan Kepegawaian, Administrasi Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	11.828.946.036,00	100	12.251.731.808,00	100	12.546.731.808,00	100	12.895.848.768,00	100	13.565.868.168,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					565.000.000,00		605.000.000,00		635.000.000,00		605.000.000,00		605.000.000,00	
Meningkatnya Distribusi Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	13142	13799	14456	565.000.000,00	15133	605.000.000,00	15771	635.000.000,00	16428	605.000.000,00	17249.72	605.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3641	3826	4020		4218		4406		4600		4606		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3431	4212	4460		5798		7537		9798		15000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.805.300.000,00		2.555.300.000,00		2.485.300.000,00		2.394.300.000,00		2.054.300.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	2022	2022	2022	2.805.300.000,00	2022	2.555.300.000,00	2022	2.485.300.000,00	2022	2.394.300.000,00	2022	2.054.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					530.000.000,00		529.000.000,00		529.000.000,00		580.000.000,00		569.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	250	320	410	530.000.000,00	510	529.000.000,00	560	529.000.000,00	710	580.000.000,00	830	569.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	5	10		15		20		25		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya Pegendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	40	50	60	150.000.000,00	65	160.000.000,00	70	160.000.000,00	75	160.000.000,00	80	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	20	20	20		30		40		50		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	215.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					448.000.000,00		150.000.000,00		609.000.000,00		321.000.000,00		500.000.000,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					448.000.000,00		150.000.000,00		609.000.000,00		321.000.000,00		500.000.000,00	
Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Konservasi (Tahura)					448.000.000,00		150.000.000,00		609.000.000,00		321.000.000,00		500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.935.265.238,00		5.071.000.000,00		5.330.510.925,00		5.499.670.065,00		5.660.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.000.000,00		3.600.000.000,00		3.800.000.000,00		3.900.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Pelayanan Urusan Penunjang yang Dilaksanakan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	3.500.000.000,00	100	3.600.000.000,00	100	3.800.000.000,00	100	3.900.000.000,00	100	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	70	75	75		75		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					640.000.000,00		640.000.000,00		663.510.925,00		696.670.065,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	640.000.000,00	100	640.000.000,00	100	663.510.925,00	100	696.670.065,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					340.265.238,00		350.000.000,00		360.000.000,00		370.000.000,00		380.000.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	4	4	4	340.265.238,00	4	350.000.000,00	4	360.000.000,00	4	370.000.000,00	4	380.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	35	33	30	200.000.000,00	29	210.000.000,00	25	220.000.000,00	16	230.000.000,00	15	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					395.000.000,00		415.428.500,00		435.000.000,00		448.000.000,00		465.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					350.000.000,00		364.428.500,00		380.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	100	100	100	350.000.000,00	100	364.428.500,00	100	380.000.000,00	100	390.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					30.000.000,00		35.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	2.40	2.50	2.70	30.000.000,00	2.70	35.000.000,00	2.80	38.000.000,00	3.00	40.000.000,00	3.15	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					34.573.823.883,00		34.944.005.815,00		36.114.630.010,00		37.107.782.335,00		37.628.246.349,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.324.955.883,00		31.695.137.815,00		32.815.312.010,00		33.808.464.335,00		34.060.928.349,00	
Terlaksananya Urusan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	31.324.955.883,00	100	31.695.137.815,00	100	32.815.312.010,00	100	33.808.464.335,00	100	34.060.928.349,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.961.690.000,00		1.961.690.000,00		1.962.140.000,00		1.962.140.000,00		2.230.140.000,00	
Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD)					1.961.690.000,00		1.961.690.000,00		1.962.140.000,00		1.962.140.000,00		2.230.140.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.287.178.000,00		1.287.178.000,00		1.337.178.000,00		1.337.178.000,00		1.337.178.000,00	
Persentase kajian kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti					1.287.178.000,00		1.287.178.000,00		1.337.178.000,00		1.337.178.000,00		1.337.178.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					33.885.930.920,00		34.248.747.582,00		35.396.080.626,00		36.369.472.843,00		36.869.633.346,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.887.030.920,00		25.185.747.582,00		26.216.080.626,00		26.832.972.843,00		27.141.633.346,00	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal Perencanaan dan administrasi Umum					24.887.030.920,00		25.185.747.582,00		26.216.080.626,00		26.832.972.843,00		27.141.633.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					8.998.900.000,00		9.063.000.000,00		9.180.000.000,00		9.536.500.000,00		9.728.000.000,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan					8.998.900.000,00		9.063.000.000,00		9.180.000.000,00		9.536.500.000,00		9.728.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					11.789.839.386,00		12.093.960.370,00		12.320.684.380,00		12.665.201.489,00		12.982.706.526,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.234.065.632,00		9.372.510.370,00		9.529.234.380,00		9.374.201.489,00		9.553.256.526,00	
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	A	A	A	9.234.065.632,00	A	9.372.510.370,00	A	9.529.234.380,00	A	9.374.201.489,00	A	9.553.256.526,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.140.773.754,00		1.171.450.000,00		1.206.450.000,00		1.491.000.000,00		1.564.450.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1.140.773.754,00	100	1.171.450.000,00	100	1.206.450.000,00	100	1.491.000.000,00	100	1.564.450.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.415.000.000,00		1.550.000.000,00		1.585.000.000,00		1.800.000.000,00		1.865.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	1.415.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.585.000.000,00	100	1.800.000.000,00	100	1.865.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					183.357.948.754,00		185.321.162.311,31		191.529.421.248,74		196.796.480.333,08		185.321.162.311,31	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.554.280.388,00		14.044.478.867,31		14.993.511.168,74		16.768.892.068,74		14.044.478.867,31	
Nilai Evaluasi Sakip Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota Jumlah Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	85	89	90	13.554.280.388,00	92	14.044.478.867,31	92	14.993.511.168,74	95	16.768.892.068,74	95	14.044.478.867,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	85	89	90		92		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					165.244.552.858,00		166.641.897.438,00		169.780.046.400,00		172.293.643.337,34		166.641.897.438,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat ketepatan waktu penyampaian raperda/raperbup APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksana APBD yang disusun Persentase dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun Persentase dokumen laporan keuangan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu Persentase jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil, dana darurat dan mendesak, analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dan hasil analisis investasi pemerintah daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	165.244.552.858,00	100	166.641.897.438,00	100	169.780.046.400,00	100	172.293.643.337,34	100	166.641.897.438,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)	142	142	142		142		142		142		142		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.388.588.494,00		1.419.722.992,00		2.233.843.840,00		2.534.686.042,00		1.419.722.992,00	
Persentase pengelolaan barang milik daerah yang dikelola dengan akuntabel Persentase ketaatan rekonsiliasi dan inventarisasi barang milik daerah	Manajemen Aset (Kategori)	95	95	95	1.388.588.494,00	95	1.419.722.992,00	95	2.233.843.840,00	95	2.534.686.042,00	95	1.419.722.992,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.170.527.014,00		3.215.063.014,00		4.522.019.840,00		5.199.258.885,00		3.215.063.014,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Asli Daerah Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	100	3.170.527.014,00	100	3.215.063.014,00	100	4.522.019.840,00	100	5.199.258.885,00	100	3.215.063.014,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.457.696.144,00		7.518.365.619,61		7.735.305.867,86		8.011.776.779,23		8.244.475.640,66	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.057.696.144,00		6.021.487.619,61		6.238.427.867,86		6.514.898.779,23		6.747.597.640,66	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	5.057.696.144,00	100	6.021.487.619,61	100	6.238.427.867,86	100	6.514.898.779,23	100	6.747.597.640,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					400.000.000,00		1.496.878.000,00		1.496.878.000,00		1.496.878.000,00		1.496.878.000,00	
1) Meningkatnya kualitas Layanan Administrasi 2) Meningkatnya Pengembangan Kompetensi 3) Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir 4) Meningkatnya Kualitas Penilaian Kriteria ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	86	86.5	87	400.000.000,00	87.5	1.496.878.000,00	88	1.496.878.000,00	88.5	1.496.878.000,00	89	1.496.878.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	14.54	15.25	15.98		16.70		17.43		18.15		18.88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	89.26	89.76	90.26		90.76		91.26		91.76		92.26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	71.61	80	82		84		86		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.426.256.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.426.256.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
1) Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan 2) Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan,Perancangan Pengembangan dan 3) Meningkatnya Layanan Penjamin Mutu,Pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi 4) Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	21.41	21.29	21.41	2.426.256.000,00	21.60	450.000.000,00	21.85	500.000.000,00	22.10	450.000.000,00	22.35	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	27.11	27.10	27.11		27.30		27.60		28		28.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	1.96	3.41	4.85		6.29		7.73		9.17		10.62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	32.81	32.81	33		33.20		33.45		33.75		34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					375.000.000,00		375.000.000,00		460.000.000,00		435.000.000,00		445.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					200.000.000,00		200.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	260.000.000,00	100	260.000.000,00	100	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					175.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.766.754.605,00		8.859.235.420,00		8.833.166.641,00		9.411.082.748,00		9.535.073.998,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.472.819.042,00		7.549.147.113,00		7.769.009.004,00		7.947.371.976,00		8.128.661.989,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Hal Perencanaan dan Administrasi Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	7.472.819.042,00	100	7.549.147.113,00	100	7.769.009.004,00	100	7.947.371.976,00	100	8.128.661.989,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					578.821.038,00		585.557.459,00		620.238.507,00		656.440.853,00		558.774.728,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	80	80	81	578.821.038,00	81.5	585.557.459,00	82	620.238.507,00	82.5	656.440.853,00	84	558.774.728,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					715.114.525,00		724.530.848,00		443.919.130,00		807.269.919,00		847.637.281,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	715.114.525,00	Terdefinisi	724.530.848,00	Terdefinisi	443.919.130,00	Terdefinisi	807.269.919,00	Terdefinisi	847.637.281,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					24.731.215.751,00		25.161.830.620,04		25.790.615.817,24		26.282.119.554,03		27.085.379.342,37	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.501.165.751,00		24.606.870.620,04		25.191.765.817,24		25.682.219.554,03		26.420.079.342,37	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	1.886.185.577,00	B	2.106.068.626,97	B	2.173.182.875,98	B	2.233.770.405,07	B	2.289.024.091,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	1.893.883.389,00	B	1.917.940.389,00	B	1.912.750.389,00	B	1.906.105.279,00	B	1.962.054.424,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	2.003.493.806,00	B	2.180.862.412,00	B	2.236.077.053,00	B	2.300.540.423,00	B	2.355.235.284,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	2.605.452.955,00	B	2.622.242.955,00	B	2.643.752.955,00	B	2.662.259.958,00	B	2.739.003.357,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	2.266.837.536,00	B	2.329.410.945,00	B	2.407.384.211,00	B	2.470.884.777,00	B	2.537.227.858,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	1.785.141.601,00	B	1.763.572.872,00	B	1.812.606.663,00	B	1.775.060.346,00	B	1.903.496.006,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	2.305.424.472,00	B	2.115.889.107,00	B	2.177.010.042,00	B	2.222.021.318,00	B	2.274.926.905,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam Hal perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	3.152.021.326,00	B	2.901.202.581,00	B	3.009.293.767,00	B	3.100.997.846,00	B	3.195.223.786,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	1.665.990.659,00	B	1.726.029.084,00	B	1.786.086.808,00	B	1.836.304.820,00	B	1.884.633.203,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	1.892.696.691,00	B	1.917.556.747,00	B	1.921.151.973,00	B	1.971.799.902,00	B	2.022.409.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP (Predikat)	B	B	B	3.044.037.739,00	B	3.026.094.901,07	B	3.112.469.080,26	B	3.202.474.479,96	B	3.256.845.028,16	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					24.000.000,00		62.700.000,00		87.000.000,00		99.000.000,00		113.000.000,00	
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan yang terlaksana	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	4.000.000,00	90	5.000.000,00	90	6.000.000,00	90	7.000.000,00	90	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	5.000.000,00	90	10.200.000,00	90	11.000.000,00	90	11.000.000,00	90	12.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masvarakat	80	90	90		90	5.000.000,00	90	7.000.000,00	90	15.000.000,00	90	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terhadap pelayanan yang diberikan. (%)													
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	-	90	-	90	18.000.000,00	90	19.000.000,00	90	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	90	10.000.000,00	90	15.000.000,00	90	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	-	90	-	90	5.000.000,00	90	5.000.000,00	90	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat	80	90	90	-	90	7.000.000,00	90	7.000.000,00	90	7.000.000,00	90	7.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terhadap pelayanan yang diberikan. (%)													
Terlaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	-	90	1.500.000,00	90	1.500.000,00	90	1.500.000,00	90	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	-	90	1.500.000,00	90	1.500.000,00	90	1.500.000,00	90	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. (%)	80	90	90	-	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan peningkatan kepuasan masvarakat	80	90	90	-	90	2.500.000,00	90	5.000.000,00	90	2.000.000,00	90	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terhadap pelayanan yang diberikan. (%)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					78.150.000,00		306.200.000,00		318.400.000,00		312.000.000,00		338.400.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	12.450.000,00	90	13.000.000,00	90	11.000.000,00	90	12.000.000,00	90	13.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	100	100	100	-	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	-	90	-	90	5.000.000,00	90	3.000.000,00	90	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	9.100.000,00	90	8.500.000,00	90	10.000.000,00	90	10.000.000,00	90	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	10.000.000,00	90	10.000.000,00	90	11.000.000,00	90	12.000.000,00	90	13.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	14.400.000,00	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	90	16.000.000,00	90	17.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	-	90	4.000.000,00	90	4.500.000,00	90	5.000.000,00	90	6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	10.300.000,00	100	10.300.000,00	100	10.500.000,00	100	12.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Lembaga pada Pemberdayaan Desa	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	14.400.000,00	90	14.400.000,00	90	20.400.000,00	90	10.000.000,00	90	14.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksanannya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	7.500.000,00	90	8.000.000,00	90	8.000.000,00	90	8.500.000,00	90	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksanannya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan di Kecamatan	Persentase Partisipasi lembaga pada pelaksanaan Koordinasi pemberdayaan desa (%)	90	90	90	-	90	8.000.000,00	90	8.000.000,00	90	8.500.000,00	90	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					80.400.000,00		80.400.000,00		80.400.000,00		80.400.000,00		80.400.000,00	
Meningkatnya Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi (%)	100	100	100	80.400.000,00	100	80.400.000,00	100	80.400.000,00	100	80.400.000,00	100	80.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					34.350.000,00		34.500.000,00		36.300.000,00		40.000.000,00		44.500.000,00	
Meningkatnya Kegiatan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	5.000.000,00	90	-	90	-	90	3.000.000,00	90	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kegiatan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	-	100	-	100	1.650.000,00	100	2.000.000,00	100	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kegiatan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	3.000.000,00	90	2.000.000,00	90	1.650.000,00	90	2.000.000,00	90	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kegiatan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	10.000.000,00	90	11.000.000,00	90	11.000.000,00	90	12.000.000,00	90	13.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	1.000.000,00	90	4.500.000,00	90	5.000.000,00	90	6.000.000,00	90	7.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	90	90	10.000.000,00	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	90	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Partisipasi Pada Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	90	90	5.350.000,00	90	2.000.000,00	90	2.000.000,00	90	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					13.150.000,00		71.160.000,00		76.750.000,00		68.500.000,00		89.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	8.000.000,00	100	9.000.000,00	100	8.500.000,00	100	9.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	4.500.000,00	100	13.160.000,00	100	14.000.000,00	100	8.500.000,00	100	9.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	3.900.000,00	100	7.000.000,00	100	9.000.000,00	100	6.000.000,00	100	7.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	15.000.000,00	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	17.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00	100	8.500.000,00	100	9.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	-	100	5.000.000,00	100	3.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TerlaksananyaPembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.750.000,00	100	3.000.000,00	100	1.250.000,00	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TerlaksananyaPembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa terlaksana	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	4.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TerlaksananyaPembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa terlaksana	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	-	100	2.000.000,00	100	5.000.000,00	100	2.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.127.958.541,00		7.212.777.539,00		7.445.620.892,00		7.651.375.467,00		7.860.760.792,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.652.958.541,00		4.728.777.539,00		4.970.620.892,00		5.176.375.467,00		5.385.760.792,00	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam hal Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Bahasa)	72.36	75	78	4.652.958.541,00	80	4.728.777.539,00	82	4.970.620.892,00	85	5.176.375.467,00	85	5.385.760.792,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	85	87	87	600.000.000,00	90	600.000.000,00	90	600.000.000,00	95	600.000.000,00	100	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.050.000.000,00		1.059.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	1.050.000.000,00	100	1.059.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatkan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75	80	80	100.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	80	85	85	125.000.000,00	90	125.000.000,00	90	125.000.000,00	95	125.000.000,00	100	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	65	75	75	600.000.000,00	80	600.000.000,00	80	600.000.000,00	85	600.000.000,00	85	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					959.219.358.564,00		994.762.322.704,13		1.049.189.488.470,06		1.058.818.696.695,67		1.072.823.916.311,03	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja mencerminkan tingkat pencapaian suatu instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja diperlukan untuk memahami efektivitas kebijakan operasional yang diterapkan, baik dari segi dampak positif maupun tantangan yang muncul dalam implementasinya. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur melalui indikator kinerja, yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti *input*, proses, *output*, *outcome*, manfaat, serta dampak jangka panjang yang menggambarkan hasil pembangunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Keberhasilan ini dapat diukur melalui pencapaian indikator hasil dari program prioritas yang dilaksanakan secara kumulatif setiap tahun atau melalui capaian mandiri dalam periode tahunan. Dengan sistem ini, target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dapat dicapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Indikator kinerja daerah disusun berdasarkan outcome dari program prioritas yang telah ditetapkan atau dengan pendekatan berbasis dampak (*impact*). Penyusunan indikator ini dilakukan melalui analisis hubungan antara satu atau lebih indikator capaian program dengan indikator utama pembangunan daerah. Setelah program dan kegiatan prioritas ditentukan, indikator kinerja daerah diformulasikan sebagai alat ukur pencapaian pembangunan yang lebih terarah dan terukur.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah tahun 2018-2023 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama

kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2029, dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel IV-2. Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Skor (0-100)	73,69	73,69	74,47	75,25	76,03	76,81	77,6
2.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Tahun	0,256	0,286	0,346	0,376	0,406	0,436	0,466
3.	IMM (Indeks Modal Manusia)	Skor (0-1)	0,54	0,54	0,545	0,55	0,557	0,561	0,567
3.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Skor (0-100)	71,67	72,23	73,06	73,87	74,36	73,95	75,6
4.	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Persen (%)	3,97	4,09-4,29	4,21-4,61	4,44-4,84	4,66-5,06	4,88-5,28	5,1-5,5
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen (%)	68,89	69,5	70,4	71,1	71,9	72,7	73,5
6.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor (0-100)	61,45	62,55	63,65	64,75	65,85	66,95	68,05
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Skor (0-100)	72,2	73	74	75	76	77	78
8.	Laju Pertumbuhan PAD	Persen (%)		5,08-35	5,08-35	5,08-35	5,48-35	10,4-35	15,4-35
9.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor (0-100)	76,8	76,8	78,2	78,9	79,6	80,3	81,0
10.	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	Skor (0-100)	65,91	65,91	68,20	70,49	72,78	75,07	77,36

Selama periode RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pembangunan lintas sektor. IKU ini menegaskan orientasi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Fokus pertama tertuju pada pembangunan infrastruktur. Melalui Indeks Pembangunan Infrastruktur, pemerintah menargetkan capaian 77,6 pada tahun 2030, meningkat dari baseline 73,69 pada 2024. Peningkatan ini menjadi fondasi untuk memperluas konektivitas wilayah dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti jalan, transportasi umum, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan pembangunan fisik, perhatian besar juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin melalui target Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang naik dari 0,256 pada 2024 menjadi 0,466 pada 2030, seiring dengan penguatan layanan kesehatan, gizi, serta perilaku hidup bersih

dan sehat. Dukungan lebih lanjut ditunjukkan dengan target Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,567 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,6 pada 2030. Kedua indikator ini menandakan pentingnya investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sebagai modal utama daya saing penduduk.

Kinerja pembangunan manusia ini kemudian diproyeksikan akan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1–5,5 persen pada 2030 menggambarkan optimisme terhadap penguatan sektor-sektor unggulan, iklim investasi yang kondusif, serta pengembangan UMKM dan potensi lokal. Bersamaan dengan itu, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan tumbuh signifikan hingga 15,4–35 persen pada 2030, mencerminkan langkah nyata dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

Dari sisi ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi yang tumbuh inklusif diharapkan dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 68,89 persen pada 2024 menjadi 73,5 persen pada 2030. Perluasan kesempatan kerja ini sekaligus memperkuat basis kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, perhatian pada aspek sosial budaya diwujudkan melalui target Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 68,05 pada 2030, yang mencerminkan pentingnya pelestarian budaya, kreativitas, dan identitas daerah sebagai penopang pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga diperkuat melalui penguatan demokrasi daerah. Target Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 78 pada 2030 menegaskan komitmen untuk memperbaiki kualitas partisipasi politik, menjamin kebebasan sipil, serta memperkuat supremasi hukum.

Arah pembangunan tersebut tidak lepas dari kebutuhan akan reformasi birokrasi. Target peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 81 pada 2030, dari 76,8 pada 2024, menunjukkan upaya konsisten mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan responsif. Hal ini diperkuat dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan kapasitas aparatur.

Seluruh agenda pembangunan tersebut akan berjalan beriringan dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 65,91 pada 2024 menjadi 77,36 pada 2030

menandakan perhatian serius terhadap pengendalian pencemaran air, udara, dan degradasi lahan. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas adaptasi daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Keterpaduan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi, penguatan demokrasi, reformasi birokrasi, serta kelestarian lingkungan menjadi satu kesatuan strategi menuju Bengkulu Tengah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2030.

Dengan menetapkan indikator-indikator tersebut, Kabupaten Bengkulu Tengah menegaskan arah pembangunannya yang strategis, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel.

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	55.28-55.28	55.28-55.28	59.71-66	63.31-69.97	66.91-73.95	70.5-77.92	74.1-81.9	
2	Jumlah penanaman modal asing	Angka	348.881	348.881	371.926	386.803	404.208	424.418	445.639	
3	Proporsi distribusi PDRB unggulan (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	%	42.8	42.8	43.4	43.7	44	44.3	44.6	
4	Jumlah penanaman modal dalam negeri	Angka	3422939	3422939	3746133	3933440	4138909	4359271	4598026	
5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	80	82	84	86	88	90	92	
6	Persentase Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikananPDRB Ekonomi Kreatif	%	31.2	30	29.8	29.5	29.2	29	28.5	
7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	
8	Tingkat Inflasi	%	3	3	3	2.8	2.8	2.7	2.5	
9	Persentase Desa Mandiri	%	12	15	18	21	25	28	30	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.5	70	70.5	71	71.5	72	72.5	
11	Persentase Kontribusi Akomodasi Makanan dan Minuman terhadap PDRB	%	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
12	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PBRD	%	12.3	12.5	12.8	13.1	13.5	13.8	14	
13	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	102	102	103	104	106	107	108	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
14	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persentase	101	102	104	104	105	106	107	
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		2,64	2,75	2,80	2,86	2,91	2,96	2,99	
II ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	56.52	56.52	61.01	63.26	65.51	67.75	70	
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	50	55	60	65	70	75	80	
3	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	46.17	46.27	46.55	46.88	47.19	47.44	47.69	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	61	63	65	67	69	71	73	
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.32	1.35	1.33	1.3	1.28	1.26	1.25	
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	80	82	84	86	88	90	92	
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	125	120	115	110	105	100	95	
8	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	73	
9	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	900	930	960	990	1020	1050	1080	
10	Kepadatan Penduduk	Orang	101.81	102.66	103.97	105.27	106.58	107.81	108.31	
III ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Infrastruktur	Angka	73.69	77.69	77.69	74.67	75.65	76.62	77.6	
2	Angka Kemiskinan	%	10.14	10.14	9.61	9.33	8.95	8.46	7.88	
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.71	7.71	8.03	8.19	8.35	8.51	8.67	
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71.67	71.67	72.61	73.15	73.71	74.26	74.81	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.47	13.47	13.762	13.86	13.94	14.08	14.18	
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	45.8	45.8	53.2	56.9	60.6	64.3	68	
7	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	55.5	57.5	60	63	66	69	72	
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	
9	Angka Literasi / Numerasi	Angka	88	89	90	91	92	93	94	
10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63	65	67	69	71	73	75	
11	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.70	0.72	0.74	0.76	0.78	0.8	0.82	
12	Prevalensi Stunting	%	18	17.5	16	14.5	13	11.5	10	
13	Tingkat Kemiskinan	%	9.9	9.8	9.2	8.6	8.2	7.8	7.5	
14	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71.25	71.45	71.7	71.9	72.15	72.38	72.6	
15	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.6	69.8	70.1	70.3	70.6	70.9	71.2	
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.5	2.45	2.4	2.35	2.25	2.15	2	
17	Indeks Gini	Angka	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
18	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	30	33	36	39	42	45	48	
20	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9	
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	14	
22	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	5107991584	3818833398	390755071948	394938886503	408169339201	419393996029	430927330920	
23	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.1777	0.1777	0.2402	0.2611	0.2819	0.3027	0.3236	
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	15	20	35	45	60	70	80	
25	Indeks Desa Membangun	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	70	77	79	80	80	82	82	
27	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	0	0	65	66	67	68	69	
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,34	0,37	0,4	0,43	0,46	0,49	0,52	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.24	3.24	3.69	3.93	4.16	4.4	4.63	
2	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3.10	3.12	3.15	3.18	3.21	3.23	3.41	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2.65	2.75	2.85	2.95	3.05	3.18	3.4	
5	Indeks Demokrasi Indonesia	%	0	0	0	0	0	0	0	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	48	50	52	54	56	58	60	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59	61	63	65	67	69	71	
8	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76.8	77.5	78.2	78.9	79.6	80.3	81	
10	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	72.2	74	74	75	76	77	78	
11	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	76.09	76.09	77.20	77.87	78.12	78.80	79.09	
12	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan OPD Yang Tertib Arsip	%	76.09	76.09	76.09	76.09	76.09	76.09	76.09	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase	70	75	80	85	90	95	100	
AB	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	1.36	1.36	1.37	1.38	1.40	1.50	1.60	
AC	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	
4	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AD	5.02 - KEUANGAN									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	85	88	90	92	92	95	95	
3	Manajemen Aset	Kategori	80	80	81	82	85	90	90	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	90	90	92	92	95	95	95	
5	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	85	85	88	88	90	95	95	
6	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	80	80	81	82	85	90	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
10	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	142	142	142	142	142	142	142	
11	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Seluruh strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang dirumuskan dalam RPJMD ini telah disesuaikan dengan tantangan pembangunan daerah, potensi yang dimiliki, serta prioritas nasional dan provinsi agar mampu menghasilkan kebijakan yang terarah, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam implementasinya, keberhasilan RPJMD ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat. Pembangunan yang inklusif dan partisipatif akan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya dapat berjalan dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh pihak untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan RPJMD ini sangat diperlukan agar target-target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Selama periode 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan program yang telah ditetapkan guna memastikan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan yang dinamis. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, RPJMD ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam membangun Kabupaten Bengkulu Tengah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa mendatang.